



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12  
9 2/14

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h  
9 X 14



14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9 x 14

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

h  
9 y 14



32. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 57);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
dan  
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
  1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

9 x 14

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbang atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Katingan adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Katingan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi.

k  
9 x 14



20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  22. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.
  23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
  24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
  25. Kebijakan adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
  26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
  27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
  28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  29. Program adalah penterjemahan sub urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
  30. Kegiatan adalah penterjemahan dari kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  31. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas atau layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya dan/atau Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menyusun RKPD untuk tahun berikutnya.

9/8/14

- (2) Dalam hal terjadinya perubahan yang bersifat parsial terhadap dokumen RPJMD, dan tidak mempengaruhi terhadap perubahan capaian sasaran, serta tidak mengubah target capaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.
  - (4) Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal,

BUPATI KATINGAN,



*[Signature]*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



*[Signature]*  
FRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 08, 138/2021



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR                      TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Katingan

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Jabatan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 77

9 Y14

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KATINGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2018-2023**

**PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2022**





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I.1
1.1 LATAR BELAKANG .....	I.1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	I.4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	I.7
1.3.1 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) .....	 I.7
1.3.2 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .....	 I.8
1.3.3 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RPJPD, RKPD, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, DAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	 I.8
1.3.4 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RTRW .....	I.8
1.3.5 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN KLHS PERUBAHAN RPJMD .....	 I.9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN .....	I.9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	I.10
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	 II.1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....	II.1
2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH .....	II.1
2.1.2 WILAYAH RAWAN BENCANA .....	II.8
2.1.3 DEMOGRAFI .....	II.13
2.1.4 POTENSI SUMBER DAYA .....	II.16
2.1.5 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG .....	II.16
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	II.62
2.2.1 PERTUMBUHAN PDRB .....	II.62
2.2.2 LAJU INFLASI .....	II.66
2.2.3 PDRB PER KAPITA .....	II.67
2.2.4 INDEKS GINI .....	II.67
2.2.5 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN .....	II.68
2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA .....	II.70
2.2.7 ANGKA MELEK HURUF (AMH) .....	II.71
2.2.8 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA.RATA LAMA SEKOLAH (RLS) .....	 II.71
2.2.9 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP .....	II.72
2.2.10 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK .....	II.72
2.2.11 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) .....	 II.73



2.2.12	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA.....	II.74
2.2.13	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA.....	II.74
2.2.14	KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I .....	II.76
2.2.15	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT .....	II.76
2.2.16	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN.....	II.78
2.2.17	PENCAPAIAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) ....	II.78
2.2.18	OPINI BPK .....	II.79
2.2.19	KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB.....	II.80
2.2.20	KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB .....	II.80
2.2.21	PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN...	II.81
2.2.22	KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN JASA PERTANIAN TERHADAP PDRB.....	II.83
2.2.23	KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB.....	II.83
2.2.24	KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGAJIAN TERHADAP PDRB.....	II.84
2.2.25	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TERHADAP PDRB .....	II.85
2.2.26	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB.....	II.86
2.2.27	KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB .....	II.87
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II.87
2.3.1	LAYANAN URUSAN WAJIB .....	II.87
2.3.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN .....	II.138
2.3.3	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	II.149
2.3.4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .....	II.150
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II.155
2.4.1	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA .....	II.156
2.4.2	PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI PANGAN DAN NON PANGAN PER KAPITA.....	II.157
2.4.3	ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI.....	II.158
2.4.4	RASIO KETERGANTUNGAN.....	II.159
2.4.5	JUMLAH DESA TERTINGGAL.....	II.161
2.5	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) .....	II.177
2.5.1	CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2019.....	II.177
2.5.2	CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2020.....	II.187
2.6	PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .....	II.197
2.6.1	CAPAIAN TPB SESUAI TARGET DAN INDIKATOR VERSI TAHUN 2020 .....	II.197



2.6.2	INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL .....	II.199
2.6.3	INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN TETAPI BELUM MENCAPAI TARGET NASIONAL.....	II.202
2.6.4	INDIKATOR TPB YANG BELUM DILAKSANAKAN DAN BELUM ADA DATA .....	II.206
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....		III.1
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU .....	III.1
3.1.1	KINERJA PELAKSANAAN APBD.....	III.1
3.1.2	NERACA DAERAH .....	III.8
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU .....	III.12
3.2.1	PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN.....	III.18
3.2.2	ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH.....	III.25
3.3	KERANGKA PENDANAAN .....	III.30
3.3.1	PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	III.31
3.3.2	PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN.....	III.37
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....		IV.1
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN .....	IV.1
4.1.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN .....	IV.1
4.2	ISU STRATEGIS.....	IV.27
4.2.1	ISU INTERNASIONAL.....	IV.27
4.2.2	ISU ATAU KEBIJAKAN NASIONAL .....	IV.32
4.2.3	ISU ATAU KEBIJAKAN PROVINSI .....	IV.45
4.2.4	ISU ATAU KEBIJAKAN KABUPATEN KATINGAN .....	IV.48
4.2.5	ISU STRATEGIS KABUPATEN KATINGAN .....	IV.213
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....		V.1
5.1	VISI .....	V.1
5.2	MISI .....	V.2
5.3	TUJUAN DAN SASARAN .....	V.4
5.4	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH.....	V.12
5.5	KESELARASAAN RPJMD DENGAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN, RPJMN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN RPJMN .....	V.14
5.5.1	KESELARASAAN RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018.2023 DENGAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2005.2025.....	V.14
5.5.2	KESELARASAAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018.2023 DENGAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021.2026 .....	V.16
5.5.3	KESELARASAAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018.2023 DENGAN RPJMN 2020.2024 .....	V.17





BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH..... VI.1

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... VI.1

6.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ..... VI.17

6.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN ..... VI.42

6.3.1 PEMBANGUNAN WILAYAH PENGEMBANGAN SEKTOR  
PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITI  
UNGGULAN ..... VI.46

6.3.2 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN  
PELABUHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN  
PERTANIAN, INDUSTRI DAN PARIWISATA ..... VI.52

6.3.3 PENGEMBANGAN EKOWISATA PADA KAWASAN  
PUNGQUALAS TAMAN NASIONAL SEBANGAU UNTUK  
KEGIATAN PARIWISATA BERBASIS ALAM ..... VI.55

6.3.4 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PUSAT  
PERFILMAN ASIA TENGGARA ..... VI.55

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII.1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH..... VIII.1

BAB IX PENUTUP ..... IX.1

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN ..... IX.1

9.2 PEDOMAN TRANSISI..... IX.2



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan .....	II.2
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Katingan per Kecamatan .....	II.3
Tabel 2.3	Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang di Kabupaten Katingan .....	II.4
Tabel 2.4	Rata-Rata Suhu Udara dan Kelambaban Relatif Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2020....	II.7
Tabel 2.5	Rata-Rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2020....	II.7
Tabel 2.6	Luasan Tata Guna Lahan di Kabupaten Katingan ....	II.8
Tabel 2.7	Potensi Banjir Setiap Kecamatan.....	II.9
Tabel 2.8	Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan.....	II.11
Tabel 2.9	Kecamatan yang Terdampak Banjir .....	II.13
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020 .....	II.13
Tabel 2.11	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2020 .....	II.14
Tabel 2.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 .....	II.15
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2020.....	II.16
Tabel 2.14	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Dipisah berdasarkan Kondisi Melampaui dan Belum Melampaui serta Tekanannya untuk masing - masing Kecamatan, Ekoregion dan Penutupan Lahan (Ha).....	II.19
Tabel 2.15	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (miliar rupiah).....	II.62
Tabel 2.16	PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (miliar rupiah) .....	II.63
Tabel 2.17	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (persen) .....	II.64
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Persen) .....	II.65
Tabel 2.19	Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2015-2020 .....	II.66



Tabel 2.20	PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.67
Tabel 2.21	Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.68
Tabel 2.22	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.70
Tabel 2.23	Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2015-2020.....	II.71
Tabel 2.24	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.72
Tabel 2.25	Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.72
Tabel 2.26	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.73
Tabel 2.27	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.73
Tabel 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.74
Tabel 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.75
Tabel 2.30	Keluarga Pra Sejahtera I, II, III dan III Plus di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.76
Tabel 2.31	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	II.77
Tabel 2.32	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.79
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.81
Tabel 2.34	Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.82
Tabel 2.35	Sumbangan Sektor Pariwisata PAD dan Jumlah Kunjungan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.87
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.88
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.88
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2020.....	II.89
Tabel 2.39	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 .....	II.90
Tabel 2.40	Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019.....	II.90





Tabel 2.41	Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.91
Tabel 2.42	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.91
Tabel 2.43	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.92
Tabel 2.44	Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.93
Tabel 2.45	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.93
Tabel 2.46	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.94
Tabel 2.47	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.94
Tabel 2.48	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.95
Tabel 2.49	Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.95
Tabel 2.50	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.96
Tabel 2.51	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2015-2020.....	II.96
Tabel 2.52	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.97
Tabel 2.53	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.97
Tabel 2.54	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.98
Tabel 2.55	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.99
Tabel 2.56	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.99
Tabel 2.57	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.100
Tabel 2.58	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.100
Tabel 2.59	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020. ....	II.101



Tabel 2.60	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.101
Tabel 2.61	Panjang Jalan yang Dapat Dilalui Roda Empat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.102
Tabel 2.62	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.102
Tabel 2.63	Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2020.....	II.103
Tabel 2.64	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.103
Tabel 2.65	Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.103
Tabel 2.66	Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.104
Tabel 2.67	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.105
Tabel 2.68	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.105
Tabel 2.69	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.106
Tabel 2.70	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.106
Tabel 2.71	Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan Menurut Penerangan Utama Tahun 2015-2020 .....	II.107
Tabel 2.72	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.107
Tabel 2.73	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.108
Tabel 2.74	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.108
Tabel 2.75	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.109
Tabel 2.76	Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.109
Tabel 2.77	Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2018 .....	II.110



Tabel 2.78	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.111
Tabel 2.79	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020. ....	II.111
Tabel 2.80	Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Tahun 2016-2017 .....	II.112
Tabel 2.81	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.113
Tabel 2.82	Rasio KDRT di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.113
Tabel 2.83	Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.113
Tabel 2.84	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2015-2020.....	II.114
Tabel 2.85	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.114
Tabel 2.86	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 .....	II.115
Tabel 2.87	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.116
Tabel 2.88	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.116
Tabel 2.89	Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan .....	II.117
Tabel 2.90	Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan.....	II.118
Tabel 2.91	Hasil Analisis <i>Overlay</i> Tutupan Lahan dan Pola Ruang .....	II.119
Tabel 2.92	Total Stok Karbon untuk Hutan di Setiap Kecamatan .....	II.120
Tabel 2.93	Total Stok Karbon untuk Hutan di Kabupaten Katingan .....	II.121
Tabel 2.94	Rasio Penduduk ber-KTP Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.121
Tabel 2.95	Persentase Bayi Berakta Kelahiran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.122
Tabel 2.96	Pasangan Akte Nikah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.122
Tabel 2.97	Persentase Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.123
Tabel 2.98	Jumlah LSM/Ormas Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019.....	II.123





Tabel 2.99	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.123
Tabel 2.100	Angka Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.124
Tabel 2.101	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.124
Tabel 2.102	Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.125
Tabel 2.103	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.125
Tabel 2.104	Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi ( <i>Unmeet Need</i> ) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.125
Tabel 2.105	Rasio Jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.126
Tabel 2.106	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.126
Tabel 2.107	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.127
Tabel 2.108	Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.127
Tabel 2.109	Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.128
Tabel 2.110	Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.128
Tabel 2.111	Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016 .....	II.128
Tabel 2.112	Dermaga Sungai yang Tersedia di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.129
Tabel 2.113	Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.129
Tabel 2.114	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.130
Tabel 2.115	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.131
Tabel 2.116	Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.131
Tabel 2.117	Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.132



Tabel 2.118	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.133
Tabel 2.119	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 (Juta) .....	II.133
Tabel 2.120	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.134
Tabel 2.121	Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.134
Tabel 2.122	Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.135
Tabel 2.123	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.135
Tabel 2.124	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.136
Tabel 2.125	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020...	II.136
Tabel 2.126	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 .....	II.136
Tabel 2.127	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 .....	II.137
Tabel 2.128	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 .....	II.137
Tabel 2.129	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Katingan 2015-2016 .....	II.138
Tabel 2.130	Produksi Perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.138
Tabel 2.131	Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.139
Tabel 2.132	Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.139
Tabel 2.133	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.140
Tabel 2.134	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 .....	II.141
Tabel 2.135	Kawasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017.....	II.141
Tabel 2.136	Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik.....	II.142
Tabel 2.137	Persentase Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 .....	II.142
Tabel 2.138	Pasar Tradisional di Kabupaten Katingan .....	II.143
Tabel 2.139	Sarana Gudang di Kabupaten Katingan.....	II.144



Tabel 2.140	Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.148
Tabel 2.141	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.148
Tabel 2.142	Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 .....	II.148
Tabel 2.143	Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020...	II.149
Tabel 2.144	Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 ..	II.150
Tabel 2.145	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.150
Tabel 2.146	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.151
Tabel 2.147	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.152
Tabel 2.148	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 .....	II.153
Tabel 2.149	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.154
Tabel 2.150	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.154
Tabel 2.151	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.155
Tabel 2.152	Persentase Tindak Lanjut BPK Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016.....	II.155
Tabel 2.153	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 .....	II.157
Tabel 2.154	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.160
Tabel 2.155	Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020.....	II.161
Tabel 2.156	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.162
Tabel 2.157	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 .....	II.177
Tabel 2.158	Tenaga Penunjang Pendidikan Tahun 2019 .....	II.178
Tabel 2.159	Indikator dan Persentase .....	II.178
Tabel 2.160	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan 2019 .....	II.180





Tabel 2.161	Tabel Tenaga Kesehatan Tahun 2019 .....	II.180
Tabel 2.162	Permasalahan dan Solusi.....	II.182
Tabel 2.163	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019.....	II.183
Tabel 2.164	Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	II.184
Tabel 2.165	Target Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II.185
Tabel 2.166	Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2019 .....	II.186
Tabel 2.167	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 .....	II.187
Tabel 2.168	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020.....	II.189
Tabel 2.169	Permasalahan dan Solusi.....	II.189
Tabel 2.170	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020.....	II.191
Tabel 2.171	Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2020 .....	II.191
Tabel 2.172	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat....	II.192
Tabel 2.173	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2020.....	II.195
Tabel 2.174	Capaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2018 dan Laporan OPD Tahun 2019.....	II.198
Tabel 2.175	Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional .....	II.199
Tabel 2.176	Indikator yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional .....	II.203
Tabel 2.177	Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Ada Data.....	II.206
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.2
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.4
Tabel 3.3	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017-2018.....	III.5
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018.....	III.7
Tabel 3.5	Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.9
Tabel 3.6	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.11
Tabel 3.7	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018.....	III.19
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.22



Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 .....	III.23
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.24
Tabel 3.11	Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018.....	III.26
Tabel 3.12	SiLPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.27
Tabel 3.13	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 .....	III.28
Tabel 3.14	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018.....	III.29
Tabel 3.15	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018..	III.30
Tabel 3.16	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 .....	III.32
Tabel 3.17	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 .....	III.34
Tabel 3.18	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023 .....	III.37
Tabel 3.19	Realisasi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Mengikat dan Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 .....	III.37
Tabel 3.20	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023.....	III.39
Tabel 3.21	Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 .....	III.40
Tabel 3.22	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 .....	III.41
Tabel 3.23	Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020.....	III.44
Tabel 3.24	Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023.....	III.44
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-3 (2018-2023).....	IV.2
Tabel 4.2	Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia.....	IV.10
Tabel 4.3	Pemetaan Permasalahan Kemiskinan .....	IV.12
Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Perekonomian .....	IV.17
Tabel 4.5	Pemetaan Permasalahan Infrastruktur .....	IV.22
Tabel 4.6	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Desa .....	IV.24
Tabel 4.7	Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan .	IV.27



Tabel 4.8	Proyek Prioritas Nasional Berlokasi di Katingan, Kalimantan Tengah.....	IV.37
Tabel 4.9	Rekapitulasi Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi Sesuai Skenario dan Simulasi TPB Kalteng Hingga Tahun 2021-2030 .....	IV.54
Tabel 4.10	Isu Strategis/Prioritas Pembangunan dan Kebijakan, Rencana dan Program KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Sesuai TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Tanpa Upaya Tambahan (TUT).....	IV.55
Tabel 4.11	Rekomendasi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2025, Tujuan Pembangunan RPJPD ke-3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya.....	IV.56
Tabel 4.12	Rekomendasi KRP TPB Tanpa Upaya Tambahan dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Tujuan Pembangunan RPJPD ke-3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Pemangku Program, Bentuk Fasilitasi/Asistensi serta Kegiatan Tanpa Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya .....	IV.141
Tabel 4.13	Jasa Ekosistem, Luasan (Sedang-Sangat Tinggi) dan Persentasenya sebagai <i>Proxy</i> untuk Evaluasi Enam Muatan KLHS.....	IV.197
Tabel 4.14	Pengaruh KRP terhadap Enam Muatan KLHS Berdasarkan Penilaian Masyarakat .....	IV.200
Tabel 4.15	Identifikasi RPJMD Daerah Lain yang Berdekatan dengan Kabupaten Katingan .....	IV.207
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023.....	V.6
Tabel 5.2	Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Katingan 2018-2023.....	V.12
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023.....	VI.12
Tabel 6.2	Penjabaran Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kedalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023.....	VI.18





Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020.....	VI.30
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 .....	VI.34
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 .....	VII.1
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 .....	VII.2
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan 2019-2023 .....	VIII.2
Tabel 8.2	Realisasi dan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023 .....	VIII.6
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan 2019-2023 .....	VIII.7



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Katingan.....	II.2
Gambar 2.2	Persentase Perkiraan Dampak dan Risiko Banjir .....	II.10
Gambar 2.3	Peta Potensi Banjir .....	II.10
Gambar 2.4	Peta Perkiraan Dampak dan Risiko Lahan Kebakaran.....	II.12
Gambar 2.5	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha).....	II.18
Gambar 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020 .....	II.66
Gambar 2.7	Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017 .....	II.68
Gambar 2.8	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020 .....	II.69
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020 .....	II.71
Gambar 2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020 .....	II.75
Gambar 2.11	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.78
Gambar 2.12	Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019.....	II.79
Gambar 2.13	Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.80
Gambar 2.14	Peranan Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.83
Gambar 2.15	Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.84
Gambar 2.16	Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.85
Gambar 2.17	Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.....	II.86
Gambar 2.18	Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .....	II.86
Gambar 2.19	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020 .....	II.152



Gambar 2.20	Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2015-2019 .....	II.156
Gambar 2.21	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Untuk Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017.....	II.158
Gambar 2.22	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017.....	II.158
Gambar 2.23	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016 .....	II.159
Gambar 2.24	Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan Tahun 2015 – 2020.....	II.160
Gambar 4.1	Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P) ....	IV.203
Gambar 4.2	Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Pengaturan (R).....	IV.204
Gambar 4.3	Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Budaya (C).....	IV.205
Gambar 4.4	Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Pendukung (S) ....	IV.206
Gambar 5.1	Keselaran Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 .....	V.16
Gambar 5.2	Keselaran Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 .....	V.17
Gambar 5.3	Keselaran Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 .....	V.18
Gambar 6.1	Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan.....	VI.17
Gambar 6.2	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Padi Ladang Kabupaten Katingan .....	VI.47
Gambar 6.3	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan .....	VI.48
Gambar 6.4	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan .....	VI.49
Gambar 6.5	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan .....	VI.50
Gambar 6.6	Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan	VI.51
Gambar 6.7	Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut.....	VI.53
Gambar 6.8	Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.....	VI.56





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada dan Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa janji yang disampaikan oleh Bupati terpilih sewaktu kampanye dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, pemenuhan pelayanan dasar, dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan dilantiknya Bapak **Sakariyas, SE** dan Bapak **Sunardi** menjadi **Bupati Katingan** dan **Wakil Bupati Katingan** periode 2018-2023 pada tanggal 24 September 2018 menjadi awal bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 22 Maret 2019 dan telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun.

Memasuki pertengahan periode RPJMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melakukan evaluasi hasil terhadap RPJMD Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi tersebut menyimpulkan dan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD tersebut akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan 2023. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi, yaitu:

- a. Kebijakan perubahan RPJMD dapat dilakukan sebab memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan memenuhi Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD



- dapat dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (b) Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- b. Terdapat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah perlu segera dilaksanakan serta diselaraskan dengan RPJMD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. Peraturan tersebut diantaranya:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - 4) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhiran yang diatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Adanya Bencana Non Alam yaitu Pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, ikut mempengaruhi perencanaan pembangunan dimana prioritas pembangunan mulai dari tahun 2020 hingga 2021 difokuskan pada penanganan Covid-19 sehingga alokasi anggaran untuk sektor lain yang dianggap tidak kalah penting menjadi terhambat. Pandemi Covid-19 masih akan menjadi isu strategis hingga masa waktu yang tidak bisa diprediksi kapan wabah itu akan mereda, sehingga perlu ada perencanaan dari waktu ke waktu agar proporsi pelaksanaan pembangunan yang lain dapat terlaksana secara optimal. Pandemi Covid-19 juga berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan





diantaranya aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maka perlu adanya kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya serta penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU Pemerintah Daerah), serta indikator IKK. Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian dan perubahan terhadap dokumen perencanaan dalam menghadapi kondisi yang ada, perlu dilakukan. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana non alam maupun perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Katingan dilakukan sama dengan tahapan penyusunan RPJMD, meliputi: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Mengingat pentingnya Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan, maka dalam proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan penyusunan dokumen perencanaan. Penjelasan masing-masing pendekatan perencanaan tersebut, yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Selain pendekatan secara proses sebagaimana dijelaskan di atas, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi, meliputi:

- a. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

9/14





Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023, baik di tahap perencanaan, penganggaran maupun pengendalian dan evaluasi tahunan. Dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat bersinergi antartingkatan pemerintahan maupun mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);





19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);





29. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor 35);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 24).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor 76);

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Katingan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Perubahan RPJMD ini juga memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Katingan. Hubungan antara Perubahan RPJMD Katingan dengan beberapa dokumen lainnya diuraikan sebagai berikut:

#### 1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 mempedomani RPJMN. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.



Salah satu faktor yang melatarbelakngi perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah perlunya penyesuaian dengan kebijakan nasional dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini dimaksudkan agar terwujud sinergi pembangunan nasional dan daerah. Pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, selanjutnya pada penyusunan Perubahan RPJMD ini memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

### **1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah**

mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

### **1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah**

Perubahan RPJMD Katingan selain berpedoman pada RPJPD, juga pada RTRW dan RPJMN. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD maupun Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Perubahan RPJMD Katingan Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025.

Posisi Perubahan RPJMD sebagai dokumen pembangunan jangka menengah sangat strategis sebab menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran tahunan dan dokumen perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dalam proses penyusunannya, Renstra PD akan mempedomani RPJMD. Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra seluruh perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

### **1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW**

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039. Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86





Tahun 2017, yang dimaksud dengan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

#### **1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD dengan KLHS Perubahan RPJMD**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan disusun dengan tidak meninggalkan aspek pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana amanat dalam peraturan, bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan dokumen lain salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dalam penyusunan Perubahan RPJMD Katingan juga memperhatikan dokumen tersebut. Hasil KLHS Perubahan RPJMD menjadi masukan bagi penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program/kegiatan/sub kegiatan.

Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, penyusunan Perubahan RKPD Katingan juga memperhatikan RPJMD daerah lain. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Katingan ke dalam perencanaan strategik yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta perkembangan keadaan dan kebijakan pemerintah lainnya yang berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini, meliputi:

- a. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir.
- b. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
- d. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Katingan.
- e. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi, yang disertai dengan indikator kinerja dan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun.





- f. Menetapkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan.
- g. Menetapkan program perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus upaya mencapai sasaran pembangunan.
- h. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur penilaian kinerja pembangunan daerah.

### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan dan sistematika penyusunan Perubahan RPJMD.

#### **Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

#### **Bab III. Gambaran Keuangan Daerah**

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

#### **Bab IV. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**

Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan/isu di tingkat internasional, nasional, regional/provinsi maupun di internal Kabupaten Katingan yaitu RPJPD dan RTRW. Selanjutnya, dilakuka juga penelaahan terhadap KLHS Perubahan RPJMD yang memberi masukan bagi muatan Perubahan RPJMD. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Katingan 5 (lima) tahun yang akan datang.

#### **Bab V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran. Setiap indikator kinerja dilengkapi realisasi dan target kinerja mulai tahun 2019 sampai dengan 2023.

#### **Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta fokus/tema pembangunan Kabupaten Katingan setiap tahun sampai tahun 2023. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan.



## **Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## **Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta realisasi dan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun untuk periode 2019 sampai 2023.

## **Bab IX Penutup**

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan/atau diperhatikan untuk pelaksanaan Perubahan RPJMD dan pedoman transisi pada saat Perubahan RPJMD 2018-2023 telah berakhir dan RKPD Tahun 2024 akan disusun.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota di Kasongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km<sup>2</sup>. Dalam perkembangan setelah dilakukan kesepakatan tata batas dengan daerah sekitarnya, luas administrasi Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi 20.410,90 km<sup>2</sup>. Adapun dasar hukum penetapan batas wilayah administrasi Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penataan administrasi wilayah tersebut, Kabupaten Katingan berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya





d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa

Adapun rincian luas per kecamatan dan jumlah desa sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan**

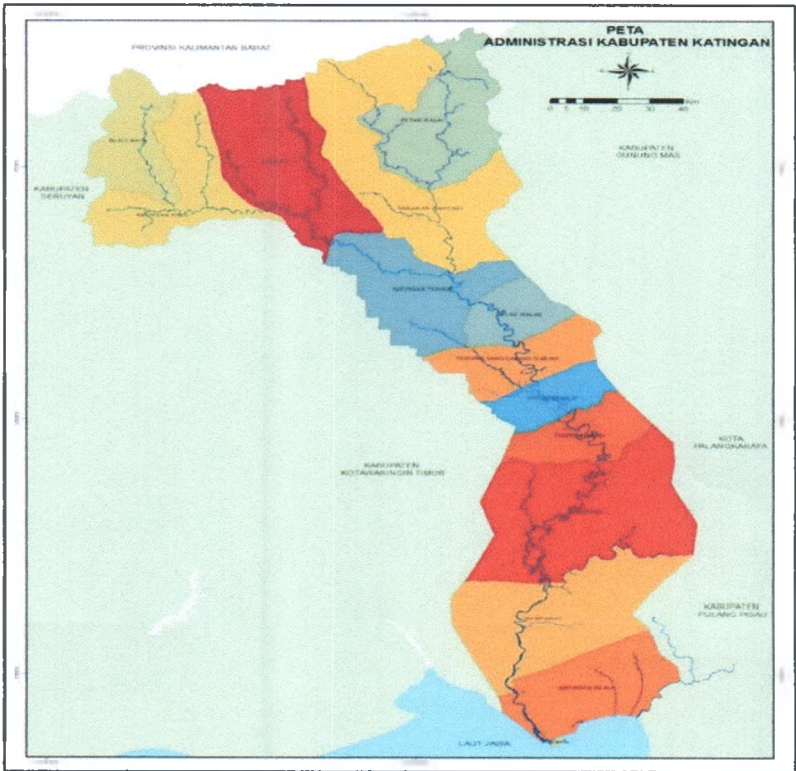
No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Kelurahan	Desa
1	Katingan Kuala	1.484,81	7,27	2	14
2	Mendawai	2.391,58	11,72	0	7
3	Kamipang	2.854,27	13,98	0	9
4	Tasik Payawan	808,12	3,96	0	8
5	Katingan Hilir	665,22	3,26	2	6
6	Tewang Sangalang Garing	903,39	4,43	1	9
7	Pulau Malan	647,48	3,17	0	14
8	Katingan Tengah	1.635,65	8,01	1	15
9	Sanaman Mantikei	2.772,38	13,58	0	14
10	Petak Malai	1.661,65	8,14	0	7
11	Marikit	2.117,36	10,37	0	18
12	Katingan Hulu	1.461,27	7,16	1	22
13	Bukit Raya	1.007,72	4,94	0	11
<b>Katingan</b>		<b>20.410,90</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>154</b>

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021

**2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara Geografis Kabupaten Katingan terletak antara 0°20" - 3°38" Lintang Selatan dan 112°00" - 113°45" Bujur Timur. Gambar Peta Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Katingan**



Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Katingan, Sekretariat Daerah Kab. Katingan, 2019

Handwritten signature and date: 19/1/4



Wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:

1. Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Katingan pada masa yang akan datang.
2. Kabupaten Katingan yang secara geografis berdekatan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau *hinterland* bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Implikasi tidak langsung mengakibatkan Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1.3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 10-50 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Katingan diperoleh kecamatan Bukit Raya merupakan kecamatan dengan posisi ketinggian 50 meter diatas permukaan laut, sedangkan kecamatan Katingan Kuala berada di dataran yang paling rendah, yaitu 13 meter diatas permukaan air laut.

Tabel 2.2  
Ketinggian Wilayah Katingan per Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi DPL (m)
Katingan Kuala	Pegatan	13,00
Mendawai	Mendawai	15,00
Kamipang	Baun Bango	17,00
Tasik Payawan	Petak Bahandang	19,00
Katingan Hilir	Kasongan	22,00
Tewang Sangalang Garing	Pendahara	32,00
Pulau Malan	Buntut Bali	27,00
Katingan Tengah	Tumbang Samba	30,00
Sanaman Mantikei	Tumbang Kaman	32,00
Petak Malai	Tumbang Baraoi	40,00
Marikit	Tumbang Hiran	40,00
Katingan Hulu	Tumbang Sanamang	40,00
Bukit Raya	Tumbang Kajamei	50,00

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, 2021

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Katingan dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang 650 Km. Sungai yang bermuara di laut Jawa ini melewati hampir seluruh kecamatan di kabupaten pemekaran ini, seperti Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing (TWSG), Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala.





Selain sungai besar tersebut, wilayah Kabupaten Katingan dialiri pula oleh puluhan anak sungai dan danau. Sungai dan danau-danau itu biasanya merupakan jalur penghubung antar satu perkampungan/pedukuhan dengan lainnya. Di antara anak sungai tersebut adalah Sungai Kalanaman, Sungai Samba, Sungai Hiran, Sungai Mahop, Sungai Bemban dan Sungai Sanamang.

**Tabel 2.3**  
**Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang**  
**di Kabupaten Katingan**

No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
I.	KATINGAN KUALA			
	Desa Selat Baning	Sungai Sebangau Kecil	8.000	3.000
		Sungai Sebangau Besar	8.588,54	
		Anak Sungai Sebangau Besar	4.876	
		Sungai Selat Labaning	4.500	2.000
	Pegatan Hilir	Sungai Kaki	5.000	2.500
	Desa Kampung Tengah	Sungai Selat Saluang	6.750	5.000
II.	MENDAWAI			
	Desa Tewang Kampung	Sungai Tarusan Hantipan	14.630	14.630
	Desa Mendawai	Sungai Bakung	24.300	15.000
	Desa P e r i g i	Sungai P e r i g i	6.669	
	Desa Tumbang Bulan	Sungai Bulan	2.747	
III.	KEC. KAMIPANG			
	Desa Gelinggang	Sungai Runen	6.240	3.000
		Sungai Puri	2.500	1.000
	DesaTampelas	Sungai Tampelas	3.400	2.000
	Desa Telaga	Sungai Telaga	4.100	2.500
	Desa Jahanjang	Sungai Jahanjang	7.520	3.500
	Desa Baun Bango	Sungai Kamipang	6.300	4.000
		Sungai Baun Bango	6.996	
	Desa Parupuk	Sungai Parupuk	4.600	2.000
		Sungai Kalaru	9.200	6.000
	Asam Kumbang	Sungai Asem Kumbang	7.340	3.500
IV.	KEC. TASIK PAYAWAN			
	Desa Telingke	Sungai Telingke	3.350	2.000
	Desa Handiwung	Sungai Pasur Mereng	5.000	2.000
	Desa Tumbang Panggu	Sungai Panggo	9.324	
	Desa Luwuk Kanan	Sungai Hampangen	19.000	17.000
V.	KEC. KATINGAN HILIR			
	Desa Tumbang Liting	Sungai Liting	4.250	1.000
	Kelurahan Kasongan Lama	Sungai Sala Ngawa	17.100	8.200
		Sungai Sala Ngaju	13.450	6.000
	Desa Banut Kalanaman	Sungai Kalanaman	75.000	45.000
	Desa Telangkah	Sungai Telangkah	4.310	1.500
	Desa Talian Kereng	Sungai Tambawu	8.200	4.000
		Sungai Tehang	36.250	7.000
		Sungai Simpur	4.500	2.500
VI.	KEC. TEWANG SANGALANG GARING			
	Desa Tewang Beringin	Sungai Mandahi	3.200	3.200
	Desa Hampalam	Sungai Tarusan	450	
	Desa Tarusan Danum	Sungai Sepang Kanan	14.100	14.100
		Sungai Sepang Kiri	23.000	16.000
		Sungai Batarung	2.400	1.000
	Desa Pendahara	Sungai Danum Matei	11.500	10.000

92/4





No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
		Sungai Tuyun	7.300	5.000
		Sungai Parit	5.600	1.000
	Desa Tewang Rangkang	Sungai Pajunjung	17.500	8.000
		Sungai Bua	4.300	4.300
	Desa Tewang Manyangen	Sungai Manten	24.900	20.000
		Sungai Barira	1.400	
<b>VII.</b>	<b>KEC. PULAU MALAN</b>			
	Desa Dahian Tunggal	Sungai Jahawei	12.350	10.000
	Desa Buntut Bali	Sungai Tatas	987	
		Sungai Babahe	2500	
	Desa Manduing Lama/Taheta	Sungai Lipa	5.500	4.000
		Sungai Tarusan Pinang	2.300	
		Sungai Tarusan	2.600	
		Sungai Pangalawan	6.840	5.000
	Desa Tumbang Banjang	Sungai Banjang	1.250	1.250
		Sungai Rait	5.200	4.000
	Desa Tumbang Lawang	Sungai Panya	2.350	2.500
	Desa Tewang Karangan	Sungai Kamapit	4.200	2.000
		Sungai Bawin	11.720	7.500
	Desa Garagu	Sungai Geragu	5.441	6.500
		Sungai Mantian 1	3.100	2.000
		Sungai Mantian 2	4.200	1.500
	Desa Tumbang Tungku	Sungai Tungku	10.040	
	Desa Tumbang Tanjung	Sungai Tanjung	10.050	1.000
		Sungai Kadarai	2.310	1.500
<b>VIII.</b>	<b>KEC. KATINGAN TENGAH</b>			
	Desa Tumbang Lahang	Sungai Lahang	8.100	2.500
		Sungai Biduh	2.400	
	Desa Tewang Panjang	Sungai Pahawei	6.500	5.000
	Desa Telok	Sungai Singa	4.500	3.227
	Desa Samba Bakumpai	Sungai Mare	1.650	1.650
		Sungai Labaning	2.200	1.560
		Sungai Undeng	2.000	1.680
	Desa Samba Danum	Sungau Su'un	5.350	3.125
<b>IX.</b>	<b>KEC. SANAMAN MANTIKEI</b>			
	Desa Tumbang Kaman	Sungai Kaman	10.000	
		Sungai Pesei	4.000	2.500
		Sungai Saki	8.5000	
	Desa Tumbang Labehu	Sungai Labehu	2.000	1.000
		Sungai Pana'an	10.000	3.000
	Desa Tumbang Manggu	Sei Kabirok	3.000	1.000
		Sungai Kambeo	1.245	
		Sungai Manggo	2.000	
		Sei Bahungai	3.000	
		Sungai Doho	780	
		Sei Panga	2.000	
		Sei Manyangan	3.000	
	Desa Kamanto	Sungai Patenei Hae	15.000	10.500
		Sungai Patenei Kurik	8.000	4.250
		Sei Kambe	2.000	
		Sei Keruh	2.000	
		Sei Kamanto	1.000	
		Sei Engan	3.000	
	Desa Habuhus	Sungai Talunei	25.000	20.000
	Desa Tumbang Kanei	Sei Balawei	10.000	7.000
	Desa Tumbang Pangka	Sungai Pangka	6.540	2.000

19 2/4



No.	Nama Kecamatan / Desa	Nama Sungai / Anak Sungai	Panjang	
			Keseluruhan (meter)	Dapat Dilayari (meter)
	Desa Tumbang Atei	Sei Mantikei	25.000	20.000
		Sungai Atei	17.250	2.500
		Sei Kucu	20.000	3.000
		Sei Gagu	2.000	1.000
		Sei Emban	8.000	2.000
		Sei Masilei	10.000	2.000
	Desa Tumbang Papi	Sungai Papie	1.200	
		Sei Rawu	15.000	2.000
	Desa Taranei	Sei Taranei	5.000	2.000
	Desa Tumbang Manggara	Sei Manggara	2.000	1.500
		Sei Kabirum	2.000	750
<b>X.</b>	<b>KEC. PETAK MALAI</b>			
	Desa Tumbang Baraoi	Sungai Baraoi	27.823	25.000
		Sungai Samukah	6.310	
	Desa Tumbang Tangoi	Sei Tangoi	10.000	5.500
	Desa Tumbang Jala	Sungai Jala	5.000	3.000
	Desa Tumbang Habangoi	Sungai Habangoi	6.320	2.000
<b>XI.</b>	<b>KEC. MARIKIT</b>			
	Desa Tumbang Hiran	Sungai Hiran	12.500	12.000
	Desa Tumbang Bemban	Sungai Bemban	18.470	16.000
	Desa Tumbang Dakei	Sungai Dakei	2.470	
	Desa Tumbang Paku	Sungai Paku	9.720	
	Desa Tumbang Mandurei	Sungai Mandurei	5.360	
	Desa Tumbang Pahanei	Sungai Pahanei	1.390	
	Desa Pariyei	Sungai Parie	3.700	
<b>XII.</b>	<b>KEC. KATINGAN HULU</b>			
	Desa Tumbang Sanamang.	Sungai Sanamang	23.400	21.000
	Desa Tumbang Hangei II	Sungai Hangei II	13.200	5.000
	Desa Tumbang Mangketai	Sungai Mangketai	4.100	
	Desa Tumbang Manangei	Sungai Manangei	5.400	
	Desa Tumbang Mahop	Sungai Mahop	12.345	10.000
	Desa Tumbang Sabetung	Sungai Sabetung	3.800	1.500
<b>XIII.</b>	<b>KEC. BUKIT RAYA</b>			
	Desa Tumbang Kajamei	Sungai Kajamei	25.700	5.000
	Desa Tumbang Kaburai	Sungai Kaburai	4.520	
	Desa Tumbang Karuei	Sungai Karuei	32.000	7.500
	Desa Tumbang Gaei	Sungai Gaei	24.700	12.000
	Desa Tumbang Dahuei	Sungai Dahuei	13.500	
	Desa Tumbang Kataei	Sungai Kataei	3.100	

Sumber: Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Katingan, 2019

Selain sungai/anak sungai dalam tabel di atas, terdapat pula beberapa sungai/anak sungai lainnya yang masuk dalam wilayah daerah Kabupaten Katingan tapi belum dilakukan pendataan.

2.1.1.5. Klimatologi

Kelembaban merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap aktifitas organisme di alam. Kelembaban merupakan salah satu faktor ekologis yang mempengaruhi aktifitas organisme seperti penyebaran, keragaman harian, keragaman vertikal dan horizontal. Kelembaban udara juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kondisi/keadaan cuaca dan iklim di suatu wilayah tertentu. Secara ilmiah, kelembaban



merupakan jumlah kandungan uap air yang terkandung dalam massa udara pada suatu saat (waktu) dan wilayah (tempat) tertentu.

Rata-rata suhu terendah di Kabupaten Katingan pada Tahun 2020 berkisar 28,52 °C, sedangkan rata-rata suhu tertinggi 30,42 °C.

**Tabel 2.4**  
**Rata-Rata Suhu Udara dan Kelambaban Relatif Setiap Bulan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2020**

Bulan	Suhu Udara (Celcius)			Rata-Rata Kelembaban Udara (%)
	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	
Januari	25,00	35,00	29,38	81,02
Februari	25,00	35,00	29,53	79,76
Maret	24,00	36,00	29,60	81,27
April	25,00	36,00	29,79	79,73
Mei	24,00	36,00	30,42	78,51
Juni	22,00	36,00	28,64	77,77
Juli	21,40	35,40	29,65	81,24
Agustus	20,30	36,20	28,52	80,29
September	21,50	39,50	29,97	80,12
Oktober	22,60	36,30	28,81	80,81
November	22,10	36,90	29,25	79,70
Desember	21,70	36,60	28,62	80,80

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, 2021

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Jadi, jumlah curah hujan yang diukur, sebenarnya adalah tebalnya atau tingginya permukaan air hujan yang menutupi suatu daerah luasan di permukaan bumi/tanah. Pada Tahun 2020, Curah hujan terbesar pada Kabupaten Katingan terjadi di bulan September yaitu 3.117,20 (mm<sup>3</sup>), sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Januari yaitu hanya 178,60 (mm<sup>3</sup>). untuk jumlah hujan, hujan terbanyak terjadi pada bulan September yaitu selama 22 hari dan pada bulan Oktober dan Desember selama 20 hari sedangkan hujan tersedikit terjadi pada bulan Februari dan Mei, yaitu hanya 9 hari.

**Tabel 2.5**  
**Rata-Rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2020**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Jumlah Hujan (hari)
Januari	178,60	16
Februari	251,90	9
Maret	346,80	16
April	459,20	18
Mei	257,20	9
Juni	215,40	11
Juli	1.289,30	12
Agustus	1.029,60	11

19/4





Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Jumlah Hujan (hari)
September	3.117,20	22
Oktober	2.149,50	20
November	2.410,20	19
Desember	1.958,60	20

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, 2021

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Sekitar ± 60 persen wilayah Kabupaten Katingan masih berupa hutan belukar dan hutan lebat. Secara keseluruhan tata guna lahan di wilayah Kabupaten Katingan sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Luasan Tata Guna Lahan di Kabupaten Katingan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering primer	187.729,38	9,19
2	Hutan lahan kering sekunder	550.006,12	26,93
3	Hutan tanaman	7.217,58	0,35
4	Semak belukar	127.009,19	6,22
5	Perkebunan	68.077,45	3,33
6	Pemukiman	3.450,58	0,17
7	Tanah terbuka	40.467,89	1,98
8	Tubuh air	17.027,00	0,83
9	Hutan mangrove sekunder	5.337,10	0,26
10	Hutan rawa sekunder	475.023,29	23,26
11	Semak belukar rawa	251.234,79	12,30
12	Pertanian lahan kering	26.756,89	1,31
13	Pertanian lahan kering campur semak	190.869,11	9,35
14	Sawah	20.042,55	0,98
15	Transmigrasi	1.239,34	0,06
16	Tambang	26.222,84	1,28
17	Rawa	44.288,90	2,17
	Total	2.042.000,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi Hidrologi Kabupaten Katingan memiliki banyak sungai, secara umum pola sungainya adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS) maka puncak banjirnya akan demikian tinggi sehingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada disekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai.

Kawasan rawan bencana alam yang dimaksud dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 adalah kawasan rawan banjir dan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.

Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Katingan ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis. Potensi

14



banjir di wilayah Kabupaten Katingan ditentukan oleh tiga hal, yaitu dikarenakan kondisi topografi, daya tampung debit air sungai oleh badan sungai dan curah hujan.

Berdasarkan kondisi topografis, wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi rendah yakni sebesar 74,77% dan kategori tinggi sebesar 25,23%. Wilayah Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Petak Malai dan Sanaman Mantikei merupakan daerah dengan potensi banjir rendah karena wilayah ini merupakan daerah hulu dan memiliki topografi yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan potensi banjir tinggi adalah Kecamatan Mendawai (78%), Katingan Kuala (70,1%) dan Kecamatan Kamipang (51,9%) yang merupakan daerah rawa dengan topografi rendah. Untuk potensi banjir lainnya disebabkan karena berkurangnya kemampuan badan sungai menampung debit air yang besar dikarenakan pendangkalan pada badan sungai akibat aktifitas PETI yang salah satunya banyak ditemukan pada segmen Sanamang-Marikit. Pendangkalan badan sungai ini ditandai dengan terbentuknya delta di tengah sungai yang merupakan tumpukan material akibat aktifitas PETI pada bagian *upstream* delta sehingga terjadi erosi pada bagian kiri dan kanan delta. Curah hujan yang tinggi (> 300 mm per bulan) juga berpotensi mengakibatkan banjir di DAS (Daerah Aliran Sungai), kondisi ini diperparah karena minimnya daerah tangkapan air yang antara lain disebabkan karena pembukaan lahan di sekitar areal DAS.

Tabel 2.7  
Potensi Banjir Setiap Kecamatan

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Rendah	Tinggi	Total
Bukit Raya	100419		100419
Kamipang	137199	147909	285109
Katingan Hilir	45397	17734	63131
Katingan Hulu	145876		145876
Katingan Kuala	44339	104033	148372
Katingan Tengah	151746	11614	163360
Marikit	211370		211370
Mendawai	52500	186471	238971
Petak Malai	165938		165938
Pulau Malan	49610	15129	64739
Sanaman Mantikei	277165		277165
Tasik Payawan	62808	17906	80714
Tewang Sanggalang Garing	79983	13581	93563
Total	1524351	514377	2038727
Persentase	74,77	25,23	100,00

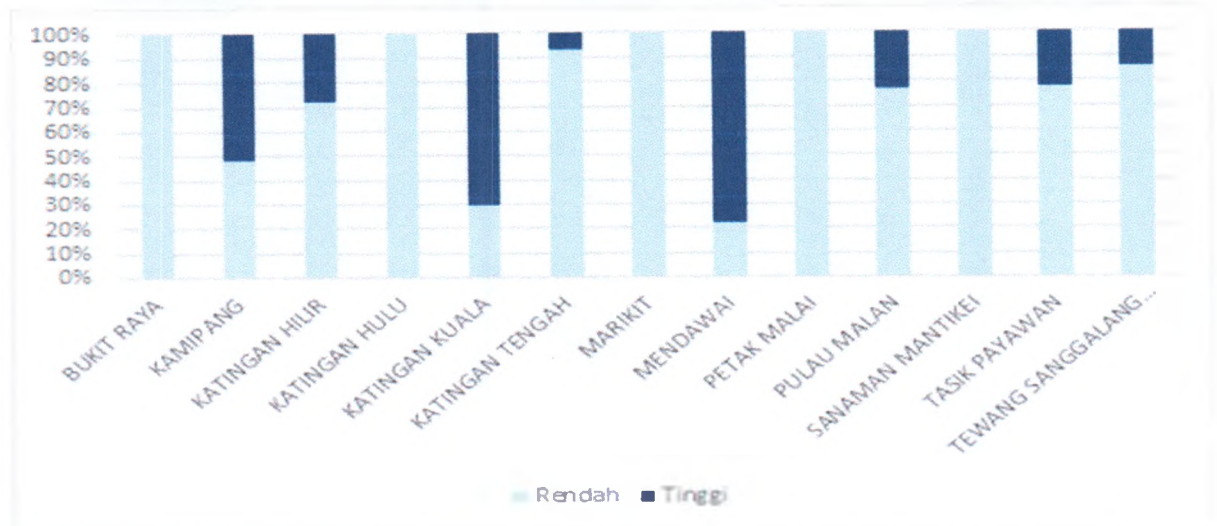
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Pada umumnya, kecamatan di Katingan memiliki potensi banjir yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah.



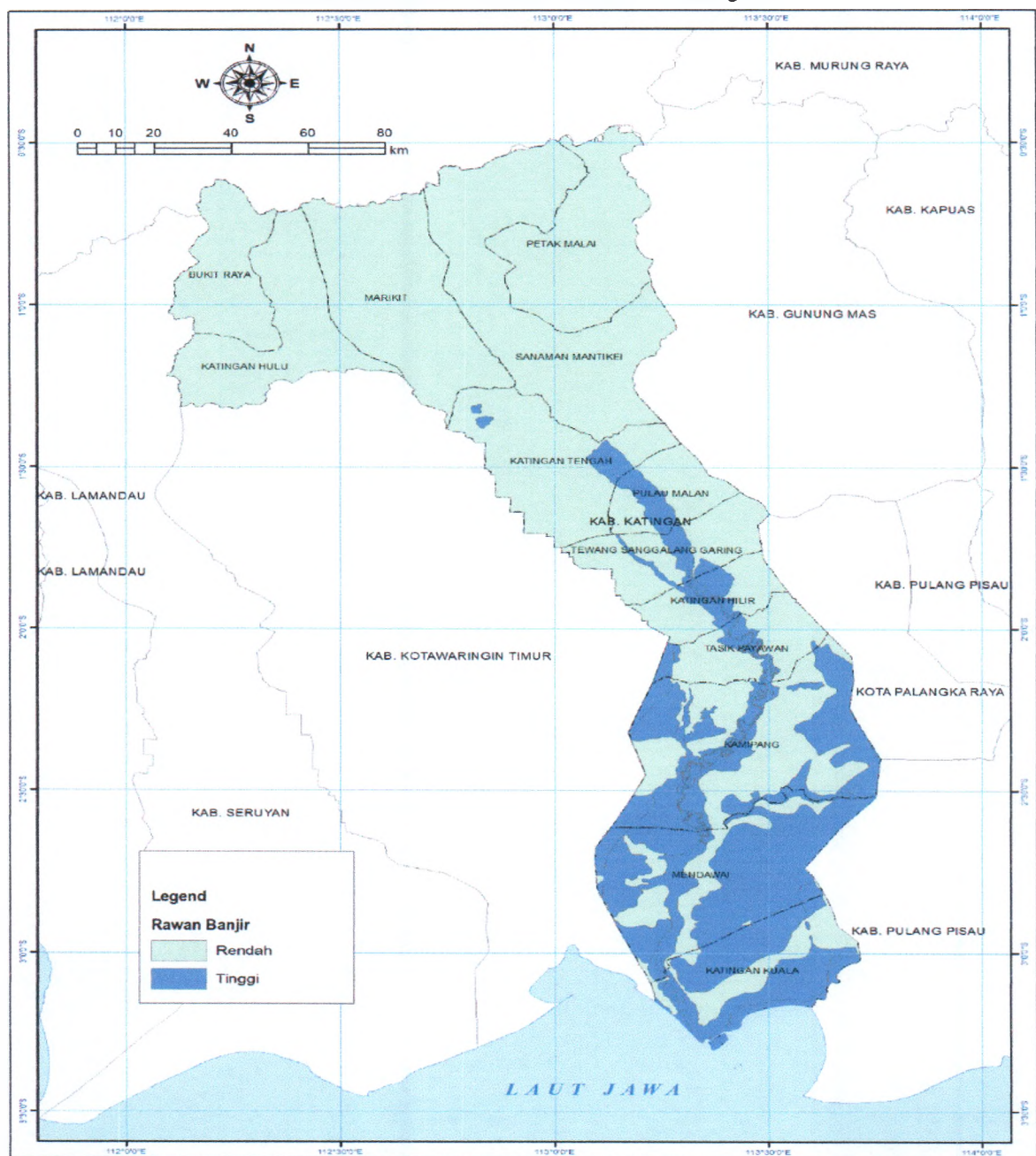


**Gambar 2.2 Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Banjir**



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

**Gambar 2.3 Peta Potensi Banjir**



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Handwritten signature and date: 19/1/19





Potensi kebakaran di Kabupaten Katingan dengan kategori rendah yakni sebesar 72,45%, sedang 19,5% dan kategori tinggi hanya sebesar 8%. Wilayah Kecamatan dengan kategori tinggi terdapat di Kecamatan Katingan Hilir (26,48%), Tewang Sanggalang Garing (26,37%) dan Tasik Payawan (25,09%) yang memiliki lahan semak belukar yang mudah terbakar. Tingkat kesulitan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan jenis lahan, tertinggi berada di wilayah lahan gambut di kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sedangkan terendah berada di lahan non gambut, yaitu pada Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing.

**Tabel 2.8**  
**Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan**

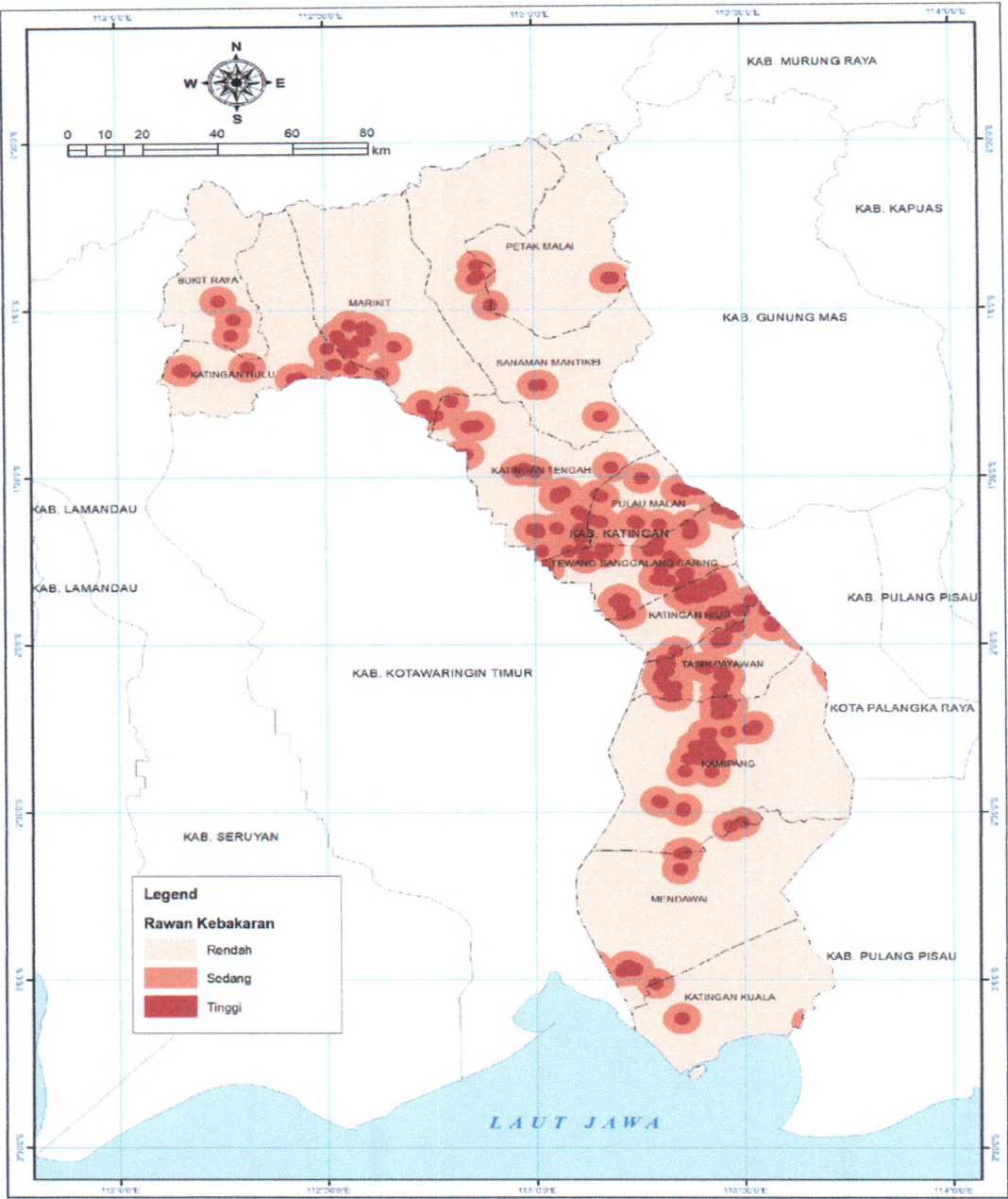
Kecamatan	Potensi Kebakaran			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Bukit Raya	80622	16031	3766	100419
Kamipang	202109	58060	24940	285109
Katingan Hilir	21740	24673	16717	63131
Katingan Hulu	110071	27209	8596	145876
Katingan Kuala	134901	11305	2167	148372
Katingan Tengah	82879	58764	21717	163360
Marikit	168149	29474	13747	211370
Mendawai	210034	21727	7210	238970
Petak Malai	151556	12169	2213	165938
Pulau Malan	16251	37968	10519	64739
Sanaman Mantikei	245927	24556	6682	277165
Tasik Payawan	24347	36113	20254	80714
Tewang Sanggalang Garing	28411	40483	24669	93563
<b>Total</b>	<b>1476997</b>	<b>398532</b>	<b>163199</b>	<b>2038727</b>
<b>Persentase</b>	<b>72,45</b>	<b>19,55</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

9/14



Gambar 2.4 Peta Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kebakaran



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Seluruh warga masyarakat terdampak bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan. Dari sebaran peta bencana banjir, pada tahun 2020, 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan, ada 10 kecamatan yang terdampak banjir, 1 kecamatan termasuk dataran tinggi, sedangkan 2 kecamatan terdampak pasang surut air laut.

Dari 10 kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Petak Malai, Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang. Untuk Kecamatan Bukit Raya, relatif lebih aman dikarenakan kategori dataran tinggi, sedangkan Kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala terdampak pasang surut air laut.

9 x 4



Tabel 2.9  
Kecamatan yang Terdampak Banjir

No	Kecamatan	Korban		
		Rumah	KK	Jiwa
1	Kecamatan Petak Malai	111	-	-
2	Kecamatan Katingan Hulu	221	221	663
3	Kecamatan Marikit	421	421	1263
4	Kecamatan Sanaman Mantikei	516	588	1764
5	Kecamatan Katingan Tengah	443	492	1755
6	Kecamatan Pulau Malan	72	72	216
7	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	3	3	9
8	Kecamatan Katingan Hilir	49	49	147
9	Kecamatan Tasik Payawan	51	51	153
10	Kecamatan Kamipang	13	13	39

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Sebaran daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yakni dari 13 kecamatan di wilayah di Kabupaten Katingan ada 6 kecamatan dengan kondisi lahan yang mayoritas gambut dan rawa, sedangkan 7 kecamatan lainnya mayoritas kondisi lahan mineral. Untuk daerah dengan kondisi mayoritas lahan gambut dan rawa antara lain Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sangat berpotensi terjadi kebakaran lahan dan hutan di hampir seluruh wilayah desa dan kelurahan. Sedangkan di 7 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya, relatif lebih aman. Meskipun begitu, secara umum, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Katingan masih berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.

2.1.3. Demografi

Pada Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Katingan mencapai 162.239 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2020 yang berjumlah 162.239 jiwa terdiri dari 84.025 penduduk laki-laki dan 78.214 penduduk perempuan dan angka terus ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.10  
Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Katingan  
Tahun 2016-2020

KECAMATAN	PENDUDUK (ribu jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Katingan Kuala	20.6	20.7	20.8	18.4	18.6
Mendawai	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2
Kamipang	6.6	6.6	6.7	7.1	7.2
Tasik Payawan	8.4	8.5	8.6	7.9	7.9
Katingan Hilir	35.0	35.9	36.8	38.2	38.8
Tewang Sangalang Garing	12.3	12.5	12.6	13.2	13.1
Pulau Malan	9.1	9.2	9.2	10.2	10.5
Katingan Tengah	32.7	33.5	34.3	27.0	29.2

Handwritten signature and date: 9/1/9





KECAMATAN	PENDUDUK (ribu jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sanaman Mantikei	10.2	10.3	10.4	10.2	10.9
Petak Malai	4.0	4.0	4.0	3.4	3.6
Marikit	7.0	7.0	7.1	6.6	6.8
Katingan Hulu	8.5	8.5	8.6	7.8	8.2
Bukit Raya	3.9	3.9	3.9	2.9	3.2
Total	162.8	165.3	167.7	169.9	162.2

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, (2016 – 2021)

Penduduk terbanyak pada 2020 berada di Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 39.530 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Katingan Tengah dan Katingan Kuala masing-masing sebesar 27.785 jiwa dan 19.136 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Petak Malai yaitu 3.448 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Katingan pada Tahun 2020 berkisar 8,10 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan terbesar terdapat di Kecamatan Katingan Hilir, yaitu sebesar 59 Jiwa/Km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Katingan Tengah sebesar 17 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Petak Malai yaitu 2 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel 2.11  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Katingan Tahun 2020

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	Km	%	Jumlah	%	
Katingan Kuala	1.484,81	7,27	19.136	11,58	13
Mendawai	2.391,5801	11,72	4.272	2,58	2
Kamipang	2.854,27	13,98	7.200	4,36	3
Tasik Payawan	808,12201	3,96	8.096	4,90	10
Katingan Hilir	665,21802	3,26	39.530	23,91	59
Tewang Sangalang Garing	903,39301	4,43	13.557	8,20	15
Pulau Malan	647,47601	3,17	10.462	6,33	16
Katingan Tengah	1.635,65	8,01	27.785	16,81	17
Sanaman Mantikei	2.772,3799	13,58	10.598	6,41	4
Petak Malai	1.661,65	8,14	3.448	2,09	2
Marikit	2.117,3601	10,37	7.015	4,24	3
Katingan Hulu	1.461,27	7,16	7.931	4,80	5
Bukit Raya	1.007,72	4,94	3.209	1,94	3
Kabupaten Katingan	20.410,90	100	162.239	100,00	8,1

Sumber: LPPD dan Lakip Kabupaten Katingan Tahun, 2020

Ditinjau berdasarkan kelompok umur, dalam lima tahun terakhir ini kelompok usia antara 0 tahun sampai 34 tahun memiliki jumlah terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek penambahan jumlah penduduk usia

Handwritten signature and date: 9/1/4



produktif. Berikut rincian perkembangan jumlah penduduk Katingan menurut kelompok Usia.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan**  
**Menurut Kelompok Umur Tahun 2020**

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	4.524	4.188	8.712
2	5-9	8.421	7.940	16.361
3	10-14	8.763	8.298	17.061
4	15-19	7.451	7.381	14.832
5	20-24	7.048	6.818	13.866
6	25-29	6.796	6.616	13.412
7	30-34	6.887	6.653	13.540
8	35-39	7.260	6.885	14.145
9	40-44	6.788	6.041	12.829
10	45-49	6.061	5.199	11.260
11	50-54	4.800	3.944	8.744
12	55-59	3.605	3.009	6.614
13	60-64	2.264	2.094	4.358
14	65-69	1.488	1.409	2.897
15	70-74	870	839	1.709
16	>=75	999	900	1.899

Sumber: LLPD dan Lakip Kabupaten Katingan Tahun, 2020

Informasi mengenai kependudukan lainnya yang dapat disajikan yaitu jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Katingan pada Tahun 2020. Data ini memberikan informasi mengenai pekerjaan utama penduduk Katingan. Selain itu dapat diketahui juga jenis kelamin penduduk yang bekerja untuk masing-masing lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2020 penduduk Katingan pada umumnya bekerja di lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Sebanyak 27.134 jiwa atau 35,03 persen penduduk Katingan yang bekerja di lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Penduduk yang bekerja di lapangan kerja tersebut didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 18.909 jiwa.

Setelah lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, maka lapangan kerja lain yang diminati oleh penduduk Katingan adalah Sektor Perdagangan, Rumah Tangga dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 30,35 persen.

h  
9/14



**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama**  
**Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis**  
**Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2020**

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	18.909	8.225	27.134	35,03
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	
Industri Pengolahan	20.403	3.107	23.510	30,35
Listrik, Air dan Gas	-	-	-	
Konstruksi	-	-	-	
Perdagangan, Rumah Tangga dan Jasa Akomodasi	13.264	13.550	26.814	34,62
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	
Lembaga Keuangan, Real Estate, Jasa persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>52.576</b>	<b>24.882</b>	<b>77.458</b>	<b>100%</b>

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021

**2.1.4. Potensi Sumber Daya**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039.

**2.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung**

Berdasarkan hasil analisis data numerik dan data spasial dalam Pemetaan DDDT-LH di Kabupaten Katingan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Terdapat 24 tipe ekoregion dan 22 kelas tutupan lahan, dimana ekoregion Pegunungan Denudasional (D1) dan Dataran Gambut merupakan ekoregion terluas, dengan masing-masing luasan 740.051,82 Ha dan 510.711,59 Ha. Sedangkan ekoregion terkecilnya adalah Tanggul Alam dan Teras Sungai (F5) dan Dataran Aluvial Rawa/Dataran Rawa Payau (F2) dengan masing-masing luasan 6,25 Ha dan 8,43 Ha, Kemudian untuk penutupan lahan, didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran (VBP12B) dan Hutan Lahan Basah Primer Gambut, dengan luasan masing-masing adalah 524.621,96 Ha dan 500.152,49 Ha. Sedangkan petutupan lahan terkecilnya adalah Bangun Industri (VTB28) dan Lahan Terbangun Non Permukiman (VTB31) dengan luas masing-masing adalah 31,80 Ha dan 37,89 Ha.
2. Hasil analisis perbandingan berpasangan dari penilaian pakar terhadap jasa ekosistem yang sudah dinormalisasi, menunjukkan bahwa pada ekoregion: Dataran Gambut (O1), Dataran Tinggi (F11), dan Dataran

Handwritten signature and date: 9/1/4





Aluvial (F1) memiliki nilai tertinggi dengan masing-masing nilai adalah 1,000 dan 0,700, serta 0,436. Sedangkan untuk penutupan lahan ditemukan pada: Perkebunan Karet (VP7c), Perkebunan Campuran (VP8), dan Permukiman (VTB27) dengan masing-masing nilai adalah 1,000, dan 0,609, serta 0,554. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekoregion dan penutupan lahan tersebut merupakan daerah-daerah penting untuk menyediakan jasa ekosistem bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat.

3. Indeks Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan tidak mengindikasikan adanya kisaran Sangat Rendah. Kisarannya adalah Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, dimana kisaran Rendah, Sedang, dan Tinggi berada di tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamipang, Mendawai, dan Petak Malai. Kisaran Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, berada di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Kuala, Sanaman Mantikei, dan Tewang Sangalang Garing. Kisaran Sedang dan Tinggi, berada di Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Marikit, Pulau Malan, dan Tasik Payawan.
4. Isu lingkungan strategis yang dihadapi Kabupaten Katingan dan menjadi tekanan utama terhadap jasa ekosistem adalah: Perijinan kebun, tambang, dan IUPHHK (HA maupun HT), Pencemaran air dan udara, baik akibat limbah cair maupun limbah padat serta berupa pembakaran hutan dan lahan, Pembukaan lahan oleh masyarakat, Perkembangan pemukiman, Pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan darat.
5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual untuk Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P), Pengaturan (R), dan Pendukung (S), dan Keseluruhannya yang sudah melampaui adalah seluas 385.860,40 Ha (18,90 %) dan yang Belum Melampaui seluas 1.655.451,23 Ha (81,10 %). Sedangkan untuk Jasa Ekosistem Budaya (C) seluruhnya masih Belum Melampaui. Selanjutnya, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya untuk Kecamatan Bukit Raya yang Belum Melampaui yaitu seluas 87.903,98 Ha dan Melampaui seluas 12.883,79 Ha, untuk Kecamatan Kamipang yang Belum Melampaui seluas 279.682,90 Ha dan yang Melampaui seluas 49.127,33 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hilir yang Belum Melampaui yaitu seluas 40.031,10 Ha dan Melampaui seluas 19.991,44 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hulu yang Belum Melampaui yaitu seluas 121.347,52 Ha dan Melampaui seluas 24.073,10 Ha, untuk Kecamatan Katingan Kuala yang Belum Melampaui yaitu seluas 101.968,74 Ha dan Melampaui seluas 46.874,89 Ha, untuk Katingan Tengah yang Belum Melampaui yaitu seluas 83.746,96 Ha dan Melampaui seluas 72.768,47 Ha, untuk Kecamatan Marikit yang Belum Melampaui yaitu seluas 189.372,94 Ha dan Melampaui seluas 30.340,74 Ha, untuk Kecamatan Mendawai yang Belum Melampaui yaitu seluas 181.655,15 Ha dan Melampaui seluas 21.666,04 Ha, untuk Kecamatan Petak Malai yang Belum Melampaui yaitu seluas 153.088,75 Ha dan Melampaui seluas 10.654,93 Ha, untuk Kecamatan Pulau Malan yang Belum Melampaui

14

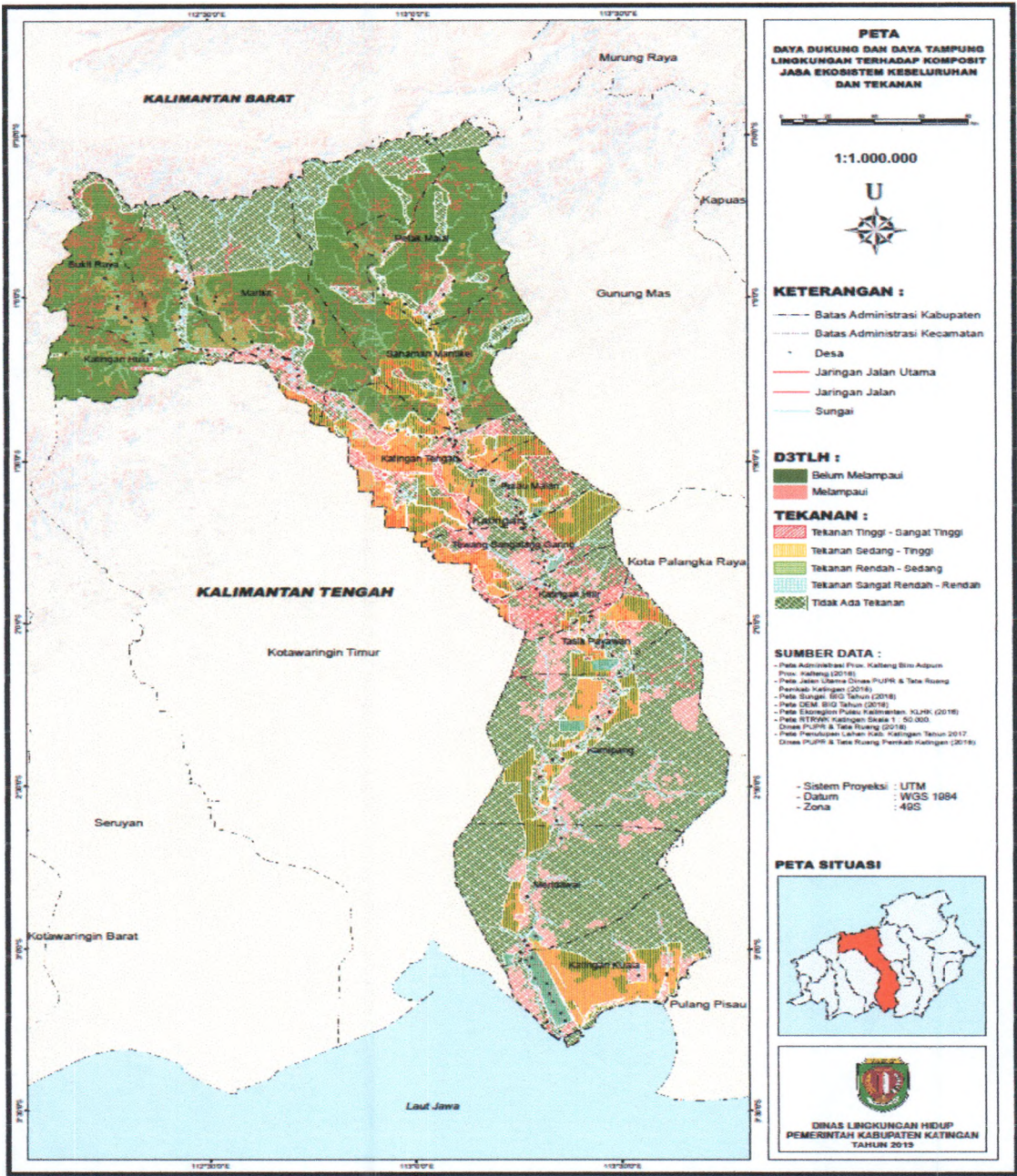




yaitu seluas 46.241,79 Ha dan Melampaui seluas 18.300,16 Ha, untuk Kecamatan Sanaman Mantikei yang Belum Melampaui yaitu seluas 265.923,41 Ha dan Melampaui seluas 13.829,42 Ha, untuk Kecamatan Tasik Payawan yang Belum Melampaui yaitu seluas 49.919,49 Ha dan Melampaui seluas 24.284,20 Ha, untuk Kecamatan Tewang Sangalang Garing yang Belum Melampaui yaitu seluas 54.568,49 Ha dan Melampaui seluas 23.106,86 Ha.

Gambaran tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Katingan, secara jelas dan ringkas disajikan pada Gambar 2.5 dan Tabel 2.14.

**Gambar 2.5 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha).**



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

9/1/4

**Tabel 2.14**  
**Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Dipisah berdasarkan Kondisi Melampaui dan Belum Melampaui serta Tekanannya untuk masing-masing Kecamatan, Ekoregion dan Penutupan Lahan (Ha)**

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
1.	Bukit Raya			79,213.36		8,690.61	87,903.98		12,831.99			51.81	12,883.79	100,787.77
		D1 Pegunungan Denudasional		55,304.58		337.90			12,602.99			6.76		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		2,045.74		318.08								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		52,870.41		19.82								
		VBP16 Semak Belukar						12,433.06			6.76			
		VBP17 Padang Rumput						166.79						
		VTB25 Gumuk Pasir						3.14						
		VTB27 Permukiman		81.07										
		VTB36 Rawa		9.48										
		VTB37 Sungai		297.88										
		D2 Perbukitan Denudasional		5,152.52		527.24		16.13						
		VBP10 Hutan Lahan Kering		2,276.78		474.30								





NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		2,874.56		52.94								
		VBP16 Semak Belukar							14.82					
		VBP17 Padang Rumput							1.31					
		VTB27 Permukiman		1.17										
		D4 Lembah antar Pegunungan/Perbukitan Denudasional		1,351.98		7,165.46			16.99			45.04		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		399.76		6,753.63								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		951.96		411.84								
		VBP16 Semak Belukar							16.99			45.04		
		VTB27 Permukiman		0.25										
		D5 Kipas Koluvial		132.47										
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		132.47										
		F11 Dataran Tinggi		1,552.37		660.00								
		VBP10 Hutan Lahan Kering		521.50		659.96								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		1,030.88		0.04								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		S22 Perbukitan Lipatan		15,719.46					195.87					
		VBP10 Hutan Lahan Kering		2,954.22										
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		12,765.24										
		VBP16 Semak Belukar						194.79						
		VBP17 Padang Rumput						1.08						
2.	Kamipang		1,972.68		31,611.02	246,099.20	279,682.90	912.75		12,093.19	8.95	36,112.45	49,127.33	328,810.23
		F7 Lembah Terkubur			7.31	13,220.67						3,085.26		
		VBP10 Hutan Lahan Kering				17.57								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				723.28								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			0.86	2,447.77								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				2.87								
		VBP16 Semak Belukar									2,808.27			
		VBP17 Padang Rumput									267.61			
		VTB25 Gumuk Pasir									9.39			

4/1/24

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB32 Danau				1.16								
		VTB36 Rawa			6.45	9,629.69								
		VTB37 Sungai				398.33								
		F9 Gosong Sungai			8,953.07	30,410.70		233.14		8,496.14		10,404.19		
		VBP10 Hutan Lahan Kering			1,345.77	2,688.94								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				6.74								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut			1,388.16	941.84								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			4,965.58	23,156.94								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran			121.71	244.21								
		VBP16 Semak Belukar						26.04		1,576.60		10,130.02		
		VBP17 Padang Rumput								31.79		203.11		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma			1.97	1,263.45								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit						207.10		6,887.75		52.42		
		VTB25 Gumuk Pasir										18.63		
		VTB32 Danau			54.80	14.30								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB36 Rawa			1,061.17	2,083.00								
		VTB37 Sungai			13.90	11.28								
		Fm3 Delta	41.10		4,814.55	15,060.77				619.59	8.95	6,577.92		
		VBP10 Hutan Lahan Kering			1.77	26.44								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran	0.57		0.61									
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	5.27		460.48	4,499.57								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	35.26		2,821.31	4,685.72								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				24.84								
		VBP16 Semak Belukar								566.08		6,484.75		
		VBP17 Padang Rumput								11.26		90.68		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				15.43								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								42.25		2.49		
		VTB27 Permukiman				69.00								
		VTB29 Pertambangan									8.95			
		VTB32 Danau			626.66	1,123.03								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB36 Rawa			902.70	1,689.09								
		VTB37 Sungai			1.01	2,927.65								
		<b>O1 Dataran Gambut</b>	<b>1,931.58</b>		<b>17,836.09</b>			<b>679.61</b>		<b>2,977.46</b>		<b>16,045.08</b>		
						<b>187,407.06</b>								
		VBP10 Hutan Lahan Kering	1,849.18		1,572.01	4,915.62								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran	26.18		13.55	9.50								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	42.57		197.50	504.22								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	13.66		14,918.91	179,944.84								
		VBP16 Semak Belukar						222.63		2,293.45		15,899.37		
		VBP17 Padang Rumput								3.16		87.96		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				16.98								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit						456.98		680.85		57.75		
		VTB32 Danau			577.35	83.09								
		VTB36 Rawa			546.72	1,901.77								
		VTB37 Sungai			10.06	31.04								
3.	Katingan Hilir		21.75		2,326.71	37,682.63	40,031.10	24.17		1,718.49		19,991.44	21,734.11	61,765.21
		<b>F11 Dataran Tinggi</b>				<b>241.68</b>						<b>178.04</b>		



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)	
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				95.62									
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				92.49									
		VBP16 Semak Belukar											148.23		
		VBP17 Padang Rumput											14.54		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				6.60									
		VTB25 Gumuk Pasir											15.28		
		VTB27 Permukiman				6.32									
		VTB37 Sungai				40.65									
		F9 Gosong Sungai			1,142.99	23,856.43				1,716.09		15,687.04			
		VBP10 Hutan Lahan Kering				10,786.83									
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			322.51	5,256.23									
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				14.55									
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			763.09	4,768.79									

9  
14  
2





NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				76.34								
		VBP16 Semak Belukar								298.25		7,533.13		
		VBP17 Padang Rumput								21.83		998.27		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma			5.51	2,240.57								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								1,309.75		854.26		
		VP8 Perkebunan Campuran			51.88	231.44								
		VTB25 Gumuk Pasir								86.27		6,301.37		
		VTB27 Permukiman			0.01	364.82								
		VTB36 Rawa				25.66								
		VTB37 Sungai				91.20								
		Fm3 Delta			1,183.72	8,456.50				2.40		756.49		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				1,778.61								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				1,928.86								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			1,060.24	3,017.64								
		VBP16 Semak Belukar										749.03		

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP17 Padang Rumput								2.40		7.46		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma			123.48	281.13								
		VTB27 Permukiman				285.58								
		VTB36 Rawa				14.90								
		VTB37 Sungai				1,149.78								
		O1 Dataran Gambut	21.75			5,128.02		24.17				3,369.87		
		VBP10 Hutan Lahan Kering				1,914.87								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran	16.98			2,100.50								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	2.44			401.07								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut				0.02								
		VBP16 Semak Belukar						24.17				3,339.17		
		VBP17 Padang Rumput										30.70		
		VP2 Sawah Tadah Hujan	2.34			6.81								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				566.22								
		VTB27 Permukiman				138.11								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)	
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)		
		VTB37 Sungai				0.41									
4.	Katingan Hulu			101,136.21	264.97	19,946.34	121,347.52		18,221.40				5,851.69	24,073.10	145,420.61
		D1 Pegunungan Denudasional		84,087.04	264.97	11,297.39			17,110.96				3,976.72		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		3,778.12		965.75									
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		78,734.69	264.97	7,924.50									
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		1,002.88		2,209.14									
		VBP16 Semak Belukar							16,784.49				3,902.68		
		VBP17 Padang Rumput							313.51				74.04		
		VTB25 Gumuk Pasir							12.97						
		VTB27 Permukiman		262.29		25.73									
		VTB36 Rawa		22.06		13.64									
		VTB37 Sungai		287.00		158.64									
		D2 Perbukitan Denudasional		9,018.48		4,567.57			423.41				181.53		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		1,042.80		3,164.06									
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		7,949.16		797.88									





NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		26.50		598.92								
		VBP16 Semak Belukar							423.26			181.53		
		VBP17 Padang Rumput							0.15					
		VTB37 Sungai		0.02		6.71								
		<b>D4 Lembah antar Pegunungan/Perbuk itan Denudasional</b>		<b>2,165.93</b>		<b>1,506.46</b>			<b>140.34</b>			<b>1,686.36</b>		
		VBP10 Hutan Lahan Kering				30.60								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		2,138.07		1,215.11								
		VBP16 Semak Belukar							119.42			1,640.96		
		VBP17 Padang Rumput							20.92			45.41		
		VTB27 Permukiman		24.30		53.54								
		VTB37 Sungai		3.56		207.20								
		<b>F11 Dataran Tinggi</b>		<b>150.65</b>		<b>2,435.04</b>								
		VBP10 Hutan Lahan Kering		136.04		2,435.04								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		14.61										

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		S12 Pegunungan Lipatan		211.13					6.29					
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		211.13										
		VBP16 Semak Belukar							6.29					
		S22 Perbukitan Lipatan		5,502.97		139.88			540.39			7.08		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		734.69										
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		4,767.73		133.72								
		VBP16 Semak Belukar							537.59			4.93		
		VBP17 Padang Rumput							2.80			2.14		
		VTB37 Sungai		0.55		6.16								
5.	Katingan Kuala		11,236.66		24,419.15	66,312.94	101,968.74	1,592.89		29,097.79	3.58	16,180.62	46,874.89	148,843.63
		F1 Dataran Aluvial	5,462.09		200.25	589.71		513.40		187.51		233.94		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				19.01								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				70.42								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)	
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)		
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	0.39												
		VBP16 Semak Belukar						513.40		187.51		233.84			
		VBP17 Padang Rumput										0.10			
		VP2 Sawah Tadah Hujan	4,063.99		153.49	180.06									
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	707.81		46.76	241.85									
		VP8 Perkebunan Campuran	133.75			7.33									
		VTB27 Permukiman	538.29			4.29									
		VTB37 Sungai	17.87			66.74									
		F2 Dataran Aluvial Rawa/Dataran Rawa Payau				5.16						3.27			
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut				5.16									
		VBP16 Semak Belukar										3.27			
		F5 Tanggul Alam dan Teras Sungai				1.69						4.56			
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				1.69									
		VBP16 Semak Belukar										4.56			

h/16  
24



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		F9 Gosong Sungai	285.25		1,226.21	11,340.34		379.29		228.80		4,840.14		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			127.18	1,373.17								
		VBP13AB Hutan Lahan Basah Primer Bakau			10.80	2,507.08								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut			79.42	122.08								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	134.88		1,006.88	3,668.62								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran	2.47		0.15	269.32								
		VBP16 Semak Belukar						379.29		228.80		4,796.56		
		VBP17 Padang Rumput										31.41		
		VP2 Sawah Tadah Hujan	99.59			19.47								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	5.88			192.77								
		VP8 Perkebunan Campuran	40.24			1,302.02								
		VTB25 Gumuk Pasir										4.45		
		VTB27 Permukiman				124.76								

Handwritten signature and initials in blue ink.



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman										7.72		
		VTB36 Rawa				73.09								
		VTB37 Sungai	2.19		1.77	1,687.96								
		<b>Fm1 Dataran Fluviomarin/Aluvial Wiayah Pesisir</b>	<b>4,752.69</b>		<b>6.62</b>	<b>65.78</b>		<b>216.58</b>		<b>606.56</b>		<b>30.98</b>		
		VBP16 Semak Belukar						216.58		552.48		30.98		
		VBP17 Padang Rumput								54.08				
		VP2 Sawah Tadah Hujan	385.45											
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	4,164.46		6.62	61.48								
		VP8 Perkebunan Campuran	23.21											
		VTB27 Permukiman	177.64											
		VTB37 Sungai	1.93			4.30								
		<b>Fm3 Delta</b>	<b>96.84</b>			<b>549.50</b>		<b>52.09</b>				<b>932.27</b>		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				13.36								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	69.93			203.04								
		VBP16 Semak Belukar						52.09				932.27		

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	2.12			20.60								
		VP8 Perkebunan Campuran				46.60								
		VTB27 Permukiman	0.63			0.08								
		VTB36 Rawa	24.15			265.81								
		<b>M1 Pecah Gelombang</b>				<b>76.82</b>						<b>166.74</b>		
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut				76.82								
		VBP16 Semak Belukar										166.74		
		<b>M2 Pantai</b>				<b>89.72</b>						<b>20.10</b>		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				18.25								
		VBP16 Semak Belukar										20.10		
		VTB37 Sungai				71.47								
		<b>M7 Laguna dan Estuaria</b>			<b>11.39</b>	<b>138.69</b>								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			11.39	107.85								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut				2.70								
		VTB37 Sungai				28.15								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		M8 Rataan Pasang Surut	557.96		8,655.60	6,519.58		355.11		13,009.09		7,113.99		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			3,986.00	607.36								
		VBP13AB Hutan Lahan Basah Primer Bakau			3.50	0.02								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	13.75		2,246.09	4,058.27								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			626.26	976.73								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran	19.98		1,768.52	393.60								
		VBP16 Semak Belukar						355.11		12,860.69		6,886.06		
		VBP17 Padang Rumput								148.40		221.72		
		VP2 Sawah Tadah Hujan	389.55		24.08	192.44								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	123.08			131.62								
		VP8 Perkebunan Campuran				87.90								
		VTB25 Gumuk Pasir										6.21		

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB27 Permukiman	9.78		1.14	12.76								
		VTB37 Sungai	1.82			58.87								
		M9 Rataan Lumpur			2.42	209.20						1.71		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			2.42	183.39								
		VBP13AB Hutan Lahan Basah Primer Bakau				25.64								
		VBP16 Semak Belukar										1.71		
		VTB37 Sungai				0.16								
		O1 Dataran Gambut	81.83		14,316.66	46,726.75		76.42		15,065.83	3.58	2,832.92		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			441.49	10.42								
		VBP13AB Hutan Lahan Basah Primer Bakau				124.44								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	27.97		1,060.94	6,707.63								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	0.54		10,657.18	39,746.36								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran	41.74		1,429.93	53.60								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP16 Semak Belukar						76.42		15,002.94		2,825.41		
		VBP17 Padang Rumput								62.89		7.51		
		VP2 Sawah Tadah Hujan			513.35	0.01								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	7.76		213.78	10.54								
		VTB29 Pertambangan									3.58			
		VTB36 Rawa				66.61								
		VTB37 Sungai	3.82			7.13								
6.	Katingan Tengah		13,691.77	38,572.73	31,482.45	83,746.96	0.04	2,227.74	45,402.39	269.27	24,869.03	72,768.47	156,515.43	
	D1 Pegunungan Denudasional		12,673.01	12,371.98	14,132.35			1,508.12	18,380.17		11,825.22			
	VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		6,006.99	11,669.71	12,995.49									
	VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		6,648.68	439.03	83.98									
	VBP16 Semak Belukar							1,300.62	3,826.38		6,460.32			
	VBP17 Padang Rumput							187.86	629.62		701.44			
	VP7D Perkebunan Kelapa Sawit							19.64	13,916.21		4,625.94			
	VP8 Perkebunan Campuran			140.98	70.98									
	VTB25 Gumuk Pasir								3.88		37.51			



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB27 Permukiman			51.62	181.04								
		VTB28 Bangunan Industri								4.08				
		VTB36 Rawa		17.34	70.26	63.21								
		VTB37 Sungai			0.38	737.66								
		D2 Perbukitan Denudasional		928.80	1,900.26	904.37			201.69	666.93		89.59		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			1,900.26	722.42								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		928.80		176.45								
		VBP16 Semak Belukar							199.39	90.43		89.19		
		VBP17 Padang Rumput							2.30	85.66				
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								490.83		0.40		
		VTB37 Sungai				5.50								
		F9 Gosong Sungai		60.88	22,149.64	11,443.09		0.04	517.93	24,999.82	269.27	10,842.07		
		VBP10 Hutan Lahan Kering			4,354.14	3,583.79								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		59.08	14,853.49	7,172.44								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut			2,281.68	431.28								
		VBP16 Semak Belukar							67.23	9,096.76		6,244.29		
		VBP17 Padang Rumput							3.15	677.99		378.55		
		VBP19 Padang Alang- alang								54.34		5.74		
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit						0.04	447.54	13,396.86		3,848.83		
		VP8 Perkebunan Campuran			505.43	39.59								
		VTB25 Gumuk Pasir								1,752.41		361.61		
		VTB27 Permukiman			35.61	1.86								
		VTB28 Bangunan Industri								13.97		3.05		
		VTB29 Pertambangan									269.27			
		VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman								7.50				
		VTB36 Rawa		1.81	119.29	150.97								
		VTB37 Sungai				63.16								
		<b>Fm3 Delta</b>		<b>29.08</b>	<b>2,150.85</b>	<b>5,002.64</b>				<b>1,355.48</b>		<b>2,112.16</b>		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		26.81	1,360.95	1,739.44								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)	
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)		
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut			614.00	1,198.81									
		VBP16 Semak Belukar								807.52		1,830.26			
		VBP17 Padang Rumput								121.56		138.29			
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				13.29									
		VP7C Perkebunan Karet				38.70									
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								381.17		4.81			
		VP8 Perkebunan Campuran			93.68	597.56									
		VTB25 Gumuk Pasir								45.23		118.82			
		VTB27 Permukiman				318.75									
		VTB28 Bangunan Industri										5.16			
		VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman										14.81			
		VTB36 Rawa			82.11	335.44									
		VTB37 Sungai		2.27	0.11	760.65									
7.	Marikit			90,571.22	3,436.56	95,365.16	189,372.94		17,014.31	1,401.23		11,925.19	30,340.74	219,713.68	
		D1 Pegunungan Denudasional		79,394.66	1,285.53	81,972.87			14,548.32	1,328.31		10,526.07			





NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP10 Hutan Lahan Kering		5,226.93		43,520.82								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		18,833.28	1,141.83	8,142.85								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		55,089.28	143.70	29,541.22								
		VBP16 Semak Belukar							13,782.97	1,299.32		10,050.20		
		VBP17 Padang Rumput							765.35	28.98		460.10		
		VTB25 Gumuk Pasir										15.77		
		VTB27 Permukiman		26.52		170.61								
		VTB36 Rawa				28.72								
		VTB37 Sungai		218.66		568.65								
		D2 Perbukitan Denudasional		6,476.73	2,151.03	10,746.77			717.64	72.93		406.47		
		VBP10 Hutan Lahan Kering				4,232.06								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		76.94	2,151.03	337.97								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		6,378.83		6,176.74								
		VBP16 Semak Belukar							698.59	66.93		393.06		

h1/b  
f

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP17 Padang Rumput							19.05	4.23		13.41		
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								1.77				
		VTB37 Sungai		20.96										
		D4 Lembah antar Pegunungan/Perbukitan Denudasional		4,439.25		2,645.51			1,748.35			992.65		
		VBP10 Hutan Lahan Kering				2,352.04								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		1,215.92		228.52								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		3,132.36										
		VBP16 Semak Belukar							1,686.17			984.48		
		VBP17 Padang Rumput							62.17			8.17		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma		21.00										
		VTB27 Permukiman		21.56		8.68								
		VTB37 Sungai		48.41		56.27								
		K2 Lembah Karst		260.58										
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		260.58										

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
8	Mendawai		1,390.73		11,289.85	168,974.58	181,655.15	728.47		3,001.42		17,936.15	21,666.04	203,321.19
		D7 Bukit Terisolasi				252.86						59.09		
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut				252.86								
		VBP16 Semak Belukar									59.09			
		F1 Dataran Aluvial	2.18			9.15								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	2.18			9.15								
		F7 Lembah Terkubur				183.60					224.28			
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut				86.54								
		VBP16 Semak Belukar									224.28			
		VTB36 Rawa				81.35								
		VTB37 Sungai				15.71								
		F9 Gosong Sungai			10.95	626.23					104.74			
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				56.97								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			10.95	393.44								
		VBP16 Semak Belukar									104.74			
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				14.74								
		VTB37 Sungai				161.08								





NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		Fm1 Dataran Fluviomarin/Aluvial Wiayah Pesisir	1.47		2.40	23.12		4.59		65.86		2.92		
		VBP16 Semak Belukar						4.59		65.86		2.92		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	1.47		2.40	23.12								
		Fm3 Delta	540.58		494.01	11,763.56		464.89		489.99		5,410.26		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				101.78								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				9.76								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	499.88		481.89	8,522.74								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				417.28								
		VBP16 Semak Belukar						464.89		489.99		5,236.78		
		VBP17 Padang Rumput										162.79		
		VP2 Sawah Tadah Hujan			6.59	37.24								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	38.54		5.52	134.99								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit										8.54		
		VP8 Perkebunan Campuran				294.08								
		VTB27 Permukiman	0.59			60.72								
		VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman										2.15		
		VTB36 Rawa				131.14								
		VTB37 Sungai	1.57			2,053.83								
		O1 Dataran Gambut	846.50		10,782.49	156,116.06		258.99		2,445.56		12,134.87		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran	0.00		94.09									
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				4,198.71								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut	435.79		10,650.75	150,463.97								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				44.83								
		VBP16 Semak Belukar						258.99		2,405.93		12,112.84		
		VBP17 Padang Rumput								39.63		22.03		

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	357.35		37.65	29.38								
		VP8 Perkebunan Campuran				337.00								
		VTB27 Permukiman	53.36			0.00								
		VTB36 Rawa				1,039.05								
		VTB37 Sungai				3.12								
9.	Petak Malai			126,262.73	2,866.09	23,959.94	153,088.75		7,182.10	125.59		3,347.25	10,654.93	163,743.68
		D1 Pegunungan Denudasional		47,986.93	2,866.09	7,905.06			5,227.95	125.59		3,253.94		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		541.25		0.08								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		45,426.16	2,742.26	7,482.94								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		1,705.12	121.89	72.57								
		VBP16 Semak Belukar							5,134.20	19.43		3,046.93		
		VBP17 Padang Rumput							93.75	106.16		207.01		
		VTB27 Permukiman		41.61		25.93								
		VTB36 Rawa			1.72									
		VTB37 Sungai		272.79	0.22	323.54								
		D2 Perbukitan Denudasional		7,037.42		543.50			77.90			6.88		



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP10 Hutan Lahan Kering		0.85										
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		7,035.86		543.19								
		VBP16 Semak Belukar							72.64			6.88		
		VBP17 Padang Rumput							5.25					
		VTB37 Sungai		0.70		0.31								
		D4 Lembah antar Pegunungan/Perbukitan Denudasional		10,142.96		723.18			1,501.40			61.15		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		10,118.98		710.74								
		VBP16 Semak Belukar							1,481.39			61.15		
		VBP17 Padang Rumput							20.01					
		VTB37 Sungai		23.99		12.44								
		F11 Dataran Tinggi		6,750.27		8,251.56			30.66					
		VBP10 Hutan Lahan Kering		1,393.39		4,091.35								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		5,148.27		669.84								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		204.71		3,489.44								
		VBP16 Semak Belukar							30.66					
		VTB37 Sungai		3.90		0.93								
		S11 Pegunungan Patahan		661.94					1.67					
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		659.04										
		VBP16 Semak Belukar							1.67					
		VTB37 Sungai		2.90										
		S12 Pegunungan Lipatan		53,683.21		4,665.77			342.52			25.28		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		35,863.57		2,818.62								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		17,716.50		1,771.43								
		VBP16 Semak Belukar							342.52			25.28		
		VTB37 Sungai		103.14		75.73								
		S22 Perbukitan Lipatan				1,870.87								
		VBP10 Hutan Lahan Kering				1,862.76								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				8.11								
10.	Pulau Malan		826.65		20,441.80	24,973.34	46,241.79	528.47		9,458.77		8,312.92	18,300.16	64,541.95
		F9 Gosong Sungai	377.64		18,504.57	15,143.29		329.09		8,003.28		5,473.42		
		VBP10 Hutan Lahan Kering	155.24		17,561.89	14,619.04								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut			203.82	90.38								
		VBP16 Semak Belukar						296.55		5,014.78		4,447.96		
		VBP17 Padang Rumput								450.09		300.14		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	194.94		602.58	402.42								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit						32.55		2,380.25		450.13		
		VP8 Perkebunan Campuran	1.33		136.27	31.45								
		VTB25 Gumuk Pasir								158.15		275.17		
		VTB27 Permukiman	26.14											
		Fm3 Delta	161.84		1,222.00	9,803.95		89.65		675.46		2,831.15		
		VBP10 Hutan Lahan Kering	161.84		316.15	2,098.57								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				11.24								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
14	M	VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut			749.41	5,434.69								
		VBP16 Semak Belukar						89.65		462.90		2,334.13		
		VBP17 Padang Rumput								1.97		74.38		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma			11.69	140.89								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								182.87		422.64		
		VP8 Perkebunan Campuran			103.38	386.53								
		VTB25 Gumuk Pasir								27.71				
		VTB27 Permukiman				309.75								
		VTB32 Danau			36.68	39.82								
		VTB36 Rawa			4.69	39.28								
		VTB37 Sungai				1,343.19								
		<b>O1 Dataran Gambut</b>	<b>287.18</b>		<b>715.23</b>	<b>26.10</b>		<b>109.72</b>		<b>780.04</b>		<b>8.35</b>		
		VBP10 Hutan Lahan Kering	123.11		597.67	25.76								
		VBP16 Semak Belukar						107.29		768.80		8.35		
		VBP17 Padang Rumput						2.43		11.24				
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	92.92		115.07	0.34								
		VP8 Perkebunan Campuran	58.33											

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB27 Permukiman	12.81											
		VTB36 Rawa			2.50									
11.	Sanaman Mantikei		719.69	177,853.91	20,980.48	66,369.33	265,923.41	287.06	9,139.62	2,153.86	91.13	2,157.76	13,829.42	279,752.83
		D1 Pegunungan Denudasional	719.69	149,341.19	20,618.17	47,126.86		287.06	6,402.07	1,565.31	91.13	1,598.85		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		24,899.46		25,964.28								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran	716.16	79,423.59	17,826.58	16,229.42								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		44,790.39	2,749.92	4,060.86								
		VBP16 Semak Belukar						66.28	5,547.03	949.44		1,411.22		
		VBP17 Padang Rumput						220.77	855.04	288.28		182.09		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma		4.51										
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								327.59				
		VP8 Perkebunan Campuran			16.87	82.14								
		VTB27 Permukiman	3.54	9.56		228.08								
		VTB28 Bangunan Industri										5.54		
		VTB29 Pertambangan										91.13		

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VTB32 Danau		8.38										
		VTB36 Rawa		20.46	23.20	8.84								
		VTB37 Sungai		184.85	1.59	553.25								
		D2 Perbukitan Denudasional		5,595.92		257.98			113.95					
		VBP10 Hutan Lahan Kering		121.78										
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		5,471.11		257.98								
		VBP16 Semak Belukar							100.15					
		VBP17 Padang Rumput							8.46					
		VTB25 Gumuk Pasir							5.34					
		VTB36 Rawa		3.03										
		D4 Lembah antar Pegunungan/Perbuk itan Denudasional		1,415.26		649.98			53.69					
		VBP10 Hutan Lahan Kering		0.00		649.98								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		1,394.89										
		VBP16 Semak Belukar							53.69					
		VTB36 Rawa		20.36										
		F11 Dataran Tinggi		9,485.88		13,143.64			585.89					



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP10 Hutan Lahan Kering		5,510.43		7,710.77								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		3,764.65		341.78								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran		207.21		5,090.61								
		VBP16 Semak Belukar							261.16					
		VBP17 Padang Rumput							38.27					
		VTB25 Gumuk Pasir							286.46					
		VTB37 Sungai		3.59		0.48								
		F9 Gosong Sungai		5,526.32	362.31	918.38			1,984.02	588.55		546.20		
		VBP10 Hutan Lahan Kering		4,743.21		596.50								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		780.75	349.14	321.84								
		VBP16 Semak Belukar							1,780.41	159.81		510.64		
		VBP17 Padang Rumput							18.35	8.54				
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit							185.27	420.20		35.56		
		VTB27 Permukiman				0.04								
		VTB36 Rawa		2.37	13.17									
		Fm3 Delta		4.94		55.81						12.71		



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		4.94		48.62								
		VBP16 Semak Belukar										4.61		
		VBP17 Padang Rumput										7.37		
		VTB25 Gumuk Pasir										0.73		
		VTB37 Sungai				7.19								
		<b>S11 Pegunungan Patahan</b>		<b>5,785.68</b>		<b>1,301.39</b>								
		VBP10 Hutan Lahan Kering		1,526.85		855.96								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		4,222.38		445.43								
		VTB37 Sungai		36.45										
		<b>S12 Pegunungan Lipatan</b>		<b>698.72</b>		<b>2,817.13</b>								
		VBP10 Hutan Lahan Kering		694.98		2,532.90								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran		3.75		270.87								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				13.36								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		S7 Dataran Nyaris/Dataran Lipatan				98.15								
		VBP10 Hutan Lahan Kering				98.15								
12	Tasik Payawan		1,976.64		15,996.83	31,946.02	49,919.49	746.63		7,055.72	21.95	16,459.89	24,284.20	74,203.69
		F1 Dataran Aluvial				2.68						0.87		
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut				1.74								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				0.93								
		VTB25 Gumuk Pasir									0.87			
		F9 Gosong Sungai	1,843.33		10,204.92	12,188.62		559.38		6,020.51	21.95	13,926.43		
		VBP10 Hutan Lahan Kering	350.39		3,679.55	2,389.14								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				47.08								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	935.06		1,189.94	414.71								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			4,766.89	6,469.24								



NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran			109.81	263.87								
		VBP16 Semak Belukar						493.09		5,525.38		11,590.18		
		VBP17 Padang Rumput						0.93		449.45		1,816.17		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	22.34		266.71	2,209.91								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit						65.37		45.68		21.50		
		VP8 Perkebunan Campuran	266.55		0.27	375.92								
		VTB25 Gumuk Pasir										498.59		
		VTB27 Permukiman	59.77		15.96	4.19								
		VTB29 Pertambangan									21.95			
		VTB36 Rawa	209.22		175.80	13.08								
		VTB37 Sungai				1.47								
		<b>Fm3 Delta</b>	<b>133.31</b>		<b>1,865.42</b>	<b>8,530.59</b>		<b>187.24</b>		<b>801.75</b>		<b>2,099.76</b>		
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				14.36								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	86.74		1,047.75	3,653.85								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			688.28	2,217.92								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran			0.94	10.94								
		VBP16 Semak Belukar						187.24		682.49		1,909.12		
		VBP17 Padang Rumput								119.27		190.64		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma			124.77	492.32								
		VTB27 Permukiman				122.15								
		VTB36 Rawa	46.57		3.68	402.44								
		VTB37 Sungai				1,616.60								
		<b>O1 Dataran Gambut</b>			<b>3,926.48</b>	<b>11,224.14</b>				<b>233.46</b>		<b>432.83</b>		
		VBP10 Hutan Lahan Kering				81.31								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			2.75	30.42								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut			217.11	306.76								
		VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gambut			3,706.62	10,726.84								
		VBP16 Semak Belukar								217.78		418.76		
		VBP17 Padang Rumput								15.68		11.66		

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				76.03								
		VTB25 Gumuk Pasir									2.42			
		VTB36 Rawa				2.80								
13.	Tewang Sangalang Garing		692.07		21,605.30	32,271.11	54,568.49	1,022.16		15,194.20		23,106.86	39,323.22	93,891.71
		F11 Dataran Tinggi				862.93				51.40		2,350.25		
		VBP10 Hutan Lahan Kering				10.47								
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran				382.98								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				237.61								
		VBP16 Semak Belukar									591.27			
		VBP17 Padang Rumput									261.85			
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit									0.02			
		VTB25 Gumuk Pasir								51.40	1,497.11			
		VTB36 Rawa				19.77								
		VTB37 Sungai				212.11								
		F9 Gosong Sungai	67.52		21,605.30	22,202.44		76.72		15,142.80		17,707.94		
		VBP10 Hutan Lahan Kering	39.02		17,110.08	15,904.64								





NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran			3,261.78	4,428.42								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut				45.79								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				46.04								
		VBP16 Semak Belukar						76.72		2,182.63		8,684.41		
		VBP17 Padang Rumput								290.59		946.54		
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	28.50		1,150.98	1,190.49								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit								11,655.79		5,449.38		
		VP8 Perkebunan Campuran			82.46	472.82								
		VTB25 Gumuk Pasir								1,008.09		2,627.62		
		VTB27 Permukiman				2.93								
		VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman								5.71				
		VTB37 Sungai				111.32								
		Fm3 Delta	180.39			7,390.46		16.82				1,377.85		
		VBP10 Hutan Lahan Kering	32.97			160.41								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran	15.24			996.95								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	83.84			3,096.77								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				272.05								
		VBP16 Semak Belukar						16.82				1,065.49		
		VBP17 Padang Rumput										46.34		
		VP2 Sawah Tadah Hujan	45.52			444.49								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma				483.23								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit										250.35		
		VP8 Perkebunan Campuran				576.82								
		VTB25 Gumuk Pasir										15.68		
		VTB27 Permukiman	0.04			231.37								
		VTB37 Sungai	2.79			1,128.38								
		<b>O1 Dataran Gambut</b>	<b>444.16</b>			<b>1,815.28</b>		<b>928.62</b>				<b>1,670.82</b>		
		VBP10 Hutan Lahan Kering	23.78			596.69								

NO	KECAMATAN	EKOREGION DAN PENUTUPAN LAHAN	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BELUM MELAMPAUI					DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP SUDAH MELAMPAUI						JUMLAH TOTAL (Ha)
			Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	Tekanan Sangat Rendah- Rendah (Ha)	Tekanan Rendah- Sedang (Ha)	Tekanan Sedang- Tinggi (Ha)	Tekan Tinggi- Sangat Tingi (Ha)	Tidak Ada Tekanan (Ha)	TOTAL (Ha)	
		VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran	296.04			555.07								
		VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut	66.07			19.64								
		VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran				282.83								
		VBP16 Semak Belukar						922.12				652.16		
		VBP17 Padang Rumput						6.50				21.81		
		VP2 Sawah Tadah Hujan	5.58			28.18								
		VP6 Ladang, Tegal, atau Huma	3.22			243.51								
		VP7D Perkebunan Kelapa Sawit										996.85		
		VP8 Perkebunan Campuran	43.01			63.33								
		VTB27 Permukiman	6.46			2.95								
		VTB36 Rawa				2.53								
		VTB37 Sungai				20.55								

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023





2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dapat dilihat dari nilai PDRB yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah diabaikan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.15  
PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.151,0	1.221,7	1.260,9	1.340,5	1437,1	1405,6
B	Pertambangan dan Penggalian	353,2	385,8	416,6	396,8	356,3	245,3
C	Industri Pengolahan	565,4	605,1	650,1	703,5	763,7	764,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,7	1,8	1,9	2,01	2,1	2,3
F	Konstruksi	467,7	490,5	537,0	584,2	618,1	562,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	275,7	294,9	319,1	349,3	371,5	367,7
H	Transportasi dan Pergudangan	264,7	277,1	297,7	322,9	343,9	342,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,5	83,1	90,2	98,1	106,6	104,5
J	Informasi dan Komunikasi	39,8	40,6	42,6	45,3	50,6	60,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	52,5	53,2	55,9	57,5	62,1	70,4
L	Real Estate	100,0	109,0	118,5	128,4	138,7	134,4
M,N	Jasa Perusahaan	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	249,0	268,0	286,00	310,2	327,6	321,0
P	Jasa Pendidikan	214,8	229,1	247,3	266,5	288,5	304,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92,4	100,4	108,7	118,4	128,0	143,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	83,4	89,7	96,4	103,7	112,8	111,6
PDRB		3.990,9	4.252,0	4.531,1	4.829,6	5.110,0	4.943,7

Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS, diolah

\* Angka sementara \*\* Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Katingan pada Tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 4,943,7 triliun dan atas dasar harga berlaku

14  
ayky



mencapai Rp 8,307,2 triliun. Bila ditelaah lebih jauh ke tahun-tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun di Tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan peningkatan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020.

**Tabel 2.16**  
**PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.566,1	1.710,2	1.807,8	1.947,7	2.126,5	2.232,4
B	Pertambangan dan Penggalian	466,4	527,1	570,9	565,6	545,8	442,1
C	Industri Pengolahan	803,0	922,4	1.023,6	1.106,3	1.214,9	1.281,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,5	1,6	1,9	2,2	2,3	2,6
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,3	2,6	3,0	3,3	3,5	3,9
F	Konstruksi	631,4	701,4	827,2	957,3	1.044,3	955,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	386,0	440,5	502,2	581,9	651,0	653,8
H	Transportasi dan Pergudangan	393,9	424,3	484,5	561,8	640,8	650,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116,4	136,7	152,3	171,6	192,2	191,7
J	Informasi dan Komunikasi	43,2	44,3	48,2	52,9	60,4	71,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	67,8	70,0	77,1	82,1	91,0	103,0
L	Real Estate	139,4	162,7	188,7	218,6	243,1	239,0
M,N	Jasa Perusahaan	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	348,1	395,1	450,8	517,1	567,3	567,9
P	Jasa Pendidikan	274,3	351,6	396,6	396,6	446,5	472,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127,6	168,7	195,3	195,8	220,0	251,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	112,9	146,2	164,2	164,2	185,9	186,1
<b>PDRB</b>		<b>5.481,0</b>	<b>6.127,5</b>	<b>6.805,6</b>	<b>7.526,2</b>	<b>8.236,8</b>	<b>8.307,2</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS, diolah

\* Angka sementara \*\* Angka sangat sementara

Distribusi PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 sampai dengan 2020 didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

19/1/4



Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi primadona dalam perekonomian Kabupaten Katingan, walaupun selama periode 2015 sampai dengan 2020 tidak jarang mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Katingan pada tahun 2020 mencapai 26,87 persen. Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Katingan adalah sektor Industri Pengolahan, selama beberapa tahun fluktuatif dan tahun 2020 mencapai 15,43 persen. Pada posisi ketiga penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,51 persen di tahun 2020.

**Tabel 2.17**  
**Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (persen)**

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,57	27,91	26,56	25,88	25,82	26,87
B	Pertambangan dan Penggalian	8,51	8,60	8,39	7,52	6,63	5,32
C	Industri Pengolahan	14,65	15,05	15,04	14,70	14,75	15,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	11,52	11,45	12,15	12,72	12,68	11,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,04	7,19	7,38	7,73	7,90	7,87
H	Transportasi dan Pergudangan	7,19	6,92	7,12	7,46	7,78	7,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,12	2,23	2,24	2,28	2,33	2,31
J	Informasi dan Komunikasi	0,79	0,72	0,71	0,70	0,73	0,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,14	1,13	1,09	1,10	1,24
L	Real Estate	2,54	2,65	2,77	2,90	2,95	2,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,45	6,62	6,87	6,89	6,84
P	Jasa Pendidikan	5,01	5,04	5,17	5,27	5,42	5,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,33	2,40	2,48	2,60	2,67	3,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,06	2,12	2,15	2,18	2,26	2,24
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS, diolah  
\* Angka sementara \*\* Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Katingan Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Katingan 5,81 persen di Tahun 2019, dan di Tahun 2020 menurun tajam menjadi -3,25 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 19,74 persen, disusul kategori Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 13,32 persen dan kategori Jasa Kesehatan

k  
9/4





dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 11,95 persen. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,16 persen.

**Tabel 2.18**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Persen)**

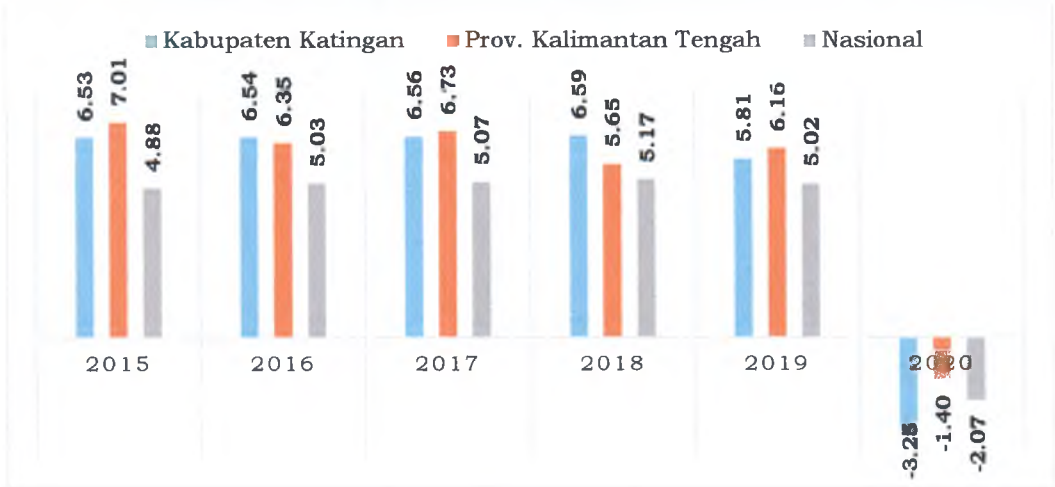
	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75	6,14	3,21	6,31	7,21	-2,19
B	Pertambangan dan Penggalian	6,00	9,22	7,99	-4,77	-10,19	-31,16
C	Industri Pengolahan	7,21	7,01	7,44	8,21	8,56	0,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,91	5,86	3,40	9,38	3,95	8,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,35	7,79	4,33	4,72	3,21	10,59
F	Konstruksi	9,55	4,87	9,49	8,79	5,80	-9,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,84	6,97	8,19	9,49	6,35	-1,03
H	Transportasi dan Pergudangan	2,08	4,70	7,42	8,47	6,52	-0,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,34	7,12	8,59	8,75	8,71	-1,99
J	Informasi dan Komunikasi	8,15	2,00	4,96	6,43	11,54	19,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	1,21	5,10	2,83	8,14	13,32
L	Real Estate	9,46	9,00	8,69	8,34	8,01	-3,05
M,N	Jasa Perusahaan	8,74	3,25	4,87	5,84	7,24	-11,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,03	7,62	6,71	8,47	5,60	-2,02
P	Jasa Pendidikan	6,21	6,63	7,97	7,76	8,24	5,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,98	8,70	8,29	8,87	8,12	11,95
R,S,T, U	Jasa lainnya	9,82	7,56	7,49	7,57	8,70	-1,01
	<b>PDRB</b>	<b>6,53</b>	<b>6,54</b>	<b>6,56</b>	<b>6,59</b>	<b>5,81</b>	<b>-3,25</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS, diolah  
\* angka sementara \*\* angka sangat sementara

9/4



**Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020**



Sumber: - BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021, diolah  
- BPS RI, 2021, diolah

Data LPE Kabupaten Katingan pada selama 6 (enam) tahun terakhir umumnya paling tinggi atau kedua lebih tinggi bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Katingan mengalami kontraksi hingga 3,25 persen, yang berarti jauh lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Kontraksi perekonomian nasional, provinsi dan Kabupaten Katingan merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020.

**2.2.2. Laju Inflasi**

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Katingan, khususnya di Kota Kasongan dipengaruhi oleh harga produk konsumsi dan komoditas di Kota Palangka Raya dan Sampit. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dan Sampit dalam kurun waktu 2015-2020 mengalami fluktuasi.

**Tabel 2.19**  
**Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2015-2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Palangka Raya	4,20	1,91	3,11	3,68	2,70	0,85
Inflasi Kota Sampit	5,72	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62
Inflasi Prov. Kalteng	4,47	2,11	3,18	4,25	2,45	1,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

12/4



2.2.3. PDRB Per kapita

PDRB Perkapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun waktu 2015-2019 PDRB perkapita Kabupaten Katingan, baik dengan ADHB atau ADHK mengalami peningkatan. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 34,19 juta dan 24,89 juta meningkat di tahun 2019 menjadi 48,5 juta dan 30,1 juta. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 48,2 juta dan 28,7 juta. Jika diamati lebih jauh, pertumbuhan PDRB perkapita Katingan selalu positif setiap tahun sampai tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus bertambah setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.20  
PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

No	PDRB Perkapita	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	ADHB (juta Rp.)	34,19	37,63	41,17	44,9	48,5	48,2
2	ADHK (juta Rp.)	24,89	26,11	27,41	28,8	30,1	28,7

Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

2.2.4. Indeks Gini

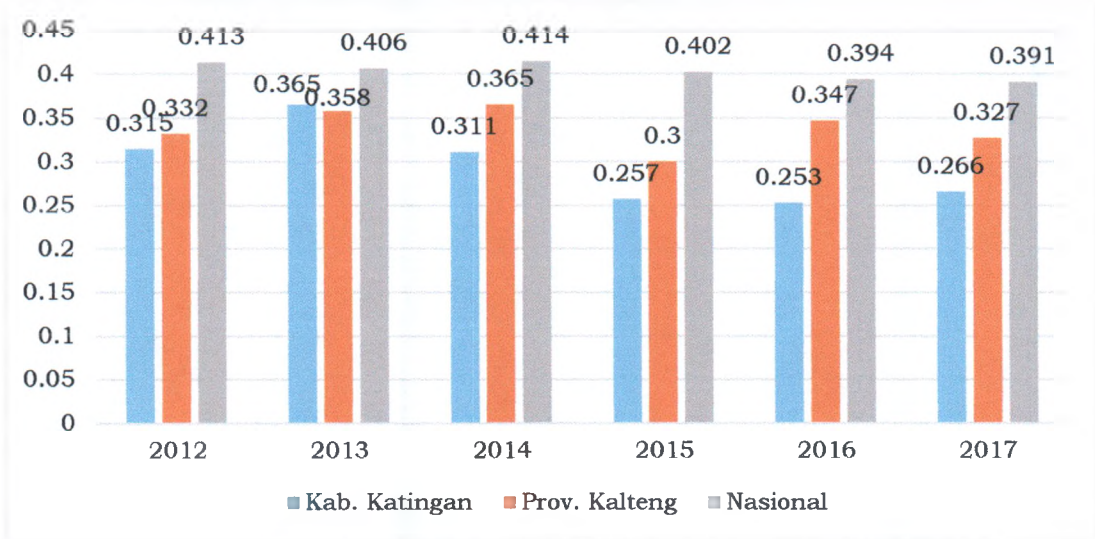
Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Indeks Gini Kabupaten Katingan mulai tahun 2012-2017 masuk kategori ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,4. Perkembangan Indeks Gini Katingan pada periode 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Posisi indeks gini Kabupaten Katingan selalu berada di bawah provinsi dan nasional. Bahkan di Tahun 2016 angka gini ratio Katingan sebesar 0,253 adalah yang terendah se-Kalimantan Tengah. Kemudian di tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,266. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Katingan semakin merata (ketimpangan rendah) karena setiap golongan penduduknya menerima bagian pendapatan yang hampir sama.

Handwritten signature and date: 19/7/19





**Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017**



Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Dalam Angka 2013-2017, BPS Katingan 2018

**2.2.5. Persentase Penduduk Miskin**

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2015-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 10.410 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,53%. Selama beberapa tahun (2015-2020), baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Katingan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 menurun menjadi 8.239 jiwa. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,79%.

Selain jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang penting tetap dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Tabel 2.21**  
**Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	10.410	10.100	9.510	8,730	8.510	8.230
2	Garis Kemiskinan (Rp)	356.695	387.848	412.113	420.418	434.609	474.056

Handwritten signature and date: 19/1/24



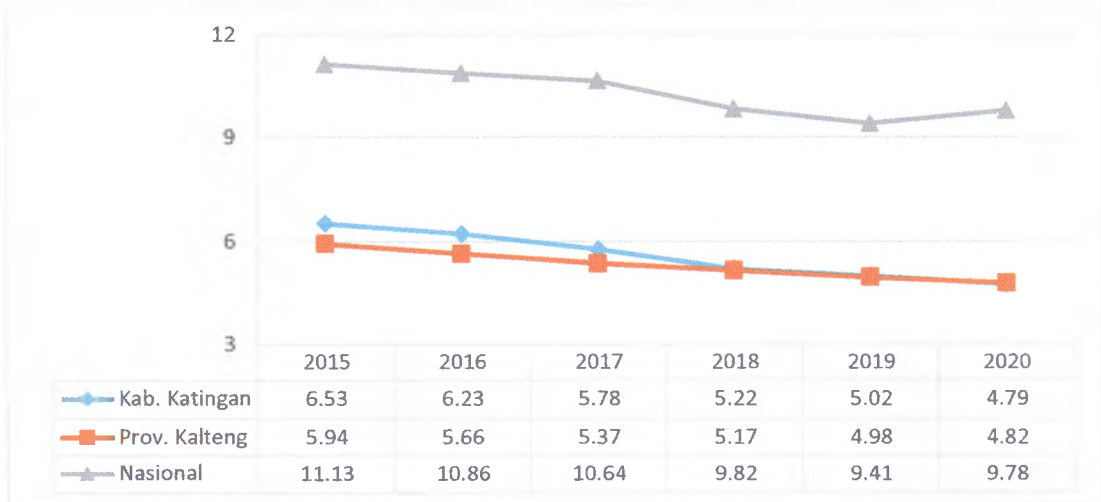
No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,53	6,23	5,78	5,22	5,02	4,79
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,97	0,85	0,92	0,54	0,94	0,51
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,19	0,27	0,09	0,30	0,09

Sumber: Potret Kemiskinan Prov. Kalteng, BPS Provinsi Kalteng, 2018, diolah dan Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021

Data menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai 2020 mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2020 berada pada 0,51 yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,94. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan, selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 indeks keparahan kemiskinan juga mengalami fluktuasi. Data Tahun 2020 menunjukkan angka 0,09 yang menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,30. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat mengalami penurunan, sebab semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan ini juga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Katingan berada diatas. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang berada di angka 9,78% pada tahun 2020, maka persentase penduduk miskin Katingan jauh lebih rendah (5,79%).

Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Provinsi Kalteng, 2021, diolah

9/14





2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.22  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan  
Tahun 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IPM (%)	66,81	67,41	67,56	67,91	68,55	68,68
Provinsi	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05
Naional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,67
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,03	12,19	12,20	12,21	12,51	12,67
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,28	65,40	65,53	66,00	66,50	66,50
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	9.599	9.960	10.276			

Sumber: IPM Prov Kalteng 2017, BPS Prov. Kalteng, 2018, diolah, dan Katingan Dalam Angka Tahun 2021

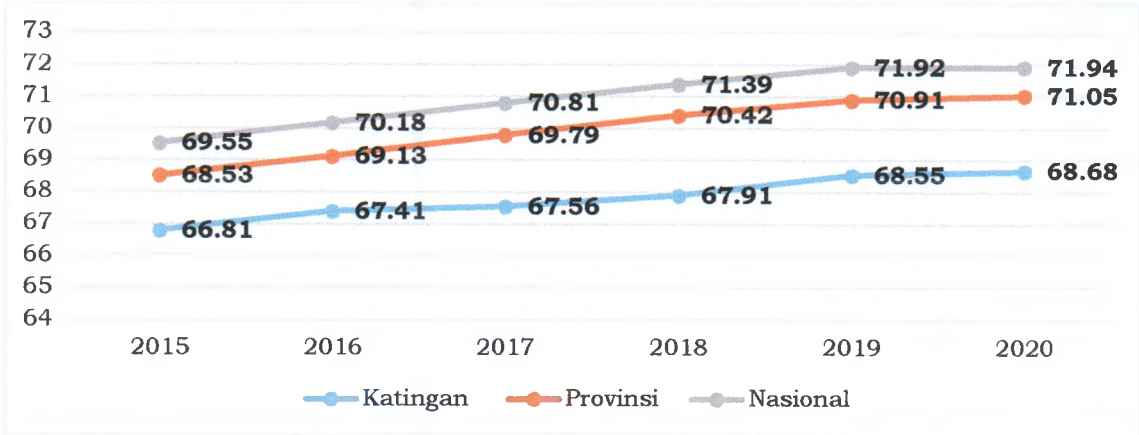
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Katingan selama periode 2015-2020 masih berada dalam kategori sedang ( $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ ) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} \leq 80$ ) atau sangat tinggi ( $\text{IPM} > 80$ ). Di tingkat Provinsi pada periode 2015-2016, IPM Kabupaten Katingan berada pada urutan ke 9, sedangkan pada periode 2017-2020 berada pada urutan ke 10. kondisi menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Meski trend IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun posisinya masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2020, IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 71,05 dan IPM Nasional sebesar 71,94. Walau demikian, berdasarkan gambar dibawah terlihat bahwa

Handwritten signature and date: 9/1/19



Kabupaten Katingan mengikuti trend peningkatan IPM dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber: IPM Prov Kalteng 2020, BPS, diolah

2.2.7. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan.

Pada tahun 2015 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Katingan adalah 99,61 persen dan mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 99,29 persen. Di tahun 2019 meningkat Kembali menjadi 99,68 persen namun di tahun 2020 kembali menurun menjadi 99,20 persen.

Tabel 2.23  
Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2015-2020

Tahun	Angka Melek Huruf
2015	99,61
2016	99,50
2017	99,49
2018	99,29
2019	99,68
2020	99,20

Sumber: Katingan Dalam Angka Tahun, 2021

2.2.8. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang



pernah diduduki seseorang. Secara umum Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan selalu meningkat selama periode tahun 2015-2020. Angka Harapan Lama Sekolah di Tahun 2015 sebesar 12,03 tahun dan selalu meningkat sampai tahun 2020 menjadi 12,67 tahun. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah di tahun 2015 8,62 tahun meningkat terus menjadi 8,67 tahun di tahun 2020. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Berikut data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2015-2020.

**Tabel 2.24**  
**Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HLS (tahun)	12,03	12,19	12,20	12,21	12,51	12,67
RLS (tahun)	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,67

Sumber: IPM Prov Kalteng 2017, BPS Prov. Kalteng, 2018, diolah

**2.2.9. Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2015 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 65,28 terus meningkat sampai tahun 2020 yaitu 66,50. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup, mencapai usia 66-67 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	65,28	65,40	65,53	66,00	66,50	66,50

Sumber: IPM Prov Kalteng 2017, BPS Prov. Kalteng, 2018, diolah dan Katingan Dalam Angka ,2021

**2.2.10. Persentase Balita Gizi Buruk**

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan status gizi dilihat berdasarkan indeks berat badan menurut umur. Pada Tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk

Handwritten signature and date: 9/1/24



mencapai angka 1,81, mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 3,15 dan mengalami penurunan sampai tahun 2020 pada angka 0,14. Keseluruhan temuan Balita dalam kondisi gizi buruk telah ditangani dan mendapat perawatan sedini mungkin di Puskesmas maupun RSUD Mas Amsyar Kasongan. Adapun perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	1,81	3,15	2,54	3,45	2,00	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

**2.2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara penghitungan, IPG merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Dengan menggunakan angka IPG, dapat diketahui perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

**Tabel 2.27**  
**Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	60,79	n.a	85,51	85,70	85,57	85,56
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,78	n.a	66,87	73,32	66,57	66,41

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017, Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data sepanjang Tahun 2015 sampai dengan 2020, diketahui bahwa IPG di Kabupaten Katingan mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender semakin lama semakin kecil. Pada tahun 2015 angka IPG sebesar 60,79 meningkat sampai tahun 2018 menjadi 85,70 dan kembali menurun sampai tahun 2020 menjadi 85,56. Sementara IDG pada periode yang sama menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dimana pada

Handwritten signature and date: 9/1/21





Tahun 2015 sebesar 84,78 menurun di tahun 2017 menjadi 66,87, namun di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 73,32 dan Kembali menurun di tahun 2020 menjadi 66,41. Penurunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

2.2.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf "U" terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan  
Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016*	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	72,20	n/a	65,97	69,49	70,79	64,55

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018 dan 2021, BPS Katingan, 2018

\* data tahun 2016 tidak tersedia sampai level kabupaten karena sampel tidak mencukupi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 72,20 persen, menurun di tahun 2017 menjadi 65,97 persen, dan meningkat Kembali sampai tahun 2019 menjadi 70,79 persen. Namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 64,55 persen.

2.2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan persentase rasio jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja (15-64) tahun. Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dilihat dari tahun 2020 penduduk Kabupaten Katingan yang tercatat sebagai pengangguran terbuka berjumlah 4.677 orang atau 5,69 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 4.693 orang atau 5,45% dari total jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten

h  
9x12



Katingan. Selengkapnya angka pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupten Katingan sebagai berikut:

**Tabel 2.29**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2020**

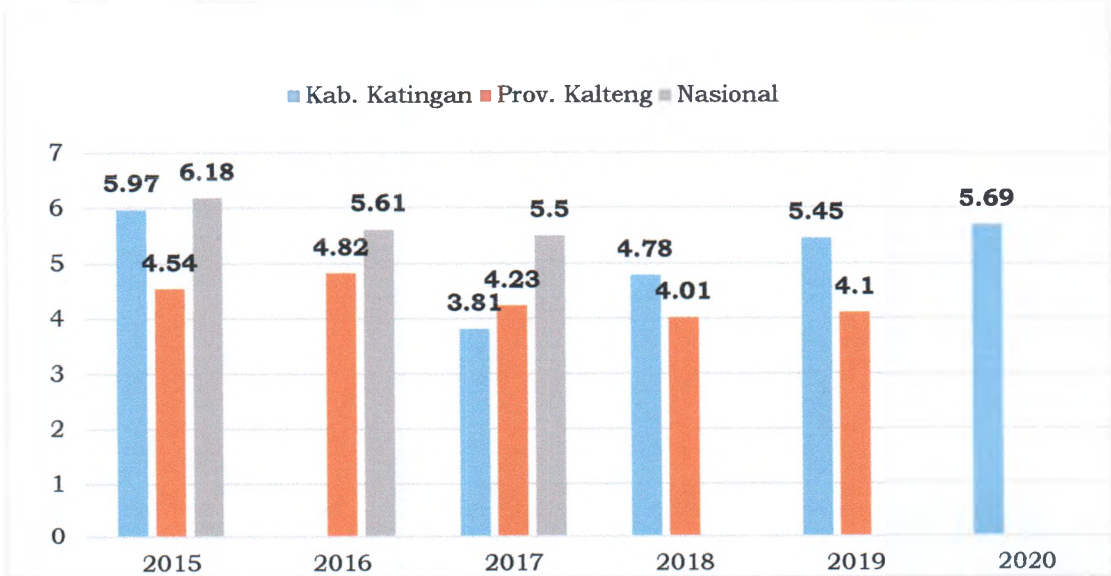
No.	Jenis Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>81.174</b>	<b>n/a</b>	<b>77.142</b>	<b>82.596</b>	<b>86.166</b>	<b>82.135</b>
1	Bekerja	76.325	n/a	74.200	78.644	81.473	77.458
2	Pengangguran Terbuka	4.849	n/a	2.942	3.952	4.693	4.677
<b>B.</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>31.250</b>	<b>n/a</b>	<b>39.801</b>	<b>36.257</b>	<b>35.561</b>	<b>45.102</b>
1	Sekolah	8.988	n/a	10.660	8.617	7.678	9.854
2	Mengurus rumah tangga	19.839	n/a	25.156	24.825	24.867	27.806
3	Lainnya	2.423	n/a	3.985	2.815	3.016	7.442
<b>Jumlah</b>		<b>112.424</b>	<b>n/a</b>	<b>116.943</b>	<b>118.853</b>	<b>121.727</b>	<b>127.237</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>		<b>5,97</b>	<b>n/a</b>	<b>3,81</b>	<b>4,78</b>	<b>5,45</b>	<b>5,69</b>

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2021

\* data tahun 2016 tidak tersedia sampai level kabupaten karena sampel tidak mencukupi

Perkembangan indikator tingkat pengangguran terbuka Katingan pada tahun 2015 menunjukkan posisi masih di atas, apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan mengalami penurunan yang menggembirakan hingga menjadi 3,81 persen dan berada dibawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional masing-masing sebesar 4,23 persen dan 5,5 persen.

**Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS RI dan BPS Kabupaten Katingan, 2021, diolah

Handwritten signature and date: 19/1/24





2.2.14. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama menyukkseskan program dimaksud, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokkan kepada 5 (lima) tahapan keluarga, yaitu : Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah Keluarga Prasejahtera, I, II, III dan III Plus tahun 2012 sebanyak 40.190 keluarga dan pada tahun 2016 menurun menjadi 33.554 keluarga. Pada data terlihat perubahan drastis terjadi pada kelompok Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang terus meningkat hingga tahun 2016. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya Keluarga Prasejahtera telah beralih menjadi Keluarga Sejahtera I. Namun yang perlu diwaspadai adalah kondisi bertambahnya jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I ini tidak baik bila berlangsung cukup lama. Perlu diupayakan berbagai cara untuk menggeser ke arah kategori Keluarga Sejahtera II bahkan hingga ke kategori Keluarga Sejahtera III Plus.

Tabel 2.30  
Keluarga Prasejahtera I, II, III dan III Plus  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Keluarga Prasejahtera	2.108	2.108	2.184	1.284	1.284	1.499
Keluarga Sejahtera I	14.261	14.261	14.261	16.373	16.373	16.301
Keluarga Sejahtera II	17.185	17.185	17.185	18.521	18.521	18.251
Keluarga Sejahtera III	-	-	-	-	-	-
Keluarga Sejahtera III Plus	-	-	-	-	-	-
Jumlah Keluarga	33.554	33.554	33.630	36.178	36.178	36.051
Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	49	49	16.445	17.657	17.657	17.800

Sumber: DP3AP2KB Kab.Katingan, 2021

2.2.15. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propenas), perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

h  
9/14





pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selama ini Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dalam peraturan ini, terdapat 9 unsur IKM yang dijadikan pengukur tingkat kepuasan masyarakat, yakni (1) persyaratan; (2) prosedur; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/taruf; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) maklumat pelaksana; dan (9) penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama ini pelaksanaan survey IKM di Kabupaten Katingan hanya pada dua instansi saja, yaitu RSUD Mas Amsyar Kasongan dan Dinas Dukcapil sedang di perangkat daerah lain yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat belum terlaksana seperti pada Dinas Penanaman Modal PTSP, Puskemas dan Kecamatan/Keluarahan. Salah satu kendalanya adalah jumlah responden yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 sebanyak minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan tidak terpenuhi.

**Tabel 2.31**  
**Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Uraian	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Nilai IKM	Target	Nilai IKM
Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Poin	76,88	79,78	78,09	80,82

Sumber: Lakip dan Lkip Kabupaten Katingan, diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator kinerja Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik merupakan gabungan penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan yang telah dikumpulkan secara mandiri oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Mas Amsyar Kasongan.

Jika dibandingkan dengan target di tahun 2019 dan tahun 2020 maka lebih tinggi 2,90 poin dan 2,73 poin dari target yang ditetapkan. Terpenuhinya

14

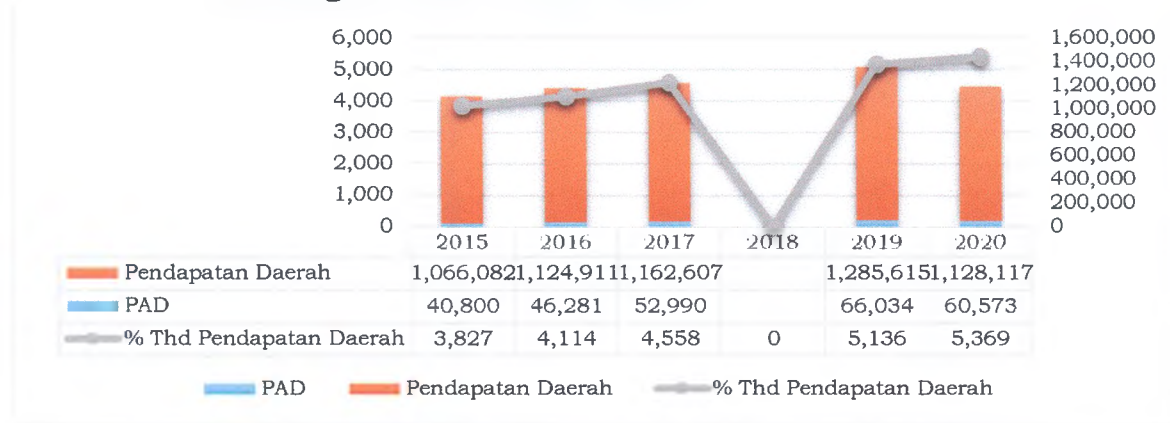


target Indikator ini karena di beberapa Perangkat Daerah antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Mas Amsyar Kasongan telah melakukan terobosan serta inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga dapat membuat penilaian kepuasan masyarakat meningkat. Inovasi layanan pada tahun-tahun selanjutnya akan terus ditingkatkan sehingga target SPM dan target Indikator Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik akan tercapai bahkan dapat melampaui dari target.

2.2.16. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan kontribusi PAD periode tahun 2015-2020.

Gambar 2.11 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020



Sumber: BPKAD dan LKIP dan Lakip Kabupaten Katingan, 2015-2020, diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan masih sangat kecil. Presentase PAD tertinggi ada di tahun anggaran 2020 yang mencapai 5,369%, walaupun di tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan.

2.2.17. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Kesimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, dengan

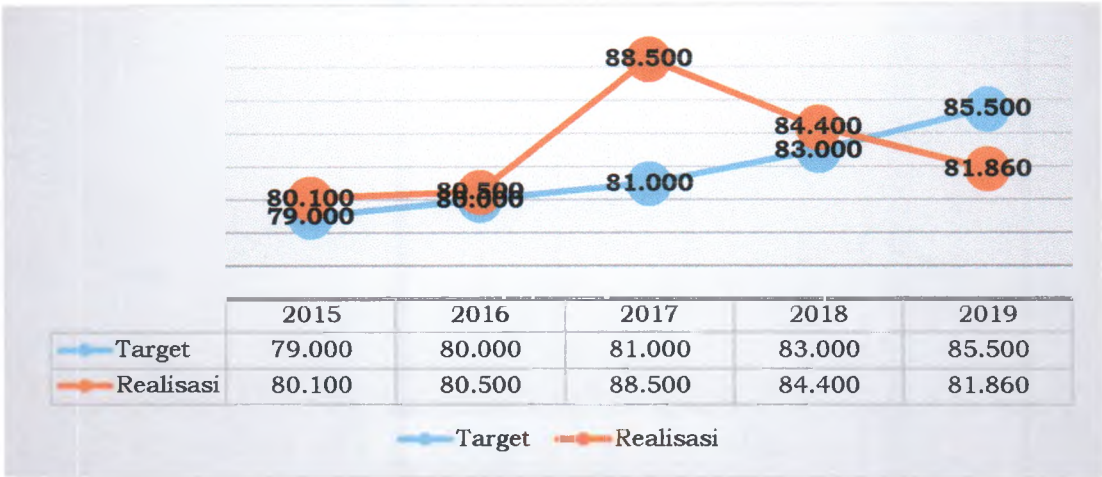
Handwritten signature and initials.





demikian PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan dan keanekaragaman pangan. Dengan terpenuhi kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi. Oleh karena itu, skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan dan seimbang. Adapun yang dimaksud dengan nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

**Gambar 2.12 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019**



Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Katingan, 2018 diolah dan BPS Kabupaten Katingan, diolah

**2.2.18. Opini BPK**

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 2015-2020 dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.32**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kabupaten Katingan, 2018, BPS Kabupaten Katingan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan prestasi yang baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat Kembali menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Handwritten signature and date: 19/1/24

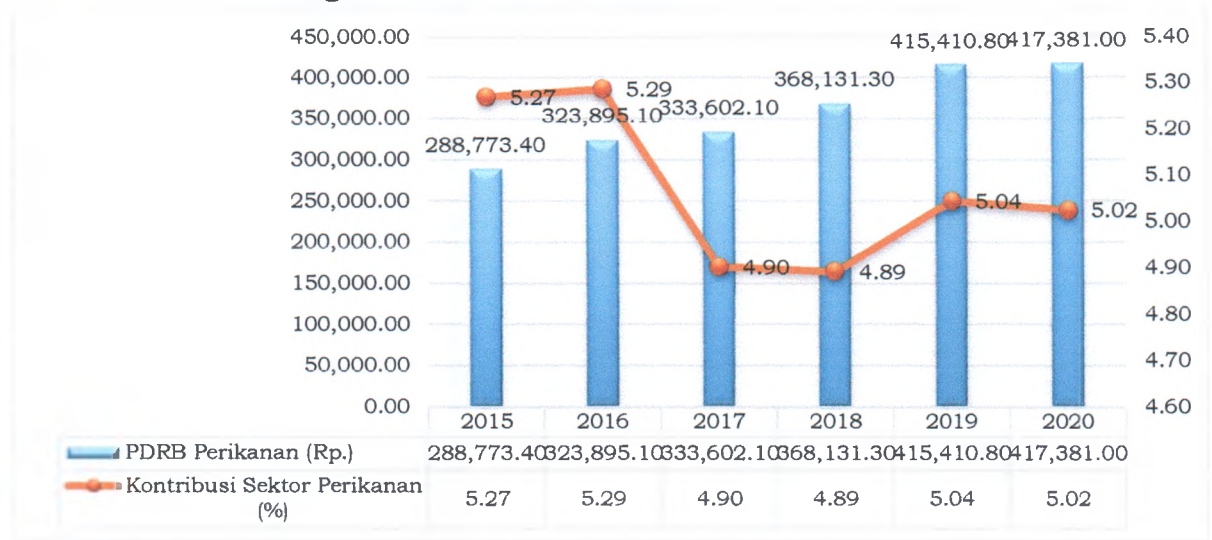




2.2.19. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komponen dari sektor pertanian dalam arti luas yang memberikan yang mempunyai potensi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di miiki oleh Kabupaten Katingan yang memberikan banyak peluang usaha bagi masyarakat di hampir semua wilayah di Kabupaten Katingan. Selain itu, disektor perikanan ada pula potensi besar yang sudah berkembang yaitu budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besarnya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum pada enam tahun terakhir ini justru mengalami penurunan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,27% di tahun 2015 menjadi 5,02% di tahun 2020. Namun demikian, ada peningkatan nilai PDRB sektor perikanan sepanjang enam tahun terakhir, yakni dari Rp.288.773 juta menjadi Rp.417.381 juta di tahun 2020. Berikut grafis peran sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2015-2020:

Gambar 2.13 Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

2.2.20. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB adalah sektor yang paling besar kontribusinya terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Katingan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kelima sub sektor ini membuka lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Katingan.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2015 sebesar 27,91 persen, namun sejak tahun 2016 mengalami pelambatan dan terus menurun sampai 25,82 persen pada tahun 2019. Di tahun 2020 meningkat menjadi 26,87 persen, namun walaupun kontribusi lapangan usaha ini cenderung menurun, hingga tahun 2020,

Handwritten signature and date: 9/1/24



Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Katingan. Kontribusinya terhadap PDRB Katingan tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 2,2 triliun rupiah atau sebesar 26,87 persen.

**Tabel 2.33**  
**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	28,57	27,91	26,56	25,88	25,82	26,87
Laju Pertumbuhan (%)	4,75	6,14	3,21	6,31	7,21	-2,19

Sumber: - PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

- PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, kategori ini mengalami pertumbuhan negatif 2,19 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang pertumbuhan -0,61 persen, dari pertumbuhan PDRB di Kabupaten Katingan sebesar -3,25 persen.

#### 2.2.21. Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha terdiri atas 5 (lima) subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan masih berusaha di sektor pertanian dalam arti luas, selebihnya terdistribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Selain didukung oleh ketersediaan lahan yang luas, potensi pada sektor pertanian di Kabupaten Katingan masih memiliki peluang besar untuk lebih dikembangkan guna menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Peningkatan pengelolaan potensi di sektor pertanian tentunya sangat penting untuk diupayakan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa produktivitas tanaman pangan utama berupa padi di Kabupaten Katingan dalam beberapa tahun terakhir (2015-2020) rata-rata menghasilkan produksi 3,2 ton per hektarnya. Khusus untuk produktivitas pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelum dari 3,34 ton menjadi 3,06 ton, dimana angka ini jauh dari target daerah sebesar 3,35 ton per hektarnya. Menurunnya produksi di sektor pertanian ini, hendaknya menjadi perhatian bagi berbagai pihak mengingat potensi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan berupa ketersediaan lahan dan tenaga kerja sangatlah besar. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pengayaan bibit unggul dan penggunaan teknologi pertanian baik untuk pengolahan lahan maupun pemupukan.

9/14





Tabel 2.34  
Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

Uraian / Jenis Komoditi	Tahun Produksi					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Produksi Sektor Pertanian</b>						
<b>1. Produksi Tanaman Pangan</b>						
a. Padi (ton)	68.875	65.634	64.216	43.814	44.597	48.573
1) Padi Sawah (Ton)	53.231	47.880	52.011	39.246	38.845	42.915
2) Padi Ladang (Ton)	15.644	16.476	12.205	4.568	7.752	5.658
b. Jagung (ton)	72	119	133	362	93	82
c. Kedelai (ton)	6	2	2	9	4	-
d. Kacang Tanah (Ton)	17	12	2	15	21	21
e. Kacang Hijau (Ton)	3	2	1	1	-	4
f. Ubi kayu (ton)	2.053	1.844	1.774	2.649	2.653	2.518
g. Ubi jalar (ton)	437	292	143	286	196	191
<b>2. Produksi Tanaman Holtikultura</b>						
a. Bawang merah (kw)	-	6	14	90	-	6
b. Cabe Besar (kw)	43	55	77	50,00	5,50	-
c. Cabe Rawit (kw)	418	671	914	500,00	78,50	1.079
d. Durian(kw)	3.342	2.688	1.088	9.936	18.437	5.303
e. Mangga (kw)	1.085	797	506	605	1.958	651
f. Pisang (ton)	11.837	9.053	10.514	772,00	5.514	10.310
g. Sayur-sayuran (kw)	335	340	5.331,0	5.528	4.375	6.261
h. Buah-buah lainnya (kw)	2.683	2.763	21.396	43.991	37.087	31.514
<b>Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)</b>	<b>20.802</b>	<b>20.865,50</b>	<b>20.551</b>	<b>12.494,0</b>	<b>16.318,0</b>	<b>17.742</b>
<b>Produktivitas tanaman padi (ton/ha)</b>	<b>3,34</b>	<b>20,986</b>	<b>31,30</b>	<b>35,07</b>	<b>31,87</b>	<b>31,85</b>
<b>B. Produksi Sektor Perkebunan</b>						
1.Sawit (ton)	1.702	11.307,75	11.307,8	11.646,98	15.646,98	15.742,87
2.Karet (ton)	5.632	2.299,05	2.647,3	2.687,37	2.677,37	2.776,90
3.Kelapa (ton)	1.712	166,32	166,3	166,64	166,64	167,32
4.Kopi (ton)	9,72	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31
<b>Luas Areal Tanaman Perkebunan (ha)</b>						
1.Sawit (ha)	3.359,00	16.380,50	16.903,00	16,861,13	16,861,13	16,893,16
2.Karet (ha)	18.385,70	19.193,11	19.193,10	19.279,27	19.229,27	19.285,00
3.Kelapa (ha)	3.557,05	491,12	491,12	488,43	488,43	457,88
4.Kopi (ha)	33	16	15,94	40,91	60,91	57
<b>Produktivitas sawit (ton/ha)</b>	<b>5,07</b>	<b>6,90</b>	<b>6,69</b>	<b>6,91</b>	<b>9,28</b>	<b>9,32</b>
<b>Produktivitas karet (ton/ha)</b>	<b>6,72</b>	<b>2,50</b>	<b>1,38</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>	<b>1,44</b>

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, 2021

Untuk sektor perkebunan kondisinya juga tidak berbeda jauh. Produktivitas komoditas sawit terus mengalami peningkatan dari 5,07 ton/ha (tahun 2015) menjadi 9,32 ton/ha (tahun 2020). Sedangkan produktivitas karet mengalami penurunan dari 6,72 ton/ha (tahun 2015) menjadi 1,38 ton/ha (tahun 2017), dan mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 1,44 ton/ha (tahun 2020).

Handwritten signature and date: 9/4/24

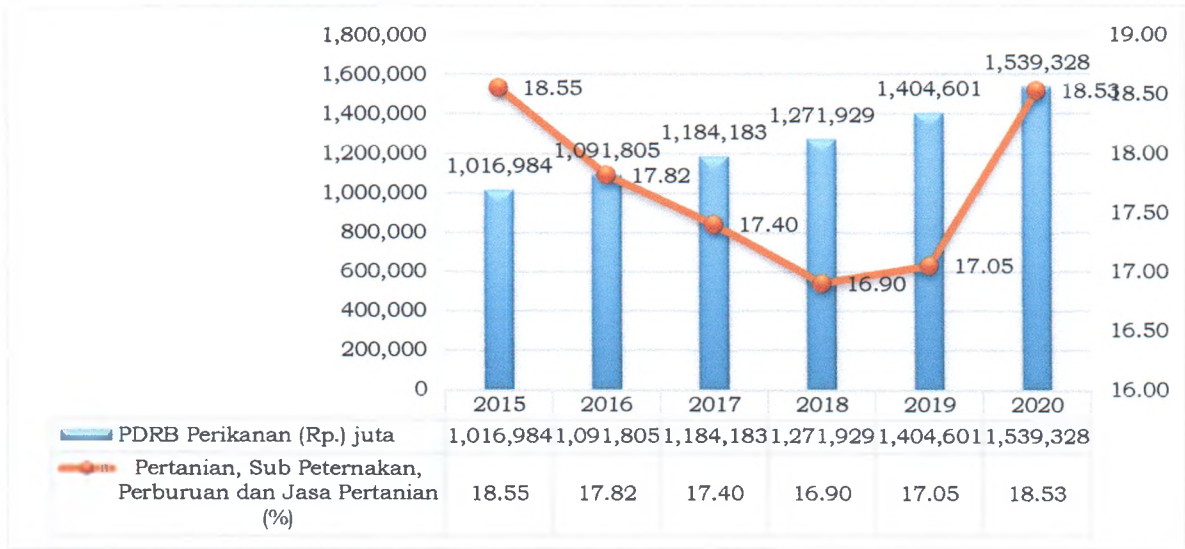




2.2.22. Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB

Sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian merupakan bagian dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori lapangan usaha ini menjadi salah satu tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Namun dalam 6 (enam) tahun terakhir, sub sektor ini pertumbuhannya mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Meski sumbangan bagi PDRB Kabupaten katingan mengalami peningkatan pertahunnya, namun sumbangannya terhadap pertumbuhan daerah justru mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 17,82%, selanjutnya terus menurun sampai pada tahun 2018 menjadi 16,90% dan meningkat kembali sampai tahun 2020 menjadi 18,53%.

Gambar 2.14 Peranan Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah.

Adapun PDRB dari sub sektor tanaman pertanian perkebunan di tahun 2020 sebesar Rp.1.539.328,2 juta mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp.1.016.984,2 juta Berikut grafis perkembangan kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2015–2020.

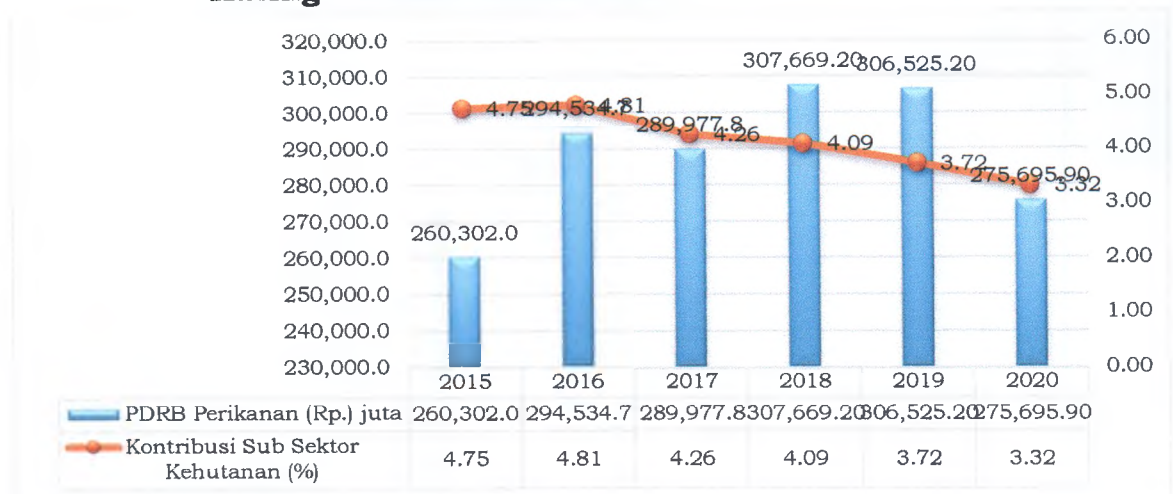
2.2.23. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Potensi pada Sub sektor kehutanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2020, penerimaan daerah dari sektor kehutanan terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Dana Hibah,dan IIUPH sebesar Rp.275.695,90 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 260.302 juta. Berikut gambaran kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2015–2020:

kr  
9/10



**Gambar 2.15 Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan PDRB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari Rp.260.302 di tahun 2015 menjadi Rp.275.695 di tahun 2020. Tetapi secara umum besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir ini justru mengalami perlambatan dari angka 4,75% di tahun 2015 menjadi 3,32% di tahun 2020. Artinya peran sub sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi juga semakin menurun berbanding lurus dengan hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perijinan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Katingan karena sejak tahun 2017 diambil alih oleh pemerintah provinsi.

#### 2.2.24. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

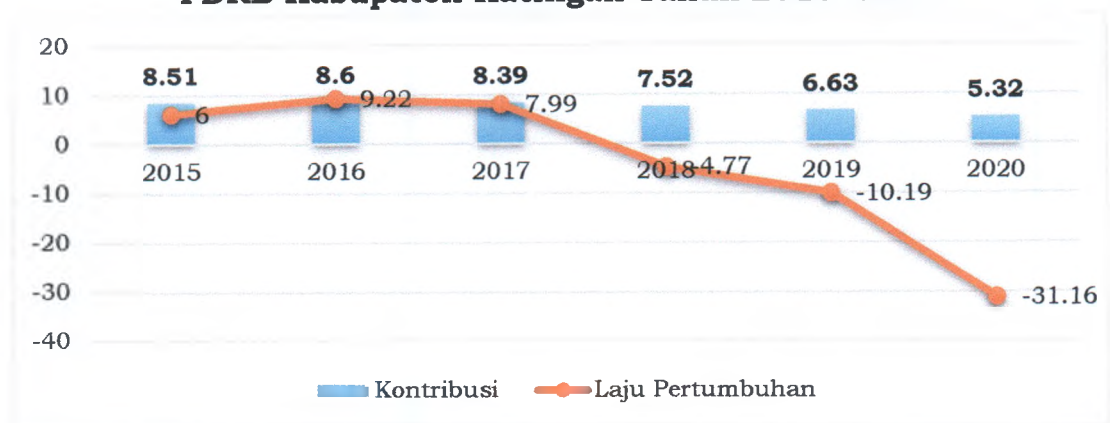
Terkait dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan kabupaten dalam bidang pertambangan semakin berkurang dan hanya sebatas pengelolaan panas bumi, selebihnya di serahkan ke pemerintah pusat dan provinsi. Demikian pula dengan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Katingan, juga semakin berkurang dari 8,51% di tahun 2015 menjadi sebesar 5,32% di tahun 2020.

Potensi pertambangan di Kabupaten Katingan yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ada di sub sektor pertambangan bijih logam dengan rata sumbangannya sebesar 4,57 – 7,79% dalam periode 2015-2020.

Handwritten signature and date: 19/1/24



**Gambar 2.16 Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**



Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 dan BPS Kab. Katingan

#### 2.2.25. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

Peningkatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan berbanding lurus dengan kenaikan sumbangan sektor perdagangan dalam periode lima tahun terakhir ini. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat dan lapangan usaha yang dihasilkan oleh sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dengan munculnya banyak pusat-pusat perdagangan besar maupun eceran di beberapa kecamatan sebagai dampak dari semakin membaiknya iklim investasi di Kabupaten Katingan. Selain itu, semakin membaiknya infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh Pemkab Katingan sehingga mampu membuka jalur perhubungan antar kecamatan di Kabupaten Katingan menjadi salah satu faktor meningkatkan peran sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam lima tahun terakhir ini. Peningkatan ini terlihat dari nilai kontribusi maupun laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Berikut grafis pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan kontribusinya terhadap lapangan usaha di Kabupaten Katingan.

*Handwritten signature and initials*





**Gambar 2.17 Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

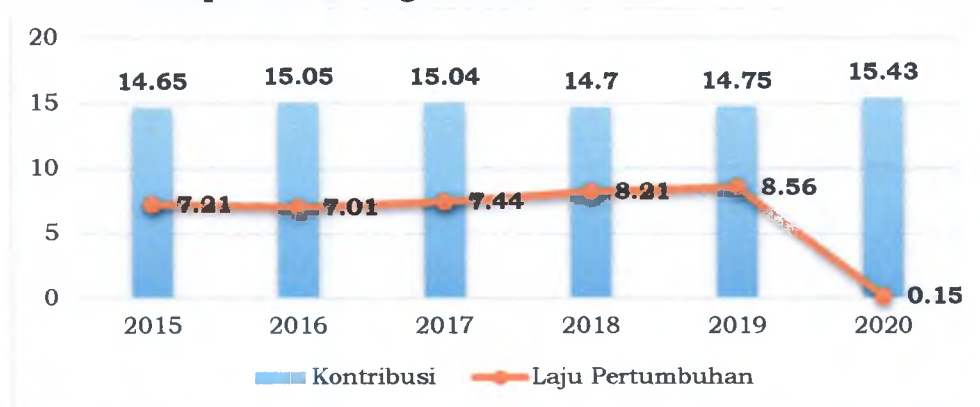


Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, BPS Kab. Katingan

#### 2.2.26. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam lima tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan dan memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan. Kontribusi PDRB sektor industri tahun 2015 adalah 14,65 %, mengalami peningkatan menjadi 15,05 % di tahun 2016 dan mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 14,7 %. Namun mengalami peningkatan kembali sampai tahun 2020 menjadi 15,43 %. Jenis industri yang meningkat di Kabupaten Katingan salah satunya adalah industri pengolahan kelapa sawit atau CPO. Peningkatan peran industri pengolahan sawit ini menunjukkan bahwa lapangan usaha yang muncul dari dampak semakin perkembangan usaha perkebunan kepala sawit di Kabupaten Katingan mampu memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut gambaran perkembangan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan periode 2015-2020:

**Gambar 2.18 Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**



Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, BPS Kab. Katingan

Handwritten signature and initials.



2.2.27. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB

Peranan sektor pariwisata berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pajak dan retribusi daerah, serta menciptakan lapangan kerja apabila dikelola dengan baik. Di Kabupaten Katingan, potensi dari sektor pariwisata belum dikelola secara baik dan optimal, sehingga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah masih kecil. BPS Kabupaten Katingan hingga tahun 2017 belum pernah merilis data penerimaan PDRB dari sektor ini. Namun kedepannya, melihat peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ukuran berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah dilihat melalui peningkatan jumlah pengunjung, pajak maupun retribusi daerah, maupun penggunaan jasa transportasi.

Pendekatan dalam menentukan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, untuk sementara digantikan/dilihat melalui jumlah realisasi PAD dari kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Katingan yang tercatat hanya pada obyek tertentu, seperti obyek wisata Bukit Batu-Kasongan yang dihitung dari jumlah tiket masuk yang terjual. Untuk wisawatan mancanegara sampai saat ini belum ada data terkait jumlah pengeluaran wisatawan, lama tinggal, dan sumbangan bagi PAD.

Tabel 2.35  
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD dan Jumlah Kunjungan  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah devisa sektor pariwisata (ribuan Rp.)	94.817	80.055	89.148	141.417	127.798	43.380
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	34.788	32.906	40.633	32.405	36.310	11.821
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	42	58	113	211	26	5

Sumber: Disbudparpora, 2021 dan BPS Kabupaten Katingan

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Katingan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

Handwritten signature and initials.



2.3.1.1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2.36  
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	118,75	109,59	108,01	118,86	115,44	114,1
APK SMP/MTS	98,13	98,17	98,65	89,58	77,73	78,27
APK SMA/MA/SMK	71,48	73,91	85,43	79,22	111,76	109,2

Sumber: diakses dari <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>, 2018, Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Kabupaten Katingan angka partisipasi kasar yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI, yaitu 7-12 tahun dengan APK di atas 115,44 persen pada tahun 2019 dan diikuti APK SMA/MA/SMK di atas 111,76 persen.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun tertentu terjadi peningkatan dan penurunan.

Tabel 2.37  
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI	92,66	94,2	93,24	100	99,87	99,85
APM SMP/MTS	72,89	69,89	71,18	76,28	76,05	75,98
APM SMA/MA/SMK	54,84	52,84	55,95	64,62	67,03	67,62

Sumber: diakses dari <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>, 2018, Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2021

kr





Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa APM SD/MI pada periode 2015 sampai dengan 2019 pada umumnya mengalami berkisar pada angka 92-100 persen. Selanjutnya untuk APM SMP/MTs pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami fluktuasi, dimana APM SMP/MTS masih dibawah angka 76 persen. Begitu pula perkembangan APM SMA dan sederajat yang masih menunjukkan angka masih dibawah 67 persen.

**c. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.38**  
**Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2020**

N O	Uraian (%)	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	100	100	100	100	99,8 8	99,8 5
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	93,9 2	96,3 8	97,6 4	97,6 4	95,6 7	96,7 6
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	72,3 6	72,8 9	74,0 4	74,0 4	69,9 1	69,6 3
4	Perguruan Tinggi	14,6 0	16,0 4	13,0 1	13,0 1	22,1 9	23,6 5

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2015-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD, usia SLTP, usia SLTA, dan usia Perguruan Tinggi. Di Kabupaten Katingan RKPD Kabupten Katingan Tahun 2021 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-35 pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS diatas 99,88%, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Kabupaten Katingan yaitu usia 19-24 tahun atau perguruan tinggi yaitu sebesar 22,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2019 jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Katingan secara persentase mengalami kenaikan.

**d. Angka Kelulusan**

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di

Handwritten signature and date: 9/1/24



sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka kelulusan yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**  
**Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019**

NO	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	104,75	104,75	100,00	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,6	120,51	120,51	102,50	98,52
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,53	103,5	103,50	-	-

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2014 – 2017, diolah dan BPS Kabupaten Katingan

Berdasarkan tabel diatas Angka Kelulusan di Kabupaten Katingan dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Katingan angka kelulusan pada setiap penjenjangan usia sekolah selalu dengan rasio mendekati maupun diatas 100 persen.

**e. Angka Melanjutkan (AM)**

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi dengan jumlah luluhan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya dikalikan 100, sedangkan Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah luluhan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dikalikan 100. Angka Melanjutkan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.40**  
**Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019**

NO	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	79,59	101,51	87	-	85,05
2	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	98,96	86,12	-	-	-

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2014-2019, diolah dan BPS Kabupaten Katingan

Berdasarkan tabel diatas, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 79,59 persen, meningkat di tahun 2016 menjadi 101,51 persen dan Kembali menurun samapi tahun 2019 menjadi 85,05 persen. Sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 98,96 persen, dan di tahun 2016 menurun menjadi 86,12 persen.

Handwritten signature and date: 19/1/24



f. **Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan**

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, selain untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41**  
**Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

NO	Tahun Ajaran	Jenjang Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015/2016	14 : 1	11 : 1	11 : 1	11 : 1
2	2016/2017	12 : 1	10 : 1	11 : 1	-
3	2017/2018	14 : 1	12 : 1	12 : 1	
4	2018/2019	15 : 1	12 : 1	12 : 1	
5	2019/2020	12 : 1	11 : 1	12 : 1	

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2016-2019 dan BPS Kabupaten Katingan

Dengan membandingkan data pada tabel di atas terhadap standar nasional rasio murid guru menurut Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 sebesar 20:1, ketersediaan guru di Kabupaten Katingan sudah sangat mencukupi secara umum. Pada tahun ajaran 2019/2020, rata-rata setiap guru SD/ sederajat bertanggung jawab untuk mengajar sekitar 12 siswa, pada jenjang SMP/ sederajat rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 11 orang siswa dan SMA/MA rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 12 orang siswa. Informasi tersebut menunjukkan bahwa beban pengajar pendidik begitu ringan sehingga menimbulkan espektasi akan capaian output kualitas pendidikan yang tinggi padahal beberapa aspek seperti kualifikasi tenaga pendidik, variasi kondisi kelas, dan pengalaman tenaga pendidik belum tercakup pada indikator tersebut.

g. **Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah jumlah guru berijazah kualifikasi D1/D-IV dibagi dengan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dikalikan 100. Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.42**  
**Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

N O	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76,4 1	81,3 4	79,8 7	77,3 6	84,8 5	22.22 0

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan, 2014-2017

9/14





Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka guru yang meemnuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2015 sebesar 76,41 persen, dan terus menurun ke 79,87 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pengalihan jumlah guru SMA dan SLB ke Pemerintah Provinsi.

2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Katingan, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

a. Angka Kematian bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari satu tahun di suatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayan perinatal. Adapun perkembangan kematian bayi di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.43  
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2015 – 2020

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kelahiran Hidup	2.892	3.452	3.094	3.298	3.379	3.244
2.	Jumlah Kematian Bayi	6	31	9	35	45	20
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	2,07	8,90	2,91	10,61	13,3	6,2

Sumber: Profile Kesehatan Kabupaten Katingan 2017 dan Kabupaten Katingan Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 sebesar 2,07, meningkat di tahun 2016 menjadi 8,90, menurun kembali di tahun 2017 menjadi 2,91 dan tahun 2019 meningkat kembali menjadi 13,32. Kemudian menurun kembali di tahun 2020 menjadi 6,2.

b. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berumur dibawah 5 (lima) tahun disuatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan, selain itu indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dalam tingkat kemiskinan penduduk. Berikut disajikan tabel Angka Kematian Balita

Handwritten signature and date: 14/4



di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan 2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.44**  
**Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2015 – 2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	3,11	12,75	8,73	10,61	5,39	0,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Balita Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 3,11 , meningkat pada tahun 2016 menjadi 12,75. Pada tahun 2017 menurun Kembali menjadi 8,73 dan meningkat Kembali menjadi 10,61. Kemudian menurun drastis di tahun 2020 menjadi 0,62.

**c. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Adapun angka kematian ibu di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.45**  
**Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2015 – 2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	449,52	144,84	96,96	121,30	207,16	93

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Ibu Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 449,52 menurun sampai tahun 2017 menjadi 96,96, namun meningkat kembali sampai tahun 2019 menjadi 207,16. Dengan upaya berbagai pihak, maka pada tahun 2020, AKI dapat ditekan turun hingga menjadi 93,00.

**d. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita**

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Adapun jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sebanyak 199 posyandu, meningkat di tahun 2016 menjadi 214 posyandu. Pada tahun 2017 posyandu mengalami penurunan menjadi 203, meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 210, pada

Handwritten signature and date: 9/1/4



tahun 2019 posyandu kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 203 dan pada tahun 2020 bertahan dengan jumlah 203.

**Tabel 2.46**  
**Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2020**

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu (unit)	199	214	203	210	203	203
2	Jumlah Balita (anak)	16.774	13.660	13.640	17.189	17.142	14.554
3	Rasio Posyandu	1,186	1,567	1,488	1,2	1,4	1,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021

**e. Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk**

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Adapun jumlah puskesmas dan puskesmas yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat jumlah puskesmas di Kabupaten Katingan berjumlah 16 Puskesmas hingga tahun 2020. Sementara jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2015 berjumlah 109 puskesmas pembantu, meningkat setiap tahun dan terakhir sebanyak 125 puskesmas pembantu di tahun 2020.

**Tabel 2.47**  
**Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas (unit)	16	16	16	16	16	16
2	Rasio Puskesmas per satuan Penduduk	0,099	0,098	0,096	0,095	0,101	0,098
3	Jumlah Puskesmas Pembantu (unit)	109	110	111	122	120	125
4	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,68	0,67	0,67	0,73	0,76	0,77
5	Jumlah Penduduk (jiwa)	160.305	162.837	165.306	167.706	157.817	162.222

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021

**f. Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit

Handwritten signature and date: 9/14





per 100.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Adapun Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.48**  
**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2	Jumlah Rumah Sakit (unit)	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	160.305	162.837	165.306	167.706	157.817	162.222

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021

Diketahui bahwa jumlah fasilitas Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 hanya berjumlah berjumlah 1 (satu) Rumah Sakit, hal ini tentunya menjadi kekurangan apabila melihat rasio ketersediaanya.

**g. Rasio dokter per satuan penduduk**

Rasio dokter per satuan penduduk adalah jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.000. Adapun Rasio dokter per satuan penduduk yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.49**  
**Rasio Dokter per Satuan Penduduk**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter (orang)	43	43	43	50	57	74
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	160.305	162.837	165.306	167.706	157.817	162.222
3	Rasio dokter per satuan penduduk	26,82	26,41	26,01	29,81	36,12	45,62

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Katingan, 2015-2018, diolah, Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2018 dan Kabupaten Katingan Dalam Angka, BPS, (2019-2020), diolah

**h. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan si satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikalikan 100. Adapun cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut.

12  
9/14

Tabel 2.50  
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	27,72	19,50	28,05	31,6	34,2	26,9
2	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	224	157	225	252	272	212
3	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan (jiwa)	808	805	802	798	795	788

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 27,72 persen, menurun pada tahun 2016 menjadi 19,20 persen, namun meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 28,05 persen. Kemudian terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi 34,2 persen, dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 26,9 persen.

i. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2015-2020 di Katingan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.51  
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Nakes (jiwa)	2.789	3.236	2.955	3.063	3.180	3.028
Jumlah seluruh ibu bersalin (jiwa)	3.858	3.843	3.828	3.808	3.801	3.938
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (persen)	72,29	84,21	77,19	80,44	83,66	80,3

Sumber: Profile Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 72,29 persen dan mengalami



fluktuasi yang cenderung meningkat sampai tahun 2020 hingga menjadi 80,3 persen.

j. **Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization***

Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* (UCI) adalah jumlah desa atau kelurahan UCI dibagi dengan jumlah seluruh desa atau kelurahan dikali 100. Adapun Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* yang ada di Kabupten Katingan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.52**  
**Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization***  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (%)	70,18	67,08	60,25	80,7	71,4	75,2
2	Jumlah desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (desa)	113	108	97	130	115	121
3	Jumlah Seluruh Desa (desa)	161	161	161	161	161	161

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa indikator cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi cenderung sedikit meningkat, kondisi ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah, sebab akan berdampak negatif bagi kondisi kesehatan masyarakat.

k. **Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan**

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama dikali 100.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar 100 persen atau dengan kata lain seluruh pasien balita gizi buruk yang ditemukan selalu diberikan perawatan yang maksimal.

**Tabel 2.53**  
**Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (%)	100	100	100	100	100	100

Handwritten signature and date: 19/1/24





No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan (anak)	2	2	3	7	5	5
3	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan (anak)	2	2	3	7	5	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

1. **Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja pada selama satu tahun berbagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.54**  
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

INDIKATOR	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	20,12	54,90	14,53	100	100	100
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja	97	56	110	129	168	90
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan di satu wilayah kerja (suspek)	482	102	757	167	198	217

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) di tahun 2015 sebesar 97 kasus dan cenderung meningkat selama kurun waktu sampai dengan tahun 2019. Namun dalam kurun waktu 5 (enam) tahun tersebut terdapat penurunan jumlah kasus sampai 56 kasus pada tahun 2016. Peningkatan kasus penderita baru TBC BTS (+) ini meningkat cukup drastis pada tahun 2019 menjadi 168 kasus. Situasi ini perlu diwaspadai dan ditangani agar tidak menjadi semakin berkembang dan menular. Upaya pengobatan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Ini terlihat dari statistis indicator perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang terus meningkat, bahkan jauh melampaui jumlah penderita baru.

m. **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah Jumlah penderita DBD yang ditanani sesuai SOP di suatu wilayah selama satu tahun berbagi dengan penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Adapun Cakupan Penemuan dan Penanganan

9x14



Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.55**  
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP (orang)	46	62	23	119	89	51
3	Jumlah penderita DBD yang ditemukan (orang)	46	62	23	119	89	51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 selalu tuntas sebanyak jumlah penderita DBD yang ditemukan.

**n. Cakupan Kunjungan Bayi**

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali 100.

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana tahun-tahun tertentu memiliki cakupan yang luas dan sempat mencapai 100 pada tahun 2018 dan 2019. Namun tak dipungkiri pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan cakupan layanan menjadi 54,62 persen akan tetapi pada tahun 2016 dan tahun 2017 mulai meningkat kembali ke atas angka 90 persen. Adapun rincian Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.56**  
**Cakupan Kunjungan Bayi**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan kunjungan bayi (%)	54,62	99,41	92,34	58,5	98,7	92,2
2	Jumlah Kunjungan Bayi (anak)	3.868	3.538	3.279	1.940	3.336	2.991
3	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup (anak)	7.082	3.559	3.551	3.298	3.379	3.244

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

**o. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dapat dilihat bahwa indikator cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan

9/14



Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 97,02 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 95,03 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 82,38 persen. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 83,70 persen. Adapun rincian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan pada periode 2015 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.57**  
**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	82,38	82,41	83,70	82,4	85,0	79,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

**p. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2013 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 93,23 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 84,1 persen, dan mengalami penurunan kembali hingga tahun 2020 menjadi 80,0 persen. Adapun rincian Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten, sebagai berikut:

**Tabel 2.58**  
**Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (%)	76,88	88,84	77,04	84,1	84,0	80,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

**q. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani**

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani pada tahun 2015 sebesar 15,68 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 36,11 persen dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 23,06 persen. Pada tahun 2018 masih mengalami penurunan hingga menjadi 2,8 persen, meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 8,3 persen, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4,5 persen.

Handwritten signature and initials.





Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 97,02 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 95,03 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 82,38 persen. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 83,70 persen. Adapun rincian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan pada periode 2015 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.57**  
**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)	82,38	82,41	83,70	82,4	85,0	79,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

**p. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2013 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 93,23 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 84,1 persen, dan mengalami penurunan kembali hingga tahun 2020 menjadi 80,0 persen. Adapun rincian Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten, sebagai berikut:

**Tabel 2.58**  
**Cakupan Pelayanan Ibu Nifas**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (%)	76,88	88,84	77,04	84,1	84,0	80,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

**q. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani**

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani pada tahun 2015 sebesar 15,68 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 36,11 persen dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 23,06 persen. Pada tahun 2018 masih mengalami penurunan hingga menjadi 2,8 persen, meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 8,3 persen, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4,5 persen.

Handwritten signature and date: 9/1/24



**Tabel 2.59**  
**Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani (%)	15,68	36,11	23,06	2,8	8,3	4,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021

**2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik**

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Panjang Jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2018 adalah 797,61 Km, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 807,59 Km. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2019 hanya 208,718 Km dalam kondisi baik. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini sedikit mengalami peningkatan. Adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2015 – 2020 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.60**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Kondisi Jalan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	123,54	125,56	146,83	161,885	208,718	215,208
Panjang Jalan Kondisi Mantap (km)	211,66	237,876	250,79	266,611	237,747	247,158
Panjang Jalan Keseluruhan (km)	740,38	784,37	794,37	797,61	807,59	808,665
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	16,69	16,01	18,48	20,30	25,84	26,61
Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap (%)	28,59	30,33	31,57	33,43	29,4	30,56

Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021

**b. Panjang Jalan dilalui Roda Empat**

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2019 yang berupa permukaan aspal sepanjang 279,941

Handwritten signature and date: 9/1/24



km dan permukaan tanah sepanjang 483,682 km. Terlihat panjang jalan yang permukaannya telah diaspal masih lebih sedikit dibandingkan dengan jalan yang permukaannya tanah.

**Tabel 2.61**  
**Panjang Jalan Yang Dapat Dilalui Roda Empat**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Permukaan Aspal (km)	223,14	234,66	256,11	272,332	279,941	285,349
2	Permukaan Tanah (km)	344,23	437,04	482,37	480,136	483,682	9,918
3	Permukaan Kerikil (km)	6,98	8,33	10,21	10,092	8,912	478,343
4	Permukaan Lainnya (km)	166,02	104,34	45,67	797,61	807,59	35,055

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018-2021

**c. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran**

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran di Kabupaten Katingan tahun 2015 sepanjang 395,94 km meningkat menjadi 536,57 km pada tahun 2017. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.62**  
**Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

INDIKATOR	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase /saluran (Km)	1,36	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Panjang Jalan yang memiliki drainase /saluran (Km)	395,94	470,32	492,358	495,608	499,783	500,858

Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021

**d. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Luar Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 adalah 9.123 Ha dan mengalami peningkatan sampai tahun 2017 hingga menjadi 13.159 Ha. Namun mengalami peningkatan Kembali di tahun 2018 menjadi 3.400 Ha, dan meningkat Kembali di tahun 2019 menjadi 3.527 Ha. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan.

Handwritten signature and date: 9/4/24





**Tabel 2.63**  
**Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik**  
**Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha)	9.123	10.176	13.159	3.400	3.527	2.773,95
Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	17.545	17.545	17.545	7.373	7.373	7.373
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	52,00	58,00	75,00	46,11	47,83	38

Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021

**e. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Berdasarkan data dari BPS sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah masyarakat Katingan yang memiliki akses terhadap air minum bersih maupun air minum layak masih berkisar dibawah 60% dari total rumah tangga di Kabupaten Katingan, cakupan pelayanan ini dapat dikatakan masih rendah.

**Tabel 2.64**  
**Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak di Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih (%)	57,28	57,88	63,34	59,65	72,82	80,55
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak (%)	46,09	39,61	43,83	36,00	32,82	-

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2015-2018,diolah dan BPS Kabupaten Katingan

Pelanggan PDAM menurut jenis konsumen selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Data tahun 2015 menunjukkan 4.085 pelanggan, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 4.447 pelanggan.

**Tabel 2.65**  
**Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen**  
**di Kabupaten Katingan, 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sosial (pelanggan)	82	58	89	105	105	110
Non Niaga (pelanggan)	4.045	4.388	4.447	5.007	5.229	4.879

Sumber: Dinas Perkimtan, 2021

Handwritten signature and date: 9/14



**f. Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**

Pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal sampai akhir tahun 2017 telah terbangun sebanyak 2.200 unit. Keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat juga semakin meningkat, terlihat dari jumlah desa di Katingan yang semakin bertambah dalam 5 (lima) tahun terakhir ini melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 114 desa.

**Tabel 2.66**  
**Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	1	2	14	33	42	44
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	0,62	1,24	8,69	2,05	26,08	27,33
Jumlah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal (unit)	1	2	14	33	42	113

Sumber: Dinas Perkimtan, 2021

Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan fluktuatif cenderung menurun. Pada Tahun 2015, Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar 47,82 persen, naik mencapai 70,81 persen pada Tahun 2017, namun sampai tahun 2019 menurun menjadi 16,77 persen, dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 25,47 persen. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang tertata sanitasinya.

**g. Rasio Ruang Terbuka Hijau**

Sampai saat ini Kabupaten Katingan belum memiliki aturan tertulis tentang penataan kawasan dan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hanya masih berbentuk draf Raperda RTRWK Kabupaten Katingan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan amanat UU tersebut pada pasal 26-31 diatur kewajiban daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Wilayah kota Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan telah ditetapkan

9/14



mencakup 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing. Dengan bertambahnya luas wilayah perkotaan ini, maka RTH publik di Kabupaten Katingan yang harus tersedia adalah 8.425,4 ha.

**Tabel 2.67**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas ruang terbuka hijau (Ha)	8.802	8.802	9.028	9.028	9.028	9.028
Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)	35.600	35.600	35.600	19,900	0,86	25,595
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	24,72	24,72	25,35	45,367	10,498	35,273

Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021

**h. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan**

Ketersediaan RTH semakin meningkat dari tahun 2013 mengingat keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan perkotaan terdiri atas 3 kecamatan. Terjadi peningkatan luas RTH publik dari 2015 s/d 2017 mengingat bertambah luas kawasan perkotaan Kasongan. Berikut tabel Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.

**Tabel 2.68**  
**Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan**  
**Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan RTH Publik yang tersedia akhir tahun SPM	274,39	421,27	421,27	421,27	421,27	421,27
Luasan RTH Publik yang harusnya tersedia di Wilayah Kota Kawasan Perkotaan	5487	8425,4	8425,4	19321,8	19321,8	18760,6
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	4,99	5	5	45,87	45,87	2,24

Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021

Handwritten signature and date: 19/1/24





2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio Permukiman Layak Huni adalah pebandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang dihuni terhadap keseluruhan luas permukiman.

Tabel 2.69  
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan  
Tahun 2015-2020

INDIKATOR	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Permukiman Layak Huni	0,063	0,337	0,422	0,261	0,449	0,248

Sumber: Dinas Perkimtan, 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rasio permukiman layak huni di Kabupaten Katingan terus meningkat, dimana di tahun 2015 sebesar 9,9 persen, dan di tahun 2016 meningkat menjadi 15,66 persen.

b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

Tabel 2.70  
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)	36.323	36.754	37.069	33.465	33.702	34.135
Jumlah rumah di suatu wilayah (unit)	43.693	43.693	43.693	39.471	39.471	39.471
Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	83,13	84,12	84,84	84,79	85,38	86,48

Sumber: Dinas Perkimtan, 2021

c. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah.

Handwritten signature and date: 9/14



Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangan utamanya. Berdasarkan data statistik, dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Tabel 2.71**  
**Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan**  
**Menurut Penerangan Utama Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Listrik PLN	80,89	74,50	83,49	83,67	63,85	69,63
Listrik Non PLN	10,83	17,18	13,41	14,59	9,95	14,29
Bukan Listrik	8,28	8,32	3,10	1,74	26,2	16,08

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, 2015-2017, Data 2019-2020 dari Bidang SDA Setda Kab. Katingan

**2.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

**a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Cakupan petugas linmas menggambarkan kapasitas pemma untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar cakupan petugas linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun data Cakupan Linmas di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.72**  
**Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

INDIKATOR	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	71,46	59,53	59,53	38,5	38,53	38,53

Sumber: Bidang Linmas Satpol Kab. Katingan, 2021

Berdasarkan tabel di diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 71,46 persen, dan menurun di tahun 2016 menjadi 59,53 persen. Pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 59,53 Persen, namun menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 38,5 persen dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2020.

Handwritten signature and date: 9/14



**b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten adalah jumlah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 dikali 100. Adapun data tersebut disajikan pada tabel dibawah.

**Tabel 2.73**  
**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	88,81	81,70	95,71

Sumber: Satpol PP Kab. Katingan, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 persen. Pada tahun 2019 menurun menjadi 81,70 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 95,71.

**c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jumlah mobil pemadaman kebakaran dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100. Adapun Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2015 sebesar 30,77 persen, dan di tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 4,96 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 38,5 persen dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2020.

**Tabel 2.74**  
**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	30,77	30,77	4,96	38,5	38,53	38,53

Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2021

**d. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK**

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK merupakan salah satu indicator untuk mengukur kinerja pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi/data dari Bidang Linmas, Satpol PP Kab. Katingan, capaian indikator Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Katingan tahun 2017 adalah 77,78 persen.

k  
A Y ky





**e. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturnya pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan tahun 2017 sebesar 5/10.000. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.75**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

INDIKATOR	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	8/10.000	8/10.000	5/10.000	6/10.000	6/10.000	6/10.000

Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2021

**f. Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan**

Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan adalah jumlah pos siskamling dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan tahun 2016 sebesar 98,17 persen. Adapun Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.76**  
**Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

INDIKATOR	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17

Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2021

**2.3.1.6. Sosial**

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau

9/14



kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Kabupaten Katingan tidak terlepas dari masalah PMKS. Masalah kesejahteraan sosial sendiri bisa diartikan sebagai kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Katingan yaitu fakir miskin, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar.

**a. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan**

Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam PMKS dan mendapatkan bantuan sosial. Berikut adalah tabel Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan selama Tahun 2015 sampai dengan 2018:

**Tabel 2.77**  
**Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2018**

Indikator	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Kelompok)	8 (APBD) 65 (APBN)	14 (APBD) 65 (APBN)	15 (APBD) 146 (APBN)	30(APBD) 15(APBD Prov) 236 (APBN
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang seharusnya diberi bantuan (Kelompok)	1.124	1.124	1.124	1.124
Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Persen)	6,4	7	14,3	21
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang dilatih (KK)	40	40	32	32

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan

**b. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

Persentase penanganan penyandang masalah sosial adalah jumlah PMKS yang tertangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada dikalikan 100. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat disajikan hanya data Tahun 2019 yaitu sebesar 73,9 persen.



c. **Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi**

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi adalah menunjukkan jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di satu wilayah. Berdasarkan data, diketahui bahwa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan, yaitu 3 buah.

**Tabel 2.78**  
**Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	3	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan

d. **Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani**

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, diketahui bahwa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tetap bertahan pada angka 85. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 95 persen.

**Tabel 2.79**  
**Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Korban Bencana Alam/ Sosial Yang Ditangani (%)	85	85	85	85	90	95

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung dan menguntungkan.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2020 total PPKS sebanyak 37.938 jiwa (12.900 KK) dengan rincian cacat sebanyak 37.110 jiwa, cacat fisik sebanyak 117 jiwa, tuna rungu/tuna wicara dan tuna netra sebanyak 362 jiwa, tuna daksa sebanyak 192 jiwa, ODGJ sebanyak 519

14





jiwa, lansia sebanyak 5.430 jiwa, serta anak-anak yang terdagtar dalam DTKS sebanyak 10.753 jiwa.

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Berdasarkan data pada tabel di bawah, jumlah perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja mengalami penurunan dari 27 perusahaan menjadi 26 perusahaan pada Tahun 2017. Selanjutnya, indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar sebagai Anggota BPJS menunjukkan kondisi yang baik yaitu bertambah dari 3.017 orang menjadu 4.472 orang pada Tahun 2017. Berikutnya, indikator lain di bidang tenaga kerja yang cukup penting yaitu Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan menunjukkan angka yang meningkat dari 2 kasus pada Tahun 2016 menjadi 6 kasus pada tahun berikutnya.

Tabel 2.80  
Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja  
Kabupaten Katingan Tahun 2016-2017

No	Indikator	Satuan	2016	2017
1	Jumlah Perusahaan yang Wajib Menyelenggarakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan	27	26
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar sebagai Anggota BPJS	Orang	3.071	4.472
3	Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan	Kasus	2	6

Sumber: LAKIP Tahun 2017 Kabupaten Katingan, diolah

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan beberapa indikator lainnya.

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan dikalikan 100. Adapun Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

Handwritten signature and date: 9/1/19



**Tabel 2.81**  
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	77,52	86,16	44,22	49,08	51,68	51,68

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, dimana Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2015 sebesar 77,52 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 86,16 persen. Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 44,22 persen, namun sampai tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 51,68 persen.

**b. Rasio KDRT**

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per rumah tangga dikalikan 100. Adapun Rasio KRT di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.82**  
**Rasio KDRT Di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio KDRT	0,031	0,009	0,004	0,016	0,032	n/a

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio KDRT di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sebesar 0,031 persen, mengalami penurunan sampai tahun 2017 menjadi 0,004 persen, namun hingga tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,032 persen.

**c. Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak**

Kabupaten Layak Anak adalah Suatu pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.83**  
**Capaian Kabupaten Layak Anak  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (poin)	0	32	513	659	659	675

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

Handwritten signature and date: 9/14



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa poin capaian Kabupaten Layak Anak terus meningkat, hal ini memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Katingan.

**d. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100 persen.

**Tabel 2.84**  
**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2015-2020**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

**2.3.1.9. Pangan**

Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb, sedangkan Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

**a. Ketersediaan Pangan**

Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebanyak 40.201 ton beras dan 19.005 ton daging, meningkat di tahun 2018 menjadi 50.336 ton beras dan 18.100 ton daging dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.85**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beras (ton)	40.201	42.613	45.170	50.336	22.204,83	42.678

Handwritten signature and date: 9/1/24





Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daging (ton)	19.005	19.955	20.953	1.586	1.608	1.641

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, 2021

2.3.1.10. Pertanian

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Katingan selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Berdasarkan data pada Kantor Badan Pertanahan Kasongan, Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.86  
Persentase Luas Lahan Bersertifikat  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	0,58	0,71	6,21	-	0,89
Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (km <sup>2</sup> )	9,57	11,69	102,21	-	20,323
Jumlah Luas Wilayah Yang Harusnya Bersertifikat (km <sup>2</sup> )	1646,03	1646,03	1646,03	-	2.262,31

Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2015-2018, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum mencapai 8 persen dari keseluruhan luas wilayah.

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian Kasus Tanah Negara yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mencapai 0 persen, hal ini dilihat dari jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 0 kasus dan jumlah kasus yang terdaftar sebanyak 0 kasus. Kecuali pada tahun 2017 terdapat penyelesaian 50 persen, yaitu penyelesaian 1 kasus dari 2 kasus yang didaftarkan.

c. Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian Izin Lokasi yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mencapai 0 persen, hal ini dilihat dari jumlah izin lokasi sebanyak 0 izin dan jumlah permohonan izin lokasi

19 X/4



sebanyak 0 izin. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 penyelesaian izin lokasi mencapai 100 persen, dilihat dari jumlah ijin lokasi 2 ijin dengan permohonan 2 izin lokasi.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan didapat dari volume sampah yang ditangani dalam satuan m<sup>3</sup> dibagi dengan volume produksi sampah dalam satuan m<sup>3</sup> dikalikan 100. Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.87**  
**Persentase Penanganan Sampah**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Volume sampah yang ditangani (m <sup>3</sup> )/hari	81	18.500	20.000	-	13,92	41,66
Volume produksi sampah (m <sup>3</sup> )/hari	135,73	46.240	47.457	11.315	25.943	7.755
Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	59,66	40,00	42,14	1.06	1.06	3.18

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2015-2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 59,66 persen, menurun di tahun 2016 menjadi 40,00 persen dan meningkat Kembali di tahun 2017 menjadi 42,14 persen.

b. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah Jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan pemda berbagi dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.88**  
**Persentase Penegakan Hukum Lingkungan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah (kasus)	1	2	1	1	1	4
Jumlah kasus lingkungan yang ada (kasus)	1	2	1	1	1	4
Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (persen)	100	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2015-2020

Handwritten signature and date: 9/1/24



c. Tutupan Lahan

Analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 wilayah Kabupaten Katingan masih sesuai tutupan lahan alami. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Katingan masih cukup efisien. Berikut ini disajikan data tutupan lahan di Kabupaten Katingan.

Tabel 2.89  
Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan lahan kering primer	187.729,38	9,19
2	Hutan lahan kering sekunder	550.006,12	26,93
3	Hutan tanaman	7.217,58	0,35
4	Semak belukar	127.009,19	6,22
5	Perkebunan	68.077,45	3,33
6	Pemukiman	3.450,58	0,17
7	Tanah terbuka	40.467,89	1,98
8	Tubuh air	17.027,00	0,83
9	Hutan mangrove sekunder	5.337,10	0,26
10	Hutan rawa sekunder	475.023,29	23,26
11	Semak belukar rawa	251.234,79	12,30
12	Pertanian lahan kering	26.756,89	1,31
13	Pertanian lahan kering campur semak	190.869,11	9,35
14	Sawah	20.042,55	0,98
15	Transmigrasi	1.239,34	0,06
16	Tambang	26.222,84	1,28
17	Rawa	44.288,90	2,17
	Total	2.042.000,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

ky



Tabel 2.90  
Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan

TUTUPAN LAHAN	KECAMATAN									TOTAL	%
	BUKIT RAYA	KAMIPANG	KATINGAN HULU	KATINGAN KUALA	MARIKIT	MENDAWAI	PETAK MALAI	SANAMAN MANTIKEI	TASIK PAYAWAN		
Hutan lahan kering primer	3549,22		10056,84		78961,29		11011,44	37044,02		140622,80	25,38
Hutan lahan kering sekunder	4769,76		1064,07		421,86		750,19	9824,88		16830,76	3,04
Hutan mangrove sekunder				2810,97						2810,97	0,51
Hutan rawa sekunder		143805,10		18877,22		139719,95			5172,45	307574,71	55,52
Pemukiman				30,57						30,57	0,01
Pertanian lahan kering				432,05		310,37				742,42	0,13
Pertanian lahan kering campur semak			2045,00	21,66	167,85					2234,50	0,40
Rawa		7976,96		306,68		4775,64				13059,29	2,36
Sawah				505,74						505,74	0,09
Semak belukar		201,02	68,58		1316,11			5,14		1590,84	0,29
Semak belukar rawa		14119,32		17284,00		18894,38			2165,14	52462,85	9,47
Tambang									285,26	285,26	0,05
Tanah terbuka		3617,37		641,50		10978,31				15237,18	2,75
Tubuh air		0,34		35,50		0,45				36,28	0,01
Total	8318,97	169720,11	13234,48	40945,88	80867,10	174679,10	11761,63	46874,05	7622,85	554024,16	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023



Untuk mendukung data mengenai tutupan lahan yang telah disajikan pada tabel diatas, berikut ini disajikan data *overlay* tutupan lahan dengan pola ruang Kabupaten Katingan.

Tabel 2.91  
Hasil Analisis *Overlay* Tutupan Lahan dan Pola Ruang

Tutupan Lahan	Alokasi ruang				
	Kawasan Budidaya		Kawasan Lindung		Total
	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
Hutan lahan kering primer	45686,73	2,29	140622,80	7,05	186309,53
Hutan lahan kering sekunder	530218,74	26,59	16830,76	0,84	547049,50
Hutan mangrove sekunder	2464,67	0,12	2810,97	0,14	5275,64
Hutan rawa sekunder	155373,59	7,79	307574,71	15,42	462948,30
Hutan tanaman	7190,87	0,36		0,00	7190,87
Pemukiman	3400,43	0,17	30,57	0,00	3431,01
Perkebunan	67552,03	3,39		0,00	67552,03
Pertanian lahan kering	25926,48	1,30	742,42	0,04	26668,90
Pertanian lahan kering campur semak	187797,48	9,42	2234,50	0,11	190031,98
Rawa	27864,49	1,40	13059,29	0,65	40923,78
Sawah	19487,61	0,98	505,74	0,03	19993,35
Semak belukar	124764,13	6,26	1590,84	0,08	126354,97
Semak belukar rawa	191142,78	9,58	52462,85	2,63	243605,63
Tambang	25831,22	1,30	285,26	0,01	26116,48
Tanah terbuka	24318,79	1,22	15237,18	0,76	39555,97
Transmigrasi	1244,73	0,06		0,00	1244,73
Tubuh air	119,49	0,01	36,28	0,00	155,77
Total	1440384,28	72,22	554024,16	27,78	1994408,45

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

d. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi konsentrasi CO2 di atmosfer adalah memelihara dan mengembangkan kemampuan hutan dan lautan untuk menyerap dan menyimpan karbon. Pemanfaatan hutan dalam upaya mitigasi tersebut sudah banyak diimplementasikan, sedangkan penerapan peran lautan belum terlihat secara signifikan (Nellemann et al., 2009).

Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan sebesar 162 ton/ha untuk hutan mangrove primer dan 116 ton/ha untuk hutan mangrove sekunder, sedangkan untuk hutan dengan kerapatan sedang sebesar 64,39 ton/ha. Dengan luas hutan 1.219.699,79 ha atau maka total stok karbon di Kabupaten Katingan adalah sebesar 183.478.370,59 ton. Berdasarkan data pada tabel dibawah, diketahui bahwa

Handwritten signature and date: 9/1/24



daerah yang memiliki stok karbon tertinggi yakni Kecamatan Masanaman Mantikei dan (22,17%) dan Kecamatan Marikit (17,86%).

**Tabel 2.92**  
**Total Stok Karbon untuk Hutan di Setiap Kecamatan**

No	Hutan	Luas (Ha)	Stok Karbon		
			Rerata (ton/Ha)	Total (ton)	%
1	<b>BUKIT RAYA</b>	<b>64440,77377</b>	<b>400</b>	<b>11681689,4</b>	<b>6,37</b>
	Hutan lahan kering primer	4800,719641	222	1065759,76	
	Hutan lahan kering sekunder	59640,05413	178	10615929,64	
2	<b>KAMIPANG</b>	<b>194604,6798</b>	<b>92,32</b>	<b>17965904,04</b>	<b>9,79</b>
	Hutan rawa sekunder	194604,6798	92,32	17965904,04	
3	<b>KATINGAN HILIR</b>	<b>17394,77499</b>	<b>208,32</b>	<b>1615546,169</b>	<b>0,88</b>
	Hutan mangrove sekunder	407,96207	116	47323,60012	
	Hutan rawa sekunder	16986,81292	92,32	1568222,569	
4	<b>KATINGAN HULU</b>	<b>93185,79315</b>	<b>400</b>	<b>17080596,63</b>	<b>9,31</b>
	Hutan lahan kering primer	11216,48755	222	2490060,235	
	Hutan lahan kering sekunder	81969,30561	178	14590536,4	
5	<b>KATINGAN KUALA</b>	<b>41318,53699</b>	<b>208,32</b>	<b>3896812,883</b>	<b>2,12</b>
	Hutan mangrove sekunder	3474,89646	116	403087,9894	
	Hutan rawa sekunder	37843,64053	92,32	3493724,894	
6	<b>KATINGAN TENGAH</b>	<b>38674,14825</b>	<b>231,14</b>	<b>6664681,375</b>	<b>3,63</b>
	Hutan lahan kering sekunder	36917,64486	178	6571340,785	
	Hutan tanaman	1756,503387	53,14	93340,59001	
7	<b>MARIKIT</b>	<b>162064,7797</b>	<b>453,14</b>	<b>32763123,7</b>	<b>17,86</b>
	Hutan lahan kering primer	89105,56043	222	19781434,42	
	Hutan lahan kering sekunder	72918,76	178	12979539,28	
	Hutan tanaman	40,45931078	53,14	2150,007775	
8	<b>MENDAWAI</b>	<b>156498,3213</b>	<b>208,32</b>	<b>14448246,74</b>	<b>7,87</b>
	Hutan mangrove sekunder	13,58621085	116	1576,000458	
	Hutan rawa sekunder	156484,7351	92,32	14446670,74	
9	<b>PETAK MALAI</b>	<b>136807,5222</b>	<b>400</b>	<b>25625728,08</b>	<b>13,97</b>
	Hutan lahan kering primer	28954,29836	222	6427854,237	
	Hutan lahan kering sekunder	107853,2238	178	19197873,84	
10	<b>PULAU MALAN</b>	<b>28553,37091</b>	<b>323,46</b>	<b>4456266,962</b>	<b>2,43</b>
	Hutan lahan kering sekunder	21360,08883	178	3802095,811	
	Hutan rawa sekunder	6940,279251	92,32	640726,5805	
	Hutan tanaman	253,0028334	53,14	13444,57057	
11	<b>SANAMAN MANTIKEI</b>	<b>219179,447</b>	<b>453,14</b>	<b>40670287,55</b>	<b>22,17</b>
	Hutan lahan kering primer	52232,71677	222	11595663,12	
	Hutan lahan kering sekunder	161805,824	178	28801436,67	
	Hutan tanaman	5140,906189	53,14	273187,7549	
12	<b>TASIK PAYAWAN</b>	<b>37260,98192</b>	<b>92,32</b>	<b>3439933,851</b>	<b>1,87</b>
	Hutan rawa sekunder	37260,98192	92,32	3439933,851	
13	<b>TEWANG SANGGALANG GARING</b>	<b>29716,65527</b>	<b>386,32</b>	<b>3169553,199</b>	<b>1,73</b>
	Hutan lahan kering sekunder	4585,25806	178	816175,9347	
	Hutan mangrove sekunder	1403,998077	116	162863,777	

Handwritten signature and date: 9/1/24





No	Hutan	Luas (Ha)	Stok Karbon		
			Rerata (ton/Ha)	Total (ton)	%
	Hutan rawa sekunder	23727,39913	92,32	2190513,488	
Total		1.219.699,79	3.856,80	183.478.370,59	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

Stok karbon untuk hutan di Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder memiliki jumlah tertinggi. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.93  
Total Stok Karbon untuk Hutan di Kabupaten Katingan

No	Hutan	Luas (Ha)	Stok Karbon		
			Rerata (ton/Ha)	Total (ton)	%
1	Hutan lahan kering primer	186309,7827	222	41360771,77	22,54
2	Hutan lahan kering sekunder	547050,1593	178	97374928,36	53,07
3	Hutan mangrove sekunder	5300,442818	116	614851,3669	0,34
4	Hutan rawa sekunder	473848,5286	92,32	43745696,16	23,84
5	Hutan tanaman	7190,87172	53,14	382122,9232	0,21
Total		1.219.699,79	661,46	183.478.370,59	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

2.3.1.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia >17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus formula jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah. Status kepemilikan KTP di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.94  
Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio penduduk ber KTP satuan penduduk (%)	77,34	97,46	90,58	99,01	99,15	99,64

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio penduduk ber KTP satuan penduduk di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun

Handwritten signature and initials.



2020 terus mengalami peningkatan. Angka ini terus meningkat sampai mencapai 97,46 persen pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 rasio penduduk ber KTP satuan penduduk mengalami penurunan hingga menjadi 90,58 persen dan kembali meningkat sampai tahun 2020 menjadi 99,64 persen.

**b. Persentase bayi berakte kelahiran**

Persentase bayi berakte kelahiran adalah jumlah bayi berakte kelahiran dibagi dengan jumlah bayi dikalikan 100. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa persentase bayi berakte kelahiran di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan, dimana pada tahun 2015 kepemilikan akte kelahiran sebesar 76 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 75 persen. Namun pada sampai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 92,05 persen. Adapun Persentase bayi berakte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.95**  
**Persentase Bayi Berakte Kelahiran**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase bayi berakte kelahiran (%)	76	75	83	89,56	92,05	93,28

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021

**c. Pasangan Berakte Nikah**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Katingan pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 8,83 persen dan di tahun 2020 mencapai 28,76 persen. Pasangan berakte nikah yang ada di Kabupaten Katingan dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.96**  
**Pasangan Akte Nikah**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio pasangan berakte nikah (%)	8,83	10,73	12,62	22,21	26,33	28,76

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021

**d. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang ada di Kabupaten Katingan dalam periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 berstatus “Sudah”.

**e. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten**

Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten adalah Ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala kabupaten.

9 > 14



Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten di Kabupaten Katingan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 “Ada”.

**Tabel 2.97**  
**Persentase Ketersediaan Database Kependudukan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021

**2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**a. Status Kemajuan Desa**

Berdasarkan penilaian hasil survey berdasarkan Indeks Desa Membangun, status dan kemandirian desa di Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.98**  
**Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020**

Uraian Status Desa	2018	2019	2020
Mandiri	0	0	1
Maju	1	2	5
Berkembang	12	37	51
Tertinggal	65	95	91
Sangat Tertinggal	76	20	6
Jumlah	154	154	154

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Katingan, 2021

**b. Persentase PKK Aktif**

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase PKK aktif yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 100 persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.99**  
**Persentase PKK Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKK Aktif (kelompok)	174	174	174	174	174	174
Jumlah PKK (kelompok)	174	174	174	174	174	174
Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2015-2020

**2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat.

Handwritten signature and initials.





Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu program keluarga bertujuan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik. Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena realisasi capaian belum mencapai target.

a. **Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR**

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi/CPR. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi Jumlah Aseptor KB di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100. Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah pemakaian kontrasepsi dari tahun ke tahun hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah PUS yang menjadi Aseptor KB.

**Tabel 2.100**  
**Angka Pemakaian Kontrasepsi**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	78,09	78,33	78,51	78,69	78,87	79,05

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

b. **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP**

Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP adalah cara yang efektif dalam menjaga jarak kelahiran, perhitungan indikator ini yaitu Jumlah Aseptor MKJP dibagi Aseptor KB dikali 100. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase MKJP cenderung naik turun, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan banyak aseptor yang masih belum konsisten menggunakan MKJP. Adapun Persentase MKJP yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.101**  
**Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang/ MKJP (%)	19,53	18,91	27,44	29,28	31,12	32,96

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

9/4



**c. Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga**

Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga adalah kelompok ketahanan keluarga yang tergabung dalam TRIBINA yaitu: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam menjalankan fungsi pokok ketahanan keluarga. Diharapkan kelompok ketahanan keluarga dapat dibentuk di setiap desa/kelurahan.

**Tabel 2.102**

**Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (%)	40,99	73,91	75,16	36,65	44,75	52,85

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

**d. Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja**

Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja adalah upaya peningkatan peranan PIK Remaja dalam mendapatkan informasi mengenai program KKBPK. PIK Remaja sebagai sarana fasilitasi kreatifitas remaja diharapkan dapat dibentuk di seluruh sekolah di setiap desa/kelurahan.

**Tabel 2.103**

**Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan remaja dalam pusat pelayana informasi dan konseling (%)	18,63	45,34	45,34	12,42	27,87	43,23

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

**e. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*)**

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*) di Kabupaten Katingan tahun 2015 persentasenya sebesar 15,22 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 hingga menjadi 13,4 persen.

**Tabel 2.104**

**Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet need*) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( <i>Unmeet need</i> ) (%)	15,22	14,86	13,4	89,70	90,90	92,10

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

9 x 4



**f. Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)**

Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) adalah jumlah kelompok UPPKS yang dibentuk di tingkat desa/ kelurahan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan berjalan secara fluktuatif hal ini dikarenakan setiap tahun evaluasi dan pelaporan terhadap kelompok UPPKS yang ada dan aktif masih belum berjalan hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah yang sulit dijangkau.

**Tabel 2.105**  
**Rasio Jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	47,83	97,52	70,19	11,80	25,61	39,42

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

**g. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB**

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 27,27 persen. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 73,25 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 92,10 persen pada Tahun 2020.

**Tabel 2.106**  
**Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)	27,27	73,25	88,5	89,70	90,90	92,10

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

**h. Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja**

Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan tahun 2015 persentasenya sebesar 18,63 persen, meningkat pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 45,34 persen. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,42 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami

Handwritten signature and date: 12/4





peningkatan kembali menjadi 27,87 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 43,23 persen pada tahun 2020.

**Tabel 2.107**  
**Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan**  
**Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja (%)	18,63	45,34	45,34	12,42	27,87	43,23

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021

**2.3.1.15. Perhubungan**  
**a. Jumlah Terminal Angkutan Jalan**

Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya.

**Tabel 2.108**  
**Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Jenis Terminal	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kelas C (unit)	1	1	1	1	1	1

Sumber: Profile Kabupaten Katingan Tahun 2015 dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021

**b. Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan**

Pengujian kelayakan kendaraan bermotor angkutan jalan bertujuan untuk menjamin keselamatan moda transportasi yang dioperasikan mengangkut orang dan barang hingga dapat mencegah kecelakaan dalam berlalu lintas. Pelaksanakan pengujian kelayakan angkutan jalan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Handwritten signature and date: 9/1/24



**Tabel 2.109**  
**Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Kendaraan bermotor angkutan jalan (KIR) (unit)	1.200	1.015	989	875	35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021

**c. Pemasangan Rambu-Rambu**

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 1.235 unit rambu lalu lintas jalan maupun sungai, Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.110**  
**Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rambu Lalu Lintas Jalan Terpasang (unit)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.036
Jumlah Rambu Sungai Terpasang (unit)	220	220	220	220	220	220
Rambu-rambu yang Terpasang (unit)	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.246

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021

**d. Izin Trayek**

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut penumpang umum dan barang pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Banyaknya izin trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.111**  
**Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016**

Kategori	2015	2016
Izin Trayek Angkutan Jalan	13	13
Izin Trayek Angkutan Sungai	55	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021

**e. Dermaga Sungai**

Sungai Katingan yang berada di Kabupaten Katingan memiliki panjang 650 km, lebar 250 m, kedalaman berkisar 3-7 m, dan alur sungai yang bisa dilayari 520 km. Transportasi sungai sejauh ini masih menjadi andalan bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Katingan, untuk mengangkut orang dan

Handwritten signature and date: 9/1/24



barang maupun kendaraan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Katingan membangun dermaga sungai guna mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah. Adapun dermaga yang tersedia di Kabupaten Katingan ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.112**  
**Dermaga sungai yang tersedia di Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2020**

Jenis Dermaga Sungai	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dermaga Bongkar Muat/ Tambatan (unit)	24	25	-	28	28	28
Dermaga Penyeberangan (unit)	10	15	-	15	15	15
Total (unit)	34	40	-	43	43	43

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021

**2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika**

**a. Cakupan Layanan Komunikasi**

Indikator cakupan layanan komunikasi memberikan informasi mengenai jangkauan pelayanan komunikasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Formulasi untuk Cakupan Layanan komunikasi adalah Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km<sup>2</sup>) dibagi Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km<sup>2</sup>). Adapun Cakupan Layanan komunikasi yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.113**  
**Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km <sup>2</sup> )	5.808	5.808	5.979	6.140	6.291	6.413
Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km <sup>2</sup> )	17.800	17.800	20.396,78	20.396,78	20.396,78	20.396,78
Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	33	33	29	30	30.84	31.44

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2021

Ada beberapa kriteria untuk menentukan cakupan layanan komunikasi yaitu jangkauan sinyal komunikasi Kuat, Lemah dan tidak ada (*blank spot*). Dalam hal ini untuk penentuan formulasi dari Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km<sup>2</sup>) adalah wilayah yang tergolong jangkauan sinyalnya Kuat. Dari tahun 2015 – 2016 luas wilayah yang tergolong jangkauan sinyal telekomunikasi kriteria “kuat” adalah 5.808 km<sup>2</sup>, kriteria “lemah” adalah 4.994 km<sup>2</sup>, kriteria “tidak ada sinyal/blank spot” adalah 6.998 km<sup>2</sup> dengan luas

Handwritten signature and date: 9/1/24





wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.800 km<sup>2</sup>. Sedangkan di Tahun 2017 ada peningkatan penerimaan sinyal HP kategori ‘kuat” di desa Tumbang Lahang dan Dahian Tunggal, namun di tahun 2017 juga terjadi penambahan luas wilayah Kabupaten Katingan menjadi 20.396,78 km<sup>2</sup>, sehingga mempengaruhi persentase cakupan layanan telekomunikasi menjadi turun sebanyak 4%. Sampai dengan tahun 2017 jumlah tower yang ada di Kabupaten Katingan berdasarkan hasil pendataan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah sebanyak 56 unit.

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

a. Persentase Koperasi Aktif

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Tabel 2.114  
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan  
Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	101	111	116	87	86	90
Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	228	233	202	206	195	204
Persentase Koperasi Aktif (%)	43,67	47,64	57,43	42,23	44,10	44,12

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 persentase koperasi aktif sebanyak 43,67 persen dan sampai Tahun 2017 mengalami peningkatan sampai pada angka 57,43 persen.

Handwritten signature and date: 19/1/24



Namun persentase koperasi aktif kembali menurun mencapai 42,23 persen pada tahun 2018 dan meningkat Kembali sampai tahun 2020 menjadi 44,12 persen.

**b. Usaha Mikro dan Kecil**

Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah usaha mikro dan kecil berbagi dengan jumlah seluruh UKM. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 mengalami lonjakan yang tinggi yaitu 44.831 unit dari tahun 2015 yang berjumlah 1.630 unit. Hal ini disebabkan Kelompok Usaha Tani dimasukkan kedalam usaha mikro dan kecil. Sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 1.526 unit, meningkat sampai tahun 2020 menjadi 1.605 unit.

**Tabel 2.115**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	1.630	44.831	44.831	1.526	1.557	1.605
Jumlah Seluruh UKM (unit)	1.630	44.831	44.831	1.526	1.559	1.607
Persentase UKM (%)	100	100	100	100	99.87	99.87

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan

**c. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM**

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM adalah jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM. Berdasarkan data di bawah, dapat dilihat bahwa Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan tahun 2014 dan 2015 berjumlah 1.630 unit dan di tahun 2016 meningkat menjadi 44.831 unit dan Kembali menurun sampai tahun 2020 menjadi 1.607 kegiatan. Adapun Jumlah UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.116**  
**Jumlah UKM non BPR/LKM UKM**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	1630	44831	44831	1526	1559	1607

Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan

**d. Jumlah BPR/LKM**

Jumlah BPR/LKM adalah Jumlah BPR/LKM aktif. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai 2018, tidak terdapat BPR/LKM di Kabupaten Katingan..

**2.3.1.18. Penanaman Modal**

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan

Handwritten signature and date: 9/1/24



menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Katingan. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

**a. Jumlah Investor**

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investor PMDN tahun 2015 sebanyak 76 unit, dan mengalami kenaikan sampai tahun 2019 menjadi 119 unit, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 63 unit. Sedangkan Jumlah Investor PMA pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjumlah 16 unit dan terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 10 unit.

**Tabel 2.117**  
**Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor PMDN (unit)	76	81	99	107	119	63
Jumlah Investor PMA (unit)	16	16	16	16	14	10

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, 2021

**b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**

Berdasarkan data, diketahui bahwa jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar Rp 139.923.730, meningkat sampai tahun 2017 menjadi 1.124.980.148.645, menurun Kembali di tahun 2018 menjadi 848.775.526.019, dan meningkat Kembali sampai tahun 2020 menjadi 4.171.745.209.352,80. Sedangkan jumlah nilai investasi berskala asing (PMA) pada tahun 2015 sebesar 342.845.923.000, menurun di tahun 2016 menjadi 239.846.810.000, meningkat Kembali di tahun 2017 menjadi 1.219.881.974.652,41, meningkat Kembali di tahun 2018 menjadi 1.875.572.532.132,41, sedikit mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 1.852.401.015.342,41 dan mengalami peningkatan Kembali di tahun 2020 menjadi 2.171.948.678.654,34. Berikut disajikan tabel Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.

Handwritten signature and date: 19/7/24





**Tabel 2.118**  
**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah nilai Investasi PMDN (Rupiah)	139.923.730	237.496.700.000,00	1.124.980.148.645,00	848.775.526.019,00	3.790.278.623.286,00	4.171.745.209.352,80
Jumlah nilai investasi PMA (US Dollar)	342.845.923.000	239.846.810.000,00	1.219.881.974.652,41	1.875.572.532.132,41	1.852.401.015.342,41	2.171.948.678.654,34

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan

**c. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**

Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu berbadi dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100. Adapun Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.119**  
**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 (jutaan)**

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Tahun berkenaan (Rp.)	139.923.730	237.496.700.000,00	1.124.980.148.645,00	848.775.526.019,00	3.790.278.623.286,00	4.171.745.209.352,80
2	Realisasi Tahun Yang Lalu (Rp.)	386.977.631.909	139.923.730	237.496.700.000,00	1.124.980.148.645,00	848.775.526.019,00	3.790.278.623.286,00
3	Kenaikan/p enurunan nilai realisasi PMDN (persen)			373,68%	-24,55%	346,56%	10,06%

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan

**2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga**

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok

*Handwritten signature and date: 20/1/24*



masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan.

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam satu periode tahun. Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam satu periode tahun.

a. Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif

Jumlah organisasi pemuda selama tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 sampai 2017 mencapai 18 organisasi pemuda. Sedangkan di tahun 2018 meningkat menjadi 120 organisasi pemuda dan mengalami peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 126 organisasi pemuda. Adanya peningkatan yang sangat signifikan mulai tahun 2018 dikarenakan organisasi pemuda kecamatan dimasukkan dalam penjumlahan organisasi pemuda yang ada. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.120  
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan  
Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	18	18	18	120	126	126

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Katingan, 2021

2.3.1.20. Statistik

a. Buku Kabupaten Dalam Angka

Buku Kabupaten Dalam Angka disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat didownload di website BPS Kabupaten Katingan. Data didalam buku Buku Kabupaten Dalam Angka dapat digunakan oleh berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan maupun mengevaluasi capaian pembangunan.

Tabel 2.121  
Buku Kabupaten Dalam Angka  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020

Indikator	Formulasi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan

h  
9/4/24



**b. Buku PDRB Kabupaten**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan Buku “PDRB Kabupaten”. Dokumen tersebut ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. Penyusunan buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

**Tabel 2.122**  
**Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

No	Indikator	Formulasi	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan

**2.3.1.21. Kebudayaan**

**a. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan**

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan adalah jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan berbagi dengan total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah dikalikan 100. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di tahun 2015 sampai dengan 2020 sebesar 100 persen.

**Tabel 2.123**  
**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (situs)	14	14	14	15	17	17
Total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah (situs)	14	14	14	15	17	17
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Katingan, 2018 dan BPS Kabupaten Katingan

**b. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebanyak 2 kali dan jumlah ini tetap setiap tahun sampai dengan tahun 2020.





**Tabel 2.124**  
**Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kegiatan)	2	2	2	2	2	2

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2012-2016 dan Disbudparpora Kab. Katingan, 2018 dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Katingan, 2021

**c. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya**

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya adalah jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada. Adapun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.125**  
**Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2020

**2.3.1.22. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Katingan. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

**a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 95,11 persen, menurun di tahun 2016 menjadi 78,21 persen. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.126**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017**

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.461	9.829	9.953
Jumlah Orang Dalam Populasi Yang	4.690	12.568	n/a

19 X 14



Uraian	2015	2016	2017
Harus Dilayani			
Persentase Pengunjung Perpustakaan	95,11	78,21	n/a

Sumber: Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2017

**b. Koleksi buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah**

Data beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 33,33 persen, meningkat di tahun 2016 menjadi 33,46 persen. Namun pada tahun 2019 turun menjadi 19,58 persen.

**Tabel 2.127**  
**Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1024	986	n/a	n/a	6.246
Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	3072	2946	n/a	n/a	31.908
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	33,33	33,46	n/a	n/a	19,58

Sumber: Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2017 dan LLPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

**2.3.1.23. Kearsipan**

**a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**

Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku adalah jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi dengan jumlah SKPD dikalikan 100. Adapun Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.128**  
**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017**

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	0	0	0
Jumlah SKPD	41	41	37
Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	0	0	0

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016 dan Setda Kab. Katingan, 2018

**b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 sebanyak 1 kegiatan, di tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 2 kegiatan.

k  
9 Y kg



**Tabel 2.129**  
**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016**

Uraian	2015	2016
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	2	2

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016

**2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan**

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Katingan. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

**2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan**

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

**a. Produksi Perikanan**

Indikator Produksi Perikanan menunjukkan jumlah produksi perikanan yang dihasilkan suatu daerah. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.130**  
**Produksi Perikanan**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan (Ton)	3.342,53	7.802,19	n/a	9.222,37	8.650,03	8.832,275

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2020, dan Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan mengalami peningkatan di tahun 2016 bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni dari 3.342,53 ton ke 7.802,19 ton. Produksi ikan ini terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 9.222,37 ton namun turun menjadi 8.832,275 ton pada tahun 2020.

**b. Konsumsi Ikan**

Indikator Konsumsi Ikan adalah salah satu indikator penting dalam menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan. Adapun data konsumsi ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sampai dengan 2016 menunjukkan adanya peningkatanyakni dari 39,55 kg

12/4





menjadi 40,98 kg. Lebih lanjut, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.131**  
**Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Ikan (Kg)	39,55	40,98	41,30	41,70	42,00	42,50
Target Daerah (Kg)	44,2	44,898	45,569	46,303	46,908	47,111
Tingkat Capaian Konsumsi Ikan (%)	89,47	92,71	90,63	90,06	89,54	90,21

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, 2021

**2.3.2.2. Pariwisata**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan suluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Katingan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik turis datang, baik dari dalam negeri (turis domestik) maupun dari luar negeri (turis asing).

**a. Kunjungan Wisata**

Kunjungan Wisata menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun yang ke Kabupaten Katingan. Kunjungan wisatawan (wisman) yang datang ke Kabupaten Katingan merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Katingan terutama ketertarikan turis asing untuk berkunjung. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Katingan selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi.

**Tabel 2.132**  
**Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wisatawan (orang)	34.351	32.405	40.290	32.570	36.336	11.826

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016 , Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2018, diolah, dan BPS Kabupaten Katingan

**2.3.2.3. Pertanian**

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan.

h  
9/1/2024



a. **Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar**

Produktivitas padi atau pangan utama lokal lainnya perhektar adalah produksi tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya dalam satuan ton berbagi dengan luas areal tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya (jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalan).

**Tabel 2.133**  
**Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*	2020
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	20.802	20.986	20.551	12.494	16.318	17.742
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (kw/ha)	33,11	30,67	31,31	35,07	31,87	31,85

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 34,38 ton/ha, cenderung menurun di tahun-tahun berikutnya, kecuali pada tahun 2017 sempat naik menjadi 32,06 ton/ha. Kondisi tahun 2020 menunjukkan produktivitas sebesar 31,85 ton/ha. Penyebab penurunan produktivitas padi dikarenakan adanya cuaca ekstrim yang berakibat banjir ataupun kemarau panjang sehingga mengakibatkan banyak lahan yang rusak dan akhirnya mempengaruhi hasil panen dan nilai produktivitas tanaman padi.

2.3.2.4. **Kehutanan**

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.

a. **Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis**

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi berbagi dengan luas total hutan dan lahan kritis dikalikan 100 persen. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Tahun 2016

*Handwritten signature and date: 9/4/24*



sebesar 0,43 persen mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 6,88 persen. Hal ini disebabkan semakin luasnya luas total hutan dan lahan kritis. Adapun Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.134**  
**Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017**

Uraian	2015	2016	2017
Luas Hutan dan Lahan Kritis Yang direhabilitasi (Ha)	37.581,68	8.509,92	0
Luas Total Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	546.351,16	1.991.696,14	1.991.696,14
Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	6,88	0,43	0

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

**b. Kerusakan Kawasan Hutan**

Kerusakan Kawasan Hutan adalah luas kerusakan kawasan hutan berbagi dengan luas kawasan hutan dikalikan 100 persen. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa persentase kerusakan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 27,68 persen, selanjutnya turun di tahun 2016 menjadi 27,22 persen.

**Tabel 2.135**  
**Kawasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2015-2017**

Uraian	2015	2016	2017
Luas Kerusakan Kawasan Hutan	508.882,27	500.372,35	n/a
Luas Kawasan Hutan	1.838.196,00	1.838.196,00	1.838.196,00
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%)	27,68	27,22	0

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016

**2.3.2.5. Energi Dan Sumber Daya Mineral**

**a. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik**

Adapun rasio elektrifikasi mencerminkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Katingan yang sudah menikmati aliran listrik. Sampai dengan Triwulan III 2021, rasio elektrifikasi di Kabupaten Katingan mencapai 68,73% dengan data RE PLN 54,47%, RE Non PLN 14,26%, RE Desa Berlistrik mencapai 94,41%.

h  
9 X/4





Tabel 2.136  
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik

No.	Kecamatan	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	JUMLAH RUMAH TANGGA	KELURAHAN/DE SA BERLISTRIK		KELURAHAN/DE SA BERLISTRIK	RUMAH TANGGA BERLISTRIK		JUMLAH RUMAH TANGGA BERLISTRIK	JUMLAH RUMAH TANGGA BELUM BERLISTRIK	RE PLN	RE NON PLN	RE	RASIO DESA BERLISTRIK	
					PLN	NON-PLN		PLN	NON PLN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	
1	KATINGAN KUALA	2	14	5,328	13	3	16	0	2,635	274	2,979	2,349	49.46 %	5.14 %	54.60 %	100.00 %
2	MANDAWAI	0	7	1,079	5	0	5	2	428	0	428	651	39.67 %	0.00 %	39.67 %	71.43 %
3	KAMIPANG	0	9	1,568	5	3	8	1	756	249	1,005	563	48.21 %	15.88 %	64.09 %	88.89 %
4	TASIK PAYAWAN	0	8	2,319	8	0	8	0	1,482	0	1,482	837	63.91 %	0.00 %	63.91 %	100.00 %
5	KATINGAN HILIR	2	6	9,205	8	0	8	0	7,155	0	7,155	2,050	77.73 %	0.00 %	77.73 %	100.00 %
6	TWG. SENGALANG GARING	1	9	3,029	10	0	10	0	2,132	0	2,132	897	70.39 %	0.00 %	70.39 %	100.00 %
7	PULAU MALAN	0	14	2,157	14	0	14	0	1,214	0	1,214	943	56.28 %	0.00 %	56.28 %	100.00 %
8	KATINGAN TENGAH	1	15	6,432	15	0	15	1	3,878	1,075	4,953	1,479	60.29 %	16.71 %	77.01 %	93.75 %
9	SANAMAN MANTIKEI	0	14	2,457	6	5	12	3	766	272	1,038	1,419	31.18 %	11.07 %	42.25 %	85.71 %
10	MARIKIT	0	18	1,872	4	14	18	0	661	1,140	1,801	71	35.31 %	60.90 %	96.21 %	100.00 %
11	KATINGAN HULU	1	22	2,037	2	21	23	0	498	1,315	1,813	224	24.45 %	64.56 %	89.00 %	100.00 %
12	PETAK MALAI	0	7	1,085	0	5	5	2	0	584	584	501	0.00 %	53.82 %	53.82 %	71.43 %
13	BUKIT RAYA	0	11	1,093	0	11	11	0	0	745	745	348	0.00 %	68.16 %	68.16 %	100.00 %
	JUMLAH	7	154		90	62			21,605	5,654						
	JUMLAH TOTAL	161		39,661	152		153	9	27,259		27,329	12,332	54.47 %	14.26 %	68.73 %	94.41 %

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Katingan, 2021

b. Persentase Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan tanpa izin adalah jumlah penambangan liar yang ditertibkan berbagi dengan luas area penambangan yang liar dikalikan 100 persen. Adapun persentase pertambangan tanpa izin di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.137  
Persentase Pertambangan Tanpa Izin  
di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Penambangan Liar Yang Ditertibkan	0	0	0
Luas Area Penambangan Liar (Ha)	1.700	1.700	1.700
Persentase Pertambangan Tanpa Izin (%)	0	0	0

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai 2017

Catatan : Ini merupakan kewenangan Provinsi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pertambangan tanpa izin yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0 persen. Ini berarti pengawasan di bidang pertambangan belum dilakukan dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius mengingat semakin luasnya area penambangan liar di Kabupaten Katingan. PETI di wilayah Kabupaten Katingan apabila dilakukan secara terus menerus berdampak pada peningkatan TSS (kekeruhan) yang merupakan parameter kunci pencemaran air di DAS Katingan. Peningkatan TSS dan parameter

9 Xfg



lainnya (COD, BOD, DO) ini menurunkan kapasitas penyediaan air minum layak dan kegiatan domestik masyarakat di sekitar lokasi pencemaran. Selain berdampak pada pencemaran lingkungan (air sungai), PETI juga akan mengakibatkan longsor pada tanah di tepi sungai dan pendangkalan sungai sehingga berpotensi banjir.

2.3.2.6. Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

a. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n dibagi dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal. Adapun Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 berjumlah 4. Sedangkan data tahun-tahun berikutnya tidak tersedia.

b. Pasar Tradisional

Pasar beserta aktivitasnya merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan mulai berkembangnya suatu daerah maupun ekonomi masyarakatnya, khususnya di wilayah yang mencakup beberapa desa yang berdekatan. Adapun jumlah pasar tradisional di Kabupaten Katingan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah hingga tahun 2018 berjumlah 21 pasar.

Tabel 2.138  
Pasar Tradisional di Kabupaten Katingan

No	Nama Pasar	Lokasi		Bentuk Bangunan
		Desa/Kel.	Kecamatan	
1.	Pasar Pagatan	Pagatan Hilir	Katingan Kuala	Toko, Los
2.	Pasar Subur Indah	Subur Indah	Katingan Kuala	Kios
3.	Pasar Jaya Makmur	Jaya Makmur	Katingan Kuala	Kios
4.	Pasar Mendawai	Mendawai	Mendawai	Toko, Los
5.	Pasar Mekar Tani	Mekar Tani	Mendawai	Los
6.	Pasar Perigi	Perigi	Mendawai	Kios
7.	Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) Ujung Hurung	Kasongan Baru	Katingan Hilir	Los
8.	Pasar Bajenta	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Kios
9.	Pasar Kasongan	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Kios,Toko
10.	Pasar Basah Kasongan	Kasongan Lama	Katingan Hilir	Los
11.	Pasar Kereng Pangi	Hampalit	Katingan Hilir	Kios,Los
12.	Pasar Pendahara	Pendahara	Twg. Sanggalang Garing	Kios,Los
13.	Pasar Buntut Bali	Buntut Bali	Pulau Malan	Los
14.	Pasar Tura	Tura	Pulau Malan	Los
15.	Pasar Tumbang Samba	Tumbang Samba	Katingan Tengah	Kios
16.	Pasar Tumbang Kaman	Tumbang Kaman	Sanaman Mantikei	Kios
17.	Pasar Tumbang Hiran	Tumbang Hiran	Marikit	Kios

Handwritten signature and date: 9/1/14



No	Nama Pasar	Lokasi		Bentuk Bangunan
		Desa/Kel.	Kecamatan	
18.	Pasar Tumbang Sanamang	Tumbang Sanamang	Katingan Hulu	Kios
19.	Pasar Dahian Tunggal	Dahian Tunggal	Pulau Malan	Los
20.	Pasar Desa Jaya Makmur	Desa Jaya Makmur	Katingan Kuala	Blok Pasar
21.	Pasar Desa Tumbang Manggu	Desa Tumbang Manggu	Sanaman Mantikei	Blok Pasar

Sumber: Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan, 2018

c. Pergudangan

Pergudangan memegang peran yang sangat penting bagi pelaku usaha. Barang yang disimpan di gudang bisa dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang maupun produk jadi. Peningkatan produktivitas dan pelayanan pergudangan akan sangat berpengaruh pada performansi suatu unit usaha secara keseluruhan. Adapun data Gudang di Kabupaten Katingan hingga tahun 2018 ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2.139  
Sarana Gudang di Kabupaten Katingan

No	Nama Gudang/Pemilik	Luas (M <sup>2</sup> )	Isi Gudang	Kondisi Gudang	Tahun Berdiri	Status Kepemilikan
1	Toko Andika/Egian Pranata	12 M <sup>2</sup>	Minuman Beralkohol	Baik	2014	PO
2	Dwi Gian Jaya Makmur/Rusmini, S.Pd	20 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
3	UD. Sawit Makmur/Purnadi	42 M <sup>2</sup>	PUPUK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI	Baik	2014	PO
4	CV. Cahaya Cipta Perkasa/Misran H.U	24 M <sup>2</sup>	Minyak Tanah	Baik	2014	CV
5	UD. Karunia Ilahi II/Riyadi	12 M <sup>2</sup>	Papan Les, Reng, Balok, Kasau Dll	Baik	2014	PO
6	Tiga Saudara/Rusiati	24 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
7	Pangkalan BBM Pangi Manis/Saliter, S.Pd	12 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
8	UD. Bintang Ringgong/Mastur Daman	200 M <sup>2</sup>	Minuman Beralkohol	Baik	2014	PO
9	Toko Bintang Jaya/Egun.L	40 M <sup>2</sup>	Bahan Bangunan	Baik	2014	PO
10	Pangkalan BBM Sederhan 01/Eriyanto	24 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
11	UD. Usaha Langgeng Bersama/Biadi Rahman	200 M <sup>2</sup>	Balok, Kasau, Papan Lis, Papan Reng Dan Aneka Jenis Kayu	Baik	2014	PO
12	UD. Karya Keluarga/M. Hasan Atthariq	200 M <sup>2</sup>	Balok, Kasau, Papan Lis, Papan Reng Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian	Baik	2014	PO
13	PT. Inti Bumi Katingan/Agus Dwi Hartanto	1400 M <sup>2</sup>	Pasir Zircon (Gudang Transit)	Baik	2014	PT
14	UD. Anugrah/Sungih	48 M <sup>2</sup>	Rotan	Baik	2014	PO
15	UD. Al-Amin/Gatin Rangkai	320 M <sup>2</sup>	Papan, Balok, Kasau, Reng, Aneka Jenis Kayu Lainnya	Baik	2014	PO
16	CV. Karya Ilham/Kiki Rahatinor	96 M <sup>2</sup>	Papan, Les, Reng, Balok, Kasau, Aneka Jenis Kayu Gergajian, Moulding, dll	Baik	2014	CV
17	PT. Kasongan Zircon Industry/Junaidi	750 M <sup>2</sup>	Zirkon	Baik	2014	PT

19 X 10





No	Nama Gudang/Pemilik	Luas (M <sup>2</sup> )	Isi Gudang	Kondisi Gudang	Tahun Berdiri	Status Kepemilikan
18	PT. Fadhila Usaha Bersama/Muhammad Farid Payawan Putra	36 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PT
19	CV. Mitra Usaha Sejati/H.Berkat Setiawan	24 M <sup>2</sup>	Minyak Tanah	Baik	2014	CV
20	CV. Dendy Jaya Mandiri/Hadiyanto, G.S	24 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	CV
21	UD. Hampangen Jaya/Yuda Anugraha Rangkai, SP	48 M <sup>2</sup>	Kasau, Balok, Papan Les, Reng, Aneka Jenis kayu serta Meubelair	Baik	2014	PO
22	UD. Al-Zahra/Mahyudin	18 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
23	CV. Satu Putri Dua Putra/Jumiati	40 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
24	UD. Bahagia / Yemini. LG	24 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
25	CV. Sangalang Makmur/Ruspida	80 M <sup>2</sup>	Rotan	Baik	2014	CV
26	UD. Lancar / Trimo	35 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
27	CV. Metro Megah Jaya Cemerlang/Mardianto L. Hanyi	35 M <sup>2</sup>	Meubelair/Moulding	Baik	2014	CV
28	UD. Wahyu Bersama/Yuli Patria, ST	24 M <sup>2</sup>	BB Dan Gas	Baik	2014	PO
29	UD. Mira Bella / Wiji Santoso	12 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
30	Toko Novi / Elsy Aulia Mamahit	24 M <sup>2</sup>	Minuman Beralkohol	Baik	2012	PO
31	CV. Bumi Katingan Makmur/Syaiwa, SE	258,39 M <sup>2</sup>	Aneka Jenis Rotan, Karet Dan Damar	Baik	2014	CV
32	Koperasi Indo Frima Hutan Lestari/Mardianto	500 M <sup>2</sup>	Papan, Balok, Kasau, Reng, Aneka Jenis Kayu Gergajian dan Lainnya	Baik	2014	Koperasi
33	Pangkalan BBM Aya/Yahya	20 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
34	Pangkalan BBM Sanah Lefi/Pitriansyah	16 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
35	Pangkalan BBM AUSIS II/Siswanto, Amd.Kep	24 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
36	Pangkalan BBM Abel/Dere Y.Engkak	40 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
37	PT. Trio Karya Mandiri/Saharuddin	18 M <sup>2</sup>	BBM Dan Gas	Baik	2014	PT
38	Kios BBM Aulia/Muhammad Hermansyah	6 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
39	CV. Maju Bersama / Nasrudin	35 M <sup>2</sup>	Gas Elpiji	Baik	2015	PO
40	Kios Tani Rasyid/H.Syamsul Rasid	24 M <sup>2</sup>	Pupuk Dan Pemberantas Hama	Baik	2015	PO
41	KUD. Mitra Cahaya Mandiri/H.M.Zairin	30 M <sup>2</sup>	Bahan Makan Ternak, Obat Pertanian Dan Pupuk	Baik	2015	PO
42	UD. Lisna / Sarwani	40 M <sup>2</sup>	BBM Dan Gas	Baik	2015	PO
43	PT. Kurnia Alam Sejati/Tri Joko	1500 M <sup>2</sup>	Pasir Zircon	Baik	2012	PT
44	UD. Raja Jabon Furniture/Mahdianor	48 M <sup>2</sup>	Kayu Akasia Dan Kayu Hasil Kebun Lainnya	Baik	2015	PO
45	PT. Papa Syamsu/Sinta Sulistya Ningrum	48 M <sup>2</sup>	Sembako	Baik	2015	PO
46	PT. Kalimantan Mineral Sands/Peter John Curran	100 M <sup>2</sup>	Pasir Zircon	Baik	2010	PT
47	J.M Mandiri / Jaini	40 M <sup>2</sup>	Rotan	Baik	2015	PO
48	Toko Anugrah/M.Katmo	20 M <sup>2</sup>	Gas Elpiji	Baik	2015	PO

9/14



No	Nama Gudang/Pemilik	Luas (M <sup>2</sup> )	Isi Gudang	Kondisi Gudang	Tahun Berdiri	Status Kepemilikan
49	UD. Cindy Fastika/Syahladin.I	24 M <sup>2</sup>	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
50	CV. Harapan Bersama/Fauji	20 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	CV
51	CV. Yusan Agatis/Harry Himawan	1.200 M <sup>2</sup>	Kotak Makanan, Sendok, Sumpit Berbahan Kayu	Baik	2015	CV
52	Pangkalan BBM Widia/Jaya Akbar	100 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
53	Pangkalan BBM Budiana/Budi Makmur	30 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
54	PT. Sumber Harapan Tumbang Samba/H.Edy Syuhada, H.M, SE	400 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PT
55	UD. Jaya Mandiri/Nina Elisa, A.Md Keb	96 M <sup>2</sup>	Moulding Dan Maubel	Baik	2015	PO
56	Koperasi Pertambangan Aurat/Nyagin S	48 M <sup>2</sup>	Pasir Zircon	Baik	2015	Koperasi
57	UD. Umbar/Paryono	30 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2014	PO
58	CV. Sindo Makmur/H.Ripansyah	300 M <sup>2</sup>	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2012	PO
59	Happy Family/Akhmad Husaini	20 M <sup>2</sup>	Minuman Beralkohol	Baik	2015	PO
60	CV. Gunadarma Jaya/Darmawan	98 M <sup>2</sup>	Pupuk Dan Bahan Makanan Ternak	Baik	2015	CV
61	PT. Anugerah Borneo Lestari/Ir. Nobelson Anggen	128 M <sup>2</sup>	Pasir Zircon	Baik	2012	PT
62	Kios Nuryani/Nuryani	24 M <sup>2</sup>	Minuman Beralkohol	Baik	2015	PO
63	Koperasi Produksi Indo Frima Huta/Mardianto	500 M <sup>2</sup>	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2014	Koperasi
64	UD. Usaha Bersama/H.Budi Anto	100 M <sup>2</sup>	Balok, Papan, Reng, Kasau, Tongkat Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
65	Koperasi Serba Usaha Bersama Nelayan Keramba Apung Kasongan/Riskani Ahmad Efendi	120 M <sup>2</sup>	Bahan Pakan Ikan	Baik	2015	Koperasi
66	CV. Kurnia Alam Sejati/Tri Joko	144 M <sup>2</sup>	Pasir Zircon	Baik	2015	CV
67	UD. Mitra Usaha Tani/Weldisen	49 M <sup>2</sup>	Balok, Papan, Reng, Kasau, Dan Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
68	Pangkalan BBM Piatigorski/Piatigorski	25 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
69	Pangkalan BBM Fauzy/Sugeng Prayetno	20 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
70	Sumber Hidup / Ikbal Khair	30 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
71	UD. Armando Jaya Utama/Ramba	30 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
72	CV. Patriatama Katingan/Abirani	60 M <sup>2</sup>	Pasir Zircon	Baik	2015	CV
73	Koperasi Hapakat Bulat/Taswandhie	18 M <sup>2</sup>	Pupuk, Saprodi, Buah Sawit	Baik	2015	Koperasi

9 y f



No	Nama Gudang/Pemilik	Luas (M <sup>2</sup> )	Isi Gudang	Kondisi Gudang	Tahun Berdiri	Status Kepemilikan
74	PT. Nazwa Liza Griya/Rajak Al Amindara	200 M <sup>2</sup>	Air Mineral Kemasan	Baik	2015	PT
75	Pangkalan BBM Rafi Karya/Wawan Irawan	25 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
76	UD. Runen Jaya Perkasa/Muhammad Maulana	160 M <sup>2</sup>	Balok, Papan, Galar,Reng, Aneka Jenis Kayu Gergajian Lainnya	Baik	2015	PO
77	UD. Wahyu/M.Aini	160 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2015	PO
78	CV. Anugerah Pradana/Anton Aswin Lubis	12 M <sup>2</sup>	Buah Kelapa Sawit Dan Pupuk	Baik	2015	CV
79	KSU BMT Karya Usaha Bersama/Mariansyah, S.Si	600 M <sup>2</sup>	Rotan	Baik	2015	PO
80	Ud. Tani Subur/ Eko Suseno	20 M <sup>2</sup>	Pupuk Non Subsidi Dan Pupuk Bersubsidi	Baik	2017	PO
81	CV. Tani Subur/ Eko Suseno	42 M <sup>2</sup>	Pupuk, Buah Sawit	Baik	2017	PO
82	CV. Mendawai Mandiri/ Alpian	30 M <sup>2</sup>	Gas LPG	Baik	2017	PO
83	Koperasi Harapan Makmur/ Guruh	24 M <sup>2</sup>	Balok, Papan Galar, Papan Reng, Papan Lis dan Aneka Jenis Kayu Gergajian	Baik	2017	Koperasi
84	PT. Bintang Sarana Karya Abadi/ Donny Gunadi	200 M <sup>2</sup>	Bahan Dan Perlengkapan Bangunan, Bahan Konstriksi Dari Kayu	Baik	2017	PT
85	PT. Hutan Karya Alam Persada/ Ir. Ruzdhan Noor	200 M <sup>2</sup>	Hasil Pertanian dan Kehutanan	Baik	2017	PT
86	UD. Sasa/ Dian	15 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2017	PO
87	CV. Satu Putri Dua Putra/Jumiati	40 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2012	CV
88	CV. Bahtera Sejahtera Bersama/ Muhammad Dawid Az Tundan	40 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2017	CV
89	Toko Itah/ Yanito	36 M <sup>2</sup>	Minuman Beralkohol	Baik	2007	PO
90	UD. Kaspari Permai/ Muliana	20 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2012	PO
91	UD. Ausis/ Hamid. N	24 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2012	PO
92	UD. Bapak Ida/ Muhamad Ishak	30 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2012	PO
93	UD. Karya Mustika/ Yasen A	20 M <sup>2</sup>	BBM	Baik	2012	PO
94	PT. Alfa Prima Lestari/ Evi Liana	60 M <sup>2</sup>	Pupuk Dan Pemberantas Hama	Baik	2017	PT

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan, 2018

2.3.2.7. Perindustrian

a. Persentase Pertumbuhan Industri

Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Katingan tahun Tahun 2015 sampai tahun 2020 menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2015 persentase pertumbuhan industri sebesar -1,86 persen dan secara drastic meningkat menjadi 13,57 persen pada Tahun 2017, menurun Kembali di tahun 2018 menjadi 0,61 persen dan meningkat Kembali sampai tahun 2020 menjadi 7,95 persen.

19/1/24





**Tabel 2.140**  
**Persentase Pertumbuhan Industri**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	-10	55	79	4	14	54
Persentase Pertumbuhan Industri (%)	-1,86	10,44	13,57	0,61	2,11	7,95

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2015 dan 2016 dan RKPD Kab. Katingan Tahun 2018

**b. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**

Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan menunjukkan jumlah kelompok pengrajin dari tahun ketahun selalu bertambah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah, dimana pada tahun 2015 terdapat 62 kelompok pengrajin dan bertambah terus jumlahnya mencapai 70 kelompok pengrajin sampai tahun 2019, dan menurun di tahun 2020 menjadi 65 pengrajin. Sementara itu selama periode yang sama, terdapat bantuan kepada kelompok pengrajin yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan. Namun bantuan tersebut diberikan pada tahun 2015 pada 6 kelompok, di tahun 2018 kepada 2 kelompok dan tahun 2019 kepada 4 kelompok.

**Tabel 2.141**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapat bantuan (kelompok)	6	0	0	2	4	0
Jumlah Kelompok Pengrajin (kelompok)	62	63	63	67	70	65
Persentase bina kelompok pengrajin yang mendapat bantuan (%)	9,7	0	0	3	5,7	0

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, 2017

**2.3.2.8. Transmigrasi**

Jumlah transmigran umum di Kabupaten Katingan nampaknya mengalami stagnansi. Hal ini ditunjukan oleh dengan jumlah transmigran umum sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlahnya sama yaitu 3.681 orang. Angka ini masih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 3.667 orang. Sementara itu transmigran swakarsa selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada.

**Tabel 2.142**  
**Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017**

Uraian	2015	2016	2017
Jumlah transmigran (orang)	3.681	3.681	3.681

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2013-2017

*Handwritten signature and date: 9/14*



*\*Setelah habis masa bina baik di Eks. UPT. Pulau Malan SP. 1 maupun di Eks. UPT. Hiyang Bana SP. 1 tidak pernah di data ulang jumlah transmigran.*

**2.3.3. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**

**2.3.3.1. Sekretariat Daerah**

**a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan. Selain itu, laporna ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan SAKIP atau LKjIP Pemerintah Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.143**  
**Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	47,37 (C)	48,66 (C)	50,33 (CC)	CC	56,69 (CC)	56,94 (CC)

*Sumber: Lakip Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020, Setda Kab. Katingan*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Bila ditinjau pencapaian selama 6 tahun terakhir, maka diketahui bahwa pada Tahun 2015 dan 2016 nilai SAKIP Katingan berada pada Nilai C, meningkat di tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan nilai SAKIP berada pada CC. Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen pemda untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

**b. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yaitu nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan.

*Handwritten signature and initials*



**Tabel 2.144**  
**Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai LPPD	2,4329 (Tinggi)	2,7255 (Tinggi)	2,9196 (Tinggi)	2,9860 (Tinggi)	2,5778 (Tinggi)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2018

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai LPPD Kabupaten Katingan pada tahun 2013 (2,4329) mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 2,9860 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 2,5778. Walaupun mengalami penurunan, namun predikatnya masih tetap Tinggi.

**2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**2.3.4.1. Perencanaan**

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Katingan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

**a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

Rencana Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Sebagai wujud untuk memaknai fungsi tersebut maka perhatian terhadap visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD menjadi sangat penting. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025.

**Tabel 2.145**  
**Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Handwritten signature and date: 9/1/20





Sumber: Bappelitbang Kab. Katingan, 2020

**b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/ selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah dan seklaigus menjadi pedoman penyusunan RKPD. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018.

**Tabel 2.146**  
**Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2020

**c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perda dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai

12  
9/1/24



target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan.

**Tabel 2.147**  
**Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

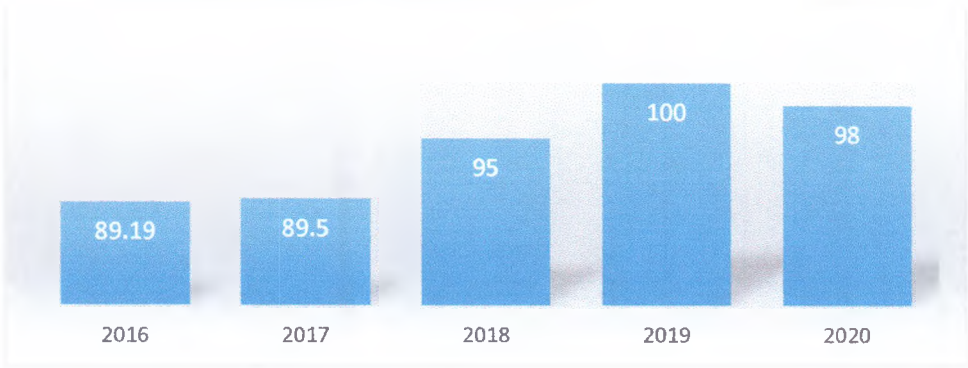
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2020

**d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD**

Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berpedoman pada RPJMD, dengan kata lain RKPD merupakan penjabaran RPJMD di tahunan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahun berkenaan yang sama atau berpedoman pada RPJMD dibagi dengan jumlah program RKPD tahun tersebut dikali 100%.

**Gambar 2.19 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020**



Sumber: Bappelitbang Kab. Katingan

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2016 sebesar 89,19 persen, meningkat di tahun 2017 hingga 2019 masing-masing menjadi 89,5 persen dan 95 persen kemudian turun di tahun 2020 menjadi 98 persen. Kondisi ini mengindikasikan penurunan konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke RKPD. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus pada tahun-tahun berikutnya dalam penyusunan RKPD, sehingga konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke RKPD selalu tetap dijaga.

Handwritten signature and initials.



#### 2.3.4.2. Keuangan

##### a. Penetapan Perda APBD

Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Hal ini berarti, paling lambat tanggal 31 November, rancangan Perda APBD harus sudah disepakati/disetujui. Selanjutnya, perda ini akan dievaluasi oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Perda.

Penetapan Perda APBD Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai dengan 2020 selalu tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kondisi ini mendorong terciptanya tertib administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Katingan.

#### 2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah.

##### a. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.148**

**Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Diklat PIM (orang)	30	39	22	42	25
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS (orang)	111	105	72	72	217
Diklat Teknis (orang)	381	334	105	119	40
Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural (orang)	30	39	22	42	25

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pejabat di Kabupaten Katingan yang mengikuti Diklat PIM selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sebanyak 60 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 1 orang. Namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 30 orang dan 39 orang. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga menjadi 22 orang.

##### b. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, dapat diketahui bahwa jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2012 sampai

9/1/24





dengan 2015 yaitu 33 orang. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 30 Orang. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel diatas, maka diketahui persentase jabatan terisi sebanyak 97 persen pada Tahun 2017. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.149**  
**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (formasi)	33	30	30	30	30	30
Pemangku Jabatan (orang)	33	33	28	26	28	27
Persentase Jabatan pimpinan tinggi Terisi (%)	100	100	97	87	93	90

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021

**c. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah**

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.150**  
**Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah**  
**di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (formasi)	1.937	1.960	1.876	1.896	1.916	1.986
Pemangku Jabatan (orang)	1.467	1.318	1.260	1.242	1.216	1.207
Persentase Jabatan administrasi Terisi (%)	75	67	67	66	63	61

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu 615 orang, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 638 Orang.

**d. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu 895 Orang. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

h  
9/11/2023



**Tabel 2.151**  
**Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (formasi)	4.534	3.725	3.210	3.320	3.353	3.423
Pemangku Jabatan (orang)	3.091	2.631	2.613	2.516	2.635	2.533
Persentase Jabatan fungsional tertentu Terisi (%)	68	71	81	76	79	74

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021

**2.3.4.4. Pengawasan**

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

**a. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK**

Data dari Inspektorat menunjukkan bahwa jumlah total temuan BPK di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 adalah 41 buah. Situasi ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 42 buah. Kondisi ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemda dan membutuhkan perbaikan penataan administasi dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Lebih lanjut,berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Katingan, dapat diketahui bahwa Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 43,90 persen, mengalami peningkatan tahun 2016 menjadi 76,19 persen. Detail mengenai Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.152**  
**Persentase Tindak Lanjut BPK**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016**

Uraian	2015	2016
Persentase tindak lanjut temuan BPK (%)	43,90	76,19
Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti	18	32
Jumlah total temuan BPK	41	42

Sumber: Inspektorat Kabupaten Katingan

**2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

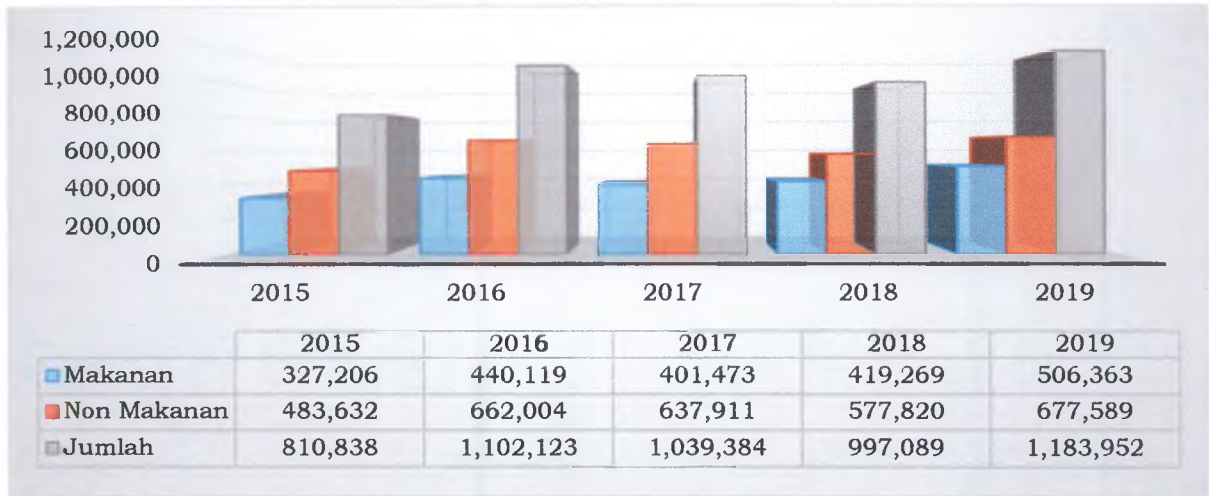
Handwritten signature and date: 12/4



2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Gambar 2.20 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Katingan, 2018, diolah

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita atau Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pada dua tahun terakhir ini rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Katingan tidak ada yang berada di bawah Rp.200.000,-, bahkan untuk semua jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun total pengeluaran rumah tanggal mengalami peningkatan dari Rp.810.838,- ditahun 2015 menjadi Rp.1.183.952,- di tahun 2019.

Handwritten signature and date: 9/1/4





**Tabel 2.153**  
**Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran**  
**Per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan, 2016-2019**

Golongan Pengeluaran (Rp)	Persentase Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)	Persentase Penduduk (%)
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
< 150 000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000 – 199 999	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000 – 299 999	0,62	0,93	0,00	0,00
300 000 – 499 999	10,72	6,07	5,73	4,74
500 000 – 749 999	16,99	25,59	26,88	19,06
750 000 – 999 999	18,37	26,22	23	25,23
1 000 000 – 1 499 999	33,72	27,41	24,1	26,78
1 500 000+	19,57	13,79	20,3	24,18
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kab. Katingan, 2018

Adapun dominasi pengeluaran rata-rata di tahun 2019 masih pada golongan antara Rp.1.000.000,- s/d Rp.1.499.999,- yaitu sebesar 26,78%. Bila dibandingkan dengan pengeluaran tahun sebelumnya, justru yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah jenis pengeluaran antara Rp.1.500.000,- + dari 20,3% di tahun 2018 menjadi 24,18% di tahun 2019.

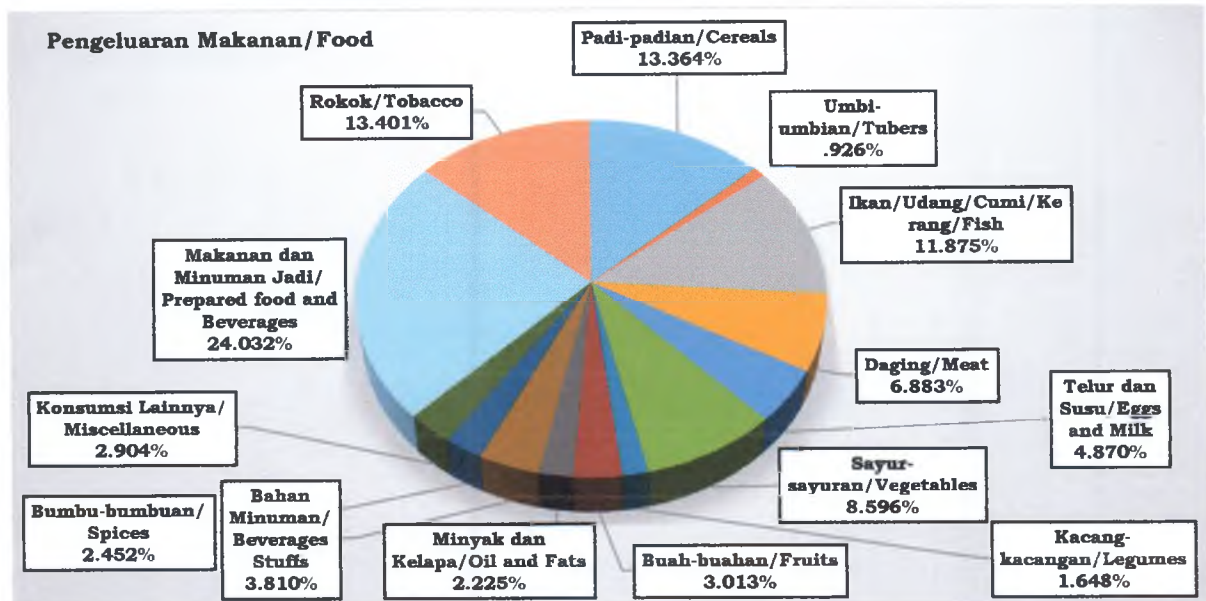
**2.4.2.Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita**

Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita sebulan di Kabupaten Katingan masih didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas makanan. Sebesar 61,37% dari total pengeluaran penduduk per kapita selama sebulan dibelanjakan untuk komoditas makanan sebesar Rp.637.911,- turut dibanding tahun 2016. Untuk jenis pangannya, terbanyak masih jenis makanan dan minuman jadi sebesar 24,03%, diikuti oleh pengeluaran untuk beli rokok (13,40%) dan belanja padi-padian (13,36%).

h  
9/19



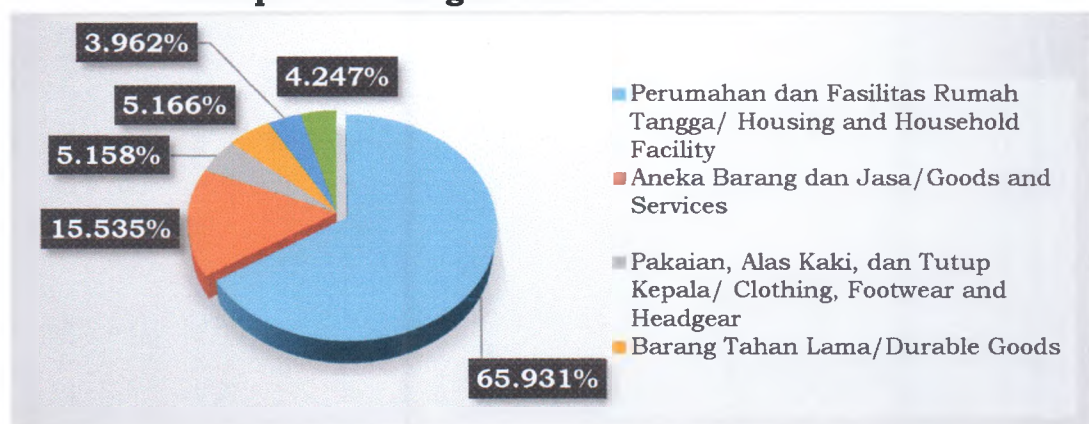
**Gambar 2.21 Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kab. Katingan Tahun 2017**



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

Untuk pengeluaran non pangan di tahun 2017, masyarakat Katingan paling banyak membelanjakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 65,93% dan belanja aneka barang dan jasa sebesar 15,54% dari total pengeluaran per kapita selama sebulan sebesar Rp.401.473,-. Berikut data selengkapnya terkait jumlah pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan masyarakat Katingan di tahun 2017.

**Gambar 2.22 Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017**



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

#### 2.4.3. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta

Handwritten signature and date: 19/1/14

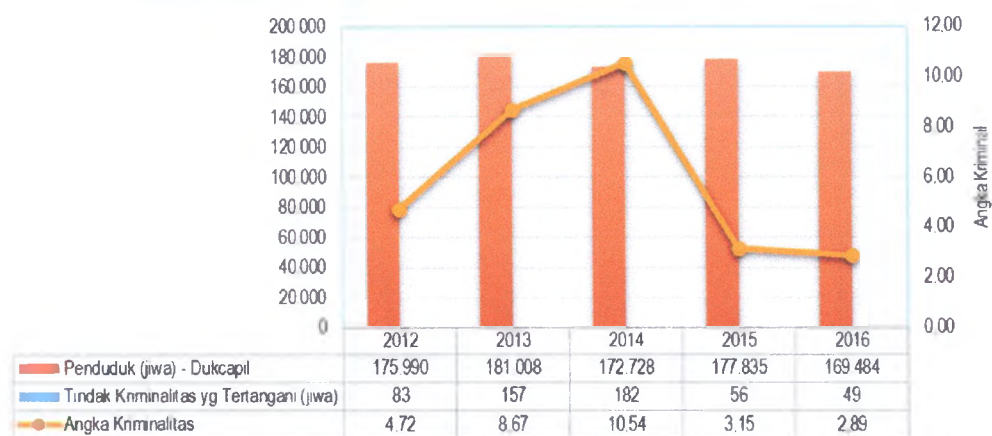


menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di bawah, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2012–2016 paling banyak di tahun 2014 sebesar 10,54 dan selanjutnya terus turun sampai angka 2,89 di tahun 2016.

**Gambar 2.23 Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Katingan Tahun 2012 – 2016**



Sumber: Kepolisian Resor Katingan – BPS – Disdukcapil Kab. Katingan, diolah

#### 2.4.4. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio Ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

14





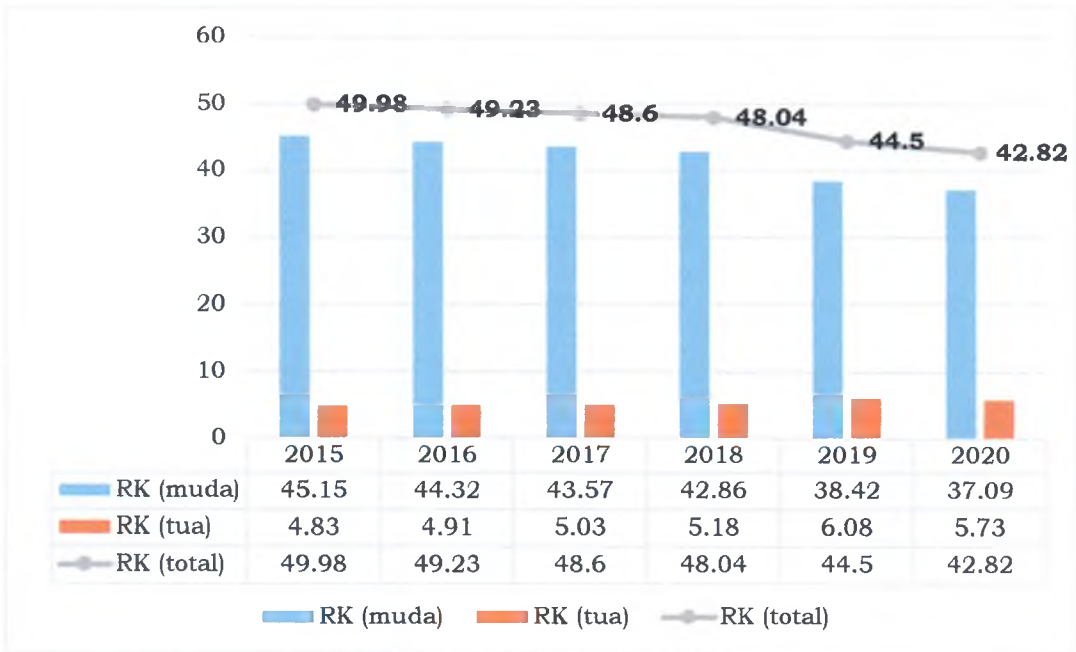
**Tabel 2.154**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

Kelompok Umur	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-14	48.260	48.360	48.464	48.554	41.963	42134
15-64	106.886	109.115	111.242	113.287	109.215	113.600
>64	5.159	5.362	5.600	5.865	6.638	6.505
Rasio Ketergantungan	49,98	49,23	48,60	48,04	44,50	42,82

Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Katingan periode 2015-2020 trennya terus menurun. Berdasarkan data pada tabel diatas, rasio ketergantungan total penduduk Katingan menurun dari 49,98 persen di tahun 2015 menjadi 42,82 persen di tahun 2020. Angka 42,82 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42-43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,82 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 37,09 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,73 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2020 penduduk usia kerja di Katingan masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

**Gambar 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**



Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah

Dengan semakin menurunnya angka ketergantungan ini menunjukkan bahwa Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek

h  
9/14



penambahan jumlah penduduk usia produktif. Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, Indonesia sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012, dan puncaknya akan terjadi di tahun 2028-2030 (Ritonga, 2014). Kabupaten Katingan pun dimungkinkan mengalami percepatan bonus demografi ini, bisa dikarenakan masukkan pendatang usia produktif dari luar daerah melalui program transmigrasi atau mencari lapangan pekerjaan di Katingan.

2.4.5.Jumlah Desa Tertinggal

Status desa tertinggal di Kabupaten Katingan menunjukkan jumlah yang cukup besar, yaitu 95 desa pada tahun 2019. Kondisi ini membutuhkan penanganan secara terpadu sehingga secara bertahap dapat terjadi pengurangan desa tertinggal dan dapat naik kelas menjadi desa berkembang, demikian juga desa berkembang dapat menjadi desa maju. Sedangkan desa berkembang pada tahun 2019 mencapai 37.

Tabel 2.155  
Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan  
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Desa Mandiri	-	-	-	-	2
Desa Maju	1	1	1	1	11
Desa Berkembang	2	12	12	37	64
Desa Tertinggal	49	65	65	95	73
Desa Sangat Tertinggal	102	76	76	21	4
Keseluruhan Desa	154	154	154	154	154

Sumber: IDM Kabupaten Katingan Tahun 2016 dan 2017, Dinas PMDes Kab. Katingan, 2021

Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Katingan sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel dibawah ini:

Handwritten signature and date: 9/14



**Tabel 2.156**  
**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Pertumbuhan PDRB	Persen	6,53	6,54	6,56	6,59	5,81	-3,25
2.	Laju inflasi (Palangka Raya)	Persen	4,20	1,91	3,11	3,68	2,7	0,85
	Laju inflasi (Sampit)	Persen	5,72	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62
3.	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	34,19	37,63	41,17	44,9	48,5	48,2
4.	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rp	24,89	26,11	27,41	28,8	30,1	28,7
5.	Indeks Gini	Indeks	0,257	0,253	0,266	0,301	0,247	0,252
6.	Persentase penduduk miskin	Persen	6,53	6,23	5,78	5,22	5,02	4,79
7.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,97	0,85	0,92	0,54	0,94	0,51
8.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,22	0,19	0,27	0,09	0,30	0,09
9.	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	66,81	67,41	67,56	67,91	68,55	68,68
10.	Angka Melek Huruf	Persen	98,61	97,50	99,49	99,29	99,68	99,20
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	12,19	12,20	12,21	12,51	12,67
12.	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,62	8,63	8,64	8,65	8,66	8,67
13.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	65,28	65,40	65,53	66,00	66,50	66,50
14.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	1,81	3,15	2,54	3,45	2	0,14
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	84,78	n/a	85,51	85,70	85,57	85,56
16.	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	Poin	60,79	n/a	66,87	73,32	66,57	66,41
17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jiwa	72,20	n/a	65,97	69,49	70,79	64,55
18.	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	94,03	n/a	96,19	-	-	-
19.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,97	n/a	3,81	4,78	5,45	5,69
20.	Keluarga Prasejahtera	KK	2.108	2.108	2.184	1.284	1.284	1.499

2  
144





No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Indeks	72,40	73,37	n/a	-	79,78	80,82
22.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	3,83	4,11	4,56	-	5,14	5,37
23.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	80,100	80.500	88,500	84,400	81,860	-
24.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
25.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	28,57	27,91	26,56	25,88	25,82	26,87
26.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	Persen	18,55	17,82	17,40	16,90	17,05	18,53
27.	Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	4,75	4,81	4,26	4,09	3,72	3,32
28.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Persen	8,51	8,6	8,39	7,52	6,63	5,32
29.	Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	Persen	5,27	5,29	4,90	4,89	5,04	5,02
30.	Peranan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	7,04	7,19	7,38	7,73	7,9	7,87
31.	Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	14,65	15,05	15,04	14,7	14,75	15,43
<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
II.1	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>							
<b>A</b>	<b>Pendidikan</b>							
<b>1</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>							
1.1	APK SD	Persen	118,75	109,59	108,01	118,86	115,44	114,12
1.2	APM SD/SDLB/MI	Persen	92,66	94,2	93,24	100	99,87	99,85

h/14



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Angka partisipasi sekolah SD	Persen	100	100	100	100	99,88	99,85
1.4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	104,75	104,75	100	100	-
1.5	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	79,59	101,51	87	-	85,05	-
1.6	Rasio Guru terhadap Murid	Rasio	14:1	12:1	14:1	15:1	12:1	-
2	<b>Pendidikan Menengah</b>							
2.1	APK SMP/MTs	Persen	98,13	98,17	98,65	89,58	77,73	78,27
2.2	APK SMA/SMK/MA	Persen	71,48	73,91	85,43	79,22	111,76	109,25
2.3	Angka partisipasi sekolah SMP	Persen	91,12	95,02	82,82	97,64	95,67	-
2.4	APM SMP/MTs	Persen	72,89	69,89	71,18	76,28	76,05	75,98
2.5	APM SMA/MA/SMK	Persen	54,84	52,84	55,95	64,62	67,03	67,62
2.6	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	Persen	93,92	96,38	97,64	97,64	95,67	96,76
2.7	Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	Persen	72,36	72,89	74,04	74,04	69,91	69,63
2.8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	99,60	120,51	120,51	102,50	98,52	-
2.9	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	99,53	103,50	103,50	-	-	-
2.10	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persen	98,96	86,12	n/a	-	-	-
2.11	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	Persen	11:1	10:1	12:1	12:1	11:1	-
2.12	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	Persen	11:1	11:1	12:1	12:1	12:1	-

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	76,41	81,34	79,87	77,36	84,85	22,220
B	Kesehatan							
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jiwa	2,07	8,90	2,91	10,61	13,3	6,2
2.	Angka Kelahiran Hidup	Jiwa	2.892	3.452	3.094	3.298	3.379	3.244
3.	Jumlah Kematian Bayi	Jiwa	6	31	9	35	45	20
4.	Angka Kematian Balita	Persen	3,11	12,75	8,73	10,61	5,39	0,62
5.	Angka Kematian Ibu	Persen	449,52	144,84	96,96	121,30	207,16	93
6.	Rasio Posyandu per satuan balita	Rasio	1,186	1,567	1,488	1,2	1,4	1,4
7.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Rasio/jumlah	0,099	0,098	0,096	0,095	0,101	0.098
8.	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	Rasio	0,68	0,67	0,67	0,73	0,76	0,77
9.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
10.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,27	0,26	0,26	0,30	0,36	0,46
11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	27,72	19,50	28,05	31,6	34,2	26,9
12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	72,29	84,21	77,19	80,44	83,66	80,3
13.	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	Persen	70,18	67,08	60,25	80,7	71,4	75,2
14.	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100





No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	20,12	54,90	14,53	100	100	100
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100
17.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	54,62	99,41	92,34	58,5	98,7	92,2
18.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	82,38	82,41	83,70	82,4	85,0	79,1
19.	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Persen	76,88	88,84	77,04	84,1	84,0	80,0
20.	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	15,68	36,11	23,06	2,8	8,3	4,5
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1.	Panjang Jalan	Km	740,38	784,37	794,37	797,61	807,59	
2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	16,69	16,01	18,48	20,30	25,84	26,61
3.	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	28,59	30,33	31,57	33,43	29,4	30,56
4.	Panjang Jalan dilalui roda empat (permukaan aspal/km)	Km	223,14	234,66	256,11	272,332	279,941	285,349
5.	Panjang Jalan dilalui roda empat (permukaan tanah/km)	Km	344,23	437,04	482,37	480,136	483,682	9,918
6.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)	Km	1,36	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
7.	Luas Irigasi Kabupaten	HA	17.545	17.545	17.545	7.373	7.373	7.373

h/12



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	52,00	58,00	75,00	46,11	47,83	38
9.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persen	46,09	39,61	43,83	36,00	32,82	-
10.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	desa	1	2	14	33	42	44
11.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	persen	24,72	24,72	25,35	45,367	10,498	35,273
12.	Luasan RTH Publik Sebesar sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	4,99	5	5	45,87	45,87	2,24
<b>D</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>							
1.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,063	0,337	0,422	0,261	0,449	0,248
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	Persen	83,13	84,12	84,84	84,79	85,38	86,48
3.	Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN	persen	80,89	74,50	83,49	83,67	63,85	69,63
<b>E</b>	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>							
1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	persen	71,46	59,53	59,53	38,5	38,53	38,53

h t x b  
h



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	100	100	100	88,81	81,70	95,71
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	30,77	30,77	4,96	38,5	38,53	38,53
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK	Persen	n/a	n/a	77,78	n/a	n/a	n/a
5.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	rasio	8/10.000	8/10.000	5/10.000	6/10.000	6/10.000	6/10.000
6.	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17	98,17
<b>F</b>	<b>Sosial</b>							
1.	Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan	Kelompok	8 (APBD) 65 (APBN)	14 (APBD) 65 (APBN)	15 (APBD) 146 (APBN)	30(APBD) 15(APBD Prov) 236 (APBN)	-	-
2.	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	n/a	n/a	21	43,84	45,32	52
3.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	3	3	3	3	3	3
4.	Persentase Korban Bencana Alam/ Sosial Yang Ditangani	persen	85	85	85	85	90	95
<b>G</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
1	Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan	Kasus	n/a	2	6			





No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	77,52	86,16	44,22	49,08	51,68	51,68
2.	Rasio KDRT	persen	0,031	0,009	0,004	0,016	0,032	n/a
3.	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Poin	0	32	513	659	659	675
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	persen	100	100	100	100	100	100
I	<b>Pangan</b>							
1.	Ketersediaan Pangan:							
	• Beras	Ton	40.201	42.613	45.170	50.336	22.204,83	42.678
	• Daging	Ton	19.005	19.955	20.953	1.586	1.608	1.641
J	<b>Pertanahan</b>							
1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	0,58	0,71	6,21	-	0,89	-
K	<b>Lingkungan Hidup</b>							
1.	Volume sampah yang ditangani	(m3)/hari	81	18.500	20.000	-	13,92	41,66
2.	Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	Persen	59,66	40,00	42,14	1.06	1.06	3.18



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Penegakan hukum lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100
L	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.	Rasio penduduk ber KTP satuan penduduk	persen	77,34	97,46	90,58	99,01	99,15	99,64
2.	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	76	75	83	89,56	92,05	93,28
3.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	persen	76	75	n/a			
4.	Rasio pasangan berakte nikah	persen	8,83	10,73	12,62	22,21	26,33	28,76
5.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1.	Jumlah LSM/Ormas Aktif	Lembaga	19	25	28	15	15	
2.	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
N	Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana							
1.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	Persen	78,09	78,33	78,51	78,69	78,87	79,05
2.	Cakupan Keluarga dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Persen	40,99	73,91	75,16	36,65	44,75	52,85
3.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	19,53	18,91	27,44	29,28	31,12	32,96



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( <i>Unmeet need</i> )	Persen	15,22	14,86	13,4	89,70	90,90	92,10
5.	Rasio jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Persen	47,83	97,52	70,19	11,80	25,61	39,42
6.	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	Persen	27,27	73,25	88,5	89,70	90,90	92,10
7.	Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja	Persen	18,63	45,34	45,34	12,42	27,87	43,23
<b>O</b>	<b>Perhubungan</b>							
1.	Jumlah Terminal Angkutan Umum Kelas C	Jumlah	1	1	1	1	1	1
2.	Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan	Unit	1.200	1.015	989	875	35	-
3.	Pemasangan rambu-rambu	Unit	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235	1.246
4.	Izin Trayek							
	Izin Trayek Angkutan Jalan	Jumlah	13	13	n/a	n/a	n/a	n/a
	Izin Trayek Angkutan Sungai	Jumlah	55	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>P</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	KIM	-	-	-	-	-	-
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	33	33	29	30	30.84	31.44

h/1/20





No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Q</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>							
1.	Persentase koperasi aktif	persen	43,67	47,64	57,43	42,23	44,10	44,12
2.	Persentase Usaha Mikro dan kecil	persen	100	100	100	100	99,87	99,87
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah	1630	44831	44831	1526	1559	1607
4.	Jumlah BPR/LKM	jumlah	0	0	0	0	0	0
<b>R</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah	76+16	81+16	99+16	107+16	119+14	63+10
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Jumlah	139.923.730	237.496.700.000 ,00	1.124.980.148.6 45,00	848.775.526.019 ,00	3.790.278.623.2 86,00	4.171.745.209.3 52,80
3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Jumlah	342.845.923.00 0	239.846.810.000 ,00	1.219.881.974.6 52,41	1.875.572.532.1 32,41	1.852.401.015.3 42,41	2.171.948.678.6 54,34
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen			373,68%	-24,55%	346,56%	10,06%
<b>S</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	18	18	18	120	126	126
<b>T</b>	<b>Statistik</b>							
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak			
2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>U</b>	<b>Kebudayaan</b>							
1.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	2
3.	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	2	2	2	2	2	2
<b>P</b>	<b>Perpustakaan</b>							
1.	Pengunjung Perpustakaan per tahun	Persen	95,11	78,21	n/a			
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	33,33	33,46	n/a	n/a	19,58	
<b>W</b>	<b>Kearsipan</b>							
1.	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	Persen	0	0	n/a			
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	2	2	n/a			
<b>II.2</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>							
<b>A</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
1.	Produksi Perikanan	ton/tahun	3.342,53	7.802,19	n/a	9.222,37	8.650,03	8.832,275
2.	Tingkat Capaian Produksi Perikanan	Persen	89,47	92,71	90,63	90,06	89,54	90,21

916



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Konsumsi ikan	Persen	39,55	40,98	41,30	41,70	42,00	42,50
<b>B</b>	<b>Pariwisata</b>							
1.	Kunjungan wisata	Persen	34.351	32.405	40.290	32.570	36.336	11.826
<b>C</b>	<b>Pertanian</b>							
1.	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	34,38	31,21	32,06	28,09		31,85
<b>D</b>	<b>Kehutanan</b>							
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persen	6,88	0,43	n/a			
2.	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	27,68	27,22	n/a			
<b>E</b>	<b>Energi dan Sumberdaya Mineral</b>							
1.	Persentase pertambangan tanpa izin	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>F</b>	<b>Perdagangan</b>							
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	7,04	7,19	7,38	7,73	7,9	7,87
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>G</b>	<b>Perindustrian</b>							
1.	Persentase pertumbuhan industry	Persen	-1,86	10,44	13,57	0,61	2,11	7,95

h/14





No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Persentase bina kelompok pengrajin yang mendapat bantuan	Persen	9,7	0	0	3	5,7	0
<b>H</b>	<b>Transmigrasi</b>							
1.	Jumlah transmigran	Orang	3.681	3.681	3.681	n.a	n.a	n.a
<b>II.3</b>	<b>Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
<b>A</b>	<b>Perencanaan</b>							
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	91,3	89,19	n/a			
<b>B</b>	<b>Keuangan</b>							
1.	Penetapan Perda APBD	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
<b>C</b>	<b>Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan</b>							
1	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural	Orang	30	39	22	42	25	-



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase Jabatan pimpinan tinggi Terisi	Persen	100	100	97	87	93	90
3	Persentase Jabatan administrasi Terisi	Persen	75	67	67	66	63	61
4	Persentase jabatan fungsional tertentu terisi	Persen	68	71	81	76	79	74
D	Pengawasan							
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	Persen	43,90	76,19	n/a			
E	Sekretariat Daerah							
1.	Nilai SAKIP	Predikat	47,37 (C)	48,66 (C)	50,33 (CC)	(CC)	56,69(CC)	56,94(CC)
2.	Nilai LPPD	Nilai/Predikat	2,9196 (Tinggi)	2,9860 (Tinggi)	2,5778 (Tinggi)			
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sebulan	rupiah	810.838	1.102.123	1.039.384	997.089	1.183.952	-
2.	Produktivitas Tenaga Kerja	juta rupiah/ tenaga kerja	52,28	n/a	n/a			
3.	Tindak Kriminalitas Yang Tertangani	kasus	56	49	120			
4.	Rasio ketergantungan	Persen	49,98	49,23	48,60	48,04	44,50	42,82

Sumber:diolah dari evaluasi hasil perangkat daerah, 2021



2.5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penerapan SPM di Kabupaten Katingan tahun 2019 dan 2020 telah dilaporkan dan menjadi bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ringkasan pencapaian dari penerapan SPM di Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

2.5.1. Capaian Penerapan SPM Tahun 2019

A. Bidang Pendidikan

1. Jenis pelayanan dasar

Sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 pada Poin B Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Jenis pelayanan dasar urusan pendidikan meliputi a. Pendidikan Anak Usia Dini; b. Pendidikan Dasar; dan c. Pendidikan Kesetaraan

Tingkat Partisipasi warga Negara berdasarkan usia dan jenjang pendidikan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.157  
Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat partisipasi warga Negara	Indikator		Capaian Kinerja (%)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)				
1.	Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Kelompok Bermain	Jumlah anak usia 0-6 tahun	34,76
		4.964	14.282	
PENDIDIKAN DASAR (SD)				
2.	Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Jumlah anak usia 7-12 pada kabupaten yang bersangkutan	112,39
		19.478	17.330	
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA (SMP)				
3.	Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 pada kabupaten yang bersangkutan	115,84
		8.218	7.094	

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019





Untuk tahun 2019 tidak ada regulasi Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pelantikan Kepala Sekolah oleh karena itu ada beberapa Kepala Sekolah yang masih sebaga Plt (Pelaksana Tugas). Untuk rekapitulasi tenaga penunjang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.158**  
**Tenaga Penunjang Pendidikan Tahun 2019**

No	Tingkat Satuan Pendidikan	Belum SMA/Sederajat	Sudah SMA/Sederajat	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-
2	Pendidikan Dasar (SD)	6	1	7
3	Pendidikan Dasar (SMP)	31	25	56
Total		37	26	63

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Selain data-data tersebut di atas, sesuai Peraturan Pemerintah dalam rangka pemenuhan SPM bidang pendidikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini, kami sampaikan juga data-data lain sebagai berikut:

**Tabel 2.159**  
**Indikator dan Persentase**

No	Indikator	Prosentase
1	Angka Melek Huruf	99,29 %
2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,24 %
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,90 %
4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97,08 %
5	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,44 %
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	78,19 %

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi terkait pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi penerapan SPM.
2. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi

9/1/20



tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;

3. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
4. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang SD dan SMP, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
5. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan pemenuhan Standar Nasional;
6. Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode penghitungan baru mencapai angka 8,65 (sumber BPS 2019) sebagai indikasi penuntasan wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun;
7. Masih banyak akses jalan dan akses internet yang belum bisa menjangkau kedaerah-daerah terpencil; dan
8. Banyaknya satuan PAUD yang belum terlayani seperti *Satu Desa Satu PAUD* dan Lembaga Kesetaraan per-Kecamatan (PKBM dan LKP);  
Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:
  1. Segera membentuk Tim Pengendalian SPM Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
  2. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
  3. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
  4. Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD dan SMP yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
  5. Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
  6. Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah;
  7. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan akses jalan dan akses internet; dan
  8. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan secara kooperatif.

#### **B. Bidang Kesehatan**

SPM bidang kesehatan meliputi 12 jenis pelayanan, sebagai berikut:

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Handwritten signature and date: 19/1/19



- 10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
- 11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
- 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

**Tabel 2.160**  
**Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Katingan Selatan Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target/ Sasaran Setahun	Hasil/ Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3977	3380	85
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3801	3226	85
3	Pelayana Kesehatan Bayi Baru Lahir	3516	3379	96
4	Pelayanan Kesehatan Balita	17,077	15,154	89
5	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	5338	4960	93
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	89,543	61,514	69
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15,154	12,226	81
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	28,628	20,087	70
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	6,463	4,565	71
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	130	264	49
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Paru	2,036	1,979	97
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	4,588	2,646	58

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Dukungan personil dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan didukung oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 2.161**  
**Tabel Tenaga Kesehatan Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan Pendukung	Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Perbaikan Gizi Masyarakat Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes,	Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan, Bidan, Perawat

Handwritten signature and date: 9/1/4





No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan Pendukung	Dukungan Personil
		Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Bidan, Perawat, Dokter, Dokter Spesialis
3	Pelayana Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bidan, Perawat, Dokter/DLP, Dokter Spesialis Anak
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter/DLP, Dokter Spesialis Anak
5	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	Tenaga Kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Gizi, Tenaga Promkes); Tenaga Non Kesehatan Terlatih (Guru, dokter kecil, kaader kesehatan)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter, Tenaga Promkes, Kader Posbindu PTM terlatih
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter, Promkes, Kader Posbindu PTM terlatih, Kader Posyandu Lansia
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Program P2PTM	Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Dokter/DLP, Tenaga Promkes
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dokter, Perawat, Nutrisionist, Bidan, Tenaga Promkes
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Dokter, Perawat, dan Kader (terlatih penanganan ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Paru	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dokter, Perawat, Pranata Laboratorium Kesehatan (terlatih program TB Paru), bidan yang terlatih untuk menskrining gejala TB anak, petugas program TB di Kab/kota
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dokter Spesialis sesuai kewenangannya, Dokter/Dokter Gigi,

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Dalam melaksanakan SPM bidang Kesehatan ditemui beberapa permasalahan. Adapun permasalahan dimaksud dan solusinya disajikan pada tabel di bawah.

12  
9 X/4



**Tabel 2.162**  
**Permasalahan dan solusi**

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada awal kehamilan/pemeriksaan setelah trimester I	Sosialisasi dan kerjasama dengan kader kesehatan desa untuk deteksi dini risiko kehamilan; kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak datang ke posyandu
2	Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Monitoring dan evaluasi pada petugas kesehatan, pemberdayaan masyarakat atau keluarga ibu hamil
3	Pemantauan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pemahaman faktor risiko terhadap bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan belum menjangkau seluruh balita yang ada, maka diperlukan analisa penyebabnya	Pengembangan Posyandu Balita, sosialisasi program kesehatan di lintas sector
5	Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran (usia 7-15 tahun), tahun 2019 hanya dilakukan pada siswa kelas 1 dan kelas 7	Koordinasi lintas sektor dan persiapan rujukan kesehatan jika ditemukan masalah pada siswa
6	Pelayanan Kesehatan belum menjangkau seluruh sasaran, karena besarnya jumlah sasaran (usia 15-59 tahun) dan masih mengandalkan kegiatan pelayana di sarana kesehatan	Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi pentingnya masalah PTM
7	Kegiatan skrining tidak seluruhnya menjangkau lansia yang ada, terutama pada daerah pedesaan dan yang tidak ada petugas kesehatan	Peningkatan kegiatan kunjungan lapangan/luar gedung, integrasi kegiatan pusling di desa yang jauh dan tidak ada petugas, peningkatan pendanaan dan bahan pendukung kegiatan skrining
8	Penderita hipertensi belum seluruhnya terdeteksi diwilayah kerja dan belum berobat secara teratur, keterbatasan dalam pelaksanaan skirining, data sasaran bukan data ril dilapangan (data hasil proyeksi);	Peningkatan ketenagaan, pendanaan, peralatan dan bahan pendukung kegiatan untuk mendukung kegiatan skining di lapangan
9	Hanya terbatas pelayanan di sarana kesehatan dan kegiatan skrining yang terbatas volumenya (perlu ketenagaan, dukungan dana dan peralatan), berkaitan dengan pola makan masyarakat; ketersediaan stik pemeriksaan,	Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan PTM, kerjasama lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat hidup sehat
10	ODGJ yang ditemukan sudah dalam keadaan tingkat berat, kurang mendapat perawatan medis; Ketersediaan obat; kurang dukungan keluarga	Penanganan harus lintas sektor, membentuk dan menambah kader kesehatan jiwa untuk mendeteksi secara dini gangguan jiwa di lingkungannya
11	Kegagalan proses pengobatan (minum obat tidak teratur, minum obat tidak sampai berakhir), penularan pada lingkungan dan keluarga	Kegiatan deteksi dini TB, Pelatihan petugas pelaksana TB, dan pembentukan pengawas minum obat TB; perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga
12	Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di masyarakat	Sosialisasi dan kerjasama lintas sector

9/4/24



Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

C. Bidang Pekerjaan Umum

SPM bidang pekerjaan umum diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2914 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.163**  
**Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
I	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	100
		Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70	70
II	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan kab/kota baik dan sedang	60	30.47
		Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah kab/kota	100	72.22
III	Informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kab/kota beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital	100	
	Penyediaan ruang terbuka hijau	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50	

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran APBD untuk melaksanakan rencana kegiatan sehingga bantuan dana dari pusat sangat diperlukan
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga perlu adanya bimbingan teknis untuk mempertajam pengetahuan dan penambahan jumlah pegawai/staf untuk melakukan pelayanan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan, misalnya kuurangnya jumlah truk pengangkut sampah dan personilnya, kurangnya lahan untuk lokasi TPA dan lain sebagainya.

h  
9/14





Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu:

1. Menyusun proposal atau usulan untuk mendapatkan dana bantuan dari pusat, misal dana Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Menambah jumlah pegawai/staf baru atau honorer dan meningkatkan SDM pegawai/staf yang ada dengan mengikuti bimbingan teknis sesuai tugas dan bidang keahlian.
3. Menambah sarana dan prasarana untuk mengakomodasi pelayanan persampahan melalui pembelian truk sampah, bak armroll, pengadaan lahan untuk TPA serta penambahan tenaga petugas persampahan.

**Tabel 2.164**  
**Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Realisasi dari pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum sebagaiamna ditarget pada tabel di atas tidak dilaporkan dalam LPPD Tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi pada SPM Bidang Perumahan Rakyat, tidak terdapat pelaporan pelaksanaannya.

#### **D. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten/Kota;
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;
- Tingkat waktu tanggap (response time rate);
- Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standr kualifikasi;dan

9/14



- Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.165**  
**Target Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum**  
**Dan Perlindungan Masyarakat**

No	Program	Indikator	Target
1.	Pemeliharaan ketentramandan ketertiban masyarakat	1). Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kab/kota	100 %
		2). Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	2 x Sehari
		3). Cakupan rasio petugas perlindungan asyarakat (linmas) di kab/kota	1 orang setiap RT atau sebutan lainnya
2.	Penanggulangan bencana kebakaran	1).Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	80 %
		2).Tingkat waktu tanggap	75%
		3).Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%
		4). Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 500-10.000 Ltr pa WMK	90%

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh sebagaimana berikut ini. Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Standar Minimal sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019 yang masih terbatas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar.
2. Kurangnya tenaga PPNS lingkup Satpol PP; dan
3. Minimnya personil Satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Diklat Teknis.

12  
9 x 14



Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Mengajukan dan mengusulkan alokasi anggaran berkaitan Sarana dan Prasarana Standar Minimal melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBD (Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, maupun Dana DAK).
2. Merencanakan dan mengajukan usulan penambahan personil anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan untuk mengikuti Diklat Teknis.

**E. Bidang Sosial**

Realisasi dari penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.166**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2019**

No	Program	Indikator	Target	Capaian
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diuar panti	10	10
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah warga negar anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	-
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasara tuna sosial diluar panti	40	20
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah warga negara gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasara tuna sosial diluar panti	-	-
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	30	30

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

Permasalahan:

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani; dan
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan

Handwritten signature and date: 9/1/4





optimal.

Solusi:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

2.5.2. Capaian Penerapan SPM Tahun 2020

A. Bidang Pendidikan

1. Jenis pelayanan dasar

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.167  
Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	96,22
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	3,24
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	70,11

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota dalam hal koordinasi, sehingga kesulitan untuk melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi penerapan SPM;
2. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengalami Penurunan dari 114,11 % tahun 2019 pada tahun 2020

h  
9/14



menjadi 96,22 % penyebabnya adalah karena ada usia dibawah 7 tahun dan diatas 16 tahun yang msh terdata di jenjang TK/RA dan di Jenjang Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA, dan sebagian Siswa yang belajar keluar daerah;

3. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 masih rendah untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 70,11 %, karena masih adanya satuan PAUD yang belum terlayani seperti Satu Desa Satu PAUD;
4. Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,74 untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2019 yaitu 5,68%, karena masih adanya PKBM yang belum terlayani seperti Satu Kecamatan Satu PKBM; dan
5. Penyerapan Anggaran masih rendah, karena masih adanya kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang tidak terlaksana atau tidak selesai, dan Rasionalisasi Kegiatan karena adanya Covid-19 khususnya dana APBD.

Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:

1. Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga Penerapan SPM ditingkat Satuan Pendidikan dan Desa dapat Maksimal;
2. Akan dilakukan koordinasi kepada sekolah SD dan SMP serta setingkatnya, untuk selalu aktif dalam hal singronisasi data setiap 2 minggu sekali sesuai dengan edarana dari kemendikbud maupun kemenag, serta menjaring anak usia sekolah untuk bersekolah;
3. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF akan bekerja keras untuk mensosialisasikan Satu Desa Satu PAUD ke Desa-desa yang belum memiliki satuan PAUD, dan akan memudahkan dalam satuan PAUD atau Lembaga desa dalam hal pemberian Rekomendasi yang akan mengusulkan ijin pendirian dan ijin operasional, untuk selanjutnya ditinjau lanjuti ke PTSP, dan sehingga mempunyai NPSN dan terdata di dapodikdasmen serta emis;
4. Akan dilakukan Pembinaan bagi satuan pendidikan yang memiliki Akte Notaris PKBM untuk mengembangkan atau membuka layanan seperti Pendidikan Kesetaraan, dan akan selalu dibimbing baik dari pencarian siswa maupun menyingronisasian di Dapodikdasmen; dan
5. Melakukan optimalisasi seluruh kegiatan baik itu DAK Fisik maupun DAK Nonfisik dengan aktif melakukan monitoring kegiatan ditiap tahap pencairan anggaran, dan menginventarisir kegiatan yang terkena Rasionalisasi pada tahun 2020 dan akan diakomodir di tahun 2021.

## **B. Bidang Kesehatan**

Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

14  
9/2/24



**Tabel 2.168**  
**Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target/ Sasaran Setahun	Hasil/ Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.938	3.118	79,18
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.759	1.959	52,11
3	Pelayana Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.579	2.980	83,26
4	Pelayanan Kesehatan Balita	13.652	11.299	83,31
5	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	28.922	12.982	44,89
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	89.543	46.725	52,18
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.260	10.198	90,57
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	28.868	15.338	52,13
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	6.463	3.055	47,27
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	258	219	84,88
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Paru	2.369	1.183	49,94
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.939	2.659	67,52

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator bidang kesehatan, pada tahun 2020 belum ada indicator yang capainnya 100% sesuai dengan ketentuan dan ada 3 (tiga) indikator yang capaian kinerjanya dibawah 50% yaitu pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus dan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis.

Dalam melaksanakan SPM bidang Kesehatan ditemui beberapa permasalahan. Adapun permasalahan dimaksud dan solusinya disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.169**  
**Permasalahan dan solusi**

No	Permasalahan	Solusi
1	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b> Ada ibu hamil yang tidak memeriksakan diri pada petugas kesehatan pada awal kehamilan	Sosialisasi dan kerjasama dengan kader kesehatan desa untuk deteksi dini resiko kehamilan
2	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b> Masih ada ibu bersalin yang tidak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Monitoring dan evaluasi pada petugas kesehatan, pemberdayaan masyarakat atau keluarga ibu hamil
3	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b> Pemantauan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Pemahaman faktor risiko terhadap bayi baru lahir
4	<b>Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	

19/1/4





No	Permasalahan	Solusi
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar belum menjangkau seluruh balita maka diperlukan Analisa sebab balita tidak mendapatkan pelayanan	Pengembangan posyandu balita, sosialisasi program kesehatan di lintas sector
5	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b> Penjaringan belum dapat dilakukan sesuai standar kepada semua siswa sasaran	Koordinasi lintas sektor dan persiapan rujukan jika ditemukan masalah
6	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b> Jumlah sasaran yang besar membuat indicator ini belum dicapai secara maksimal	Koordinasi lintas sektor dan sosialisasi masalah PTM
7	<b>Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</b> Jumlah lansia yang berada dalam satu wilayah belum ada yang valid, kekurangan petugas yang melaksanakan screening	Harus dicari strategi untuk dapat menjangkau sasaran lansia
8	<b>Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi</b> Penderita hipertensi belum terdeteksi dan belum berobat secara teratur	Kekurangan petugas dalam melaksanakan screening, menggunakan data dari riset untuk dijadikan acuan penjaringan hipertensi
9	<b>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</b> Untuk melakukan screening dibutuhkan biaya yang cukup besar, kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan pola makan	Sosialisasi tentang PTM, kerjasama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat
10	<b>Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa</b> Orang dengan gangguan jiwa berat pada umumnya sudah terlantar dan tidak mendapat perawatan	Kerjasama lintas sektor, menambah kader jiwa untuk mendeteksi gangguan kejiwaan yang ada di sekitarnya
11	<b>Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)</b> Banyak pasien yang gagal berobat, pasien tidak minum obat sampai sembuh, penularan pada lingkungan dan keluarga	Deteksi dini TB, pelatihan petugas dengan kompetensi TB, kerjasama lintas sektor dan lintas bidang
12	<b>Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV</b> Adanya stigma negatif tentang penderita HIV di masyarakat	Sosialisasi kerjasama lintas sektor dan mengubah stigma negatif masyarakat

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

C. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel 2.170**  
**Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	95,40
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	95,40

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, yaitu:

1. Pengurangan anggaran karena dialihkan untuk anggaran penanganan Covid 19 berdampak pada capaian kinerja dalam pelayanan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat. Karena dengan pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas;
2. Terjadinya perbedaan antara rencana dari beberapa program/kegiatan dengan kondisi di lapangan, khususnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu:

4. Melakukan prioritas penganggaran terutama pada pelayanan infrastruktur kepada masyarakat;
5. Melakukan review desain dengan tetap mengacu berdasarkan anggaran yang tersedia;
6. Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis terutama kegiatan yang menyangkut pencapaian SPM; dan
7. Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis dalam pencapaian SPM.

**D. Urusan Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.171**  
**Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0,00

ky



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	Capaian (%)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0,00

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Dukungan Personil Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum ada kejelasan dinas pelaksanaannya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum teranggarkan dan belum ada kejelasan dinas pelaksanaannya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sehingga kedepannya perlu dimasukkan dalam RKPD/RPJMD dianggarkan dan Mengakomodir Target dan Anggaran Program/Kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya.

E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.172  
Realisasi Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum  
Dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara 647 orang	100 %	647
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	88.100 orang (55,6)
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	120.464 orang (76 %)
4.	Pelayanan penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	0 orang (100%)

19 x 14





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
5.	dan evakuasi korban bencana			
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran adalah 4 orang	100 %	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Untuk poin nomor 1 dan 2 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, pada tahun 2020 di Kabupaten Katingan 4 orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani Bidang Damkar dan ada 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya 647%, yaitu pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terutama penegakan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh sebagaimana berikut ini.

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

– Permasalahan

Payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dalam pencapaian target SPM serta masih rendahnya koordinasi di daerah juga menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat (Linmas Desa) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum sangat diperlukan yaitu melalui kegiatan pelatihan Linmas Desa yang ada di 154 Desa di Kabupaten Katingan.

– Solusi

Dalam memenuhi target perlu meningkatkan kualitas pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada masyarakat, membuat payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penambahan/rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi, penyiapan Sarana dan Prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada, Penyiapan anggaran yang cukup untuk menunjang pencapaian SPM di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dan meningkatkan peran serta

14



masyarakat dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah melalui Linmas Desa.

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran dikawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdiksi tanggungjawab Pemerintah daerah Kabupaten Katingan.

– Permasalahan

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat sasaran dari indikator ini cakupannya sangat luas, mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan dari 13 Kecamatan tersebut hanya 4 Kecamatan yang ada Pos dan Personil Pemadam Kebakarannya yaitu Pos Pemadam di Kasongan dan Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Pos Pemadam di Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Pos Pemadam Kebakaran di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah dan Pos Pemadam Kebakaran di Pagatan Kecamatan Katingan Kuala. Kendala yang dihadapi terkait indikator ini yaitu kurangnya peran serta Masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik permukiman maupun lahan, kualitas aparatur pemadam kebakaran belum memadai, terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran serta minimnya anggaran sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

– Solusi

Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mengingat Wilayah Kabupaten yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 154 Desa sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu anggota Pemadam Kebakaran melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan Kegiatan Sosialisasi dan simulasi dalam memberdayakan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran yang bekerjasama dengan stakeholder terkait, meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai dan penyiapan anggaran yang cukup sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan damkar dilapangan.

**F. Bidang Sosial**

Realisasi dari penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Katingan pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

ky



**Tabel 2.173**  
**Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas diluar panti yang dijangkau melalui Program Keluarga Harapan, PBI, JKN, BPNT dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanganan Covid 19 sebanyak 281 orang	281	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar diluar panti yang dijangkau melalui Program Keluarga Harapan, PBI, JKN, BPNT dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanganan Covid 19 sebanyak 5.181 orang	5.181 orang	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah lanjut usia diluar panti yang dijangkau melalui Program Keluarga Harapan, PBI, JKN, BPNT dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanganan Covid 19 sebanyak 3.342 orang	3.342 orang	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Tidak ada kasus	-	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah korban bencana kabupaten yang dilayani Dinas Sosial selama tahun 2020 sebanyak 22.717 orang	22.717 orang	100

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2020

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang di kehendaki Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2. Masih tersebar dan belum terbangun system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
4. Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas terjadinya bencana didaerah semakin tinggi.
5. Adanya pandemi Virus Corona 19 yang melanda negara ini, termasuk Kabupaten Katingan yang mengakibatkan pergeseran anggaran belanja.
6. Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana.

Solusi:

19/14





1. Menggunakan media komunikasi sosial yang ada secara efektif sebagai sarana informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi.
2. Mengajukan proposal pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bekerja sama dengan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyediaan peralatan dan logistik bantuan untuk korban bencana.
3. Berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder yang ada (instansi vertikal, SOPD terkait, pihak swasta dan masyarakat).
4. Mengadakan Posko siaga dan rutin melaksanakan patroli dengan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang lebih besar lagi.

Laporan bencana yang melanda di wilayah Kabupaten Katingan selama tahun 2020 tidak lagi didominasi oleh titik panas/hotspot serta kebakaran hutan dan lahan akan tetapi bencana banjir dan penanganan pandemi Corona Virus 19. Hal ini dikarenakan perubahan musim sepanjang tahun 2020 yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi daripada tahun tahun sebelumnya, serta merebaknya virus corona yang melanda negara ini hingga Kabupaten Katingan yang mengakibatkan pengaruh sektor sosial dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Sepanjang tahun 2020, sudah terjadi beberapa kali bencana banjir, baik skala besar maupun kecil. Menurut laporan yang disusun, ada 2 (dua) kali banjir skala besar terjadi di Kabupaten Katingan, yaitu periode Bulan Mei – Juni serta di Bulan September yang melanda hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Katingan. Sedangkan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19 sejak Bulan April sampai Desember, BPBD Kabupaten Katingan yang juga ditunjuk sebagai Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid 19 bekerjasama dengan instansi lainnya, telah aktif melaksanakan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penanggulangan persebaran virus. Baik dengan pendirian posko posko di perbatasan, posko di daerah karantina pasien, maupun melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi lokasi yang disinyalir bisa dijadikan lokasi baru persebaran virus tersebut. Adapun kebakaran hutan/lahan maupun indikasi titik hotspot hampir tidak terjadi di wilayah Kabupaten Katingan, baik dari wilayah hulu sampai wilayah hilir. Menurut laporan, baik yang diperoleh pada saat pelaksanaan patroli siaga bencana maupun dari Instansi Instansi terkait lainnya, sepanjang bulan Januari sampai dengan Nopember 2020, telah terdeteksi sebanyak 897 titik hotspot tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Katingan. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sedangkan laporan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan hampir tidak terjadi sepanjang tahun 2020, meskipun posko siaga bencana kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk di Posko Kabupaten maupun di beberapa kecamatan yang berpotensi terjadi kebakaran. Untuk mengatasi bencana telah di bentuk forum koordinasi, patroli bersama dan posko bersama yang melibatkan BPBD, TNI, POLRI, Tagana, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Manggala Agni dan Damkar Kabupaten Katingan.

19 2/14



## 2.6. PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

### 2.6.1. Capaian TPB sesuai Target dan Indikator Versi Tahun 2020

Capaian TPB Kabupaten Katingan yang sesuai dengan Target dan Indikator Tahun 2020 yang dihimpun berdasarkan Laporan SOPD, secara keseluruhan disajikan pada Tabel IV-1. Berdasarkan table tersebut, jumlah capaian TPB Kabupaten Katingan dengan keseluruhan indikator yaitu sebanyak 220 indikator yang dilaksanakan adalah sebanyak 79 indikator (35,91%), sebanyak 22 indikator (10%) sudah mencapai target nasional dan 57 indikator (25,91%) belum mencapai target nasional, serta 141 (64,09%) indikator tidak ada data dan tidak dilaksanakan. Pilar Social sebanyak 16 indikator (7,27%) sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional, 34 indikator (15,45%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 40 indikator (18,18%) tidak dilaksanakan dan tidak ada data; Pilar Ekonomi sebanyak 3 indikator (1,36%) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, sebanyak 7 indikator (3,18%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, serta 49 indikator (22,27%) belum dilaksanakan dan tidak ada data; Pilar Lingkungan sebanyak 3 indikator (1,36%) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan sebanyak 16 indikator (7,27%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, serta sebanyak 31 indikator (14,09%) belum dilaksanakan dan belum ada data; Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 0 indikator (0,0%) sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, serta 21 indikator (9,55%) belum dilaksanakan dan tidak ada data.

Keberadaan data dan hasil capaian TPB di Kabupaten Katingan tersebut mengindikasikan, bahwa kabupaten ini harus lebih serius dalam melakukan berbagai kegiatan terkaitan pencapaian TPB agar target di tahun 2030 dapat dicapai dengan baik.

9/1/19



Tabel 2.174  
Capaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2018 dan Laporan OPD Tahun 2019

PILAR	NO TPB	CAPAIAN TPB OLEH OPD						INDIKATOR	
		SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL		SUDAH DILAKSANAKAN TETAPI BELUM MENCAPAI TARGET NASIONAL		BELUM DILAKSANAKAN DAN TIDAK ADA DATA			
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
SOSIAL	1	2	0.91	16	7.27	4	1.82	22	10.00
	2	2	0.91	2	0.91	5	2.27	9	4.09
	3	6	2.73	8	3.64	17	7.73	31	14.09
	4	2	0.91	6	2.73	6	2.73	14	6.36
	5	4	1.82	2	0.91	8	3.64	14	6.36
JUMLAH		16	7.27	34	15.45	40	18.18	90	40.91
EKONOMI	7	0	0.00	0	0.00	2	0.91	2	0.91
	8	1	0.45	3	1.36	12	5.45	16	7.27
	9	0	0.00	1	0.45	13	5.91	14	6.36
	10	2	0.91	3	1.36	6	2.73	11	5.00
	17	0	0.00	0	0.00	16	7.27	16	7.27
JUMLAH		3	1.36	7	3.18	49	22.27	59	26.82
LINGKUNGAN	6	0	0.00	12	5.45	11	5.00	23	10.45
	11	1	0.45	2	0.91	11	5.00	14	6.36
	12	0	0.00	1	0.45	3	1.36	4	1.82
	13	0	0.00	0	0.00	2	0.91	2	0.91
	15	2	0.91	1	0.45	4	1.82	7	3.18
JUMLAH		3	1.36	16	7.27	31	14.09	50	22.73
HUKUM DAN TATA KELOLA	16	0	0.00	0	0.00	21	9.55	21	9.55
JUMLAH		0	0.00	0	0.00	21	9.55	21	9.55

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023





## 2.6.2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator TPB di Kabupaten Katingan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2.175**  
**Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional**

Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional		
	Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan

1w  
9 x 4



Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional		
	Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
air, serta penyakit menular lainnya.			
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur $\leq 18$ tahun.	Dinas Kesehatan
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Dinas Kesehatan

9/2/14



Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional		
	Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.			
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Kesehatan
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas,	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Handwritten signature and initials.





Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional		
	Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.			
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Dinas Sosial
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>  <b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan Provinsi  BPDASHL Kahayan
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Dinas Kehutanan Provinsi  BPKH XXI Palangka Raya

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

2.6.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB di Kabupaten Katingan yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional disajikan dalam tabel di bawah.

Handwritten signature and initials.



**Tabel 2.176**  
**Indikator yang Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target Nasional**

Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Sosial
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	Dinas Kesehatan
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan

Handwritten signature and initials.



Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Kesehatan
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Dinas Pendidikan
5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

*Handwritten notes:*  
k  
9 y k





Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas Lingkungan Hidup
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas Lingkungan Hidup
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	BPDASHL Kahayan
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Lingkungan Hidup
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Lingkungan Hidup
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan Provinsi BPDASHL Kahayan

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

Handwritten signature and initials.



#### 2.6.4. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Ada Data

Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum ada data disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 2.177**

#### Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Ada Data

Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas Sosial
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Kesehatan
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan

h  
9 x 1



Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun.	Dinas Kesehatan
3.4.2*	Angka kematian ( <i>insidens rate</i> ) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq 15$ tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> ).	Dinas Kesehatan
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Kesehatan

19 X 1





Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Kesehatan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Kesehatan
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Kesehatan
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

h  
9/1



Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
	kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Penduduk dan Keluarga Berencana
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas Lingkungan Hidup
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dinas Kehutanan Provinsi BPDASHL Kahayan
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas Kehutanan Provinsi BPDASHL Kahayan
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Dinas ESDM Provinsi
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Dinas ESDM Provinsi
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

*Handwritten signature and initials*



Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

*Handwritten signature/initials*





Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Dinas Sosial
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan bencana Daerah
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan bencana Daerah
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan bencana Daerah
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan bencana Daerah
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas Lingkungan Hidup
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Inspektorat
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan bencana Daerah

19/11/2023



Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan bencana Daerah
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dinas Lingkungan Hidup
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Dinas Kehutanan Provinsi
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Dinas Kehutanan Provinsi
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dinas Kehutanan Provinsi Balai Taman Nasional Sebangau dan Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Dinas Lingkungan Hidup
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.	Dinas Lingkungan Hidup
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.	Dinas Lingkungan Hidup
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

h  
9/11



Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
	kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Penduduk dan Keluarga Berencana
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Inspektorat
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Satuan polisi Pamong Praja
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

k  
9/10





Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Belum Ada Data		
Nomor Indikator	Keterangan Indikator	OPD Pengampu
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> .	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian ( <i>Vital Statistics Register</i> ).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

*Handwritten signature and initials*



## BAB III

### GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

##### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

##### a) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014-2018 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

h  
a x 14



**Tabel 3.1**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>933.118.983.049</b>	<b>1.066.081.723.749</b>	<b>1.124.910.926.689</b>	<b>1.162.607.295.128</b>	<b>1.260.733.017.283</b>	<b>7,89</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>50.959.197.566</b>	<b>40.799.553.099</b>	<b>46.280.722.192</b>	<b>52.990.318.457</b>	<b>53.291.967.612</b>	<b>2,14</b>
Hasil Pajak Daerah	17.559.351.060	10.250.508.758	11.754.994.414	24.244.009.315	13.601.096.740	8,85
Hasil Retribusi Daerah	5.349.917.003	2.306.260.956	3.228.625.060	2.981.559.360	3.640.578.174	-0,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.963.093.030	3.619.254.975	4.143.123.625	5.749.484.182	7.247.303.729	25,36
Lain-lain PAD yang Sah	25.086.836.473	24.623.528.410	27.153.979.093	20.015.265.600	28.802.988.969	6,51
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>793.804.635.391</b>	<b>852.822.612.439</b>	<b>918.845.149.320</b>	<b>920.151.106.522</b>	<b>1.007.006.624.056</b>	<b>6,19</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96.529.830.546	114.701.364.439	90.677.884.616	65.591.540.839	102.810.253.167	6,74
Dana Alokasi Umum	645.888.942.000	668.100.108.000	708.751.031.000	696.300.554.000	695.606.221.000	1,92
Dana Alokasi Khusus	51.378.640.000	70.021.140.000	119.416.233.704	158.259.011.683	208.590.149.889	42,79
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.222.845	-	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>88.355.150.092</b>	<b>172.459.558.211</b>	<b>159.785.055.178</b>	<b>189.465.870.149</b>	<b>200.434.425.615</b>	<b>28,05</b>
Pendapatan Hibah	1.946.786.070	1.886.934.059	1.743.887.175	27.300.051.390	25.885.561.745	362,41
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.765.093.022	21.826.141.940	23.470.974.223	32.782.877.559	32.689.178.470	7,91
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.970.761.000	104.134.566.000	100.726.104.000	129.232.941.200	140.359.685.400	62,37
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.320.000.000	7.800.000.000	-	-	1.500.000.000	-
Pendapatan Lainnya	20.352.510.000	36.811.916.212	33.844.089.780	150.000.000	-	-

Sumber: diolah dari LRA Tahun 2014-2018





Berdasarkan tabel diatas perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Katingan cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, total pendapatan daerah Kabupaten Katingan adalah sebesar Rp933.118.983.049 Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi Rp 1.260.733.017.283 dengan peningkatan pendapatan rata-rata pertahun sebesar 7,89 persen.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2014-2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,14 persen, yang secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda. Sementara itu, sumber pendapatan Kabupaten Katingan berasal dari pendapatan Dana Perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Katingan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2014-2018 terakhir sebesar 6,19 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 42,9 persen Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terjadi kenaikan rata-rata sebesar 28,05 persen.

#### **b) Belanja Daerah**

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2014-2018, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

W  
9/1/4



**Tabel 3.2**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>BELANJA</b>	<b>955.517.558.529</b>	<b>1.072.561.321.565</b>	<b>1.154.558.813.417</b>	<b>1.179.826.276.420</b>	<b>1.247.802.033.180</b>	<b>6,96</b>
<b>Belanja Tidak langsung</b>	<b>403.067.780.761</b>	<b>469.737.944.811</b>	<b>508.821.351.173</b>	<b>574.257.219.908</b>	<b>650.530.323.685</b>	<b>12,75</b>
Belanja Pegawai	305.548.645.568	345.078.227.268	362.910.191.147	336.760.299.686	397.556.283.487	7,24
Belanja Subsidi	-	1.800.000.000	1.449.919.197	1.194.609.400	1.323.386.550,00	-
Belanja Hibah	62.065.566.212	50.687.476.197	20.651.787.554	26.453.800.000	41.343.706.511,00	1,70
Belanja Bantuan Sosial	1.556.578.900	544.000.000	793.000.000	6.334.936.460	5.859.116.451,00	168,02%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.348.081.000	1.399.397.005	1.154.195.000	1.486.917.506	2.675.177.060,06	23,76
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	31.586.289.081	69.832.234.935	121.862.258.275	201.733.261.063	201.772.653.626,00	65,29
Belanja Tidak Terduga	962.620.000	396.609.406	-	293.395.793	-	-
<b>Belanja Langsung</b>	<b>552.449.777.768</b>	<b>602.823.376.754</b>	<b>645.737.462.244</b>	<b>605.569.056.512</b>	<b>597.271.709.495</b>	<b>2,16</b>
Belanja Pegawai	40.530.032.814	35.322.705.882	36.538.215.610	45.640.578.674	46.843.449.268	4,54
Belanja Barang dan Jasa	188.996.502.185	229.400.862.760	299.759.287.490	196.972.717.942	213.669.482.561,23	6,56
Belanja Modal	322.923.242.768	338.099.808.113	309.439.959.144	362.955.759.896	336.758.777.665,61	1,57

Sumber: LRA Tahun 2014-2018, diolah



Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2014-2018 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,96 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,75 persen. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya paling besar adalah Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 168,02 persen. Belanja Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,26 persen. Komponen Belanja Langsung terbesar pertumbuhannya paling besar adalah Belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,56 persen.

**Tabel 3.3**  
**Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2017-2018**

No	Uraian	Tahun	
		2017	2018
A	Pendapatan Umum Daerah		
1	Pendapatan Asli Daerah	52.990.318.457	53.291.967.612
2	Dana Bagi Hasil	65.591.540.839	102.810.253.167
3	Dana Alokasi Umum	696.300.554.000	695.606.221.000
	Jumlah A	814.882.413.296	851.708.441.779
B	Belanja Pegawai		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	298.560.903.383	303.183.712.927
2	Tambahan penghasilan PNS	35.619.837.500	91.054.570.560
	Jumlah B	334.180.740.883	394.238.283.487
	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>	<b>480.701.672.413</b>	<b>457.470.158.292</b>

Sumber: Diolah dari LRA Kab.Katingan 2017-2018

Berdasarkan data tabel diatas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Kabupaten Katingan pada tahun 2017 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 480.701.672.413 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang”, Sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp 457.470.158.292, yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang”.

h  
19 x 14





**c) Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Katingan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4. Pada Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu melebihi dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 15,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Katingan semakin Baik, sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dengan rata-rata sebesar 42,1% per tahun.

h  
9 x 14



**Tabel 3.4**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>194.657.435.429</b>	<b>167.758.859.949</b>	<b>154.601.395.828</b>	<b>114.888.433.865</b>	<b>88.529.676.000</b>	<b>-17,57</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	88.529.676.000	-17,57
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>10,30</b>
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	4.750.000.000	10,30
2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>190.157.435.429</b>	<b>160.758.859.949</b>	<b>144.601.395.828</b>	<b>105.888.433.865</b>	<b>83.779.676.000</b>	<b>-18,29</b>

Sumber: LRA Tahun 2014 -2018, diolah



### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Katingan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

#### a) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen. Aset lancar pemerintah Kabupaten Katingan mengalami tren penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan rata-rata penurunan sebesar 11,03 persen, namun beberapa akun mengalami peningkatan diantaranya Investasi jangka panjang sebesar 25,45 persen serta aset tetap terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,66 persen, aset tetap rata-rata pertumbuhan sebesar 1,66 persen

#### b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan signifikan terutama pada komponen Kewajiban jangka pendek, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 343,00. Peningkatan tersebut terjadi kenaikan yang signifikan pada periode 2015 ke periode tahun 2016 dengan peningkatan sebesar 21,05 persen.

h  
9 x 14





**Tabel 3.5**  
**Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>ASET</b>	<b>3.302.534.832.956</b>	<b>2.341.569.008.551</b>	<b>2.504.104.815.128</b>	<b>2.712.976.146.534</b>	<b>3.161.236.918.347</b>	<b>0,68</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>183.117.090.308</b>	<b>176.975.377.465</b>	<b>136.240.110.768</b>	<b>114.087.042.020</b>	112.369.054.980	<b>-11,03</b>
Kas	167.758.859.949	154.280.255.133	114.954.109.101	88.645.774.506	63.072.770.637	-21,31
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-		
Piutang	66.942.438.430	15.482.947.624	12.593.790.753	10.943.481.237	16.803.029.414	-13,77
Penyisihan Piutang	-	-	-1.246.807.627	-1.276.958.722	(2.169.512.113)	
Persediaan	5.026.281.522	7.119.164.548	8.692.210.913	15.774.744.999	34.662.767.042	66,24
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>18.340.472.337</b>	<b>25.340.472.337</b>	<b>35.340.472.337</b>	<b>44.340.472.337</b>	<b>49.090.472.337</b>	<b>28,45</b>
Investasi Non Permanen	402.109.620	402.109.620	402.109.620	402.109.620	402.109.620	0,00
Investasi Permanen	17.938.362.717	24.938.362.717	34.938.362.717	43.938.362.717	48.688.362.717	28,92
<b>ASET TETAP</b>	<b>2.920.421.734.668</b>	<b>3.250.986.617.888</b>	<b>3.563.248.838.099</b>	<b>2.300.696.089.703</b>	<b>2.786.936.028.645</b>	<b>1,66</b>
Tanah	583.750.863.010	584.145.623.610	586.917.445.092	578.176.000.092	579.460.581.992	-0,18
Peralatan dan Mesin	209.941.541.635	245.565.192.476	288.276.670.818	295.920.337.373	324.697.986.669	11,68
Gedung dan Bangunan	618.253.771.079	693.437.805.247	789.621.319.674	772.462.547.937	810.691.769.040	7,20
Jalan Jaringan dan Instalasi	1.477.683.983.828	1.588.055.553.415	1.680.164.819.813	1.793.474.338.228	2.401.773.746.713	13,48
Aset Tetap Lainnya	17.889.915.910	24.646.439.668	32.343.646.213	29.575.770.131	34.367.091.966	19,16
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.901.659.207	115.136.003.472	185.924.936.490	349.930.156.354	8.791.009.277	211,15
Akumulasi Penyusutan	-	-1.290.277.086.640	-1.408.664.013.883	-1.518.843.060.411	(1.372.846.157.012)	
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>180.655.535.644</b>	<b>178.543.627.500</b>	<b>177.939.407.806</b>	<b>253.852.542.473</b>	<b>212.841.362.385</b>	<b>6,25</b>
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	127.257.500	777.228.181	762.149.437	754.949.437	712.780.077	125,57



Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	762.644.071	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	18.588.214.175	1.601.884.075	1.822.579.983	2.079.533.567	2.133.777.901	-15,22
Aset Lain-lain	161.177.419.898	176.164.515.244	175.354.678.386	251.018.059.469	209.994.804.407	8,91
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.302.534.832.956</b>	<b>2.341.569.008.551</b>	<b>2.504.104.815.128</b>	<b>2.712.976.146.534</b>	<b>3.161.236.918.347</b>	<b>0,68</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.399.000</b>	<b>625.873.986</b>	<b>13.790.209.850</b>	<b>8.560.445.026</b>	<b>7.927.502.400</b>	<b>3387,61</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.399.000</b>	<b>625.873.986</b>	<b>13.790.209.850</b>	<b>4.280.222.513</b>	<b>7.927.502.400</b>	<b>3403,00</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.399.000	625.873.986	-	109.620.273	143.000	-
Utang Beban	-	-	5.226.324.150	-	-	-
Pendapatan Diterima dimuka	-	-	-	16.333.333	6.483.333	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	8.563.885.700	-	159.368.895	-
Utang Beban	-	-	-	4.154.268.907	7.761.507.171	-
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.399.000</b>	<b>625.873.986</b>	<b>13.790.209.850</b>	<b>4.280.222.513</b>	<b>7.927.502.400</b>	<b>3403,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>3.302.529.433.956</b>	<b>2.340.943.134.565</b>	<b>2.490.314.605.277</b>	<b>2.708.695.924.021</b>	<b>3.153.309.415.947</b>	<b>0,61</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.302.534.832.956</b>	<b>2.341.569.008.551</b>	<b>2.504.104.815.128</b>	<b>2.712.976.146.534</b>	<b>3.161.236.918.347</b>	<b>0,68</b>

Sumber: Neraca Kabupaten Katingan Tahun 2014 sampai 2018, BPKAD, diolah



c) **Ekuitas Dana**

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Katingan selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar sebesar 0,61 persen. Serta perkembangan ekuitas dana dan kewajiban selama periode tahun 2014-2018 terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen.

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Katingan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	0,00	0,35	10,12	3,75	14,17
2	Rasio cepat ( <i>quick ratio</i> )	0,00	0,40	10,80	4,40	9,80
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00	0,03	0,55	0,32	0,25
4	Rasio hutang terhadap modal	0,00	0,03	0,55	0,32	0,25

Sumber: Hasil perhitungan

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini.

**A. Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Katingan, yaitu:

**1. Rasio Lancar**

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 14,17%. Hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2017 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Katingan sebesar 14 kali lebih.



Handwritten signature and date: 19 x 14





## 2. Quick Rasio

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan quick rasio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun periode tahun 2018 quick rasio sebesar 9,80% hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Katingan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

## B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

### 1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2018 sebesar 0,25. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

### 2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. periode tahun 2018 sebesar 0,25. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Katingan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

## 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

h  
9 x 14



Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

### **1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

- a. Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan

h  
A x/y





pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

- c. Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
  - d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - e. Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.
2. Dana Perimbangan
    - a. Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Katingan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.
  3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    - a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
    - b. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

Handwritten signature and date: 9 x/9





- c. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

## **2. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Katingan, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Belanja Modal  
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:
  - 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) merupakan objek pemeliharaan;
  - 3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
  - 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.
- f. Belanja DPRD
  - 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula

h  
9 x 10



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

- 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
  - 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan
  - 4) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
- g. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - 3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
  - 4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9 x 14



merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- h. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
- i. Belanja Subsidi
  - 1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - 2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- j. Bantuan Sosial
  - 1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
  - 2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- l. Belanja Bantuan Keuangan
  - 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  - 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan

9 x f 9





penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;

- 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

m. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Katingan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Katingan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Katingan, yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Handwritten signature and initials.



**Tabel 3.7**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018**

Kode	Uraian	2014			2015			2016		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	1.103.568.306.244	955.517.558.529	86,6	1.227.354.080.995	1.072.561.321.565	87,4	1.236.955.112.612	1.154.558.813.417	93,3
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	419.842.602.144	403.067.780.761	96	494.618.052.083	469.737.944.811	95	525.533.918.933	508.821.351.173	96,8
5.1.1	Belanja Pegawai	360.074.864.892	305.548.645.568	84,9	395.788.465.366	345.078.227.268	87,2	377.660.187.342	362.910.191.147	96,1
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	0	1.800.000.000	1.800.000.000	100	1.450.000.000	1.449.919.197	100
5.1.4	Belanja Hibah	25.490.800.000	62.065.566.211	243,5	21.257.000.000	50.687.476.197	239	21.998.369.700	20.651.787.554	93,9
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	105.370.000	1.556.578.900	1.477,30	1.030.370.000	544.000.000	52,8	858.000.000	793.000.000	92,4
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.400.000.000	1.348.081.000	96,3	1.400.000.000	1.399.397.005	100	1.200.500.300	1.154.195.000	96,1
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	31.771.567.252	31.586.289.081	99,4	71.342.216.717	69.832.234.935	97,9	121.866.861.591	121.862.258.275	100
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	962.620.000	96,3	2.000.000.000	396.609.406	19,8	500.000.000	0	0
5.2	BELANJA LANGSUNG	683.725.704.099	552.449.777.768	80,8	732.736.028.911	602.823.376.754	82,3	711.421.193.679	645.737.462.244	90,8
5.2.1	Belanja Pegawai	38.810.042.248	40.530.032.814	104,4	40.855.341.946	35.322.705.882	86,5	39.997.551.955	36.538.215.610	91,4
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	306.857.368.738	188.996.502.185	61,6	281.391.335.545	229.400.862.760	81,5	347.944.908.632	299.759.287.490	86,2
5.2.3	Belanja Modal	338.058.293.113	322.923.242.768	95,5	410.489.351.421	338.099.808.113	82,4	347.944.908.632	299.759.287.490	86,2



.... Lanjutan

Kode	Uraian	2017			2018			Rata-Rata Pertumbuhan
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	%
5	BELANJA	1.302.276.358.149,00	1.159.392.700.366	89	1.328.762.409.461,04	1.279.529.902.602	96,3	90,5
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	581.997.086.135,00	574.257.219.908	99	679.982.076.425,61	677.192.214.610	99,6	95,15
5.1.1	Belanja Pegawai	340.958.552.590,00	336.760.299.686	99	424.218.174.412,61	424.218.174.412	100,0	91,08
5.1.3	Belanja Subsidi	1.350.000.000,00	1.194.609.400	89	1.332.222.142,00	1.323.386.550	99,3	57,7
5.1.4	Belanja Hibah	28.865.508.084,00	26.453.800.000	92	43.512.758.513,00	41.343.706.511	95,0	152,11
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.682.000.000,00	6.334.936.460	95	6.282.000.000,00	5.859.116.451	93,3	361,6
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000,00	1.486.917.506	99	2.722.406.858,00	2.675.177.060	98,3	97,52
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	202.141.025.461,00	201.733.261.063	100	201.814.514.500,00	201.772.653.626	100,0	99,21
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	293.395.793	59	100.000.000,00	0	-	36,73
5.2	BELANJA LANGSUNG	720.279.272.014,40	585.135.480.458	81	648.780.333.035,43	602.337.687.992	92,8	81,82
5.2.1	Belanja Pegawai	50.420.612.545,00	45.640.578.674	91	51.909.427.766,00	51.909.427.766	100,0	91,3
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	291.003.556.418,80	176.539.141.888	61	232.329.562.598,40	213.669.482.561	92,0	69,49
5.2.3	Belanja Modal	378.855.103.050,60	362.955.759.896	96	364.541.342.671,03	336.758.777.665	92,4	89,36

Sumber: LRA Kabupaten Katingan 2014-2018





Berdasarkan Tabel 3.7 dari data realisasi rata-rata pertumbuhan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2014-2018 sebesar 90,5%. Belanja Tidak Langsung periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 95,15%, sedangkan Belanja Langsung pada periode yang sama, memiliki rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 81,82%.

**b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Katingan ditampilkan pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Handwritten signature and date: 9/2/17



**Tabel 3.8**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BELANJA</b>	<b>368.142.324.168</b>	<b>396.583.580.418</b>	<b>459.102.125.041</b>	<b>429.634.709.325</b>	<b>549.225.330.576</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>267.322.750.759</b>	<b>292.027.923.340</b>	<b>351.116.665.357</b>	<b>336.620.740.883</b>	<b>397.556.283.487</b>
Gaji Dan Tunjangan	228.169.342.789	250.293.038.726	308.808.115.357	298.560.903.383	303.183.712.927
Tambahan Penghasilan PNS	36.963.407.970	39.544.884.614	40.137.450.000	35.619.837.500	91.054.570.560
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	2.190.000.000	2.190.000.000	2.171.100.000	2.440.000.000	3.318.000.000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>100.819.573.409</b>	<b>104.555.657.078</b>	<b>107.985.459.684</b>	<b>93.013.968.442</b>	<b>151.669.047.089</b>
Honorarium PNS	4.842.013.347	3.420.440.000	4.391.119.500	5.018.159.000	464.900.000
Honorarium Non PNS	29.304.812.131	27.256.818.672	27.393.912.900	29.107.531.600	38.190.986.805
Uang Lembur	1.594.065.000	1.824.070.000	1.707.386.000	1.208.093.000	1.481.856.000
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	4.765.394.836	993.392.210	995.387.210	830.658.800	999.999.000
Belanja Makanan Dan Minuman	6.882.687.608	16.510.458.194	15.387.388.825	10.389.610.900	11.873.191.550
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	927.233.355	1.003.671.000	1.258.576.600	824.799.500	314.831.000
Belanja Pakaian Kerja	425.449.000	1.121.993.500	738.248.050	333.288.000	247.891.000
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.788.310.050	2.445.661.250	2.307.440.600	3.714.868.200	4.150.892.525
Belanja Perjalanan Dinas	38.201.491.315	38.543.717.452	47.294.359.345	38.961.132.229	45.165.418.744
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.965.000.000	3.053.800.000	150.000.000		-
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.032.305.267	8.381.634.800	6.361.640.654	2.625.827.213	3.613.661.722
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	90.811.500	-	-	-	45.165.418.744
Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah



Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2014	368.142.324.168	808.022.577.073	45,56
2	2015	396.583.580.418	1.079.561.321.565	36,74
3	2016	459.102.125.041	1.164.558.813.417	39,42
4	2017	429.634.709.325	1.188.826.276.420	36,14
5	2018	549.225.330.576	1.288.529.902.602	42,62

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah terjadi kenaikan dan penurunan dari periode tahun 2014-2018 dengan kenaikan sebesar. Pada periode tahun 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 8,83% dan terjadi kenaikan lagi periode 2015-2016 sebesar 2,6% serta pada tahun 2017-2018 terjadi kenaikan sebesar 6,48%.

**c. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel di bawah:

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.





**Tabel 3.10**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>268.739.374.359</b>	<b>294.243.913.235</b>	<b>352.469.084.781</b>	<b>337.557.198.812</b>	<b>398.754.615.913</b>	<b>10,79%</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	228.169.342.789	250.293.038.726	308.808.115.357	298.560.903.383	303.183.712.927	7,83%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	36.963.407.970	39.544.884.614	40.137.450.000	35.619.837.500	91.054.570.560	38,21%
3	Biaya Pemungutan Pajak	38.505.000	-	-	-	-	-
4	Insentif Pemungutan Pajak	430.377.793	1.428.281.506	440.403.091	139.558.803	401.433.300	70,51%
5	Insentif Pemungutan Retribusi	323.181.726	55.211.122	115.117.498	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	2.190.000.000	2.190.000.000	2.171.100.000	2.440.000.000	3.318.000.000	11,88%
7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	624.559.081	732.497.267	796.898.834	796.899.126	796.899.126	6,52%
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>4.750.000.000</b>	<b>10,30%</b>
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	4.750.000.000	10,30%
	<b>TOTAL A+B</b>	<b>273.239.374.359</b>	<b>301.243.913.235</b>	<b>362.469.084.781</b>	<b>346.557.198.812</b>	<b>403.504.615.913</b>	<b>10,65%</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan 2014-2018, diolah



### **3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah**

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### **a. Sumber Penutup Defisit Riil**

Dalam Sumber Penutup Defisit Riil pemerintah Kabupaten Katingan harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.



**Tabel 3.11**  
**Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>933.118.983.049</b>	<b>1.066.081.723.749</b>	<b>1.124.910.926.689</b>	<b>1.126.725.415.437</b>	1.260.733.017.283
2	BELANJA DAERAH	955.517.558.529	1.072.561.321.565	1.154.558.813.417	1.145.998.264.701	1.247.802.033.180
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.500.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	4.750.000.000
<b>A.</b>	<b>Defisit Riil</b>	<b>-26.898.575.480</b>	<b>-13.479.597.816</b>	<b>-39.647.886.727</b>	<b>-28.272.849.264</b>	8.180.984.103
<b>Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:</b>						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	88.529.676.000
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan atas Investasi	-	-	-	-	-
	Total Realisasi Penerimaan	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	88.529.676.000
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>167.758.859.949</b>	<b>154.279.262.133</b>	<b>114.953.509.101</b>	<b>86.615.584.601</b>	<b>96.710.660.103</b>

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah



**Tabel 3.12**  
**SilPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata pertumbuhan
1	Jumlah SilPA	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	88.529.676.000	-17,57%
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	5.399.000	625.873.986	-	109.620.273	-	-
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
SILPA RIIL (1-2-3)		194.652.036.429	167.132.985.963	154.601.395.828	114.778.813.591	88.529.676.000	-17,57%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah



**Tabel 3.13**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Defisit Ril	-22.398.575.480	-6.479.597.816	-29.647.886.727	-19.272.849.264	8.180.984.103
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	194.657.435.429	167.758.859.949	154.601.395.828	114.888.433.865	88.529.676.000
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-		
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan	167.758.859.949	154.279.262.133	114.953.509.101	88.669.452.573	96.710.660.103

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah

Tabel 3.14  
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018

N O	URAIAN	2014		2015		2016		2017		2018	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	167.758.859.949		154.279.262.133		114.953.509.101		88.669.452.573		96.710.660.103	
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	167.758.859.949	100	154.279.262.133	100	114.953.509.101	100	88.669.452.573	100	96.710.660.103	100
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dana Reboisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dana Terikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah





**b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan guna memberikan gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Katingan yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Saldo Kas Neraca Daerah	167.758.859.949	154.280.255.133	114.954.109.101	88.645.774.506	96.710.660.103
	Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga samapi dengan akhir tahun belum terselesaikan	5.399.000	625.873.986	-	109.620.273	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	167.753.460.949	153.654.381.147	114.954.109.101	88.536.154.232	96.710.660.103

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah

**3.3. KERANGKA PENDANAAN**

Analisis kerangka pendanaan guna menghitung kapasitas total keuangan daerah, serta dalam kerangka pendanaan bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tahun 2019 telah terbit beberapa peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah periode tahun selanjutnya. Peraturan tersebut diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta selanjutnya pada tataran teknis Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2020 peraturan tersebut telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

h  
9 x 19



### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Belanja daerah memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2018-2020. Sementara itu, target Tahun 2021 menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2021. Penentuan target pendapatan tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan berdasarkan tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan pada periode tahun 2019-2020 terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 9,27 persen, komponen pendapatan yang menurun diantaranya komponen Dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan minus 14,02 persen, komponen pendapatan yang menyalami kenaikan pertumbuhannya yaitu pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,36 persen serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,39 persen. Selanjutnya pada Realisasi Belanja daerah pada periode 2019-2020 terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus 20,80 persen, komponen belanja yang terjadi penurunan pada komponen Belanja langsung dengan rata-rata penurunan sebesar 42,58 persen, namun komponen belanja tidak langsung terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,45 persen

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2014, mengamanatkan adanya penyertaan modal Pemda Kabupaten Katingan. Penyertaan modal ini ditujukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan, PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah, dan PT. Katingan Mandiri Persada. Hal ini menjadi komponen dalam pengeluaran pembiayaan. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2020 disajikan secara rinci pada Tabel 3.16.

Handwritten signature and initials in blue ink.



**Tabel 3.16**  
**Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2019-2020**

Kode Akun	Uraian	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.262.989.546.120</b>	<b>1.145.874.324.280</b>	<b>-9,27</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>48.304.794.935</b>	<b>60.555.024.700</b>	<b>25,36</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	20.855.317.940	16.919.152.120	-18,87
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.611.954.138	4.307.653.425	19,26
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.600.307.548	7.738.215.980	1,81
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	16.237.215.309	31.590.003.175	94,55
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.003.741.055.494</b>	<b>863.011.124.898</b>	<b>-14,02</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	117.965.158.699	88.784.395.773	-24,74
4.2.2	Dana Alokasi Umum	712.958.173.000	634.091.753.000	-11,06
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	172.817.723.795	140.134.976.125	-18,91
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>210.943.695.691</b>	<b>222.308.174.682</b>	<b>5,39</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	32.571.914.630	34.902.934.369	7,16
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.505.420.262	29.884.994.313	-13,39
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		10.079.243.000	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
4.3.6	Pendapatan Lainnya	143.866.360.799	147.441.003.000	2,48
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.389.889.317.649</b>	<b>1.100.845.535.475</b>	<b>-20,80</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>703.667.698.206</b>	<b>706.849.781.737</b>	<b>0,45</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	408.776.717.122	396.392.722.044	-3,03
5.1.3	Belanja Subsidi	1.349.993.700	1.416.385.700	4,92
5.1.4	Belanja Hibah	23.026.900.000	23.157.850.000	0,57
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.400.204.017	25.198.228.982	-14,29
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.762.644.179	2.359.731.056	-85,03
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	225.351.239.188	225.280.458.715	-0,03
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	33.044.405.240	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>686.221.619.443</b>	<b>393.995.753.738</b>	<b>-42,58</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	48.622.863.753	54.691.001.719	12,48
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	452.365.781.889	200.995.939.181	-55,57
5.2.3	Belanja Modal	185.232.973.801	138.308.812.838	-25,33
	Surplus/defisit	(126.899.771.529)		-100,00
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>96.710.660.105</b>	<b>137.179.378.956</b>	<b>41,85</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96.710.660.105</b>	<b>144.394.378.956</b>	<b>49,31</b>
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	96.710.660.105	144.394.378.956	49,31
6.1.2	Koreksi SiLPA			
6.1.3	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.4	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			

h  
9x15





Kode Akun	Uraian	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	7.215.000.000	
6.2.1	Pembentukan dana cadangan			
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah		7.215.000.000	
6.2.3	Pembayaran pokok utang			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			

Sumber: Diolah dari LRA Kab.katingan Tahun 2019 & 2020

Pada Tabel 3.17 disajikan proyeksi Pendapatan dan Belanja tahun 2021-2023 yang disajikan dengan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Komponen pendapatan yang diproyeksikan meningkat diantaranya Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,00 persen, Pendapatan Transfer sebesar 5,44 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 3,80 persen. Pada sisi Belanja periode tahun 2021-2023 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 persen, diantaranya, belanja modal sebesar 9,48 persen dan belanja tranfer sebesar 3,46 persen, namun pada komponen belanja operasi di proyeksikan menurun sebesar 0,48 persen serta belanja tidak terduga diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 49,43 persen.

Handwritten signature and initials.



**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023**

Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (PAPBD)	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.167.108.724.784</b>	<b>1.287.831.814.784</b>	<b>1.307.161.916.788</b>	<b>5,92</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>101.000.000.000</b>	<b>13,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	25.282.423.902	37.282.423.902	37.655.248.141	24,23
4.1.2	Retribusi Daerah	6.259.088.218	7.259.088.218	7.331.679.100	8,49
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.370.215.980	20.370.215.980	20.573.918.140	16,77
4.14	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.088.271.900	35.088.271.900	35.439.154.619	3,52
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.060.781.224.784</b>	<b>1.159.504.314.784</b>	<b>1.177.834.416.788</b>	<b>5,44</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.050.016.720.000	1.130.739.810.000	1.149.069.912.004	4,65
4.2.01.01	Dana Perimbangan	899.375.894.000	970.098.984.000	977.765.255.337	4,33
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	68.756.117.000	78.756.117.000	79.543.678.170	7,77
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	625.956.787.000	686.667.846.000	693.534.524.460	5,35
4.02.01.02	Dana Transfer Khusus	204.662.990.000	204.675.021.000	204.687.052.707	0,01
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.02	Transfer Antar Daerah	10.764.504.784	28.764.504.784	28.764.504.784	83,61
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	10.764.504.784	28.764.504.784	28.764.504.784	83,61
4.2.02.02	Dana penyesuaian	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>26.327.500.000</b>	<b>28.327.500.000</b>	<b>28.327.500.000</b>	<b>3,80</b>
4.3.01	Hibah	-	-	-	-



Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (PAPBD)	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	
4.3.02	Dana darurat	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	26.327.500.000	28.327.500.000	28.327.500.000	3,80
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.334.486.139.539</b>	<b>1.340.010.298.333</b>	<b>1.372.542.963.249</b>	<b>1,42</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>839.310.653.563</b>	<b>792.627.508.289</b>	<b>829.106.908.132</b>	<b>-0,48</b>
5.1.01	Belanja pegawai	426.905.902.123	437.173.857.351	447.688.777.785	2,41
5.1.02	Belanja barang dan jasa	340.157.581.961	298.640.875.769	339.707.105.880	0,77
5.1.03	Belanja bunga				#DIV/0!
5.1.04	Belanja subsidi	1.473.100.000	1.601.150.000	1.740.330.814	8,69
5.1.05	Belanja hibah	61.183.591.786	32.425.656.190	17.184.724.673	-47,00
5.1.06	Belanja bantuan sosial	9.590.477.693	22.785.968.980	22.785.968.980	68,79
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>248.467.063.540</b>	<b>294.732.965.327</b>	<b>295.729.135.837</b>	<b>9,48</b>
5.2.1	Belanja Modal	248.467.063.540	294.732.965.327	295.729.135.837	9,48
<b>5.3</b>	<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>19.774.200.136</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>5.057.094.563</b>	<b>-49,43</b>
5.3.1	Belanja tidak terduga	19.774.200.136	10.000.000.000	10.000.000.000	-0,49
<b>5.4</b>	<b>Belanja transfer</b>	<b>226.934.222.300</b>	<b>242.649.824.717</b>	<b>242.649.824.717</b>	<b>3,46</b>
5.4.01	Belanja bagi Hasil	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	224.434.222.300	240.149.824.717	240.149.824.717	3,50
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-167.377.414.755</b>	<b>-52.178.483.549</b>	<b>-65.381.046.460</b>	<b>24,61</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>167.377.414.755</b>	<b>52.178.483.549</b>	<b>65.381.046.460</b>	<b>-21,76</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>182.256.414.755</b>	<b>67.057.483.549</b>	<b>65.381.046.460</b>	<b>-32,85</b>
6.1.01	SiLPA	182.256.414.755	67.057.483.549	65.381.046.460	-32,85
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-



Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (PAPBD)	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran pembiayaan	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan modal daerah	14.879.000.000	14.879.000.000	-	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari APBD Kabupaten Katingan Tahun 2021



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

a) **Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)**

Proyeksi SiLPA disajikan berdasarkan realiasi dan proyeksi, periode tahun 2019-2020 merupakan nilai realiasi, selanjutnya tahun 2021 berdasarkan target APBD tahun 2021 dan periode tahun 2022 sampai dengan 2023 merupakan nilai proyeksi, berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan tahun dasar tahun 2021, direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA tahun 2022-2023 sebesar minus 39,8%.

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023**

Uraian	Realisasi		PAPBD	Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	96.710.660.105	144.394.378.956	182.256.414.755	67.057.483.549	65.381.046.460

Sumber: LRA tahun 2019&2020, APBD 2021 dan hasil Analisis

b) **Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat**

Penyajian Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat di bagi dua yaitu periode tahun 2019 sampai dengan 2020 disajikan dengan pengertian pengeluaran wajib mengikat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Realisasi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2019-2020 disajikan secara rinci pada tabel di bawah.

**Tabel 3.19**  
**Realisasi Kebutuhan pengeluaran wajib mengikat dan Prioritas**  
**Utama Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020**

No	Uraian	Realisasi		Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
A	Belanja Tidak Langsung	409.565.575.954	397.170.324.461	(3,03)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	315.620.769.149	311.410.189.674	(1,33)

h  
9 x 10



No	Uraian	Realisasi		Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	
2	Tambahan Penghasilan PNS	88.904.442.856	81.233.093.831	(8,63)
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.529.000.000	3.529.000.000	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	722.505.117	220.438.539	(69,49)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	788.858.832	777.602.417	(1,43)
B	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	<b>7.215.000.000</b>	-
1	Penyertaan Modal	-	7.215.000.000	-
	<b>Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)</b>	<b>409.565.575.954</b>	<b>404.385.324.461</b>	<b>(1,26)</b>

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Selanjutnya, proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2021 sampai dengan 2023 berdasarkan pengertian belanja wajib dan belanja mengikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.





**Tabel 3.20**  
**Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta**  
**Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023**

No	Uraian	APBD		Proyeksi			
		2021	%	2022	%	2023	%
A	Belanja Mengikat	427.751.864.117	31,9	437.173.857.351	32,6	446.803.386.691	30,9
1	Belanja Pegawai	427.751.864.117	31,9	437.173.857.351	32,6	446.803.386.691	30,9
							0,0
B	Belanja Wajib						0,0
1	Pendidikan	273.440.692.215	20,4	294.495.625.516	22,0	317.171.788.680	22,0
2	Kesehatan	236.654.761.809	17,6	254.877.178.468	19,0	274.502.721.210	19,0
3	Infrastruktur	165.168.912.842	12,3	177.886.919.131	13,3	191.584.211.904	13,3
4	Peningkatan kapasitas SDM	7.308.715.912	0,5	7.871.487.037	0,6	8.477.591.539	0,6
5	Penguatan APIP	10.178.622.250	0,8	10.962.376.163	0,8	11.806.479.128	0,8
							0,0
C	Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000		14.879.000.000		14.879.000.000	1,0
1	Pembentukan Dana Cadangan		0,0				0,0
2	Penyertaan modal daerah	14.879.000.000	1,1	14.879.000.000	1,1	14.879.000.000	1,0
3	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo						
4	Pemberian Pinjaman Daerah						
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.						
	Total Belanja Wajib Mengikat	716.071.556.332		746.548.482.866		778.854.175.371	

Sumber: APBD 2021, dan hasil Pengolahan

**c) Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah**

Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten katingan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pada periode tahun 2019-2020 penghitungan menggunakan prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan periode tahun 2021 sampai dengan 2023 menggunakan prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.Realisasi kapasitas rill kemampuan keuangan daerah periode tahun 2019-2020 terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 12,17 persen, secara rinci realiasi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten katingan dapat disajikan pada tabel di bawah.

Handwritten signature and initials.



**Tabel 3.21**  
**Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020**

Uraian	Realisasi	
	2019	2020
<b>Pendapatan</b>	<b>1.262.989.546.120</b>	<b>1.145.874.324.280</b>
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	96.710.660.105	144.394.378.956
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-
<b>Total penerimaan</b>	<b>1.359.700.206.225</b>	<b>1.290.268.703.236</b>
Dikurangi:		
Pengeluaran pembiayaan	-	7.215.000.000
Belanja Tidak Langsung	703.667.698.206	706.849.781.737
<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah</b>	<b>656.032.508.019</b>	<b>576.203.921.500</b>

Sumber: Hasil pengolahan data

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah membawa paradigma baru dalam pengelolaan keuangan di daerah. Salah satu hal mendasar adalah tidak berlakunya lagi belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak berlaku dan yang berlaku adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah terdiri atas a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Hal ini menyebabkan penghitungan proyeksi kapasitas keuangan daerah menggambarkan seluruh penerimaan daerah untuk mendanai belanja daerah. Dengan demikian, mulai tahun 2021 proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Katingan menerapkan peraturan yang terbaru sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

h  
ay!



**Tabel 3.22**  
**Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023**

Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (P-APBD)	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.167.108.724.784</b>	<b>1.287.831.814.784</b>	<b>1.307.161.916.788</b>	<b>5,92</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>101.000.000.000</b>	<b>13,00</b>
4.1.1	Pajak Daerah	25.282.423.902	37.282.423.902	37.655.248.141	24,23
4.1.2	Retribusi Daerah	6.259.088.218	7.259.088.218	7.331.679.100	8,49
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.370.215.980	20.370.215.980	20.573.918.140	16,77
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	33.088.271.900	35.088.271.900	35.439.154.619	3,52
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.060.781.224.784</b>	<b>1.159.504.314.784</b>	<b>1.177.834.416.788</b>	<b>5,44</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.050.016.720.000	1.130.739.810.000	1.149.069.912.004	4,65
4.2.01.01	Dana Perimbangan	899.375.894.000	970.098.984.000	977.765.255.337	4,33
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	68.756.117.000	78.756.117.000	79.543.678.170	7,77
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	625.956.787.000	686.667.846.000	693.534.524.460	5,35
4.2.01.02	Dana Transfer Khusus	204.662.990.000	204.675.021.000	204.687.052.707	0,01
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)				#DIV/0!
4.2.02	Transfer Antar Daerah	10.764.504.784	28.764.504.784	28.764.504.784	83,61
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>26.327.500.000</b>	<b>28.327.500.000</b>	<b>28.327.500.000</b>	<b>3,80</b>
4.3.01	Hibah				
4.3.02	Dana darurat				
4.3.03	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	26.327.500.000	28.327.500.000	28.327.500.000	3,80





Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (P-APBD)	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>182.256.414.755</b>	<b>67.057.483.549</b>	<b>65.381.046.460</b>	<b>-32,85</b>
6.1.01	SiLPA	182.256.414.755	67.057.483.549	65.381.046.460	-32,85
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan				
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah				
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah				
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>1.349.365.139.539</b>	<b>1.354.889.298.333</b>	<b>1.372.542.963.249</b>	<b>0,86</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.334.486.139.539</b>	<b>1.340.010.298.333</b>	<b>1.357.651.931.541</b>	<b>1,32</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>839.310.653.563</b>	<b>792.627.508.289</b>	<b>815.224.078.641</b>	<b>0,32</b>
5.1.01	Belanja pegawai	426.905.902.123	437.173.857.351	447.688.777.785	2,22
5.1.02	Belanja barang dan jasa	340.157.581.961	298.640.875.769	339.707.105.880	6,78
5.1.03	Belanja bunga				
5.1.04	Belanja subsidi	1.473.100.000	1.601.150.000	1.601.150.000	0,00
5.1.05	Belanja hibah	61.183.591.786	32.425.656.190	17.184.724.673	-50,57
5.1.06	Belanja bantuan sosial	9.590.477.693	22.785.968.980	9.042.320.304	-47,34
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>248.467.063.540</b>	<b>294.732.965.327</b>	<b>294.732.965.327</b>	<b>0,08</b>
5.2.1	Belanja Modal	248.467.063.540	294.732.965.327	294.732.965.327	0,08



Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (P-APBD)	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
		2021	2022	2023	
5.3	Belanja tidak terduga	19.774.200.136	10.000.000.000	5.057.094.563	-5,37
5.3.1	Belanja tidak terduga	19.774.200.136	10.000.000.000	5.057.094.563	-5,37
5.4	Belanja transfer	226.934.222.300	242.649.824.717	242.649.824.717	6,36
5.4.01	Belanja bagi Hasil	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	224.434.222.300	240.149.824.717	240.149.824.717	6,42
6.2	Pengeluaran pembiayaan	14.879.000.000	14.879.000.000	14.879.000.000	0,00
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo				
6.2.02	Penyertaan modal daerah	14.879.000.000	14.879.000.000	14.879.000.000	0,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan				
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah				
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>1.349.365.139.539</b>	<b>1.354.889.298.333</b>	<b>1.372.542.963.249</b>	<b>1,30</b>

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



d) Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia, untuk itu ditetapkan alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut prioritas, sebagai berikut:

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut kelompok prioritas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23  
Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok  
Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020

Uraian	Realisasi	
	2019	2020
Kapasitas Riil keuangan daerah:	656.032.508.019	576.203.921.500
Prioritas I	51.687.991.524	57.961.471.295
Prioritas II & III	604.344.516.495	518.242.450.204

Sumber: Hasil pengolahan data

Selanjutnya periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 untuk proyeksi alokasi kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan mengalokasikan penerimaan daerah untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat yang merupakan prioritas pertama. Selanjutnya, penerimaan daerah dialokasikan untuk membiayai belanja dalam rangka pemenuhan visi dan misi pembangunan yang selanjutnya dikelompokkan menjadi prioritas kedua, serta belanja urusan lainnya yang menjadi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan prioritas ketiga. Proyeksi alokasi masing-masing prioritas tahun 2021 sampai 2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.24  
Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok  
Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023

Uraian	Proyeksi		
	2021	2022	2023
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH:	1.334.486.139.539	1.340.010.298.333	1.357.663.963.249
A. PRIORITAS I	716.071.556.332	746.548.482.866	778.854.175.371
B. PRIORITAS II & III	596,355,286,192	568,394,496,165	553,412,449,879

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

k  
9 x





## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

Pada bab ini dirumuskan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Katingan berdasarkan kondisi riil. Pemetaan permasalahan pembangunan menjadi sangat strategis sebab menjadi agenda pembangunan yang harus dicari penyelesaiannya. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan 5 (lima) tahun kedepan.

#### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Bab II. Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan, serta berbagai keinginan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Katingan diuraikan pada bagian ini.

##### 4.1.1. Identifikasi Permasalahan RPJPD Kabupaten Katingan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 periode ketiga. Dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan jangka panjang. Berikut hasil identifikasi permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan pada tahap ke-3, sebagai berikut:

Handwritten signature and date: 9/1/24



**Tabel 4.1**  
**Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD**  
**Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-3 (2018-2023)**

Tujuan RPJPD Tahapan ke-3	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat	1. Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan	Kualitas SDM yang berdaya saing rendah	SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
	2. Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri	Rendahnya partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
	3. Terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian	Rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	Meningkatnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah
	4. Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan	Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat	Penegakan hukum secara adil dan transparan
	5. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial.	Belum meratanya kesejahteraan masyarakat dan masih tingginya angka kemiskinan	Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta penurunan angka kemiskinan

9 x 10





Tujuan RPJPD Tahapan ke-3	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	6. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak	IPM dan IPG masih dalam kategori cukup;	Peningkatan usia lama sekolah, usia harapan hidup dan daya beli masyarakat
	7. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.	Ketersediaan infrastruktur dasar dan energi masih terbatas	Peningkatan investasi dan jangkauan layanan energi yang merata
	8. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air	Alih fungsi lahan khususnya pada daerah tangkapan air	Pelaksanaan program konservasi hutan, sungai dan danau
	9. Terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.	Cakupan pelayanan penyediaan air minum terbatas	Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	10. Berkembangannya infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.	Ketersediaan infrastruktur pertanian di pedesaan masih rendah	Peningkatan produktivitas pertanian

Handwritten signature and initials.





Tujuan RPJPD Tahapan ke-3	Sasaran yang Ingin Dicapai	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
	11.Terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari	Berubahnya fungsi lahan akibat aktivitas ekonomi	Pelaksanaan program konservasi lingkungan
	12.Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Eksplorasi SDA yang kurang terkendali	Pengawasan dan pemantauan kegiatan yang berpotensi merusak SDA
	13.Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.	Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah	Pemantauan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan jangka panjang yang telah ditelaah dan capaian kinerja pembangnan beberapa tahun terakhir sebagaimana telah disajikan pada Bab II RPJMD ini, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan. Adapun permasalahan pembangunan dimaksud, sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam hal ini penduduk atau masyarakat suatu daerah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Penduduk yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang seringkali diwakili dengan indikator pendidikan, kesehatan dan penghasilan, niscaya memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan. Peran aktif penduduk dalam pembangunan tentu sangat berarti bagi penduduk itu sendiri, masyarakat luas, maupun bagi kemajuan daerah tersebut. Masyarakat dapat berperan dalam setiap aspek atau sektor pembangunan, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

Sama seperti daerah lain, Kabupaten Katingan juga sangat membutuhkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bahkan memiliki daya saing menghadapi tantangan dan kompetisi dengan SDM dalam negeri maupun luar negeri. Menilik capaian beberapa indikator terkait kualitas penduduk Katingan beberapa tahun terakhir, diperoleh gambaran bahwa kualitas SDM Kabupaten Katingan belum optimal.

Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM Katingan merupakan masalah pokok pembangunan sumber daya manusia. Untuk melihat sampai sejauh mana kualitas dan daya saing SDM disuatu tempat, dapat dilihat dari

h





capaian Angka IPM yang menggunakan empat indikator mewakili tiga dimensi, yakni dimensi kesehatan berupa Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), dimensi pengetahuan berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas, serta dimensi penghidupan yang layak berupa rata-rata besarnya pengeluaran per kapita penduduk yang dikenal dengan Angka Pengeluaran per Kapita (PNP per Kapita).

Secara umum nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Katingan selama periode 2015-2020 masih berada dalam kategori sedang ( $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ ) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} \leq 80$ ) atau sangat tinggi ( $\text{IPM} > 80$ ) (sebagaimana Tabel 2.20). Di tingkat Provinsi pada periode 2015-2016, IPM Kabupaten Katingan berada pada urutan ke 9, sedangkan pada periode 2017-2020 berada pada urutan ke 10. kondisi tersebut menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Meski trend IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun posisinya masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2020, IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 71,05 dan IPM Nasional sebesar 71,94.

#### a. Pendidikan

Untuk memahami sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan yang optimal, maka kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan.

Bila dikaitkan dengan kedua indikator tersebut, maka secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Katingan yang dapat mempengaruhinya dapat dilihat dari hal-hal berikut :

- Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;
- Rasio murid terhadap guru sudah terpenuhi akan tetapi sebaran tenaga pengajar di semua jenjang tidak merata, kebanyakan menumpuk di daerah perkotaan dan tempat-tempat tertentu;
- Masih kurangnya ketersediaan fasilitas dan perlengkapan belajar siswa dan sarana pendidikan; dan
- Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan selalu meningkat selama periode tahun 2015-2020. Angka Harapan Lama Sekolah di Tahun 2015 sebesar 12,03 tahun dan selalu meningkat sampai tahun 2020 menjadi 12,67 tahun. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah di tahun 2015 8,62 tahun meningkat terus menjadi 8,67 tahun di tahun 2020. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di

9 x 14





kelas 3 SMP. Kondisi menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Katingan masih tinggi, terutama mulai jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Peningkatan angka HLS dan RLS ini ternyata tidak diikuti oleh penurunan beberapa indikator lainnya dibidang pendidikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun 2015 APK SMP/MTS mencapai 98,13 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi hanya 77,73 persen;
- 2) Kecenderungan penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.  
APM SD/MI pada tahun 2019 hanya mencapai 99,87 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 100 persen. Begitu pula dengan APM SMP/MTS, dimana pada tahun 2019 hanya mencapai 76,05 persen, menurun dibanding dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 76,28 persen.
- 3) Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah usia SD, usia SLTP, usia SLTA, dan usia Perguruan Tinggi.
- 4) Menurunnya Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.
- 5) Menurunnya Angka melanjutkan (AM) dari dari SD/MI ke SMP/MTs, dimana pada tahun 2019 hanya mencapai 85,05 persen, menurun dibanding dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 101,51 persen. Hal tersebut juga dialami oleh Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA, dimana pada tahun 2015 angkanya mencapai 98,96 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 86,12 persen.

Permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Katingan masih mengalami kendala terutama masalah penyebaran/penempatan guru di semua daerah belum merata walaupun secara rasio murid terhadap guru sudah memenuhi syarat dibawah 20 : 1 untuk SD dan 30 : 1 untuk SMP. Selain itu permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP adalah belum memadainya guru bidang studi tertentu terutama Guru Matematika, Guru IPA, dan Guru Bahasa Inggris.

Selain itu terdapat penurunan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, dimana pada tahun 2017 angkanya hanya mencapai 79,87 persen, menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 81,34 persen.

Selanjutnya dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah diperlukan dukungan pengadaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum. Berdasarkan data pada Tabel 2.124 terlihat bahwa persentase pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 95,11 persen dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 78,21 persen. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan dapat dipicu oleh menurunnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Hal ini mengurangi minat masyarakat ke perpustakaan. Data menunjukkan persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2019 hanya 19,58 persen atau mengalami

9 y 14





penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai menjadi 33,46 persen.

#### **b. Kesehatan**

Dimensi berikut untuk mengukur kualitas SDM adalah dimensi kesehatan yang dilihat dari besaran Angka Umur Harapan Hidup (UHH) sebagaimana ada di Tabel 2.23. Untuk permasalahan kesehatan sendiri, dapat diukur dengan dua indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan derajat kesehatan masyarakat Katingan, yakni:

1) Masih tingginya Angka Kematian Balita

Data di Bab II menunjukkan bahwa masalah kematian balita di Kabupaten Katingan masih cukup tinggi dimana AKABA tertinggi mencapai angka 12,75 di tahun 2016 dan ada penurunan menjadi 8,73 di tahun 2017. Angka 8,73 menunjukkan bahwa setiap ada kelahiran 1.000 bayi pada tahun 2017, terdapat 8-9 balita yang meninggal. Permasalahan ini harus menjadi perhatian secara mendalam oleh OPD terkait, terutama bagaimana pemerintah daerah dapat mengurangi resiko kematian balita sampai angka 0 atau tidak ada kematian balita.

2) Masih tingginya Angka Kematian Ibu

Selain masih terdapatnya kasus kematian balita, ternyata masalah kematian ibu pasca melahirkan juga masih cukup tinggi di Kabupaten Katingan, meski dalam tiga tahun terakhir angkanya terus menurun hingga poin 96,96 di akhir tahun 2017-

Kedua indikator di atas, bila dianalisis lebih lanjut menggambarkan permasalahan aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Katingan masih rendah. Hal-hal berikut yang disinyalir menjadi akar masalahnya, yakni:

1) Adanya kecenderungan kenaikan Persentase Balita Gizi Buruk.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan bergizi dan seimbang pada anak, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melahirkan generasi sehat dan cerdas, terbatasnya pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita, adanya penyakit seperti TBC yang menyebabkan anak menjadi kurus dan menjadi gizi buruk (Data Tabel 2.74).

2) Tingginya Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Katingan tergolong masih tinggi, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 37,2%. Kemudian, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Katingan pada tahun 2016 sebesar 26,6%, tahun 2017 sebesar 23,06%, dan berdasarkan hasil Studi Faktor Gizi Terhadap Pertumbuhan Anak di Kabupaten Katingan tahun 2018 sebesar 28,5% hal ini menerangkan bahwa 1 dari 3 sampai dengan 4 anak di Kabupaten Katingan adalah stunting. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya upaya pencegahan stunting yang dilakukan, meliputi intervensi spesifik yaitu intervensi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak ibu hamil sampai bayi usia 2 tahun (baduta) dan intervensi sensitif yaitu dukungan stakeholder di luar kesehatan,

9 10 11





masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil, rendahnya konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, rendahnya pemberian asi eksklusif, rendahnya pemeriksaan K2 (ante natal care).

Selain faktor gizi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan ketersediaan air bersih sangat menentukan upaya pencegahan stunting.

3) Tingginya penyalahgunaan Napza

Berdasarkan hasil Studi Penyalahgunaan Napza pada masyarakat Kabupaten Katingan (di kalangan pelajar) pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, diperoleh hasil bahwa angka prevalensi atau angka kejadian di kalangan pelajar SMP dan SLTA di Kabupaten Katingan yang pernah pakai napza sekitar 8% dan atau diperkirakan ada 1 dari 13 orang pelajar yang pernah pakai napza. Sedangkan yang setahun pakai napza sebesar 6,3% atau setara dengan 1 dari 16 orang pelajar pakai napza dalam setahun terakhir. Apakah angka ini tinggi atau rendah? Untuk menjawabnya kita bisa gunakan angka acuan dari studi lain sebagai indikator. Studi yang sama adalah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa di Indonesia tahun 2016, yaitu yang pernah pakai sebesar 1,6% dan setahun pakai sebesar 0,6% (BNN dan PPKUI, 2016). Dengan demikian, angka temuan di Kabupaten Katingan jauh lebih besar dari angka nasional. Sehingga dapat disimpulkan, permasalahan narkoba di Kabupaten Katingan sangat serius untuk segera ditangani dan dicarikan solusi agar angka prevalesi tidak bertambah besar.

4) Rendahnya kualitas sanitasi di Kabupaten Katingan

Sanitasi meliputi 3 hal yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase. Permasalahan air limbah domestik adalah masih ada 33,55% penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) yang terdiri dari 29,91% di wilayah perdesaan dan 3,64% di wilayah perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan di tempat terbuka, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di sembarangan tempat.

Permasalahan persampahan adalah rendahnya tingkat layanan persampahan dan masih banyaknya masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat sebesar 86,98%. Permasalahan drainase adalah masih adanya luas genangan air sebesar 61 Ha pada permukiman di perkotaan.

5) Tidak adanya penambahan jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit

Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana kesehatan, dimana jumlah puskesmas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sama sekali tidak terdapat penambahan dan untuk jumlah Rumah Sakit pun hanya terdapat satu Rumah Sakit untuk melayani seluruh kabupaten. Hal ini menyebabkan sistem rujukan yang jauh dari tempat tinggal masyarakat.

6) Menurunnya cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization*





Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 hanya mencapai 71,4%, menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 80,7%. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi pada anak, adanya pemahaman masyarakat yang keliru terhadap vaksin, penyediaan vaksin yang terbatas pada fasilitas kesehatan.

- 7) Meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja

Dari tabel 2.52 dapat dilihat bahwa jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) di tahun 2015 sebesar 97 kasus dan cenderung meningkat selama kurun waktu sampai dengan tahun 2019. Namun dalam kurun waktu 5 (enam) tahun tersebut terdapat penurunan jumlah kasus sampai 56 kasus pada tahun 2016. Peningkatan kasus penderita baru TBC BTA (+) ini meningkat cukup drastis pada tahun 2019 menjadi 168 kasus. Situasi ini perlu diwaspadai dan ditangani agar tidak menjadi semakin berkembang dan menular. Upaya pengobatan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Ini terlihat dari statistis indikator perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang terus meningkat, bahkan jauh melampaui jumlah penderita baru.

- 8) Menurunnya Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2015 sebesar 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017.

- 9) Penyebaran Penduduk.

Penyebaran penduduk Kabupaten Katingan yang tidak merata dibandingkan luas Kabupaten Katingan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 8,1 jiwa/km<sup>2</sup>, berimplikasi pada semakin jauhnya jangkauan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kependudukan dan infrastruktur jalan serta layanan air bersih dan sanitasi layak. Hal ini memerlukan terobosan dalam mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Selain permasalahan tersebut di atas, pencapaian indikator bidang Kesehatan siklus hidup serta penanganan penyakit menular dan tidak menular di tahun 2020, capaiannya indikator SPM masih dibawah 60% antara lain :

- Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin = 52%
- Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar = 45%
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif = 30%
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = 39%
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus = 47%
- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis = 50%

Hubungan masalah antara masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Katingan dengan penyebab masalah tersebut dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

9 x 14





**Tabel 4.2**  
**Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya antara kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)	Belum optimalnya cakupan pelayanan pendidikan	
		Menurunnya pengunjung perpustakaan	Menurunnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masalah: <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya angka kematian bayi dan balita</li><li>- Meningkatnya angka kematian ibu</li><li>- Menurunnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</li><li>- Kenaikan persentase balita gizi buruk</li><li>- Menurunnya Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization</li><li>- Meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak adanya penambahan jumlah puskesmas dan Rumah Sakit</li><li>- Terjadinya penurunan rasio dokter per satuan penduduk</li><li>- Terjadinya penurunan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk</li><li>- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat.</li><li>- Rendahnya pemahaman masyarakat akan asupan makanan bergizi dan seimbang</li><li>- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala</li><li>- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh bayi, balita dan anak</li><li>- Rendahnya pemahaman masyarakat akan manfaat imunisasi.</li><li>- Rendahnya kepatuhan masyarakat untuk mengkonsumsi obat TBC sesuai aturan pakai.</li></ul>
		Jangkauan pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan setaraan gender terbatas	Penyebaran penduduk yang tidak merata dan mencakup wilayah yang sangat luas

Sumber: hasil analisis

**2. Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Katingan. Walaupun data beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Katingan yaitu 4,79% pada Tahun 2019, namun penanggulangan masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi prioritas. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang paripurna bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Katingan. Hal yang penting untuk penanganan masalah tersebut, yaitu menemukan dan mengenali apa penyebab dari kemiskinan tersebut. Berikut ini beberapa hal

Handwritten signature and initials.



masalah dan akar masalah yang memberi kontribusi bagi masalah pokok kemiskinan.

**a. Pendidikan**

Pendidikan masyarakat Kabupaten Katingan kebanyakan tamat SD dan tidak tamat SMP sehingga peluang masuk pada pasar tenaga kerja menjadi kecil. Bangunan SMP rata – rata berada di ibukota Kecamatan dan Sekolah Satu Atap SD-SMP hanya ada di desa-desa relatif besar. Begitu pula dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK hanya ada di ibukota Kecamatan dan terbanyak di Kota Kasongan.

**b. Sosial**

- 1) Masih rendahnya Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan.

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan baru mencapai 14,3 persen. Tentu angka ini masih sangat jauh dari kondisi ideal bagi penanganan PMKS, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar.

- 2) Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dimana jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sama sekali tidak terdapat penambahan yaitu hanya berjumlah 3 buah panti asuhan.

**c. Ketenagakerjaan**

- 1) Meningkatnya Jumlah Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur dalam penilaian kondisi ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini untuk urusan ketenagakerjaan masalah yang terjadi adalah semakin meningkatnya jumlah pengangguran terbuka. Dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebanyak 2.942 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 4.677. kondisi tersebut mengakibatkan meningkat pula Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan, dimana pada tahun 2017 TPT Kabupaten Katingan hanya mencapai 3,81 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 5,69.

- 2) Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan data pada BAB II dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 72,20 persen, menurun di tahun 2017 menjadi 65,97 persen, dan meningkat Kembali sampai tahun 2019 menjadi 70,79 persen. Namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 64,55 persen.

Masalah pokok kemiskinan di Kabupaten Katingan dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

9 x 14





**Tabel 4.3**  
**Pemetaan Permasalahan Kemiskinan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kemiskinan	Pendidikan rata-rata penduduk Katingan hanya tamat SD dan tidak tamat SMP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keberadaan SMP dan SMA hanya berada di ibukota Kecamatan dan Kota Kasongan.</li></ul>
		Masih rendahnya penanganan dan pemberian bantuan bagi PMKS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbatasnya pendanaan bagi penanganan PMKS. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan hanya berkisar 15 kelompok pada Tahun 2017, sementara jumlah kelompok yang perlu diberi bantuan sebanyak 1.124.</li><li>- Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi</li></ul>
		Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya kesempatan kerja</li><li>- Kurangnya keterampilan tenaga kerja sehingga sulit untuk diterima dalam dunia kerja</li><li>- Kurangnya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga swasta</li></ul>

Sumber: hasil analisis

**3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian**

Kabupaten Katingan merupakan daerah penyangga atau *hinterland* bagi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai gerbang dari dan menuju ibukota provinsi, Katingan memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan dan memasarkan potensi dan hasil kekayaan alam yang dimilikinya. Pengembangan dan pemasaran potensi ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Katingan. Data LPE Kabupaten Katingan pada selama 6 (enam) tahun terakhir umumnya paling tinggi atau kedua lebih tinggi bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Katingan mengalami kontraksi hingga 3,25 persen, yang berarti jauh lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Kontraksi perekonomian nasional, provinsi dan Kabupaten Katingan merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020.

Meski demikian, Gini Ratio Katingan termasuk yang paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah yang menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan relatif baik. Demikian pula dengan pendapatan perkapita penduduk Katingan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Semua ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan ke depannya.

ay hf

h





Memperhatikan data-data yang ada, berikut potensi kekayaan alam Katingan yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dikelola secara optimal dan lestari, sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Katingan. Beberapa masalah yang melatarbelakangi belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam tersebut dijelaskan berikut ini.

**a. Pertanian**

Salah satu sumber daya alam yang potensial dikembangkan yaitu pertanian dalam arti luas, termasuk pula pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor ini selain menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak, juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Katingan. Meski kontribusi lapangan usaha sektor ini besar terhadap PDRB, namun pada sektor pertanian berdasarkan data pada Tabel 2.131, diketahui bahwa Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 produksinya mencapai 71.443 Ton, namun pada tahun 2020 turun menjadi 48.459 Ton. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh menurunnya juga Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya, dimana pada tahun 2020 luas areal tanaman padi hanya mencapai 17.741 ha.

Selain itu, terjadi penurunan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Katingan, dimana pada tahun 2017 Skor Pola Pangan Harapan mencapai 85,500, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi hanya 81,860.

Dari segi infrastruktur pendukung, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian di pedesaan masih rendah. Data pada Tabel 2.84 menunjukkan sudah ada upaya untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah, namun persentasenya belum mencapai seluruh areal sawah yang ada. Selain itu, terbatasnya ketersediaan jalan yang baik pada daerah-daerah sentra pertanian juga menjadi kendala. Permasalahan ini menyebabkan petani kesulitan membawa hasil pertaniannya dan cenderung berbiaya tinggi saat memproduksi hasil panennya. Peluang ini sering dimanfaatkan para tengkulak dan pedagang dari luar daerah untuk mengambil keuntungan dari keterbatasan ini. Gambaran kondisi ini nampak ada di wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dilihat dari aspek ekonomi, secara umum ada beberapa penyebab produk pertanian tanaman pangan, palawija dan hortikultura mengalami penurunan antara lain:

- Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing.
- Lemahnya kelembagaan pertanian.
- Kurangnya bantuan permodalan untuk usaha tani.
- Masih rendahnya aktivitas penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan baru dalam budidaya pertanian.

9 x 14

h



- Kurangnya kemampuan mengolah lahan dengan teknologi pertanian yang baik.

Selain pertanian, sektor perikanan merupakan bagian atau sub sektor dari pertanian yang mempunyai potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di Kabupaten Katingan memiliki peluang usaha bagi masyarakat terutama dalam budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besarnya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum dalam lima tahun terakhir justru mengalami kecenderungan penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,29% di tahun 2016 menjadi 5,02% pada tahun 2020.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan umumnya tidak dilaksanakan dengan baik di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Katingan. Hal tersebut mengakibatkan hingga akhir tahun 2020 realisasi produksi ikan daerah mencapai 8.832,27 ton, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 9.222,37 Ton. Adapun jumlah konsumsi ikan masyarakat Katingan sebanyak 40,98 kg/perkapita/tahun pada tahun 2016. Munculnya permasalahan dalam upaya peningkatan sektor perikanan antara lain:

- Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tambak, kolam dan keramba.
- Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan tangkap.
- Keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan.
- Kurangnya pengelolaan hasil produksi perikanan.
- Terbatasnya permodalan dan akses perbankan.
- Terbatasnya ketersediaan bibit ikan yang dikembangkan oleh UPT. Pembibitan Ikan Hampalit.

#### **b. Kehutanan**

Katingan masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan berbagai keanekaragamahayatinya. Namun dengan semakin banyaknya aktivitas manusia menyebabkan luas tutupan lahan dan hutan di Katingan semakin tahun semakin berkurang, seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan lahan pertanian, serta bencana kebakaran hutan/lahan. Untuk menyelamatkan potensi hutan di Katingan, perlu diadakan tinjauan terhadap permasalahan yang ada, yakni:

##### **1) Kewenangan pengelolaan hutan**

Sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan diserahkan ke pemerintah Provinsi. Selain itu terbitnya PP No.18 Tahun 2016 mempertegas aturan tersebut yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan kehutanan sebab tidak memiliki tanaman hutan raya. Akibatnya, pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten.

##### **2) Semakin luasnya lahan kritis di kawasan hutan**

9 x 4 k





Kehutanan saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Katingan, dimana wilayah yang ada hampir sebagian besar merupakan wilayah hutan. Namun permasalahan yang dihadapi adalah semakin meluasnya kawasan hutan dengan lahan kritis, dimana pada tahun 2015 luas total hutan dan lahan kritis mencapai 546.351,16 ha, sementara itu tahun 2016 meningkat menjadi 1.991.696,14 Ha. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan karena peningkatan lahan kritis tersebut hampir mencapai 50%.

3) Masih tingginya kawasan kerusakan hutan

Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat bahwa Luas Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2016 masih sangat tinggi yaitu mencapai 500.372,35 dengan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 27,22 persen.

4) Menurunnya kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB

Berdasarkan data pada BAB II dapat dilihat PDRB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari Rp.260.302 di tahun 2015 menjadi Rp.275.695 di tahun 2020. Tetapi secara umum besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir ini justru mengalami perlambatan dari angka 4,75% di tahun 2015 menjadi 3,32% di tahun 2020. Artinya peran sub sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi juga semakin menurun berbanding lurus dengan hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perijinan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Katingan karena sejak tahun 2017 diambil alih oleh pemerintah provinsi.

**c. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Katingan juga memiliki potensi energi dan kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi, seperti bahan tambang batubara, emas (dan mineral pengikut seperti perak), bijih besi, pasir zircón (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Potensi ini hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan dan dikelola. Adapun permasalahan dalam mengelola potensi energi dan sumber daya mineral Katingan, yakni:

1) Kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral

Sama seperti kehutanan, kewenangan mengenai energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Pemda Katingan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan mengenai energi dan sumber daya mineral sebab tidak memiliki panas bumi. Sehingga pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan.

2) Masih tingginya luas area penambangan Liar

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan sekaligus memunculkan permasalahan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan bahan tambang yang tidak terkendali menyebabkan areal pertambangan tanpa liar di Kabupaten Katingan yang masih tinggi, baik itu disepanjang bantaran

9 ytf k





sungai maupun di tempat lainnya. Aksi tambang tanpa izin ini menyebabkan sungai dan tanah tercemar limbah merkuri serta banyak hutan dan lahan yang hilang dan berganti menjadi kawasan tandus. Luas wilayah pertambangan tanpa izin pada tahun 2017 yaitu 1.700 Ha.

3) Menurunnya Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Jika dilihat dari Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB, tahun 2016 kontribusinya mencapai 8,60%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi hanya 5,32. Hal ini dipengaruhi oleh banyak lahan yang sudah mendapatkan izin tambang namun sampai saat ini masih belum beroperasi.

**d. Rendahnya upaya pengembangan sektor pariwisata**

Secara umum, Kabupaten Katingan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya, terutama bila dikaitkan dengan posisi dan kondisi alamnya. Namun potensi tersebut belum didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana wisata, SDM pengelola pariwisata, perlindungan situs dan pelestarian budaya lokal, serta inventarisasi data potensi wisata yang potensial dikembangkan, ditambah dengan pandemi covid-19 yang sedang melanda wilayah Indonesia dan salah satunya yaitu Kabupaten Katingan, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Katingan, baik nusantara maupun mancanegara.

Berdasarkan tabel 2.33 diketahui bahwa Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kabupaten Katingan pada tahun 2020 hanya mencapai 11.821 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36.310 orang. Sama hal nya dengan wisatawan nusantara, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 211 orang, namun pada tahun 2020 hanya mencapai 5 orang.

Kondisi demikian juga diakibatkan oleh jumlah hunian wisawatan di Katingan yang masih sangat minim. Hanya terdata di lokasi tertentu seperti TN. Sebangau di Punggualas dan objek wisata Danau Bulat, tetapi hunian kamar hotel di Kota Kasongan dan sekitarnya tidak ada. Adapun kawasan pemukiman warga seperti di Desa Keruing sebagai bagian dari atraksi wisata juga belum layak untuk dijadikan tempat inap karena prasarana pendukungnya terbatas, seperti air bersih dan kamar mandi yang terstandar.

**e. Masih rendahnya daya saing investasi daerah**

Salah satu ukuran untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah jumlah dan nilai investasi skala nasional/asing yang masuk di daerah tersebut. Keterbukaan daerah dan pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu kunci bagi pihak swasta untuk berinvestasi di Katingan.

Dalam tiga tahun terakhir tercatat jumlah investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan trend yang positif, walaupun sempat mengalami pelambatan pada tahun 2016 yang hanya berada diangka 73. Akan tetapi pada Tahun 2017 jumlah investor PMDN meningkat hingga

9 y 19 W





menjadi 99. Jumlah investor PMA selama kurun waktu 2015 sampai 2016 tetap pada angka 16 investor. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan hingga menjadi 10 investor. Secara umum, investasi terbesar di Katingan adalah di sektor perkebunan (sawit dan karet) dan pertambangan. Di satu sisi, meningkatnya investasi di kedua sektor ini akan membuka peluang lapangan kerja baru, akan tetapi disisi lain akan menyebabkan pembukaan lahan yang berdampak pada berkurangnya luasan hutan dan tutupan lahan di Katingan. Selain itu, dengan semakin banyak peluang usaha baru akan mendorong terjadinya persaingan dan kompetisi di segala bidang usaha dan pekerjaan. Akibatnya, setiap orang termasuk masyarakat lokal yang tidak siap dengan perubahan ini lambat laun dapat tersingkir.

Perkembangan pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi seperti koperasi aktif, UMKM dan UKM cukup memprihatinkan. Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi terlihat dari masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak ada aktivitasnya. Berdasarkan data pada BAB II diketahui bahwa Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan pada tahun 2017 mencapai 57,42%, namun pada tahun 2019 persentasenya mengalami penurunan menjadi hanya 42,78%.

Demikian juga dengan UKM, meski ada peningkatan dari sisi jumlah tetapi sampai saat ini di Katingan belum ada produk UMKM dengan skala usaha industri dan mandiri yang menjadi produk unggulan daerah yang dapat bersaing secara kompetitif baik di skala lokal, regional, apalagi nasional. Faktor modal dan keterampilan menjadi hambatan utama sehingga koperasi dan UMKM di Katingan belum berkembang dengan baik.

Adapun produktivitas tenaga kerja di Katingan trendnya terus meningkat, dan capaian tertinggi berada pada lapangan usaha Sektor Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan. Namun sektor ini hanya menyerap tenaga kerja dengan angka di bawah 1% karena sektor ini memerlukan kapasitas dan keterampilan tertentu. Sebaliknya, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak tetapi dari segi produktivitas berada di urutan ke-8 terkecil dari sembilan sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Katingan.

Keterhubungan antara masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam di Katingan dengan masalah dan akar masalahnya, dijelaskan secara sistematis pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Perekonomian**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian	Masih rendahnya upaya pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum berkembangnya usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas dan berkelanjutan</li><li>• Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pertanian di pedesaan dan kawasan sentra produksi.</li></ul>

Handwritten signature and initials.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan hortikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing.</li><li>• Lemahnya kelembagaan pertanian, kurangnya akses permodalan, lemahnya kapasitas petani, teknologi pengolahan lahan dan nilai tambah produk pertanian.</li><li>• Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan tambak, baik segi produksi, kelembagaan, nilai tambah produk, permodalan dan ketersediaan bibit.</li></ul>
		Masih rendahnya daya saing daerah dan kemandirian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya upaya promosi investasi daerah dan kualitas layanan perijinan</li><li>• Masih rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal, kelembagaan ekonomi dan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM</li><li>• Masih rendahnya kapasitas tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li><li>• Masih rendahnya koordinasi dan sinergi diantara stakeholder yang ada dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal</li></ul>
		Belum terwujudnya penerapan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hilangnya hak pengelolaan hutan, energi dan sumber daya mineral</li><li>• Masih rendahnya upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, terutama akibat aktivitas pembukaan hutan dan lahan yang tidak terkendali</li><li>• Belum maksimalnya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan/lahan dan pencemaran lingkungan akibat limbah berbahaya</li></ul>
		Belum termanfaatkannya keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam	Belum berkembangnya potensi pariwisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi

Sumber: hasil analisis

4. Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan

Berbagai aktivitas pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur. Infrastruktur di suatu daerah diyakini merupakan komponen pendukung pembangunan yang tidak dapat disepelekan. Tak dapat

9 Y Hf h





dipungkiri, seringkali keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditandai dengan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang baik dan cakupan yang luas dan merata.

Posisi Kabupaten Katingan yang sangat strategis sebab dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang baik. Namun kondisi yang ada, masih ditemui keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah. Masalah dan akar masalah yang menyebabkan kondisi ini, antara lain:

**a. Pekerjaan Umum**

**1) Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik.**

Permasalahan yang muncul dalam aspek pekerjaan umum adalah 74,16 persen kondisi jalan yang ada pada Kabupaten Katingan masih dalam kondisi tidak baik. Dimana secara jumlah panjang jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 adalah 807,59 Km.. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2019 hanya 208,718 Km dalam kondisi baik atau 25,84 persen. Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik ini disebabkan oleh minimnya pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan.

**2) Masih Tingginya Panjang Jalan dilalui Roda Empat yang berupa Permukaan Tanah**

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2019 yang berupa permukaan aspal sepanjang 279,941 km dan permukaan tanah sepanjang 483,682 km.

Penjelasan mengenai kondisi ini oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, yaitu apabila dana terbatas dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah dapat diabaikan, yang ingin dicapai adalah jalan fungsional. Apabila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun bila kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan, tidak dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas.

**3) Cenderung menurunnya Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik**  
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Katingan pada Tahun 2015 mencapai 52%, dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 menjadi 75%. Namun pada tahun 2019 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik mengalami penurunan menjadi hanya 47,83%.

**4) Masih rendahnya pelayanan air bersih dan air minum layak**

Penyediaan prasarana dan sarana utilitas (air bersih, limbah, sampah dan rumah layak huni) di Katingan masih terbatas. Sampai akhir tahun 2017, tercatat baru 63,34% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan 43,83% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air layak. Namun tahun berikutnya terjadi penurunan kinerja pelayanan air minum bersih yaitu menjadi 59,65% sedangkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air layak turun menjadi 32,82%.

9 x 14 k





Permasalahan mendasar dari masih terbatasnya akses air bersih selain karena faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang juga karena perilaku hidup sebagian masyarakat Katingan yang sangat tergantung dan masih bermukim di sepanjang sungai Katingan. Padahal kondisi sungai ini berdasarkan hasil penelitian sudah tercemar zat berbahaya seperti merkuri dan bahan kimia lainnya hasil pembuangan aktivitas tambang dan pupuk kimia dari kegiatan perkebunan.

**b. Perumahan dan Pemukiman**

1) Masih rendahnya Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 yaitu 9,9% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 15,66%. Meski demikian, Rasio Permukiman Layak Huni tersebut masih terbilang sangat rendah.

2) Belum meratanya penataan kawasan permukiman dan perumahan

Kualitas penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan menjadi salah satu permasalahan dalam penataan kawasan permukiman dan perumahan sehat di Katingan. Saat ini, sudah mulai tumbuh keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat bahkan sampai ke pedesaan. Sampai akhir tahun 2017 tercatat dari 154 desa dan 7 kelurahan yang ada, baru 114 desa/kelurahan atau 70,81% yang melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun total jumlah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal yang sudah terbangun baru 315 unit. Jumlah ini masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat mengingat dengan semakin banyak tumbuh kawasan pemukiman baru atau perluasan kawasan yang ada, akan meningkatkan kebutuhan akan pengolahan limbah dan sanitasi yang layak.

Dengan semakin banyak muncul perumahan dan kawasan baru, tentu produksi sampah sejenis rumah tangga juga semakin banyak. Dengan semakin banyak sampah yang dihasilkan, semestinya kinerja penanganan sampah juga semakin baik. Dari data yang ada (Tabel 2.108) infrastruktur yang tersedia untuk pembuangan sampah ternyata masih sangat kurang. Baru 42,14% tempat pembuangan sampah yang mampu dilayani, dimana dari total volume produksi sampah yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 47.457 m<sup>3</sup>/hari yang dihasilkan, baru sekitar 20.000 m<sup>3</sup>/hari yang mampu ditangani. Hal ini pula yang menyebabkan Kabupaten Katingan dalam periode lima tahun ini belum memperoleh penghargaan bidang kebersihan kota atau Kalpataru.

3) Masih rendahnya Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik tahun 2019 hanya sebesar 81,39 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 83,67 persen. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya pelayanan sampai ke seluruh wilayah. Hal yang menyulitkan untuk





melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi sejak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

**c. Perhubungan**

1) Minimnya Jumlah Terminal Angkutan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan adalah masih belum terdapatnya terminal Kelas A dan B, saat ini di Kabupaten Katingan baru terdapat terminal Kelas C dan jumlahnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 hanya berjumlah 1 unit.

2) Tidak tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai

Kabupaten Katingan memiliki aliran sungai yang membentang dari ujung wilayah utara dan bermuara langsung ke Laut Jawa di wilayah selatan. Artinya, dengan topografi wilayah seperti ini, Katingan potensial memiliki pelabuhan laut yang dapat digunakan untuk bongkar muat barang dan lalu lintas antar pulau. Kondisi yang ideal dikembangkan berada di sekitar Pulau Damar atau Bajungkal di daerah Sei Kaki. Namun akses jalan darat menuju wilayah ini belum ada, mengakibatkan rencana pengembangan Pelabuhan Pegatan-Mendawai belum bisa dilaksanakan. Selain terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Katingan, juga rencana pembangunan jalan dan pelabuhan ini memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Bila pembangunan pelabuhan ini dapat terlaksanakan, maka diharapkan mampu melayani angkutan barang dan kendaraan dari Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangka Raya menuju Pulau Jawa dan sekitarnya.

**d. Komunikasi dan Informatika**

Penyediaan sarana layanan komunikasi dan jaringan internet saat ini dirasakan semakin penting. Namun keterbatasan ketersediaan layanan ini menjadi kendala ketersediaan informasi dan layanan elektronik bagi masyarakat. Kondisi geografi Katingan yang sangat luas dan banyaknya posisi desa/kelurahan yang terpencil menjadi faktor utama terbatasnya layanan komunikasi di Katingan. Untuk layanan sinyal HP yang terjangkau baru mencakup 5.979 km<sup>2</sup> di tahun 2017, padahal luas Katingan mencapai 20.396,78 km<sup>2</sup>.

Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, sampai tahun 2018 baru memasang jaringan internet di 11 desa. Namun untuk areal *blank spot* atau tanpa jaringan, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai walaupun di beberapa titik masih memungkinkan adanya layanan sinyal komunikasi telepon (HP) yang tidak konsisten.

Untuk layanan komunikasi umum yang dipusatkan pada fasilitas umum di perkotaan, baru tersedia layanan internet dan CCTV sebagai alat pantau aktivitas di lokasi RTH Taman dalam Kota Kasongan saja. Dengan estimasi jumlah Taman Kota se-Kabupaten Katingan adalah 20 lokasi tersebar di 13 Kecamatan, maka saat ini terealisasi baru sebesar 20%.

9 yte

h





Masalah masih terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.5**  
**Pemetaan Permasalahan Infrastruktur**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur jalan, yang ditandai dengan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya panjang jalan kondisi baik</li></ul>	Terjadi penurunan sebab minim pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan, sehingga mengalami penurunan kondisi jalan.
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Masih tingginya panjang jalan dilalui roda empat yang berupa permukaan tanah</li><li>- Masih ada desa/kecamatan yang tidak terjangkau jalan darat</li></ul>	Bila dana terbatas, dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah tidak masalah yang penting fungsional. Bila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun kalau kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan saja tidak dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas.
		Belum meratanya penyediaan jaringan air bersih dan penataan kawasan permukiman dan perumahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak meratanya ketersediaan jaringan air bersih bagi masyarakat di desa dan perkotaan</li><li>• Masih rendahnya kualitas dan jumlah sarana dan prasarana sanitasi lingkungan</li><li>• Masih rendahnya kualitas penanganan dan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</li></ul>
		Masih rendahnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Belum optimalnya pelayanan sampai ke seluruh wilayah. Hal yang menyulitkan untuk melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi.
		Masih rendahnya pelayanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunnya jumlah terminal angkutan umum</li><li>• Tidak tersedianya pelabuhan laut</li></ul>

9 X 14

h



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Terbatasnya layanan komunikasi dan jaringan internet terpasang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondisi geografis Katingan yang luas dan letak desa/ kelurahan yang terpencil</li><li>• Terbatasnya kemampuan menyediakan layanan internet terpasang (wifi) di Kantor Pemerintah dan Kantor Desa, serta fasilitas umum.</li></ul>

Sumber: hasil analisis

5. Lambatnya perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Katingan

Secara administratif, Kabupaten Katingan memiliki 154 Desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan. Untuk mendorong pembangunan di desa, Pemerintah telah menyalurkan Dana Desa yang setiap tahun nilainya semakin bertambah. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Katingan, pada tahun anggaran 2017 disediakan total dana desa se-Katingan sebesar Rp.121.733.211.100 dan di tahun 2017 ini menjadi Rp.123.109.956.000. Kisaran dana yang diterima desa di tahun 2018 terendah sebesar Rp.680.912.000 di Desa Tumbang Kataei Kec. Bukit Raya dan tertinggi Rp.1.419.502.000 di Desa Tewang Rangkang Kec. Tewang Sanggalang Garing. Besarnya dana desa yang disalurkan tersebut, ternyata belum mampu dimanfaatkan oleh desa secara optimal sehingga dalam penilai pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, penilaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Katingan masih belum memuaskan.

Data pada bab II menunjukkan bahwa sampai tahun 2017, belum ada satupun desa di Kabupaten Katingan yang berstatus desa mandiri dan hanya satu desa saja yang berstatus desa maju, yakni Desa Hampalit. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Katingan masih mendominasi, dimana jumlah desa tertinggal pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 95 desa dan desa sangat tertinggal pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 76 desa. Secara umum, persoalan pembangunan desa di Katingan adalah terkait keterbatasan SDM desa dan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola tata pemerintahan dan keuangan desanya. Banyak desa-desa di Katingan yang masih terpencil dan belum dapat dilalui jalan darat menjadi kendala utama lambatnya perkembangan desa-desa tersebut. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan dana desa tersebut untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi di desa (BUMDes). Berikut pemetaan masalah pembangunan desa di Kabupaten Katingan.

9/14 k





**Tabel 4.6**  
**Pemetaan Permasalahan Pembangunan Desa**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Katingan	Terbatasnya kemampuan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakatnya	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya kapasitas aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa</li><li>• Rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat desa</li><li>• Belum berkembangnya produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi desa</li></ul>

Sumber: hasil analisis

**6. Tata Kelola Pemerintahan**

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Kabupaten Katingan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 nilai SAKIP Kabupaten Katingan mencapai predikat B. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Katingan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Walau demikian, nilai SAKIP ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan data pada Bab II, diketahui bahwa nilai LPPD Kabupaten Katingan pada tahun 2013 (2,4329) mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 2,9860 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 2,5778. Walaupun mengalami penurunan, namun predikatnya masih tetap Tinggi.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan permasalahan utama rendahnya capaian realisasi anggaran karena terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Untuk mencapai tingkat optimalisasi anggaran dan kinerja, tentunya proses PBJP tidak dapat dihilangkan dari upaya peningkatan pelayanan teknologi informasi, yaitu peningkatan layanan/standarisasi layanan pengadaan elektornik (LPSE).

Permasalahan lainnya yaitu pelayanan dasar yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Katingan belum dilaksanakan dengan baik. Informasi penerapan SPM yang dimuat pada Bab II menunjukkan Sebagian realisasi indikator kinerja SPM masih rendah dan ada juga yang tidak memiliki laporan kinerja.

Hal-hal yang menjadi penyebabnya belum optimalnya kualitas penerapan reformasi birokrasi dan percepatan penerapan SPM ada beberapa faktor, yakni:

**a. Terbatasnya kapasitas ASN Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

Jumlah ASN Kabupaten Katingan sampai akhir tahun 2018 tercatat berjumlah 3.784 orang. Bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Katingan, jumlah ini tidaklah berimbang. Belum lagi adanya ketidakseimbangan antara penambahan dengan

9 174 k





pengurangan pegawai menjadi penyebab munculnya permasalahan ini. Pengadaan CPNS sebagai jalur utama dalam menambahkan pegawai tidak efektif dikarenakan adanya kebijakan moratorium CPNS. Penambahan pegawai yang dimungkinkan melalui penerimaan mutasi pegawai dari luar daerah dan pengangkatan pegawai non PNS. Penerimaan mutasi dari luar daerah tidak bisa ditentukan targetnya karena Pemerintah Daerah yang sebatas pasif menerima secara selektif atas permohonan mutasi yang masuk. Sedangkan pengangkatan pegawai non PNS terkendala oleh belum adanya regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai salah satu kategori Aparatur Sipil Negara selain PNS.

Disisi lain masih terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan. Data menunjukkan masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Dengan diambil alihnya kewenangan melaksanakan diklat penjenjangan oleh Provinsi mengakibatkan kesempatan mengikuti diklat kepemimpinan terbatas. Selain itu, terbatasnya pendanaan bagi ASN mengikuti diklat-diklat teknis menyebabkan banyak ASN Katingan yang tidak bisa mencapai minimal 30 jam pelatihan dalam setahun. Hal ini terlihat dari realiasi alokasi untuk belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sejak tahun 2015 terus berkurang dari 8,3 milyar menjadi 2,6 milyar di tahun 2017.

**b. Belum optimalnya kualitas perencanaan**

Sampai saat ini *e-planning* belum dapat diintegrasikan dengan *e-budgeting*. Permasalahan yang dihadapi karena aplikasi dalam mengintegrasikan kedua sistem ini memerlukan dukungan input data dan informasi seperti dokumen RPJMD, RKPD, dan RENSTRA perangkat daerah. ASN disemua perangkat daerah masih belum semuanya mampu menyusun program dan kegiatan yang signifikan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kelemahan dalam kondisi ini adalah belum tersedianya tenaga ASN yang menjadi fungsional perencana.

**c. Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan**

Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 3.1) ditunjukkan dari persentase realisasi peningkatan daerah terutama dari pos PAD yang rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun ini mencapai 1,2%. Demikian pula di pos Dana Perimbangan rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,7%, bahkan untuk item DAU justru mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata hingga -3,6%.

Disisi lain, nilai belanja daerah dan ratio peningkatannya terus mengalami kenaikan (sebagaimana Tabel 3.2). Yang paling signifikan terlihat pada belanja tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir mencapai 15,9% dan untuk belanja langsung bagi pembangunan mencapai 6,1%. Kondisi ini bila dibiarkan akan

9 y 14 k



menimbulkan limitasi dalam kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan.

Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh WTP berturut-turut pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2020, meski ditahun 2017 menurun menjadi WDP. Pencapaian WTP ini perlu dipertahankan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah.

**d. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan**

Pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah juga belum optimal. Indikasi dari masalah ini adalah masih banyak temuan hasil pemeriksaan BPK sampai 2016 baik yang belum ditindaklanjuti maupun temuan baru. Kondisi ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, terkelola dan terukur. Kedepan pelaksanaan atas praktik pengendalian intern perlu dilakukan dengan baik melibatkan seluruh unit organisasi dan efektivitas pengendalian perlu dievaluasi untuk memetakan penanganan atas kelemahan yang ada.

**e. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik**

Saat ini tuntutan masyarakat untuk adanya peningkatan layanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari aparat pemerintah sebagai pelayan publik semakin tinggi. Apalagi bila kondisi ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa OPD Kabupaten Katingan masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2020 mencapai nilai 80,82, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun mengalami peningkatan, namun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan dan terus diperbaiki.

Adapun masalah pokok terkait tata kelola pemerintahan yang dijabarkan kedalam masalah dan akar masalahnya disajikan pada tabel di bawah.

9 x 14 k





**Tabel 4.7**  
**Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dan percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minil (SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kapasitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>- Belum optimalnya kualitas perencanaan</li> <li>- Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan</li> <li>- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan</li> <li>- Masih rendahnya kualitas dan sistem pelayanan publik</li> </ul>

Sumber: hasil analisis

## 4.2. ISU STRATEGIS

### 4.2.1. Isu Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang mendatang. Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungancukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan adalah adanya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi COVID-19. Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis

9 y 14





Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan, beberapa isu internasional yang cukup relevan dengan Indonesia dan secara khusus pembangunan Katingan diuraikan sebagai berikut:

#### **4.2.1.1. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Pada awal Januari 2007 para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memutuskan untuk mempercepat tercapainya ASEAN *Community*-bukan saja *Economic Community* tetapi juga ASEAN *Community*-dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan.

Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN *Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN *Political-Security Community* (APSC), dan ASEAN *Socio-Culture Community* (ASCC).

9 y t l w





Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat memproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen.

Negara seperti Indonesia dianggap pelaku usaha dunia sebagai pasar yang diminati dan dilakukan penetrasi. Sebenarnya bila dianggap sebagai pasar tetapi pada saat bersamaan dijadikan tempat memproduksi, Indonesia tetap mendapatkan keuntungan. Namun, bila yang terjadi ialah Indonesia sebagai pasar, sedangkan negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam yang dijadikan tempat memproduksi, maka ini tidak terlu menguntungkan bagi Indonesia. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

#### **4.2.1.2. Lingkungan Hidup**

Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa kebakaran hutan, bencana alam banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan gejala *global warming* dan perubahan iklim dunia, menumbuhkan perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia untuk semakin memperhatikan, menjaga serta memelihara planet bumi.

##### **a. Sampah Plastik**

Sehubungan dengan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, pada Tahun 2018 diperingati dengan tema "Kendalikan Sampah Plastik". Tema ini diangkat sebagai perwujudan komitmen bersama seluruh pihak dalam upaya mengatasi bahaya sampah plastik di berbagai belahan dunia, juga di Indonesia. Tema ini mengandung arti motivasi kerja sekuat tenaga untuk atasi sampah, juga kerja yang sistematis dalam mengurangi sampah, mengolah sampah, dan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kegiatan daur ulang, atau dikenal dengan istilah 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*); serta yang penting adalah upaya bersama kolaborasi semua pihak, pemerintah/pemda, masyarakat dan dunia usaha.

Seperti negara lain, Indonesia dihadapkan pada permasalahan dampak dari peningkatan aktivitas dan kebutuhan manusia, yaitu berupa penumpukan sampah plastik, yang hingga kini perlu dilakukan tindak lanjut pengelolaan yang cepat, tepat, dan ramah lingkungan. Hal ini sangat penting, mengingat sampah plastik merupakan benda yang tidak dapat terurai dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan laut.

Berdasarkan pidato sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2018 lalu,

9 1 14





komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 16% (sipsn.menlh.go.id) dari total timbunan sampah secara nasional. Sementara komposisi sampah plastik di kota-kota besar seperti Jakarta, sekitar 17% (Riset bersama Indonesia Business Link dan Laboratorium Teknik Penyehatan dan Lingkungan UI 2016). Komposisi sampah plastik menunjukkan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11% di tahun 2005 menjadi 15% di tahun 2015. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (*packaging*) makanan dan minuman, kemasan *consumer goods*, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya.

Dari total timbunan sampah plastik, yang telah dilakukan daur ulang diperkirakan baru 10-15% saja, selain itu 60-70% ditimbun di TPA, dan 15-30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut (Data Program Adipura KLHK 2016). Dengan demikian, guna mengatasi persoalan sampah kemasan plastik, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat, seperti sinergi antara perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

#### **b. Pemanasan Global Atau Perubahan Iklim**

Selain isu mengenai sampah, perhatian masyarakat internasional terkait lingkungan hidup juga tertuju pada pemanasan global atau perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh sektor termasuk Program REDD+ di sektor kehutanan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk tahun 2020-2030 Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% sampai 41% dari *Business as usual* dengan baseline 2,87 Gton CO<sub>2</sub>e untuk semua sektor. Target tersebut telah disampaikan di dalam NDC yang mana juga menggabungkan antara upaya mitigasi dan adaptasi.

Lebih lanjut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan pada acara *The 22nd Session of the Conference of the Parties (COP 22)* Tahun 2018 di Marakesh, dua sektor utama yang berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi yaitu energi dan lahan. Untuk energi, Indonesia akan menggunakan energi terbarukan sebesar 23% di Tahun 2025 dan setidaknya 31% di Tahun 2050. Pada waktu yang sama penggunaan batubara diminimalisasi sampai 30% di 2025 dan setidaknya 25% di 2050 dengan menggunakan teknologi bersih. Sedangkan pada sector lahan melalui program REDD+ diproyeksikan potensi menurunkan emisi sebesar 0,8 Gton CO<sub>2</sub>e per tahun.

#### **4.2.1.3. Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)**

Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi





agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Tujuan dan 169 Target untuk periode pelaksanaan Tahun 2015-2030. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Komitmen Indonesia telah dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan lebih lanjut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

Prinsip dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sesuai dengan amanat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka akan disusun dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





#### 4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan RPJMD perlu dilakukan untuk mengetahui isu atau kebijakan nasional apa saja yang perlu ditindaklanjuti atau diselaraskan dengan pemerintahan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan, dilakukan telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Undang-Undang mengenai Desa dan Pemerintahan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

##### 4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 mempedomani RPJMN. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempedomani RPJMN dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap RPJMN Tahun 2015-2019, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan nasional pada periode tersebut, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- b. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- c. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan.
- d. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.
- e. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi.
- f. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
- g. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
- h. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan.
- i. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan.
- j. Peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor.
- k. Pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.
- l. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan.
- m. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan.

9/14 k



- n. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
- o. Pemantapan ketahanan pangan.
- p. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan.
- q. Meningkatkan tata kelola kehutanan (*good forest governance*).
- r. Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan.
- s. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang.
- t. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
- u. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik.
- v. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
- w. Mendorong pembangunan *fixed/wireline broadband* termasuk di daerah perbatasan Negara.
- x. Mempercepat implementasi *e-Government* dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective*.
- y. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
- z. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.
- aa. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.
- bb. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang.
- cc. Meningkatkan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik.
- dd. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan Tepat Sasaran.
- ee. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya.
- ff. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.
- gg. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses public.
- hh. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.
- ii. Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan.
- jj. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
- kk. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem.
- ll. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
- mm. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 memuat visi dan misi pembangunan Indonesia sebagai berikut:

9 Y 14





**VISI:**  
**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN**  
**BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Adapun 7 (tujuh) misi dalam rangka mencapai visi yang dimaksud, meliputi:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah Nawa Cita, meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain amanat nawa cita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMN juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan).

Masih seputar RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat pula Agenda Pembangunan Wilayah yang dimuat dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019. Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, meliputi:

9 x 14



- a. Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan.
- b. Pembangunan Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kecamatan Katingan Hilir.
- c. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru.

#### **4.2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Salah satu faktor yang melatarbelakngi perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah sinergi pembangunan nasional dan daerah. Pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, selanjutnya pada penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi pembangunan nasional terdiri atas 9 (sembilan), yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi dan misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

9/14





Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Selain itu, RPJMN juga memberikan arah kebijakan pembangunan untuk setiap provinsi di Indonesia. Pada arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa proyek prioritas nasional yang berlokasi di Katingan. Beberapa proyek prioritas nasional yang berlokasi di Katingan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.





Tabel 4.8  
Proyek Prioritas Nasional Berlokasi di Katingan, Kalimantan Tengah

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis						
Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batangjung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah	>1				
Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu - Bangkuang; - Batangjung; Gunung mas -Katingan) (KPBU)	Panjang Jalur Kereta Api dibangun (km)	96 (selesai)	3.001,44	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Kemenuhub, Pemda, KPBU
KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi						
Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa	62,63	225,02	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Bina Pemerintahan Desa	1. Kementerian Desa PDTT 2. Kementerian Dalam Negeri
Desa Digital (P3PD)	Jumlah desa yang menerapkan dan mengembangkan Desa Digital (desa)	392	29,52	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT



PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
				Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		
Penetapan Batas Desa	Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa (provinsi)	1	0,51	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Jumlah provinsi yang mengembangkan Sumber Daya Air Minum berkelanjutan berbasis masyarakat (provinsi)		0,27	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa (desa)	10	4,08	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih (orang)	68	1,26	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri

2  
fy 1/19





PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
				Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		
Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Jumlah desa yang melakukan penguatan kelembagaan pemerintah desa (P3PD) (desa)	392	54,23	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pendampingan pada 74.957 Desa	Jumlah pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa (orang)	470	131,38	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT
Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah kab/kota yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa (kab/kota)	4	0,59	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Bina Pemerintahan Desa	Kementerian Dalam Negeri
Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Jumlah provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa (provinsi)	1	1,18	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

2  
t419



PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
				Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara		
Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes (desa)		1,28	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kementerian Desa PDTT

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, diolah

2  
14/10



#### **4.2.2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas.

#### **4.2.2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Terbitnya undang-undang ini membawa warna baru bagi berbagai aspek terkait dengan pemerintahan daerah. Salah satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya perubahan urusan pemerintahan daerah yang berdampak pada kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka seluruh pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Konsekuensi logis dari

9 x 10





penerapan peraturan pemerintah ini yaitu berubahnya susunan perangkat daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kondisi ini juga diikuti dengan adanya perubahan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini merupakan amanat dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; RPJMD; dan c. RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Perkada.

Undang-Undang ini juga memberikan porsi yang cukup besar bagi pengembangan inovasi. Bahkan mendorong adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan

9 y t4





mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimanamendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis.

#### **4.2.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Dengan demikian, jenis SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan penganggaran pembangunan Daerah (APBD) sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9819





#### 4.2.2.6. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik pada seluruh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena "hantaman" efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan Kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah

9114





pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan Work From Home, Physical Distancing, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sector ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sector pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

#### **4.2.3 Isu atau Kebijakan Provinsi**

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan perlu memerhatikan kebijakan pembangunan yang ada di tingkat provinsi. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinergi pembangunan anatar provinsi dan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Pada kesempatan ini dilakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan kebijakan mengenai *Heart of Borneo*.

##### **4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021**

Sebagaimana Pasal 260 dan 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020, dengan demikian harus melakukan

9/1/20





penyusunan dan penetapan Perda tentang RPJMD. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur pada bulan Mei 2021 menjadi titik dimulainya Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, meliputi:

1. Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah
3. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0
4. Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5. Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
7. Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
8. Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan
9. Pemekaran Wilayah
10. Penurunan Angka Stunting
11. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan
12. *Corporate Education* dalam Manajemen ASN
13. Tumpang Tindih Lahan

Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021–2025, serta Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan.

Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

#### **4.2.3.2. Heart of Borneo**

*Heart of Borneo* (HoB) adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan inisiatif HoB adalah untuk

9/14





mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Jantung Kalimantan adalah bagian kawasan HoB di Indonesia.

*Heart of Borneo* (HoB) merupakan inisiatif pemerintah sehingga program dan kegiatan HoB diprakarsai oleh pemerintah bekerja sama dengan para mitra. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan HoB dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) di tingkat nasional, Kelompok Kerja Provinsi (Pokjapro) di tingkat provinsi dan Kelompok Kerja Kabupaten (Pokjakab) di tingkat kabupaten. Pokjanas HoB bekerja untuk memfasilitasi isu-isu yang terjadi di tingkat nasional, demikian juga dengan Pokjapro dan Pokjakab masing-masing untuk isu-isu di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggota Pokjanas adalah kementerian terkait dan perwakilan Pokjapro yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk Pokjapro dan Pokjakab beranggotakan dinas dan instansi terkait yang masing-masing ditetapkan oleh gubernur dan bupati.

Visi yang ingin dicapai melalui inisiatif *Heart of Borneo* adalah terwujudnya pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator. *Heart of Borneo* yang meliputi 23 juta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi masyarakat dan alam, melalui kerjasama internasional yang dipimpin oleh masing-masing pemerintah negara di Borneo, yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan.

Misi pengelolaan kawasan *Heart of Borneo* adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, 23 juta hektar jejaring kawasan lindung, cadangan lintas batas, dan koridor dikelola secara berkelanjutan dan zona penyangga berfungsi untuk menjamin masa depan semua spesies prioritas dan kawasan HoB endemik didirikan.
2. Pada tahun 2020, tidak ada konversi hutan yang bernilai konservasi tinggi untuk penggunaan lahan lain di kawasan HoB.
3. Pada tahun 2020, mekanisme pembiayaan jangka panjang memberikan manfaat diversifikasi dan adil bagi masyarakat lokal dan pemerintah, dan meningkatkan barang dan jasa ekosistem.

Luas kawasan HoB di tiga negara meliputi areal seluas kurang lebih 23 juta hektar yang secara ekologis saling berhubungan. Wilayah HoB sebagian besar berada di Indonesia yaitu sekitar 72% yang didominasi oleh hutan hujan tropis. Kawasan HoB memiliki 7 fungsi penting yaitu tutupan kawasan hutan, melimpahnya keanekaragaman hayati, menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, sosial-budaya dan ekowisata. Salah satu fungsi penting kawasan HoB adalah sebagai menara air, dimana 14 dari 20 sungai utama di Pulau Borneo berhulu di kawasan HoB, seperti Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas dan lainnya.

Program atau inisiatif *Heart of Borneo* dikembangkan tidak hanya untuk tujuan-tujuan konservasi semata, namun lebih penting lagi bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB. Lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan pilar-pilar program HoB selain sosial

9 x 14





ekonomi dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, khusus di wilayah Indonesia, kerjasama lintas sektoral dan peran serta aktif pemerintah provinsi dan kabupaten di kawasan HoB menjadi sangat penting. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat lokal, yaitu masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam di kawasan HoB, harus menjadi bagian pokok dalam pembangunan di kawasan HoB.

#### **4.2.4 Isu atau Kebijakan Kabupaten Katingan**

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) harus dilakukan dalam tahap penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

##### **4.2.4.1. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan**

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Ini berarti, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan harus memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahapan berkenaan. Untuk pembangunan jangka menengah Katingan periode 2018-2023 mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahap Ketiga (2018-2023).

Beberapa isu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025, sebagai berikut:

1. Masih dijumpai penduduk dengan tingkat pendapatan rendah.
2. Sulit menciptakan kesempatan kerja yang luas.
3. Minim investasi di berbagai sektor.
4. Masih tertinggal sektor Pertanian dan Perdesaan.
5. Masih terjadi penyusutan SDA dan Degradasi Lingkungan.
6. Sulitnya Aksesibilitas.
7. Masih rendah Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan.
8. Masih lemah Penegakan Hukum.
9. Belum mantapnya otonomi daerah.
10. Belum jelas tapal batas wilayah.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan juga isu strategis diatas, perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan saat ini memasuki tahap ke-3. Tahap ketiga RPJPD Kabupaten Katingan ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

**Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif** dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan

9/1/14





pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Bersamaan dengan itu **kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan** berkembang makin mantap serta profesionalisme aparaturnya penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

**Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata** sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak;

**Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang** ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

**Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan** yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.

#### 4.2.4.2. Telaah RTRW Kabupaten Katingan

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pembangua jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 2019-2039 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, tujuan

9 x 14





penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang berkembang dan sejahtera serta berjati diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dengan berbasis agrobisnis serta berwawasan lingkungan.

Kemudian untuk tujuan penataan ruang Kabupaten Katingan meliputi:

- a. Pemerataan ekonomi Kabupaten;
- b. Pengembangan pusat-pusat pemukiman;
- c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
- d. Peningkatan produksi pertanian;
- e. Peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan;
- f. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain:

1. Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
  - a. Membentuk pola ruang dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi;
  - b. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
  - c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
  - d. Mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan; dan
  - e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.
2. Strategi pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh, meliputi:
  - a. Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
  - b. Mengembangkan ruas jalan terusan ruas Pegatan-Kasongan dan Kasongan- Pendahara, sebagai akses menuju ruas jalan trans Kalimantan poros selatan bagian utara dan selatan Kabupaten Katingan;
  - c. Pembangunan sub terminal di semua kecamatan kecuali di pusat kegiatan lokal kasongan, Buntut Bali dan Tumbang Samba sebagai perpindahan moda dari pelabuhan sungai ke daratan dan sebaliknya;
  - d. Membangun sarana perhubungan skala nasional; dan
  - e. Mengembangkan prasarana perhubungan sungai sebagai jalur alternatif.
3. Strategi pengembangan sektor unggulan, meliputi:
  - a. Meningkatkan kegiatan pertanian dengan sub sektornya, melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
  - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
  - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;



- d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan potensial antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan peternakan; dan
- e. Memilih sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.
- 4. Strategi peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
  - a. Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan
  - b. Melakukan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan lindung.
- 5. Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi:
  - a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
  - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
  - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

#### **4.2.4.3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Katingan Tahun 2018-2023**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Isu Lingkungan Hidup, Isu Strategis Pembangunan, dan Simulasi Pembangunan Berkelanjutan**

##### **1. Isu Lingkungan Hidup**

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan multidimensi yang saling terkait satu dengan yang lain, oleh karena itu semua pihak wajib secara sinergis memainkan peran sesuai posisi dan fungsi kita masing-masing untuk mewujudkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup dewasa ini disebabkan karena pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih diarahkan pada sektor ekonomi dan sosial, dimana pertimbangan terhadap aspek lingkungan masih kurang. Dalam semangat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sehingga konsekuensinya, kebijakan,





rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang di dasari pada 3 pilar yakni ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan.

Dengan memperhatikan arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai agenda global yang focus menangani masalah sosial, ekonomi dan lingkungan, maka perlu adanya komitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan yang baik dan mengurangi penurunan kualitas lingkungan, maka perlu dilakukan identifikasi mengenai isu-isu prioritas lingkungan hidup yang muncul sesuai dengan karakteristik daerah di Kabupaten Katingan.

Berdasarkan DIKPLHD Tahun 2019 (DLH Kabupaten Katingan, 2020) dikemukakan bahwa:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019 adalah sebesar 73,99 yang didapat dari nilai-nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 92, Indeks Kualitas Air sebesar 51,67, dan Indeks Tutupan Hutan sebesar 77,23. Jika dibandingkan dengan Target Indeks Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk Tahun 2019, dimana IKLHnya sebesar 72,64, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 92, Indeks Kualitas Air sebesar 50, dan Indeks Tutupan Hutan sebesar 75,1. Maka, IKLH Kabupaten Katingan dapat melebihi target Indeks Kinerja Utamanya, meskipun untuk Indeks Kualitas Air masih sedikit berada dibawah target.
- b. Isu-isu prioritas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2019 yang dilaporkan pada Tahun 2020 adalah: (a) Kualitas air/Pencemaran air, (b) Banjir, (c) Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), (d) Sampah/Persampahan, dan (e) Lahan Kritis.
- c. Isu-isu tersebut, secara keseluruhan bersifat Urgen (Perlu segera untuk ditangani), Konsisten (Penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi), Sensitif (Potensial menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda), dan Aktual (Mendapat perhatian publik yang luas), serta Signifikan (Dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap publik).
- c. Satu dari lima isu-isu prioritas tersebut yaitu Banjir, merupakan TUPOKSI dari SOPD lain yaitu BPBD. Kerusakan lingkungan hidup juga menyebabkan bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Katingan selama tahun 2021. Hujan yang mengguyur secara terus menerus selama beberapa hari ini menyebabkan debit air Sungai Katingan dan Sungai Samba meluap. Kondisi banjir tidak bisa dihindarkan sehingga banjir melanda wilayah Kabupaten Katingan. Berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Katingan, peristiwa banjir yang dipicu oleh faktor cuaca tersebut telah merendam beberapa wilayah di 13 kecamatan yang ada di kabupaten Katingan, dan berdampak pada 15.911 KK atau 25.443 jiwa. Selain itu, sebanyak 15.439 unit rumah, 67 unit tempat ibadah, 78 unit fasilitas pendidikan, 36 unit fasilitas kesehatan, 40 unit perkantoran, 19 pos PPKM dan 794.100 hektar luas wilayah juga terdampak banjir.

9 x 14





Selanjutnya ditegaskan, memperhatikan hasil analisis DPSIR terutama komponen respon dari isu-isu prioritas yang dipetakan kausalitasnya, serta inovasi daerah dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2019. Maka rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan strategi pencapaian visi-misi dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, perlu dilakukan tindak lanjut berupa:

- a. Upaya peningkatan kualitas air/penurunan pencemaran air pada badan air (Sungai, Danau, Bekas Galian Tambang, Situ, dll), akan dilakukan dengan memperbanyak kegiatan pendidikan lingkungan yang dimulai dengan mengembangkan sekolah lapangan pada DAS Mikro disekitar daerah-daerah dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidupnya yang telah Melampaui Batas sesuai Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang telah disusun Tahun 2019.
- b. Penanganan banjir dan Lahan kritis pada daerah-daerah yang selalu mengalami banjir berulang setiap tahunnya, terutama pada delapan kecamatan yang relative selalu mengalami banjir tahunan berulang (Kecamatan Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sanggalang Garing, Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan), juga pada daerah-daerah dalam KHG dan pesisir, yang akan dipadukan dengan kegiatan RHL dan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut Daerah, BPDASHL Kahayan, KPHP Unit XVII dan Unit XXX, Pemegang IUPHHK dan IPPKH, serta LSM Lokal, atau pihak-pihak lainnya.
- c. Penanganan kebakaran hutan dan lahan, akan dilakukan dan difokuskan pada wilayah-wilayah kiri-kanan sungai dan jalan dan akan berkerjasama dengan pihak-pihak seperti pada RTL 2. Pemerintah Kabupaten Katingan akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota tetangga, serta mendukung percepatan PERDA Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dan pembentukan regulasi pada tingkat kabupaten. Selain itu, sesuai Keputusan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dirjen PPI-KLHK No.:SK.9/PKHL/PKHL/PPI.4/3/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Desa Sasaran Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020, untuk Kabupaten Katingan akan difokuskan pada Sembilan desa, desa-desa tersebut adalah: Desa Hyang Bana, Desa Jahanjang, Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Talingke, Desa Luwuk Kanan, Desa Tewang Manyangen, Desa Tewang Tampang, dan Desa Tumbang Liting.
- d. Penanganan Sampah/Persampahan akan dilaksanakan dengan membangun unit-unit pengelolaan persampahan pada lokasi-lokasi baru yang sesuai dengan arahan RTRWK dan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan, serta kegiatan pemugaran dan peremajaan sarana prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah sesuai persyaratan teknis. Selain itu, akan ditingkatkan upaya-upaya daur ulang sampah anorganik dan pengomposan sampah organik dengan memfasilitasi dan mengasistensi para pemulung dan pengolah

9 y t4



- kompos, bekerjasama dengan petani tanaman hortikultura dan parapihak lainnya.
- e. Dinas Lingkungan Hidup akan berupaya lebih keras dalam mencapai IKU sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu dengan memperhatikan factor-faktor penentu keberhasilan capaiannya.
  - f. Dinas Lingkungan Hidup akan mengembangkan inovasi baru atau melakukan refleksi dengan modifikasi terhadap inovasi pengelolaan lingkungan hidup dari tempat lain yang berkesesuaian.

2. Isu Strategis Pembangunan

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Skor dari Ranking Capaian TPB, Skor Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi (Tabel 4.10) serta Hasil Rekapitulasi Persepsi/Pendapat Masyarakat tentang Urutan TPB Prioritas, serta mempertimbangkan kondisi terkait Bencana Pandemi Covid 19 yang memerlukan upaya refocusing kegiatan dan anggaran untuk beberapa tahun kedepan, maka isu strategis/prioritas pembangunan di Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030, terutama untuk tahun 2021-2023 (periode berjalan RPJPD ke-3), secara ringkas disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 4.9**  
**Rekapitulasi Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi TPB Kalteng Hingga Tahun 2021-2030**

NO TPB	SKOR CAPAIAN TPB OLEH OPD	RTK TPB KEPADA OPD
1	47.78	2.920
2	32.30	5.203
3	54.98	3.577
4	37.15	3.332
5	31.12	4.731
6	27.03	0.522
7	0.00	7.065
8	18.27	8.165
9	15.92	7.205
10	9.31	8.120
11	19.60	9.453
12	23.94	7.694
13	33.33	8.295
15	18.99	10.941
16	5.00	7.311
17	0.00	6.150
<b>RATAAN</b>	<b>23.42</b>	<b>6.293</b>

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

924





**Tabel 4.10**  
**Isu Strategis/Prioritas Pembangunan dan Kebijakan, Rencana dan Program KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 sesuai TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Tanpa Upaya Tambahan (TUT)**

NO.		NOMOR DAN TUJUAN TPB	
		DENGAN UPAYA TAMBAHAN (DUT)	TANPA UPAYA TAMBAHAN (TUT)
I.	Pilar Pembangunan Sosial	1. Tanpa Kemiskinan	
		2. Tanpa Kelaparan	
		3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
		4. Pendidikan Berkualitas	
		5. Kesenjaraan Gender	
II.	Pilar Pembangunan Ekonomi		7. Energi Bersih dan Terjangkau
		8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
		9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	
			10. Berkurangnya Kesenjaraan
			17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
III.	Pilar Pembangunan Lingkungan		6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
		11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
		12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	
		13. Penanganan Perubahan Iklim	
		15. Ekosistem Daratan	
IV.	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola		16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

**B. Alternatif Skenario dan Rekomendasi KRP**

**1. Alternatif skenario dan rekomendasi KRP dengan upaya tambahan**

Isu Strategis dan Indikator Kunci sesuai Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi serta Nomor Urutan Prioritas Intervensi terhadap TPB dengan Tanpa Upaya Tambahan KLHSRPJMD Kabupaten Katingan hingga Tahun 2021-2030, dan Isu Strategis/Prioritas dan Indikator Kunci sesuai Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi serta Nomor Urutan Prioritas Intervensi terhadap TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) KLHS RPJMD Kabupaten Katingan hingga Tahun 2021-2030, dan hasil kompilasi dengan memperhatikan persepsi/pendapat masyarakat, secara ringkas disajikan pada tabel di bawah.

9214





Tabel 4.11

Rekomendasi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2025, Tujuan Pembangunan RPJPD ke-3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
1.	1. Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan social 2. Peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. 3. Perbaikan kebijakan ekonomi makro, yaitu: stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang	Tujuan 1: Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan.	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat	TPB 1. Desa Tanpa Kemiskinan.  Dalam rangka mencapai target 0 persen kemiskinan di desa pada tahun 2030, ada beberapa sasaran yang harus dicapai di desa. Diantaranya, sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan; penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah; akses dan layanan	TPB 1. Tanpa Kemiskinan	1. Target TPB 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam segala dimensi kemiskinan berdasarkan pengertian nasional. 2. Target TPB 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa seluruh laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber	Program Pengelolaan Pendidikan  1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Pendidikan Kab. Katingan  Dinas Kesehatan Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap

2  
19/10



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.	Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial  Tujuan 9:	5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 8. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi. 10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air. 11. Pembangunan Prasarana Lingkungan. 12. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya	pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.  1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0% 2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100% 3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% 4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% 5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%		pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentukbentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk keuangan mikro. 3. Target TPB 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan, serta mengurangi keterpaparan dan kerentanan mereka terhadap kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim maupun bencana	2. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Kesiadaan Farmasi, Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial Kab. Katingan	Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

1419



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata	<p>pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,</p> <p>13. Perwujudan kawasan tanaman pangan.</p> <p>14. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.</p> <p>15. Perwujudan kawasan peternakan.</p> <p>16. Perwujudan kawasan perkebunan.</p> <p>17. Perwujudan Kawasan perikanan.</p>			<p>dan tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya.</p> <p>Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 • Financing for Development • Habitat III</p>	<p>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>2. Program Pengembangan UMKM</p> <p>1. Program Perencanaan Tenaga Kerja</p> <p>2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>3. Program Penempatan Tenaga Kerja</p>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan</p> <p>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Katingan</p> <p>1. Dinas Pertanian, Pangan dan</p>	<p>Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai</p>

74/19

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			18. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industri.  19. Perwujudan Kawasan Pariwisata.  20. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.  21. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.  22. Perwujudan Kawasan Pesisir.  23. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.  24. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.  25. Perwujudan kawasan strategis sudut				1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 6. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 9. Program Peningkatan Diversifikasi dan	Perikanan Kab. Katingan 2. P2R Katingan	Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

2  
1919





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			<div>situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.</div> <div>30. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.</div> <div>31. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentinganpendayaguna an sumber daya alam atau teknologi tinggi.</div>				<div>dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</div> <div>1. Program Kawasan Permukiman</div> <div>2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</div> <div>3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</div> <div>4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</div> <div>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air</div>	<div>Pemukiman dan Pertanahan Kab. Katingan</div> <div>Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Katingan</div>	<div>Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</div> <div>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan</div>

1919 k

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
							2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengelolaan Pelayaran  Program Pengelolaan Keuangan Daerah  1. Program Penanggulangan Bencana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan  1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Katingan 2. Satuan Polisi Pamong Praja  Bappelitbang Kabupaten Katingan	dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/10/24

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
							<div>2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</div> <div>1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</div> <div>2. Program Penelitian dan Pengembangan</div> <div>1. Program Pengelolaan Perkebunan</div>	<div>Dinas Perkebunan Prov. Kalteng</div> <div>1. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng</div> <div>2. BKSDA Kalteng</div> <div>3. BTN Sebangau,</div> <div>4. BTN Bukit Baka-Bukit Raya</div> <div>5. BPDASHL Kahayan</div>	<div>Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</div> <div>Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</div> <div>Kegiatan/Sub Kegiatan</div>

14/10/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
							<div>1. Program Pengelolaan Hutan</div> <div>2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</div> <div>3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</div> <div>4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</div>	<div>6. BPKH XXI</div> <div>7. BP2HP</div> <div>8. BPPI &amp; Karhutla Kalimantan</div> <div>9. BRGM</div> <div>10. IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE</div> <div>11. IUP</div> <div>12. KUP</div> <div>13. WWF</div> <div>14. BNF</div> <div>15. BOF</div> <div>16. GGGI</div> <div>17. WALHI</div> <div>18. SoB</div> <div>19. JPP</div> <div>20. FOKKER SHK</div> <div>21. LPP-LH "Green Borneo" Katingan P2R Katingan</div>	<div>sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</div> <div>Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</div> <div>Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai</div>

1429 k

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
									Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

tg 10/9/23

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
2.	1. Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat 2. Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik	Tujuan 1: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).	TPB 2. Desa Tanpa Kelaparan.  Agenda kedua TPB Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan	TPB 2. Tanpa Kelaparan	1. Target TPB 2.1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun. 2. Target TPB 2.2.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Perizinan Usaha Pertanian 4. Program Penyuluhan Pertanian 5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan 2. P2R Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan

14/10/24





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan.3. Memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet 4. Memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk	Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial.  Tujuan 9:	4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 8. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi. 10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.	dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.  1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0% 2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100% 3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan		Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil dan menyusui, dan manula. 3. Target TPB 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan berskala mikro, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan,	6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 7. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 9. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 10. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 11. Program Penanganan Kerawanan Pangan 12. Program Pengawasan Keamanan Pangan 13. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

7429 k

## Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	dengan Vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin		<div>kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,</div> <div>17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.</div> <div>18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.</div> <div>19. Perwujudan kawasan peternakan.</div> <div>20. Perwujudan kawasan perkebunan.</div> <div>21. Perwujudan Kawasan perikanan.</div> <div>22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.</div> <div>23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.</div>				<div>4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</div> <div>5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</div> <div>1. Program Pemberdayaan Sosial</div> <div>2. Program Rehabilitasi Sosial</div> <div>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</div> <div>4. Program Penanganan Bencana</div>	<div>2. Tim Penggerak PKK Kabupaten Katingan</div> <div>3. Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Katingan</div> <div>Dinas Sosial Kab. Katingan</div> <div>1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan</div>	<div>Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</div> <div>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai</div>

14 2019



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.  25. Perwujudan Kawasan Pariwisata.  26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.  27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.  28. Perwujudan Kawasan Pesisir.  29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.  30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.				1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Perindustrian Kab. Katingan 2. P2R Katingan 3. Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Katingan   Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Katingan	Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

74/2019 W

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional. 32. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi. 33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi. 34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya. 35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan				1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Pengelolaan Pelayaran  Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Katingan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan  Bappelitbang Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

14/12/2024



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.  37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.  38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwt.  39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.				1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  2. Program Penelitian dan Pengembangan  Program Pengelolaan Perkebunan         1. Program Pengelolaan Hutan	1. Dinas Perkebunan Prov. Kalteng  2. IUP Sawit         1. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng 2. BKSDA Kalteng 3. BTN Sebangau, 4. BTN Bukit Baka-Bukit Raya 5. BPDASHL Kahayan	Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak         Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/10/2024



IV.73

1419 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
								25. LPP-LH "Green Borneo" Katingan 26. P2R Katingan	Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

74 709 12



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran

1419 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
3.	1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan	Tujuan 1: Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.	TPB 3. Desa Peduli Kesehatan.  Pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan	TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1. Target TPB 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio Kematian Ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran 3.2.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan Kab. Katingan 2. RSUD Mas Amsyar Kasongan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan

14/10/24



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan social 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care).	kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan  Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan	2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 8. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	kesehatan; terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); angka kematian bayi (AKB); peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; prevalensi pemakaian kontrasepsi; pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah); pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia remaja.  1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk 2. Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0% 3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100% 4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0 5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0 6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi lahir dan balita. 2. Target TPB 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis malaria, dan penyakit tropis lainnya, melawan hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya, terutama COVID dengan berbagai variannya. 3. Target TPB 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas. 4. Target TPB 3.7. Pada tahun 2030, menjamin	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3. IDI Kab. Katingan 4. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab. Katingan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan	Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

74/19 W





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		<p>Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan social</p> <p>Tujuan 6: Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; Meningkatkan kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak</p>	<p>9. Pengembangan Sistem Jartingan Prasarana Telekomunikasi.</p> <p>10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.</p> <p>11. Pembangunan Prasarana Lingkungan.</p> <p>12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.</p> <p>13. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)</p> <p>14. Kawasan pelestarian alam (KPA)</p> <p>15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.</p>	<p>mencapai 100% 7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0% 8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100% 9. Persentase perokok &lt;18 tahun mencapai 0% 10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT 11. Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial 12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0% 13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100% 14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0% 15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5</p>		<p>akses universal terhadap layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>5. Target TPB 3.9. Pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan polusi udara, air, dan tanah.</p> <p>Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Beijing</p>	<p>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</p> <p>1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>2. Program Perlindungan Perempuan</p> <p>3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <p>5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>6. Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Katingan</p>	<p>Permendagri No.90/2019</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019</p>

f4x9 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		Tujuan 9: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata	<div>16. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,</div> <div>17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.</div> <div>18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.</div> <div>19. Perwujudan kawasan peternakan.</div> <div>20. Perwujudan kawasan perkebunan.</div> <div>21. Perwujudan Kawasan perikanan.</div>			+20 • Habitat III • Climate Change	<div>7. Program Pengendalian Penduduk</div> <div>8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</div> <div>9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</div>		

tf yg k

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.						
			23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.						
			24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.						
			25. Perwujudan Kawasan Pariwisata.						
			26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.						
			27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.						
			28. Perwujudan Kawasan Pesisir.						

te yag k

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.						
			30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.						
			31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.						
			32. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.						
			33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.						
			34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.						
			35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan						

14/19 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			daya dukung lingkungan hidup.  36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.  37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.  38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.  39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan						

f4y9 12

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			<p>pertimbangan aspek lingkungan.</p> <p>40. perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentinganpendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.</p>						
4.	<p>1. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran</p> <p>2. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan</p>	<p>Tujuan 1: Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata,</p>	<p>1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.</p> <p>2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).</p> <p>3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan</p> <p>4. Lingkungan (PPL).</p>	<p>TPB 4. Desa Tanpa Kemiskinan.</p> <p>Uuntuk mencapai tujuan TPB Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah: akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang</p>	<p>TPB 4. Pendidikan Berkualitas</p>	<p>1. Target TPB 4.1. Pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas.</p> <p>2. Target TPB 4.2. Pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-</p>	<p>Program Pengelolaan Pendidikan</p>	<p>1. Dinas Pendidikan Kab. Katingan</p> <p>2. PGRI Kab. Katingan</p> <p>3. UPR</p> <p>4. UMP</p> <p>5. UNDA</p> <p>6. TOMAS</p> <p>7. TOGA</p>	<p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra</p>

14/10/24





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	Wajib Belajar 12 Tahun 3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata 4. Memperkuat penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah 5. Meningkatkan tata kelola	kelaunan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan.  Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai	5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 6. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 7. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 8. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 9. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 10. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi. 11. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.	berkualitas dan terjangkau untuk warga desa. Selain itu, tujuan ini berfokus pada tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa.  1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% 2. Akses anak ke pesantren mencapai 100% 3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% 4. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100% 5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100% 6. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun 7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan		laki memiliki akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak awal yang berkualitas, pengasuhan dan pendidikan pra-sekolah. 3. Target TPB 4.3. Pada tahun 2030, menjamin Akses Yang Setara Bagi Semua Perempuan dan Laki-Laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas. 4. Target TPB 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah remaja dan dewasa yang memiliki keahlian yang relevan,	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia       1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan      1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Katingan	Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak      Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan

fy 29 k



7420 h



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		lembaga jaminan social	18. Perwujudan kawasan tanaman pangan. 19. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura. 20. Perwujudan kawasan peternakan. 21. Perwujudan kawasan perkebunan. 22. Perwujudan Kawasan perikanan. 23. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi. 24. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.			semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mementingkan budaya perdamaian dan antikekerasan, kependudukan global serta apresiasi terhadap keragaman budaya dan kontribusi budaya. 7. Target TPB 4.a. Membangun dan Meningkatkan Mutu	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3. Program pengembangan Kapasitas Kepramukaan 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pembinaan Sejarah 6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Katingan 2. DAD Kab. Katingan 3. KONI Kab. Katingan 4. KNPI Kab. Katingan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Katingan	Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

14/10/20



No	Program Rpijmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			25. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara. 26. Perwujudan Kawasan Pariwisata. 27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan. 28. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. 29. Perwujudan Kawasan Pesisir. 30. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara. 31. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.			Fasilitas Pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian          Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian          Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

17/10/23



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			32. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional. 33. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi. 34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi. 35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya. 36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 37. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan				1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan	Daerah Kab. Katingan          Bappelitbang Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak          Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

19/10/2023

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			38. pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.  39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.  40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.  41. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.  42. perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan						Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

terang k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
				pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.					
5.	1. Mewujudkan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya 2. Meningkatkan kesetaraan gender dan	Tujuan 6: Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; Meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak.	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan 4. Lingkungan (PPL). 5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 6. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	TPB 5. Keterlibatan Perempuan Desa.  Beberapa indikator tercapainya tujuan TPB Desa ini adalah: tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam Badan Perwakilan Desa (BPD); median usia kawin pertama perempuan; layanan kesehatan untuk perempuan, dan layanan pendidikan untuk perempuan; serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.  1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung	TPB 5. Kesetaraan Gender	1. Target TPB 5.1. Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di manapun. 2. Target TPB 5.2. Menghapuskan segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecehan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya 3. Target TPB 5.3. Menghapuskan semua kebiasaan yang	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Katingan 2. Tim Penggerak PKK Kabupaten Katingan 3. Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14 x 9 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	pemberdayaan perempuan 3. Meningkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).		7. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 8. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 9. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 10. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi. 11. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air. 12. Pembangunan Prasarana Lingkungan. 13. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung. 14. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan	pemberdayaan perempuan minimal 30% 2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% 4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100% 5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun 6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0% 7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100% 8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30% 9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan		membahayakan, seperti pernikahan dini, anak dan paksa serta sunat pada perempuan. 4. Target TPB 5.4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tidak dibayar melalui Penyediaan Pelayanan Publik, Infrastruktur, dan Kebijakan Perlindungan Sosial serta Mendorong Adanya Tanggung Jawab Bersama dalam rumah tangga keluarga sebagai hal yang wajar. 5. Target TPB 5.5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dan	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan          Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan          Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak          Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan

14 19 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)  15. Kawasan pelestarian alam (KPA)  16. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.  17. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,  18. Perwujudan kawasan tanaman pangan.  19. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.	berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30% 10.Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis		mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan Pada Tiap Jenjang Pengambilan Keputusan dalam Kehidupan Umum, Ekonomi, dan Politik.  6. Target TPB 5.a. Melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan Hak yang Sama terhadap Sumberdaya Ekonomi dan juga akses terhadap Kepemilikan dan Kontrol Atas Lahan serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum Negara.	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  2. Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbang Kab. Katingan	Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra

10/10/2023





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			20. Perwujudan kawasan peternakan. 21. Perwujudan kawasan perkebunan. 22. Perwujudan Kawasan perikanan. 23. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi. 24. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry. 25. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara. 26. Perwujudan Kawasan Pariwisata.			7. Target TPB 5.c. Mengangkat dan menguatkan Kebijakan yang Jelas serta Penegakkan Perundang-Undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dana anak perempuan pada semua tingkat.  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III			Pemkab/ Parapihak

18/10/2023





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.						
			28. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.						
			29. Perwujudan Kawasan Pesisir.						
			30. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.						
			31. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.						
			32. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.						
			33. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.						
			34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.						

19/09/2019



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.						
			36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.						
			37. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.						
			38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.						

19/10/2023

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.  40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.  41. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						
6.	1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah	Tujuan 1: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.	TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata.	TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.	1. Target TPB 8.3. Memajukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan

tey k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	(UMKM) dan koperasi 2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.	merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan social.  Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat	2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).  3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).  4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat  5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.  6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut  7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api.  8. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.  1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta 2. Pekerja sektor formal minimal 51% 3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya 4. Tingkat pengangguran terbuka 0% 5. PKTD menyerap >50%		kegiatan-kegiatan produktif, Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak, kewirausahaan, Kreativitas dan Inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan.  2. Target TPB 8.5. Pada tahun 2030, mencapai penyerapan ketenagakerjaan yang produktif dan menyeluru serta Pekerjaan yang Layak bagi Seluruh Perempuan dan Laki-Laki, termasuk pemuda dan penyandang	3. Program Penempatan Tenaga Kerja 4. Program Hubungan Industrial 5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi  1. Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2. Rumah Kreatif BUMN 3. P2R Katingan  1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian Prov. Kal-Teng	Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra

19/10/2024



No	Program Rpijn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		<p>kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan social.</p> <p>Tujuan 9: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan</p>	<p>9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.</p> <p>10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.</p> <p>11. Pembangunan Prasarana Lingkungan.</p> <p>12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.</p> <p>13. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)</p> <p>14. Kawasan pelestarian alam (KPA)</p> <p>15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.</p>	<p>penganggur di desa 6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100% 7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100% 8. Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa</p>		<p>disabilitas, serta Kesetaraan Upah untuk Pekerjaan yang Bernilai Setara.</p> <p>3. Target TPB 8.6. Pada tahun 2020, mengurangi proporsi Pemuda yang tidak bekerja, berpendidikan atau terlatih.</p> <p>4. Target TPB 8.7. Segera mengambil langkah-langkah untuk melarang dan menghilangkan penyerapan Tenaga Kerja Anak-Anak, mengentaskan Kerja Paksa, dan mengakhiri segala bentuk penyerapan tenaga kerja anak termasuk pengerahan dan pemanfaatan tentara</p>	<p>6. Program Pengembangan Umkm</p> <p>7. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <p>8. Program Pengembangan Ekspor</p> <p>9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>1. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</p> <p>3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>4. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.</p>	<p>3. Kementerian Koperasi dan UKM</p> <p>4. Kementerian perdagangan</p> <p>5. BKPM</p> <p>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p> <p>2. PT Bank Pembangunan Kalteng</p>	<p>Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan</p>

10 x 9





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		pertanian dan pariwisata.	16. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,  17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.  18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.  19. Perwujudan kawasan peternakan.  20. Perwujudan kawasan perkebunan.  21. Perwujudan Kawasan perikanan.			anak-anak pada tahun 2025.  5. Target TPB 8.8. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung Lingkungan Kerja yang Aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan, imigran dan pekerja tidak tetap.  6. Target TPB 8.9. Pada tahun 2030, merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung Pariwisata Berkelanjutan yang Mampu Menciptakan Lapangan Kerja, Mendukung Budaya dan Produk Lokal.	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya  2. Program Pengembangan Kebudayaan  3. Program Pemasaran Pariwisata  4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Katingan  2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Prov. Kal-Teng  3. DAD Kab. Katingan  4. KONI Kab. Katingan  5. KNPI Kab. Katingan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

1429 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi. 23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry. 24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara. 25. Perwujudan Kawasan Pariwisata. 26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan. 27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. 28. Perwujudan Kawasan Pesisir.			Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III • Agenda 21 for Culture.	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan	Daerah Kab. Katingan          Bappelitbang Kab. Katingan	enyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak   enyesuaian Variabel pada setiap

19/09/2023



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara. 30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan. 31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional. 32. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi. 33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi. 34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya. 35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan						Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

19 k

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			daya dukung lingkungan hidup.  36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.  37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.  38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.						

14/09/20





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.  40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						
7.	1. Memperkuat infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat 2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di	Tujuan 2: Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.  2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)  3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).	TPB 9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan.  TPB Desa ini, menggunakan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, di antaranya: kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industri di desa; serta kontribusi industri	TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1. Target TPB 9.1. membangun Infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan 2. P2R Katingan 3. Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan

4 2019 14

IV.104

↑ ~~ε~~ ~~χ~~ ~~φ~~ ~~κ~~





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.  Tujuan 9: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan	11. Pembangunan Prasarana Lingkungan. 12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung. 13. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau) 14. Kawasan pelestarian alam (KPA) 15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan. 16. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan			universal di negara-negara terbelakang pada tahun 2020.  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Habitat III • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 • Climate Change.	2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh 3. Program peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Pengelolaan Sistem Air Limbah  1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Aplikasi Informatika	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Katingan  1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan 2. BPS Kab. Katingan	Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada

19/10/20



ky yq k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara. 25. Perwujudan Kawasan Pariwisata. 26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan. 27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. 28. Perwujudan Kawasan Pesisir. 29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara. 30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.				1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Katingan	MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap

te xA k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional. 32. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi. 33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi. 34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya. 35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan						Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/1/20





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			<p>Pendaya-gunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.</p> <p>37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.</p> <p>38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.</p> <p>39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan pertimbangan aspek lingkungan.</p>						

14 Y9 14

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			40. perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						
8.	1. Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan,	Tujuan 2: Terpenuhiya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha,	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.  2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).	TPB 11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman.  Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan	TPB 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjuta n	1. Target TPB 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses terhadap Perumahan dan Pelayanan Dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

19 X 9 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	<p>dan lingkungan yang mendukung (enabling environment) terkait kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha</p> <p>2. Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan</p>	<p>makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.</p> <p>Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik,</p>	<p>3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).</p> <p>4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <p>5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.</p> <p>6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut</p> <p>7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api.</p> <p>8. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.</p> <p>9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.</p>	<p>beberapa target capaian kawasan permukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.</p> <p>1. Rumah kumuh mencapai 0% 2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT 3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum &gt;50% 4. Penduduk yang pindah ke kota &lt;15% 5. Swsta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa 6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100% 7. Tersedia peringatan dini bencana 8. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0% 9. Tersedia peringatan dini bencana 10. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100% 11. Terdapat taman/lapangan di desa</p>		<p>kondisi permukiman kumuh.</p> <p>2. Target TPB 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, khususnya dengan memperbanyak Transportasi Umum, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat yang rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan manula.</p> <p>3. Target TPB 11.3. Pada tahun 2030,</p>	<p>3. Program Pengelolaan Sistem Air Limbah</p> <p>4. Program Kawasan Permukiman</p> <p>5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p> <p>7. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</p> <p>9. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</p> <p>10. Program Penatagunaan Tanah</p>		<p>Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p>

14/09/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.	meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan social.  Tujuan 7: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai	10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air. 11. Pembangunan Prasarana Lingkungan. 12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung. 13. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau) 14. Kawasan pelestarian alam (KPA) 15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan. 16. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi			meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan di semua negara. 4. Target TPB 11.4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga Warisan Alam Dan Budaya dunia. 5. Target TPB 11.5. Pada tahun 2030, mengurangi jumlah kematian, korban, dan pengurangan kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang diakibatkan oleh	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLLAJ) 2. Program Pengelolaan Pelayaran 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Katingan 2. Balai Wilayah Sungai II Kalimantan  1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Katingan 2. BKSDA Kalteng 3. BTN Sebangau, 4. BTN Bukit Baka-Bukit Raya 5. WWF 6. BNF 7. BOF 8. GGGI	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan

14 Ya



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.  Tujuan 8: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai	<p>tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,</p> <p>17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.</p> <p>18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.</p> <p>19. Perwujudan kawasan peternakan.</p> <p>20. Perwujudan kawasan perkebunan.</p> <p>21. Perwujudan Kawasan perikanan.</p> <p>22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.</p>			<p>Bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi masyarakat miskin dan yang berada dalam situasi rentan.</p> <p>6. Target TPB 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi Dampak Lingkungan Per Kapita di Perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus kepada Kualitas Udara dan Pengelolaan Limbah.</p> <p>7. Target TPB 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap Ruang Terbuka Hijau dan Publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya bagi perempuan dan</p>	<p>Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p> <p>6. Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p> <p>1. Program Penanggulangan Bencana</p> <p>2. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran</p>	<p>9. DAD Kab. Katingan</p> <p>10. MDA Hindu Kaharingan Kab. Katingan</p> <p>11. LPP-LH "Green Borneo" Kasongan</p> <p>12. PzR Katingan</p> <p>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Katingan</p> <p>2. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Katingan</p>	<p>sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan</p>

14 10 14





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		<p>oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.</p> <p>Tujuan 10: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai</p>	<p>23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.</p> <p>24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.</p> <p>25. Perwujudan Kawasan Pariwisata.</p> <p>26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.</p> <p>27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.</p> <p>28. Perwujudan Kawasan Pesisir.</p> <p>29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.</p>			<p>anak-anak, manula, dan penyandang disabilitas.</p> <p>8. Target TPB 11.a. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara kawasan urban, peri-urban dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan wilayah dan nasional.</p> <p>9. Target TPB 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengangkat dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi terkait inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim,</p>	<p>Program Penanganan Bencana</p> <p>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Dinas Sosial Kab. Katingan</p> <p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p>

19/10/2023





No	Program Rpijn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		<p>oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.</p> <p>Tujuan 11: Semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang</p>	<p>30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.</p> <p>31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.</p> <p>32. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.</p> <p>33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.</p> <p>34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.</p> <p>35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p>			<p>Ketahanan Terhadap Bencana, melakukan pengembangan dan implementasi yang sejalan dengan Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 mengenai Pengurangan Resiko Bencana.</p> <p>10. Target TPB 11.c. Mendukung negara-negara terbelakang untuk membangun bangunan yang tangguh dan berkelanjutan menggunakan bahan dan material lokal, termasuk melalui pemberian bantuan teknis dan finansial.</p> <p>Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development</p>	<p>1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Katingan</p>	<p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai</p>

14/09/20

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.	<div>36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.</div> <div>37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.</div> <div>38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.</div> <div>39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.</div>			<div>• Habitat III •Climate Change</div> <div>• Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</div> <div>• Agenda 21 for Culture.</div>			Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/10/24

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentinganpendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						

14 Ya R





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
9.	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan 2. Penanganan Limbah 3. Pengembangan industri hijau 4. Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah	Tujuan 10: Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat	TPB 12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan.  Indikator keberhasilan TPB Desa ini di antaranya dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha; terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha.  1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah	TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan	1. Target TPB 12.2. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan Sumber Daya Alam yang Efisien dan berkelanjutan. 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi separuh dari jumlah Sampah Pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumen, serta mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai. 12.4. pada tahun 2020, meraih Manajemen	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 5. Program Pengelolaan Persampahan	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan 2. BKSDA Kalteng 3. BTN Sebangau, 4. BTN Bukit Baka-Bukit Raya 5. WWF 6. BNF 7. BOF 8. GGGI 9. DAD Kab. Katingan 10. MDA Hindu Kaharingan Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

19/10/2023



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termasuk sampah plastik.	lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.	5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 8. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi. 10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air. 11. Pembangunan Prasarana Lingkungan. 12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.	rumah tangga 2. Tersedia unit pengolahan sampah		Limbah dan Bahan Kimia yang ramah lingkungan sesuai dengan kerangka internasional yang berlaku serta mengurangi pencemarannya terhadap tanah, air, dan udara untuk meminimalisir dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. 2. Target TPB 12.5. Pada tahun 2030, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, Pengurangan, Daur Ulang, dan Penggunaan Kembali Sampah (3R). 3. Target TPB 12.7. Mendorong proses	1. Program Pengelolaan Hutan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	11. LPP-LH "Green Borneo" Kasongan 12. PzR Katingan 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng 2. BKSDA Kalteng 3. BTN Sebangau, 4. BTN Bukit Baka-Bukit Raya 5. BPDASHL Kahayan 6. BPKH XXI 7. BP2HP XII 8. BRGM 9. IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE 10. UPT KPHP Katingan Hilir 11. UPT KPHP Katingan Hulu 12. IUP 13. KUP 14. WWF	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

18/10/2023



f q y a k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura. 19. Perwujudan kawasan peternakan. 20. Perwujudan kawasan perkebunan. 21. Perwujudan Kawasan perikanan. 22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi. 23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry. 24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.			Lapangan Kerja Dan Mendukung Budaya Dan Produk Lokal.  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development, Habitat III • Climate Change • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan  1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pembinaan Sejarah 3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 5. Program Pengembangan Sumber Daya	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng 2. KUP  1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Katingan 2. DAD Kab. Katingan 3. KNPI Kab. Katingan 4. KONI Kab. Katingan	MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap

19/1/20

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			25. Perwujudan Kawasan Pariwisata. 26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan. 27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. 28. Perwujudan Kawasan Pesisir. 29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara. 30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan. 31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional. 32. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.				Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri        Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan        Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan	Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak        Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019

14/10/18



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi. 34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya. 35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi. 37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek				1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbang Kab. Katingan	dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/19





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			<p>ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.</p> <p>38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.</p> <p>39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.</p> <p>40. perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.</p>						<p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p>

74/19 k

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran

19/10/2024



No	Program Rjpmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
10.	1. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 2. Pembangunan Rendah Karbon. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi penanggulang an bencana dan peningkatan ketahanan	Tujuan 8: Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat  Tujuan 9: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan,	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan 4. Lingkungan (PPL). 5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 6. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 7. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 8. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api.	TPB 13. Desa Tanggap Perubahan Iklim.  TPB ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks resiko bencana di desa.  1. Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT 2. Penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT	TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim	1. Target TPB 13.1. Meningkatkan Daya Tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara. 2. Target TPB 13.3. Memperbaiki pendidikan, Peningkatan Kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia serta lembaga dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. 3. Target TPB 13.b. Mengedepankan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas demi Perencanaan Dan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Keanekaragaman Hayati 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6. Program Pengelolaan Persampahan 7. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

fy x 19 k



No	Program Rjpmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
	iklim. Adapun untuk Pembangunan Rendah Karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidangbidang prioritas, meliputi pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengelolaan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut	terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata  Tujuan 10: Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus	9. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.  10. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.  11. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.  12. Pembangunan Prasarana Lingkungan.  13. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.  14. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)  15. Kawasan pelestarian alam (KPA)			Manajemen Perubahan Iklim yang efektif di negara-negara terbelakang, termasuk berfokus pada perempuan, remaja, dan masyarakat lokal dan yang termarginalisasi.  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development •Habitat III • Climate Change • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 • carbon Cities Climate Registry (cCCR) • Compact of Mayors.	Pengelolaan Lingkungan Hidup  1. Program Pengelolaan Hutan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng 2. BKSDA Kalteng 3. BTN Sebangau, 4. BTN Bukit Baka-Bukit Raya 5. BPDASHL Kahayan 6. BPKH XXI 7. BP2HP XII 8. BRGM 9. IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE 10.UPT KPHP Katingan Hilir 11.UPT KPHP Katingan Hulu 12.IUP 13.KUP 14.WWF 15.BNF 16.BOF 17.GGGI	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/2/2024

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		membaiiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.  Tujuan 11: Semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah	16. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.  17. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,  18. Perwujudan kawasan tanaman pangan.  19. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.  20. Perwujudan kawasan peternakan.  21. Perwujudan kawasan perkebunan.				1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	18.WALHI 19.SoB 20.JPP 21.FOKKER SHK 22.LPP-LH "Green Borneo" Katingan 23.P2R Katingan  1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Katingan 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Katingan 3. POLRES Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV,

tf ya k



IV.129

fy ya





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			29. Perwujudan Kawasan Pesisir. 30. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara. 31. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan. 32. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional. 33. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi. 34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi. 35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.				3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbang Kab. Katingan	dengan Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan

18/9 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 37. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan 38. pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi. 39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan. 40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.						Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14299 14

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			41. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.  42. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentinganpendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						

tyva k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran

f4y9 h



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
11.	1. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Mengurangi laju deforestasi 3. Mengurangi laju degradasi hutan.	Tujuan 7: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 6. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api.	TPB 15. Desa Peduli Lingkungan Darat.  Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi margasatwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati; luas lahan terbuka hijau; serta jumlah satwa terancam punah.  1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% 2. Akses anak ke pesantren mencapai 100% 3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% 4. APM	TPB 15. Ekosistem Daratan	1. Target TPB 15.1. Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan Ekosistem Air Tawar dan Daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan kesepakatan internasional. 2. Target TPB 15.2. Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan Ekosistem Air Tawar dan Daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan	1. Program Pengelolaan Hutan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1. Dinas Kehutanan Prov. Kalteng 2. BKSDA Kalteng 3. BTN Sebangau, 4. BTN Bukit Baka-Bukit Raya 5. BPDASHL Kahayan 6. BRGM 7. IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE 8. IUP 9. KUP 10. WWF 11. BNF 12. BOF 13. GGGI 14. WALHI 15. SoB 16. JPP 17. FOKKER SHK	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak

14/09/20





No	Program Rpijn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		<p>Tujuan 8: Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>Tujuan 9: Selain itu, pengembangan infrastruktur</p>	<p>7. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.</p> <p>8. Pembangunan Prasarana Lingkungan.</p> <p>9. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.</p> <p>10. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)</p> <p>11. Kawasan pelestarian alam (KPA)</p> <p>12. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.</p> <p>13. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi</p>	<p>PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100% 5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100% 6. Rata-rata lama sekolah penduduk &gt;20 tahun mencapai 12 tahun 7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan</p>		<p>lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan perjanjian internasional.</p> <p>3. Target TPB 15.5. Segera mengambil tindakan untuk mengurangi degradasi habitat alamiah, menghentikan hilangnya Keanekaragaman Hayati serta melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam atau langka pada tahun 2020.</p> <p>4. Target TPB 15.9. Pada tahun 2020, memadukan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam Perencanaan Daerah</p>	<p>Program Pengelolaan Perkebunan</p> <p>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Program Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Program Keanekaragaman Hayati</p> <p>4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>	<p>18. LPP-LH "Green Borneo" Katingan</p> <p>19. P2R Katingan</p> <p>Dinas Perkebunan Prov. Kalteng</p> <p>1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Katingan</p> <p>2. Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng</p> <p>3. BKSDA Kalteng</p> <p>4. BTN Sebangau,</p> <p>5. BTN Bukit Baka-Bukit Raya</p>	<p>Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan</p>

1489 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.  Tujuan 10: Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi	<p>tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,</p> <p>14. Perwujudan kawasan tanaman pangan.</p> <p>15. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.</p> <p>16. Perwujudan kawasan peternakan.</p> <p>17. Perwujudan kawasan perkebunan.</p> <p>18. Perwujudan Kawasan perikanan.</p> <p>19. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.</p>			<p>dan Nasional, proses pembangunan serta strategi pengentasan kemiskinan.</p> <p>5. Target TPB 15.b. Mengerahkan Sumberdaya dari Segala Sumber pada Tiap Tingkat untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menyediakan insentif yang sesuai bagi negara berkembang terkait hal tersebut, termasuk untuk konservasi dan reboisasi hutan.</p> <p>Agenda Internasional Terkait Lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financing for Development</li> <li>• Climate Change</li> </ul>	<p>5. Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>6. Balai PPI &amp; Karhutla Kalimantan</p> <p>7. WWF</p> <p>8. BNF</p> <p>9. BOF</p> <p>10. GGGI</p> <p>11. DAD Kab. Katingan</p> <p>12. MDA Hindu Kaharingan Kab. Katingan</p> <p>13. LPP-LH "Green Borneo" Kasongan</p> <p>14. P2R Katingan</p> <p>Sekretariat Daerah Kab. Katingan</p>	<p>MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan</p>

14/19

1929

No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
		penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan	<div>pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.</div> <div>27. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.</div> <div>28. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.</div> <div>29. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.</div> <div>30. perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan</div>						<div>Mitra Pemkab/ Parapihak</div> <div>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</div>

19 Ya k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikatornya	TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT)			OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya)	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
			pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

14/09/20



## 2. Alternatif skenario tanpa upaya tambahan

Isu Strategis dan Indikator Kunci sesuai Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi serta Nomor Urutan Prioritas Intervensi terhadap TPB dengan Tanpa Upaya Tambahan (TUT) KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Hingga Tahun 2021-2030, dan hasil kompilasinya yang memperhatikan pendapat masyarakat, maka Skenario KRPnya secara ringkas disajikan pada tabel di bawah.



**Tabel 4.12**

**Rekomendasi KRP TPB Tanpa Upaya Tambahan dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Tujuan Pembangunan RPJPD ke-3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Pemangku Program, Bentuk Fasilitas/Asistensi serta Kegiatan Tanpa Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya**

No	Program Rpijmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
1.	1. Mengentaskan kemiskinan 2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan 3. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial 4. Melakukan pembangunan kewilayahan melalui pendekatan koridor	Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; Meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak  Tujuan 2: Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.  2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)  3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).	TPB 10. Desa Tanpa Kesenjangan.  TPB Desa ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Gini desa; tingkat kemiskinan di desa; status perkembangan desa; serta indeks kebebasan sipil di desa.	TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan.	1. Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan menjaga pertumbuhan pendapatan dari 40% populasi terbawah dengan tingkat di atas rata-rata nasional.  2. Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayaka	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah        1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan       Dinas Sosial Kabupaten Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/Parapihak   Penyesuaian Variabel pada

14/09/20





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
	pertumbuhan dan koridor pemerataan	mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian	4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 8. Pengembangan Sistem Jaringan	1. Koefisien Gini desa di bawah 0,200 2. Tingkat kemiskinan 0% 3. Status perkembangan desa A (setara mandiri) 4. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100 5. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100% 6. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran.		n dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial atau status lainnya. 3. Target 10.3. Menjamin peluang yang sama dan mengurangi ketimpagan pendapatan, termasuk dengan menghilangkan peraturan, kebijakan, dan praktik yang	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Katingan 2. POLRESTA 3. Perwira Penghubung 4. BATAMAD Kab. Katingan 5. FORDAYAK-KT Kab. Katingan	setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

1429



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya	<p>Infrastruktur Ketenagalistrikan.</p> <p>9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.</p> <p>10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.</p> <p>11. Pembangunan Prasarana Lingkungan</p> <p>12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.</p> <p>13. Kawasan perlindungan</p>			<p>mendiskriminasi serta mendorong adanya legislasi, kebijakan dan tindakan yang sesuai terkait hal tersebut.</p> <p>4. Target 10.4. Mengangkat kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan secara progresif mencapai kesetaraan.</p> <p>5. Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia yang tertib, aman,</p>	<p>4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</p> <p>1. Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>2. Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi</p> <p>3. Pemberdayaan UMKM</p> <p>4. Pengembangan UMKM</p> <p>1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan,</p>	<p>Permendagri No.90/2019 dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak</p>

14209





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		lembaga jaminan social  Tujuan 7: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga	setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)  14. Kawasan pelestarian alam (KPA)  15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.  16. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan			teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik.  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Habitat III • Beijing +20	2. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak  1. Program Hubungan Industrial 2. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi  1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Katingan  Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Katingan  Bappelitbang Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan

14/9/23





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai  Tujuan 9: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga	kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,  17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.  18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.				2. Program Penelitian dan Pengembangan		sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/

14/09/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.	19. Perwujudan kawasan peternakan. 20. Perwujudan kawasan perkebunan 21. Perwujudan Kawasan perikanan. 22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi. 23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.						Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

1429 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.						
			25. Perwujudan Kawasan Pariwisata.						
			26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.						
			27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.						

14 Ya k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			28. Perwujudan Kawasan Pesisir.						
			29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.						
			30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.						
			31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.						
			32. Perwujudan Kawasan						

14/1/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			Strategis Provinsi.						
			33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.						
			34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.						
			35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.						

14 X 19



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.						
			37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.						
			38. Perwujudan kawasan strategis						

14/19/19



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.  39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.  40. perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan						

14/2/2024



No	Program Rpijn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						
2.	1. Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan 2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik 3. Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik	Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan 4. Lingkungan (PPL).	TPB 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan. Tujuan TPB Desa ini memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Capaian tujuan ini sampai tahun 2030 dapat diukur dengan beberapa indikator, di antaranya: konsumsi listrik rumah tangga di Desa mencapai minimal 1.200 kWh; Rumah tangga di Desa menggunakan gas atau sampah kayu untuk	TPB 7. Energi Bersih dan Terjangkau	1. Target TPB 7.1. Pada tahun 2030, menjamin Akses yang Universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern. 2. Target TPB 7.2. Pada tahun 2030, meningkatkan proporsi Energi Terbarukan	1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 3. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng 2. KUP Sekretariat Daerah Kab. Katingan	Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap

1429





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
	4. Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan 5. Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.	disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial  Tujuan 7: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai	5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat 6. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 7. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut 8. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. 9. Pengembangan Sistem Jaringan	memasak; penggunaan bauran energi terbarukan di desa.  1. Keluarga 2. 3. 4. pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi > 1.200 Kwh/kapita 2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100% 3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga 5. Keluarga pengguna minyak untuk		dalam rasio penggunaan sumber energi dunia. 3. Target TPB 7.3. Pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan Efisiensi Energi dunia.  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Climate Change • Habitat III	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbang Kab. Katingan	Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019

14/19 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai  Tujuan 9: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara),	Infrastruktur Ketenagalistrikan.  10. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.  11. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.  12. Pembangunan Prasarana Lingkungan  13. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.  14. Kawasan perlindungan	transportasi dan memasak <50%					dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14 x 9 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai	setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)  15. Kawasan pelestarian alam (KPA)  16. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.  17. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan						

14/2/19



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,  18. Perwujudan kawasan tanaman pangan.  19. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.						

tf ya k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			20. Perwujudan kawasan peternakan.						
			21. Perwujudan kawasan perkebunan.						
			22. Perwujudan Kawasan perikanan.						
			23. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.						
			24. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.						

fy ya h



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			25. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.						
			26. Perwujudan Kawasan Pariwisata.						
			27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.						
			28. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.						

14 29 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			29. Perwujudan Kawasan Pesisir.						
			30. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.						
			31. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.						
			32. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.						
			33. Perwujudan Kawasan						

14 109 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			Strategis Provinsi.						
			34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.						
			35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.						
			36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.						

14/9 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			37. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.						
			38. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.						
			39. Perwujudan kawasan strategis						

14/1/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.						
			40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.						
			41. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan						

1429 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						
3.	1. Konsolidasi demokrasi 2. Reformasi birokrasi dan tata kelola 3. Penegakan hukum nasional 4. Menjaga stabilitas keamanan nasional.	Tujuan 3: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).	TPB 16. Desa Damai Berkeadilan.  Tujuan TPB Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030: tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak; lestarnya budaya gotong royong di desa; meningkatkan-nya indeks demokrasi di desa; serta tidak adanya	TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1. Target TPB 16.1. Mengurangi segala bentuk Kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan di mana pun, secara signifikan. 2. Target TPB 16.5. Mengurangi segala bentuk Korupsi dan penyuapan secara substansial.	1. Program Perlindungan perempuan 2. Program Peningkatan kualitas Keluarga 3. Program Perlindungan khusus Anak  1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Katingan  1. Inspektorat Kab. Katingan 2. Inspektorat Provinsi Kab. Katingan 3. BPKP RI Perwakilan Provinsi Kal-Teng 4. BPK RI Perwakilan Provinsi Kal-Teng	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap

14/1/19



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.  Tujuan 11: Semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan	4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat  5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.  6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut  7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api.  8. Pengembangan Sistem Jaringan	perdagangan manusia dan pekerja anak.  1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan  2. 3. 4. 5. 6.  7. 8. 9.  terhadap anak mencapai 0% 2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan		3. Target TPB 16.6. Mengembangkan Lembaga-Lembaga Yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan di semua tingkat. 4. Target TPB 16.7. Menjamin Pengambilan Keputusan yang Representatif, Partisipatif, Inklusif dan Responsif di semua tingkat. 5. Target 16.10. Menjamin Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum Adat 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa	5. KPK RI 6. Kejaksaan Negeri Kasongan  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Katingan  Sekretariat Daerah	Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap

14/1/19 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			Infrastruktur Ketenagalistrikan.  9. Pengembangan Sistem Jartingan Prasarana Telekomunikasi.  10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.  11. Pembangunan Prasarana Lingkungan  12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.  13. Kawasan perlindungan	3. Pekerja anak mencapai 0% 4. Perdagangan manusia mencapai 0% 5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0% 6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk public 7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes 8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku 9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi		melindungi hak kebebasan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional yang berlaku  Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Habitat III.	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 2. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten dan Kota 3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan       Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak   Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019

14/10/20



F4 29 12



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			<p>kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,</p> <p>17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.</p> <p>18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.</p>	<p>TPB 18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.</p> <p>Untuk mencapai tujuan TPB Desa 2030 ini, digunakan beberapa indikator di antaranya: lestarinya kegiatan tolong menolong dan gotong royong; partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa; perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim; pelestarian budaya desa; serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budaya.</p>			<p>Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>8. GEPAK Kasongan</p> <p>9. GKE Resort Katingan</p> <p>10. Paroki Gereja Katolik Kab. Katingan</p> <p>11. PD Muhammadiyah Kab. Katingan</p> <p>12. PNU Kab. Katingan</p> <p>13. MD Agama Hindu Kaharingan Kab. Katingan</p> <p>14. FKUB Kab. Katingan</p> <p>15. Nasyiatul Aisyiyah Kab. Katingan</p> <p>Sekretariat DPRD Kab. Katingan</p>	<p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan</p>

14/10/20





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			19. Perwujudan kawasan peternakan.	1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama					sesuai Permendagri No.90/2019 dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS)
			20. Perwujudan kawasan perkebunan	2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa					Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak
			21. Perwujudan Kawasan perikanan.	3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin			Program Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Katingan	
			22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.	4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Katingan	
			23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.	5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun				3. Inspektorat Kab. Katingan	
				6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. POLRESTA Kab. Katingan	
								5. Perwira Penghubung Kab. Katingan	
								6. DAD Kab. Katingan	

14/1/20





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.  25. Perwujudan Kawasan Pariwisata.  26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.  27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.	7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/ walikota  8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B  9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif  10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%  11. Aset desa meningkat  12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%				7. BATAMAT Kab. Katingan 8. FORDAYAK-KT Kab. Katingan 9. GEPAK Kasongan 10. Perkumpulan Tariu Borneo Bangkule Rajank Kasongan 11. GKE Resort Katingan 12. Paroki Gereja Katolik Kab. Katingan 13. PD Muhammadiyah Kab. Katingan 14. PNU Kab. Katingan 15. MD Agama Hindu Kaharingan Kab. Katingan 16. FKUB Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan

74 ya k

14 y 9 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			Strategis Provinsi.  33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.  34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.  35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.				1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak

1480



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.						
			37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.						
			38. Perwujudan kawasan strategis						Penyesuaian Variabel pada setiap

14/1/20



No	Program Rpijn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			berdasarkan pertimbangan 39. aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.  40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.  41. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan						Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/10/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						
4.	<p>1. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman</p> <p>2. Peningkatan kapasitas institusi dalam</p>	<p>Tujuan 2: Terpenuhiya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong</p>	<p>Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.</p> <p>Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).</p> <p>3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).</p>	<p>TPB 6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.</p> <p>Tercapainya tujuan TPB Desa ini dapat diukur dari beberapa hal, seperti: akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100 persen pada tahun 2030; terjadinya efisiensi penggunaan air minum; serta adanya aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah,</p>	TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	<p>1. Target TPB 6.1. Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan universal terhadap Air Minum yang Aman Dan Terjangkau untuk semua</p> <p>2. Target TPB 6.2. Pada tahun 2030, meraih akses yang adil dan cukup terhadap Sanitasi dan kebersihan untuk semua,</p>	<p>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</p> <p>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Program Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah</p>	<p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Katingan</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan</p>	<p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p>

14 Ya k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
	layanan pengelolaan sanitasi 3. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.	peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.  Tujuan 4: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di	4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat  5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.  6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut  7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api.  8. Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur	sungai, air tanah, dan danau.		serta mengakhiri defekasi terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam situasi rentan 3. Target TPB 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan Mengurangi Pencemaran,	Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Program Pengelolaan Persampahan 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak

14/10/2023



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan social.  Tujuan 7: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi	Ketenagalistrikan.  9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.  10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.  11. Pembangunan Prasarana Lingkungan.  12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.  13. Kawasan perlindungan setempat			menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan zat berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan Meningkatkan Praktik Daur Ulang dan Penggunaan Ulang yang aman dalam jumlah substansial secara global	Program Pengelolaan Sumber Daya Air          Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Katingan 2. Balai Wilayah Sungai II Kalimantan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada

14/10/2019





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		(darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai  Tujuan 8: Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber	(Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)  14. Kawasan pelestarian alam (KPA)  15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.  16. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan			4. Target TPB 6.4. Pada tahun 2030, meningkatkan Penggunaan Air yang Efisien secara substansial di semua sektor dan menjamin penyediaan dan pengambilan air bersih yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air	Program Pengelolaan Keuangan Daerah      1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Penelitian dan Pengembangan	Sekretariat Daerah Kab. Katingan      Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Katingan	setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

14 Ya





No	Program Rpijmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
		<p>daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>Tujuan 9: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.</p>	<p>produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,</p> <p>17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.</p> <p>18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.</p>			<p>secara subsansial</p> <p>5. Target TPB 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Terintegrasi pada tiap tingkat, termasuk melalui kerjasama lintas batas bila diperlukan</p> <p>6. Target TPB6.6. Pada tahun 2030, melindungi dan memulihkan ekosistem</p>		<p>Bappelitbang Kab. Katingan</p>	<p>Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p>

14/1/19



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			19. Perwujudan kawasan peternakan.			terkait air, termasuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, daerah resapan air serta danau			Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak
			20. Perwujudan kawasan perkebunan.			7. Target TPB 6.b.			
			21. Perwujudan Kawasan perikanan.			Mendorong dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam memperbaiki pengelolaan air dan sanitasi			
			22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.						
			23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.			Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development			

14 X 9 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Climate Change</li> <li>• Habitat III</li> </ul>			
			25. Perwujudan Kawasan Pariwisata.						
			26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.						
			27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.						

14 109 k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			28. Perwujudan Kawasan Pesisir.						
			29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.						
			30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.						
			31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.						
			32. Perwujudan Kawasan						

14 Ya k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			Strategis Provinsi.						
			33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.						
			34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.						
			35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.						

14 Ya k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.						
			37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.						
			38. Perwujudan kawasan strategis						

19/10/2023



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.						
			39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.						
			40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan						

19/1/2024



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						
5.	1. Optimalisasi penerimaan Negara 2. Peningkatan nilai tambah ekonomi yang secara tidak langsung berkaitan dengan upaya peningkatan remitansi pekerja migran 3. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Tujuan 2: Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk	1. Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. 2. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 3. Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).	TPB 17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa.  Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya: keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga; ketersediaan jaringan internet di desa; statistik desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.  1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap	TPB 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1. Target TPB 17.1. Memperkuat pergerakan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui bantuan luar negeri untuk negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas negara terkait Pengumpulan Pajak dan Sumber	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan  Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Katingan	Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak  Penyesuaian Variabel pada

14 Ya k





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
	<p>4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</p> <p>5. Penuntasan infrastruktur TIK</p> <p>6. Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi</p> <p>7. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional.</p>	mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.	<p>4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat</p> <p>5. Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.</p> <p>6. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut</p> <p>7. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api.</p> <p>8. Pengembangan Sistem Jaringan</p>	<p>PDB Desa di atas 12% per tahun</p> <p>2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional</p> <p>3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi</p> <p>4. Komoditas desa yang diekspor meningkat</p> <p>5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses public</p> <p>6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa</p> <p>7. Tersedia data SDGs setiap tahun</p>		<p>Pendapatan Lainnya.</p> <p>2. Target TPB 17.14. Meningkatkan Koherensi Kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan.</p> <p>3. Target TPB 17.16. Meningkatkan Kemitraan Global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilengkapi dengan kerjasama multi-stakeholder yang dapat</p>	<p>3. Program Pelayananan Penanaman Modal</p> <p>4. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</p> <p>1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</p> <p>2. Program Aplikasi Infomatika</p>	<p>1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan</p> <p>2. BPS</p> <p>Sekretariat Daerah</p>	<p>setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak</p> <p>Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan</p>

14 109 12





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			Infrastruktur Ketenagalistrikan.			menggerakkan dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya negara berkembang.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bappelitbang Kab. Katingan	sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak
			9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi.						
			10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.						Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/
			11. Pembangunan Prasarana Lingkungan.				1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
			12. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.			4. Target TPB 17.17. Mendorong dan mendukung Kerjasama efektif antara	2. Program Penelitian dan Pengembangan		
			13. Kawasan perlindungan						

14/10/19



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)			pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang dipupuk dari pengalaman dan strategi dalam bekerjasama.			Parapihak
			14. Kawasan pelestarian alam (KPA)			5. Target TPB 17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan terhadap pengembangan kapasitas negara-negara berkembang untuk meningkatkan ketersediaan Data yang			Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019
			15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan.						Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai
			16. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan						

14 Ya



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,			Berkualitas, Tepat Waktu Dan Dapat Diandalkan yang terpisahkan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, etnis, status kependudukan, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks negara.			Permendagri No.90/2019
			17. Perwujudan kawasan tanaman pangan.			6. Target TPB 17.19. Pada tahun 2030, mengembangk			Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019
			18. Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.						Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan

14/10/2019





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			19. Perwujudan kawasan peternakan.			an gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung Pengembangan Kapasitas Statistik di negara-negara berkembang.			sesuai Permendagri No.90/2019 dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak
			20. Perwujudan kawasan perkebunan.						
			21. Perwujudan Kawasan perikanan.						
			22. Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.						
			23. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.			Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for			

14/1/19 k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			24. Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.			Development • Habitat III.			
			25. Perwujudan Kawasan Pariwisata.						
			26. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.						
			27. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.						

14/10/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			28. Perwujudan Kawasan Pesisir.						
			29. Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.						
			30. Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.						
			31. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.						
			32. Perwujudan Kawasan						

14/10/19





No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			Strategis Provinsi.						
			33. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.						
			34. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.						
			35. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.						

f & y a w



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			36. Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.						
			37. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.						
			38. Perwujudan kawasan strategis						

ty ya k



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwt.						
			39. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.						
			40. Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan						

14/09/20



No	Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas	Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023	Program RTRWK Tahun 2019-2039	TPB Desa Dan Indikator Pentingnya	TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT)			OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran	
					TPB	Target TPB Prioritas	Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya	Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung	Bentuk Fasilitas/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
			pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.						

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

7 9 19 12



C. Pengaruh Skenario Pembangunan terhadap Enam Muatan KLHS

Hasil simulasi skenarionya untuk Muatan KLHS I (Kapasitas DDDTLH), Muatan KLHS II (Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup), dan Muatan KLHS III (Kinerja Layanan Ekosistem), secara jelas disajikan pada Tabel 4.14 dan hasil simulasi skenarionya untuk Muatan KLHS IV (Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam), Muatan KLHS V (Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim), dan Muatan KLHS VI (Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati) dan keseluruhannya, secara jelas disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.13  
Jasa Ekosistem, Luasan (Sedang-Sangat Tinggi) dan Persentasenya  
sebagai Proxy untuk Evaluasi Enam Muatan KLHS

No	Jasa Ekosistem	Luas Wilayah Dari Level Sedang-Sangat Tinggi (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)	Proxy Untuk Kajian Pengaruh KRP Terhadap Enam Muatan KLHS
1.	R21: Pengaturan Air dan Mencegah Kekeringan	2.025.585,10	99,23	I
2.	R6: Pemeliharaan Kualitas Udara	1.976.241,16	96,81	I
3.	R22: Pengaturan Pengendalian Banjir	2.025.391,84	99,22	II
4.	R32: Pengaturan Pengendalian Longsor	1.963.691,60	96,20	II
6.	P11: Penyediaan Budidaya Pangan, Sayuran dan Buah-buahan	2.040.275,75	99,95	III
7.	R4: Pengaturan Pemurnian Air	1.835.662,53	89,93	III
8.	P2: Penyediaan Air Bersih	1.986.010,53	97,29	III
9.	R52: Pengaturan Pengolahan Limbah	1.462.626,34	71,65	III
10.	C11: Budaya Tempat Tinggal	1.221.047,49	59,82	III
11.	C12: Budaya Tempat Budidaya	586.948,39	28,75	III
12.	S1: Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	1.214.760,95	59,51	IV
13.	S2: Siklus Hara	1.114.554,99	54,60	IV
14.	S3: Pendukung Produksi Primer	542.156,62	26,56	IV
15.	R11: Pengaturan Iklim Global	1.986.241,49	97,30	V
16.	R12: Pengaturan Iklim Regional dan Lokal	1.976.134,60	96,81	V
17.	S4: Pendukung Biodiversitas	1.334.163,83	65,63	VI
18.	S51: Pendukung Habitat Perkembangbiakan Flora	1.919.268,44	94,02	VI
19.	S52: Pendukung Habitat Perkembangbiakan Fauna	1.685.916,52	82,59	VI
20.	Komposit P: Komposit Penyediaan	2.037.223,43	99,80	
21.	Komposit R: Komposit Pengaturan	1.717.092,97	84,12	
22.	Komposit C: Komposit Budaya	466.148,65	22,84	
23.	Komposit S: Komposit Pendukung	254.509,09	12,47	
24.	Komposit PRCS: Komposit Keseluruhan	2.025.654,41	99,23	

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

xf49





**1. Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan I KLHS (Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) KLHS.**

Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap Enam Muatan KLHS I, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB Gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS I sebesar 79,45 dan pada tahun 2030 sebesar 81,75.

**2. Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan II KLHS (Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup) KLHS**

Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap Enam Muatan KLHS II, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS II sebesar 79,44 dan pada tahun 2030 sebesar 81,73.

**3. Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan III KLHS (Kinerja layanan Ekosistem) KLHS**

Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap Enam Muatan KLHS III, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS III sebesar 83,79 dan pada tahun 2030 sebesar 85,17.

**4. Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan IV KLHS (Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam)**

Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap enam muatan KLHS IV, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi enam muatan KLHS IV sebesar 73,00 dan pada tahun 2030 sebesar 73,59.

**5. Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan V KLHS (Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim)**

Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030 Sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap enam muatan KLHS V, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS V sebesar 94,42 dan pada tahun 2030 sebesar 96,69.

Keberadaan Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Program Kampung Iklim dan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/457/2020 tentang Tata cara Pengusulan dan Pengembangan Program

9 x 4





Kampung Iklim memberikan peluang besar dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat menghadapi perubahan iklim (Mitigasi dan adaptasinya) yang sesuai dengan Muatan V KLHS (Tingkat kerentanan dan kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim). Peraturan Gubernur tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi ProKlim. Sedangkan tujuannya adalah untuk: mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat local. Sedangkan Surat Keputusan Gubernur, berisi Tata Cara Pengusulan dan Pengembangan ProKlim sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mendukung dalam memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan ProKlim.

#### **6. Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan VI KLHS (Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati)**

Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030 Sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap enam muatan VI KLHS, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS VI sebesar 81,95 dan pada tahun 2030 sebesar 90,09.

#### **7. Pengaruh skenario pembangunan (KRP) terhadap Keenam (Gabungan) Muatan KLHS**

Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030 Sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap keseluruhan/gabungan dari keenam muatan KLHS, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS Gambungannya sebesar 82,01 dan pada tahun 2030 sebesar 84,84.

Dari hasil konsultasi public yang dilaksanakan pada KP II (10 Mei 2021), pengaruh KRP terhadap Enam Muatan KLHS, secara ringkas disajikan pada Tabel VI-7. Hasil penilaian tersebut agak sedikit berbeda dengan kajian kuantitatif yang dilakukan secara spasial dan dengan system dinamis. Akan tetapi, penilaian tersebut dapat menjadi warning bagi pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijaksana dalam mencapai TPB.

92/14



Tabel 4.14

Pengaruh KRP terhadap Enam Muatan KLHS berdasarkan Penilaian Masyarakat

NO.	ENAM MUATAN KLHS	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN JASA EKOSISTEM	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KRP TERKAIT PENCAPAIAN TPB TERHADAP 6 (ENAM) MUATAN KLHS					
			TPB 1. TANPA KEMISKINAN	TPB 2. TANPA KELAPARAN	TPB 3. KEHIDUPAN SEHAT & SEJAHTERA	TPB 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	TPB 5. KESETARAAN GENDER	TPB 6. AIR BERSIH & SANITASI LAYAK
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	a. Pengaturan dan tata aliran air dan Banjir (R2)	-47.17	-42.86	-41.86	-35.29	0.00	-15.13
		b. Pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6)	-17.92	-7.45	-10.00	-10.00	0.00	0.00
2	Dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup	a. Pengaturan perlindungan dari bencana (R3)	-38.68	-33.67	-35.19	-37.25	0.00	0.00
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	a. Penyediaan pangan (P1)	-64.15	-66.07	-65.79	-69.44	0.00	-10.32
		b. Penyediaan air bersih (P2)	-65.09	-64.42	-64.71	-63.46	0.00	-22.54
		c. Tempat tinggal dan ruang hidup (C1)	-61.32	-52.33	-52.22	-45.19	-0.94	-13.93
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	a. Penyediaan sumber daya genetic (P5)	-22.64	-21.15	-22.73	-25.51	0.00	0.00
		b. Pendukung produksi primer (D3)	-26.42	-25.00	-24.51	-25.00	0.00	0.00
5	Tingkat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	a. Pengaturan iklim (R1)	-19.81	-13.27	-16.67	-16.98	0.00	0.00
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	a. Kekaragaman hayati/Biodiversitas (D4)	-28.30	-22.00	-22.00	-21.57	0.00	0.00

14/10/2021





Lanjutan...

NO.	ENAM MUATAN KLHS	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN JASA EKOSISTEM	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KRP TERKAIT PENCAPAIAN TPB TERHADAP 6 (ENAM) MUATAN KLHS				
			TPB 7. ENERGI BERSIH & TERJANGKAU	TPB 8. PEKERJAAN LAYAK & PERTUMBUHAN EKONOMI	TPB 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	TPB 10. BERKURANGNYA KESEKIANJARAN	TPB 11. KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN
7	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	a. Pengaturan dan tata aliran air dan Banjir (R2)	-20.88	-23.75	-50.94	-33.33	-27.59
		b. Pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6)	0.00	0.00	-34.91	-26.60	-17.65
2	Dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup	a. Pengaturan perlindungan dari bencana (R3)	-6.94	-6.58	-46.23	-38.04	-32.81
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	a. Penyediaan pangan (P1)	-14.29	-15.63	-26.42	-26.42	-27.27
		b. Penyediaan air bersih (P2)	-25.32	-26.67	-37.74	-34.00	-30.49
		c. Tempat tinggal dan ruang hidup (C1)	-20.27	-22.39	-29.25	-27.88	-27.45
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	a. Penyediaan sumber daya genetic (P5)	0.00	0.00	-27.36	-21.43	-14.10
		b. Pendukung produksi primer (D3)	0.00	0.00	-27.36	-21.43	-17.44
5	Tingkat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	a. Pengaturan iklim (R1)	-1.35	-1.32	-25.47	-17.71	-4.41
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	a. Keanekaragaman hayati/Biodiversitas (D4)	-2.21	-2.21	-16.04	-11.00	0.00

14/1/20





Lanjutan...

NO.	ENAM MUATAN KLHS	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN JASA EKOSISTEM	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KRP TERKAIT PENCAPAIAN TPB TERHADAP 6 (ENAM) MUATAN KLHS				
			TPB 12. KONSUMSI & PRODUKSI BERKELANJUTAN	TPB 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	TPB 15. EKOSISTEM DARATAN	TPB 16. PERDAMAIAN, KEADILAN & KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	TPB 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	a. Pengaturan dan tata aliran air dan Banjir (R2)	-20.51	-44.34	-49.14	-49.15	-51.79
		b. Pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6)	-17.65	-54.72	-48.94	-49.06	-50.98
2	Dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup	a. Pengaturan perlindungan dari bencana (R3)	-28.38	-44.34	-44.34	-44.74	-48.11
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	a. Penyediaan pangan (P1)	-31.25	-31.13	-32.41	-32.73	-33.96
		b. Penyediaan air bersih (P2)	-27.17	-40.57	-40.57	-41.38	-45.28
		c. Tempat tinggal dan ruang hidup (C1)	-29.17	-27.36	-33.62	-34.92	-40.00
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	a. Penyediaan sumber daya genetic (P5)	-13.10	-18.87	-20.37	-24.60	-27.68
		b. Pendukung produksi primer (D3)	-17.05	-20.75	-20.75	-24.59	-27.78
5	Tingkat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	a. Pengaturan iklim (R1)	-4.41	-56.60	-50.00	-50.00	-44.34
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	a. Kekaragaman hayati/Biodiversitas (D4)	0.00	-41.51	-39.22	-40.68	-44.44

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

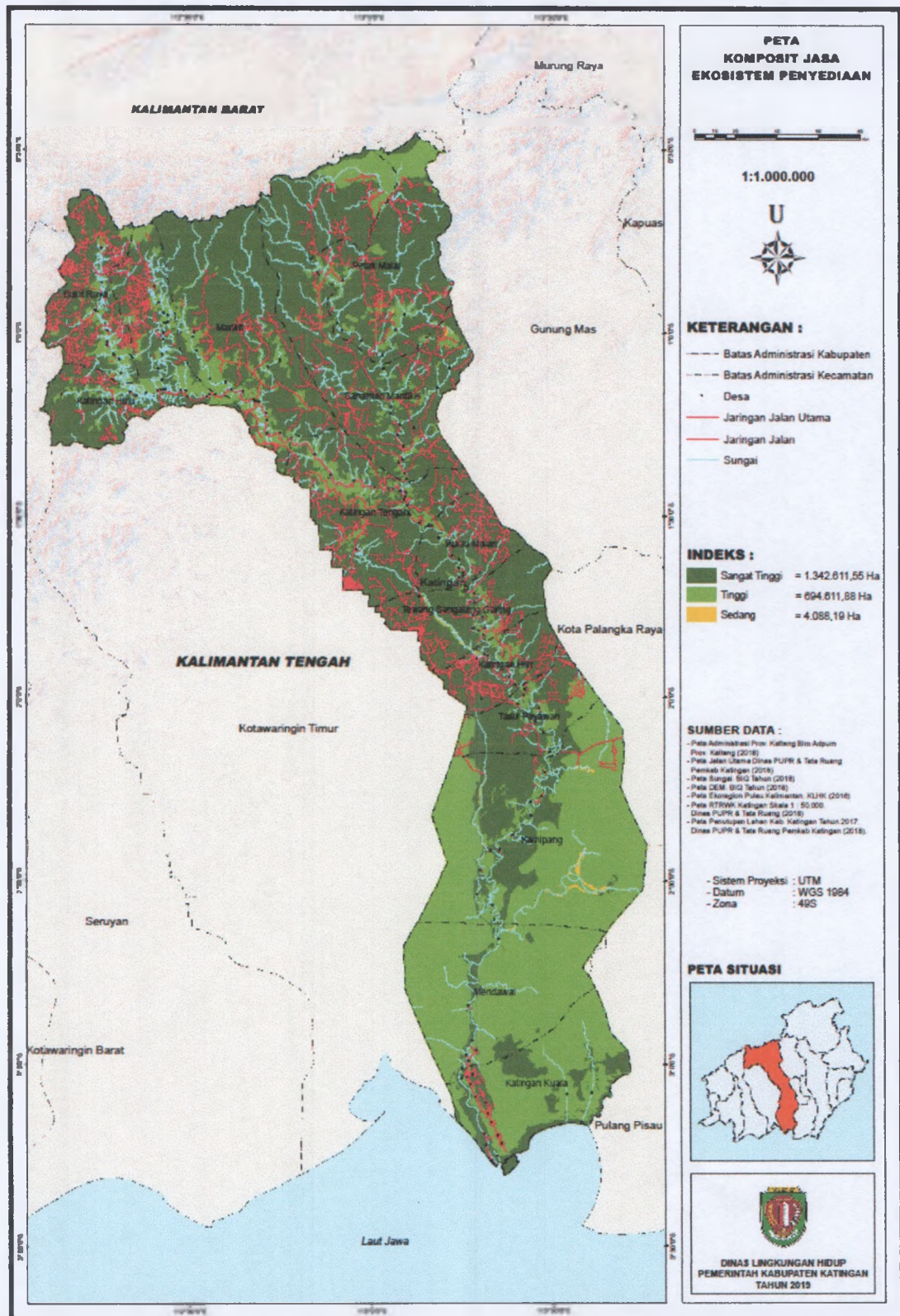
Keterangan: Tanda minus mengindikasikan pengurangan.

119





**Gambar 4.1 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P)**



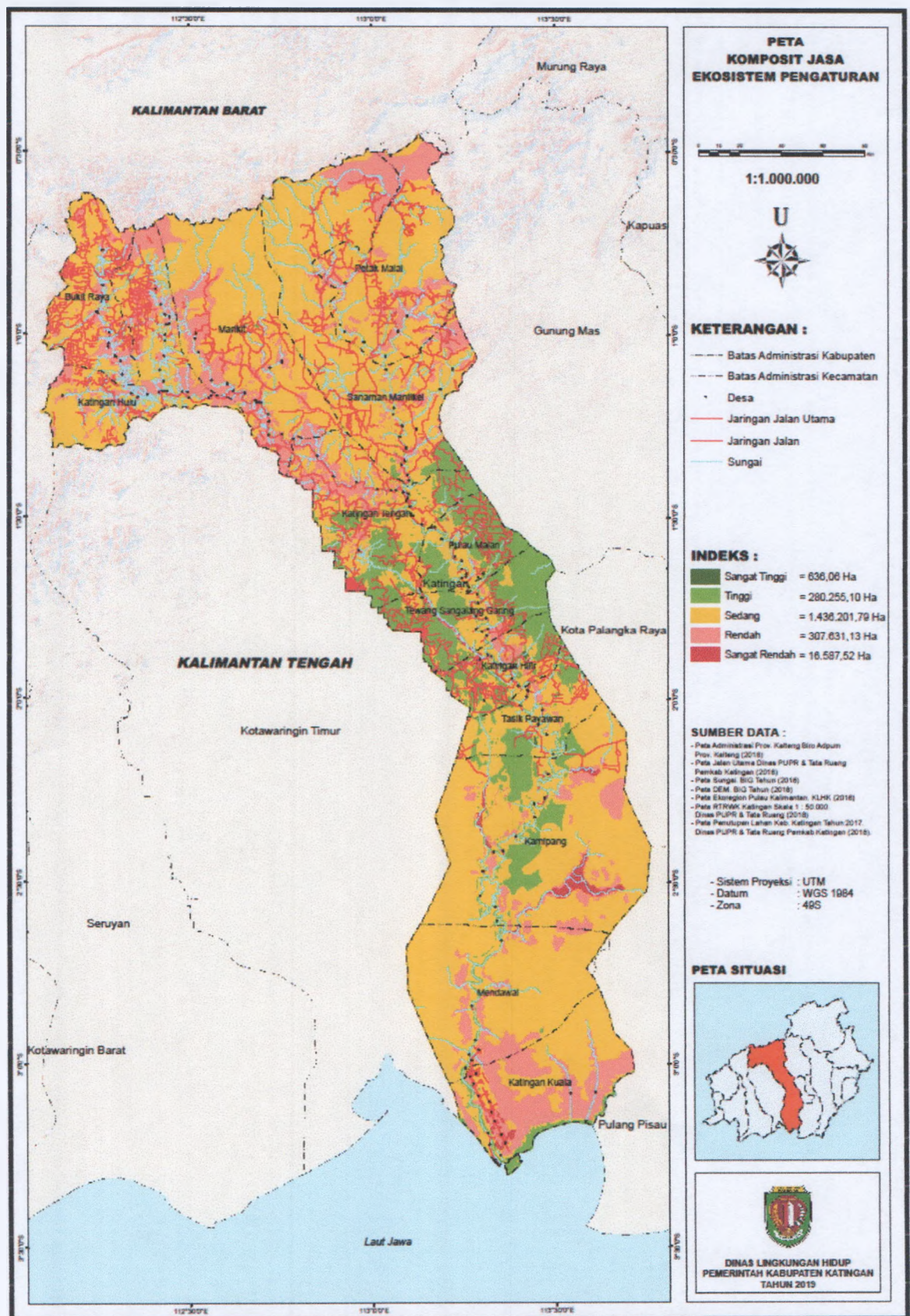
Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

9/14





Gambar 4.2 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Pengaturan (R)



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023



**PETA  
KOMPOSIT JASA  
EKOSISTEM BUDAYA**

1:1.000.000

**KETERANGAN :**

- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- \* Desa
- Jaringan Jalan Utama
- Jaringan Jalan
- Sungai

**INDEKS :**

Sangat Tinggi	= 1.184,06 Ha
Tinggi	= 175.647,01 Ha
Sedang	= 280.316,67 Ha
Rendah	= 1.490.035,28 Ha
Sangat Rendah	= 115.527,60 Ha

**SUMBER DATA :**

- Peta Administrasi Prov. Kalteng Bina Adaptasi Prov. Kalteng (2013)
- Peta Jalan Utama Dinas PUPR & Tata Ruang Provinsi Kalteng (2013)
- Peta Sungai B-0 Tahun (2010)
- Peta DEM B-0 Tahun (2010)
- Peta Sebaran Pohon Kalimantan K2-HK (2010)
- Peta ITSM Kalteng Skala 1 : 50.000
- Dinas PUPR & Tata Ruang (2010)
- Peta Pemukiman Lahan RSH Kalteng Tahun 2012
- Dinas PUPR & Tata Ruang Provinsi Kalteng (2013)

**Sistem Proyeksi :** UTM  
**Datum :** WGS 1984  
**Zona :** 40S

**PETA SITUASI**

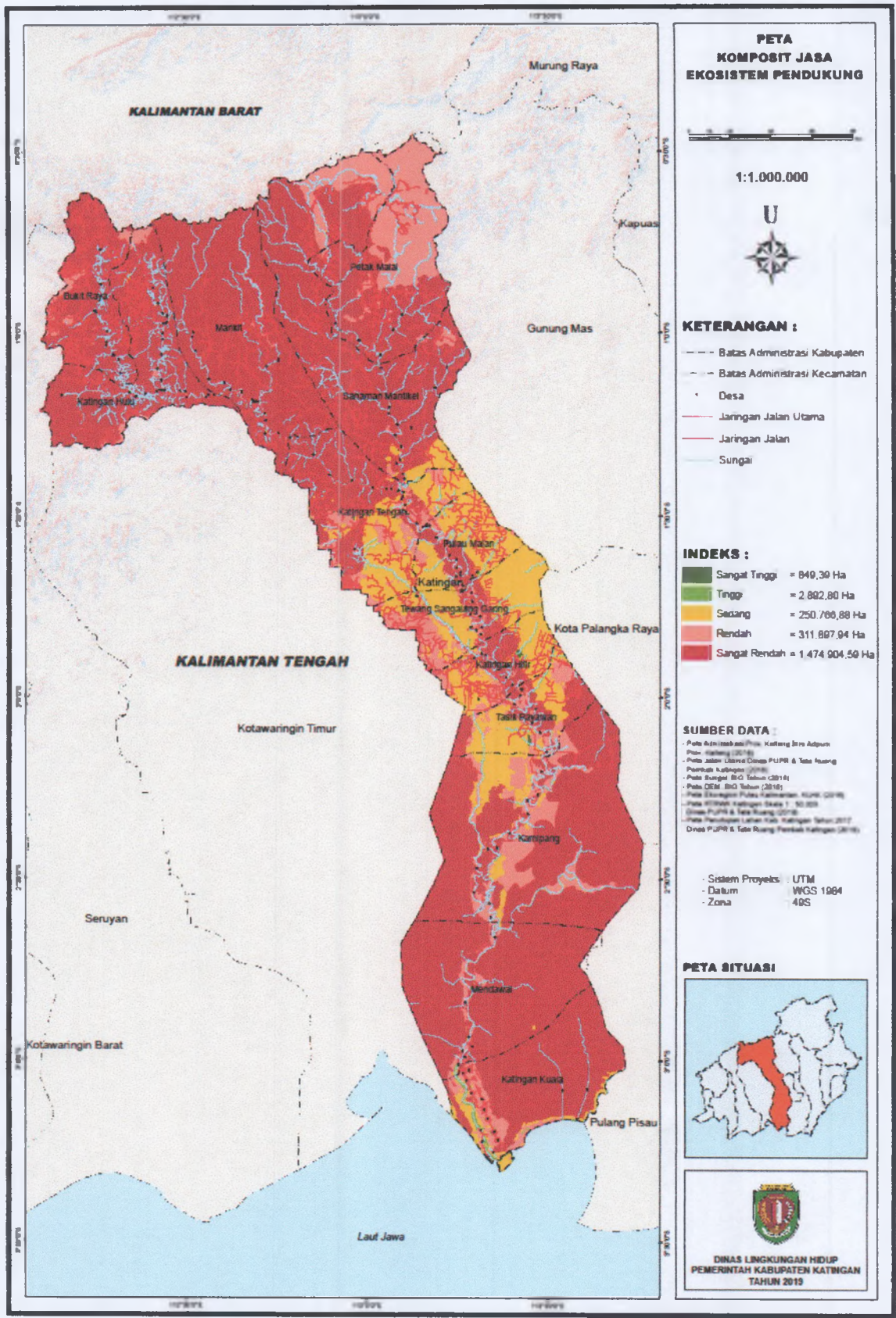
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2013**

9 y + 4





Gambar 4.4 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Pendukung (S).



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023

A 214



4.2.4.4. Telaah RPJMD Daerah Lain

Proses perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan selain memperhatikan berbagai dokumen atau isu yang telah dibahas diatas, juga memperhatikan RPJMD daerah lain di sekitar Kabupaten Katingan. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya.

Identifikasi RPJMD daerah lain dilakukan terhadap kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Katingan, meliputi: Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Telaahan ini disajikan pada tabel dibawah.

**Tabel 4.15**  
**Identifikasi RPJMD Daerah Lain**  
**Yang Berdekatan Dengan Kabupaten Katingan**

No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Visi: "Kabupaten Melawi Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru" Misi: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan 2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.	1. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat 2. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat	Sektor transportasi dan perhubungan Rencana pembangunan jalan lintas Provinsi yang melewati Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan dan Kecamatan Nangan Pingoh Kabupaten Melawi, akan membuka keteisoliran wilayah-wilayah Selayan Katingan. Untuk itu percepatan pembangunan Jembatan di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah akan mendorong dan mendukung perwujudan rencana ini. Selain itu, masyarakat di kedua daerah khususnya masyakat Katingan bisa memanfaatkan fasilitas angkutan darat dan transportasi udara melalui Kabupaten Melawi sebagai alternatif baru untuk kebutuhan transportasi serta





No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
				kebutuhan bahan pangan, sandang dan papan. Secara geografis, Kabupaten Melawi yang berbatasan dengan wilayah Katingan sama-sama memiliki kawasan hutan yang kaya akan potensi flora dan faunan endemik. Kawasan yang saat ini bersama-sama dikelola kedua daerah adalah Tanaman Nasional Bukit Raya Bukit Baka. Dengan terbuka akses jalan antar Kabupaten, maka secara bersama-sama kedua daerah bisa mengembangkan potensi wisata berbasis alam pada wilayah konservasi. Selain berdampak secara ekonomis bagi masyarakat sekitar, dengan tetap terpeliharanya daerah hutan ini maka kawasan untuk daerah resapan air tetap terjaga dan mencegah bencana alam akibat banjir dan kerusakan lingkungan.
2	Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021" Misi: 1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal. 2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 2. Mempertahankan kawasan hutan seluas minimal 30% dari luas Kabupaten Sintang sesuai dengan RTRW daerah.	Terkait dengan komitmen untuk melestarikan kawasan strategis untuk pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus mendukung Kalimantan sebagai pusat paru-paru dunia ( <i>Heart of Borneo</i> ), Kabupaten Sintang dan Kabupaten Katingan bersama-sama pula dengan Kabupaten Melawi memiliki kawasan konservasi di TN.Bukit Baka Bukit Raya. Dengan terjaganya kelestarian hutan di kawasan ini, diharapkan kedua daerah sama-sama dapat menanggulangi permasalahan lingkungan berupa dampak bencana alam banjir dan

19 X 14 k



No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
		<div>3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.</div> <div>4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.</div> <div>5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</div> <div>6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</div>		terpeliharanya kawasan penyangga resapan air dikedua perbatasan kabupaten. Selain itu, desa-desa konservasi di daerah ini dapat dikembangkan sebagai kawasan desa wisata TN Bukit Baka-Bukit Raya yang terletak di Kecamatan Serawak-Sintang dan Kecamatan Bukit Raya-Katingan.
3	Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 219-2024	<div>Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)".</div> <div>Misi:</div> <div>1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proporsional;</div> <div>2. Meningkatkan kualitas pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM);</div> <div>3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah;</div> <div>4. Mempercepat Reformasi Birokrasi;</div> <div>5. Penegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement);</div>		

91/14

h



No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
		<p>6. Mengembangkan nilai – nilai budaya dan Kearifan Lokal;</p> <p>7. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>); dan</p> <p>8. Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat dalam Rangka NKRI.</p>		
4	Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 2016-2021	<p>Visi: “terwujudnya Kabupaten Kotim yang mandiri, maju dan sejahtera,”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan</li> <li>2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa</li> <li>3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja</li> <li>4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berwibawa (<i>good governance</i>)</li> <li>5. Mewujudkan Kabupaten Kotim yang nyaman Lestari dan berbudaya</li> </ol>		
5	Kota Palangkaraya-Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 2018-2023	<p>Visi: “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart</li> </ol>	<p>Dalam mewujudkan misi, diterapkan beberapa strategi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah</li> <li>2. Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi,</li> </ol>	

A 514 k





No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
		Environment (Lingkungan Cerdas) 2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) 3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas)	Keamanan, dan Pelayanan Publik Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	
6	Kabupaten Pulang Pisau- Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 2019-2023	Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera". Misi: 1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasara Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman. 2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan. 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan. 6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional ( <i>Good and Clean Governance</i> ). 7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan		
7	Kabupaten Seruyan- Kalimantan	Visi: "Mewujudkan Kabupaten Seruyan SEHAT (Sejahtera, Elok,		

9 574



No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
	Tengah, RPJMD Tahun 2018-2023	<p>Harmonis, Aman dan Tentram)".</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional;</li> <li>2. Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal;</li> <li>3. Memeberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat;</li> <li>4. Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada Ekonomi kerakyatan, mulai dari indutstri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan koperasi;</li> <li>5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;</li> <li>6. Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai pintu gerbang perekonomian Kabupaten Seruyan;</li> <li>7. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pertambangan energi;</li> <li>8. Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya;</li> <li>9. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja;</li> </ol>		

9/14





No	Daerah Lain	Visi dan Misi	Kebijakan Terkait	Keterangan
		10. Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI.		

Sumber: website pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota.

4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Katingan

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan untuk periode 2018-2023 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal. Aspek-aspek tersebut telah diwakili oleh analisis terhadap permasalahan pembangunan di Katingan, analisis lingkungan hidup strategis, dinamika isu dan/atau kebijakan yang berkembang di lingkungan internasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Katingan sebagaimana diuraikan diatas. Hasil telaahan tersebut menghasilkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, profesional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan refomasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan *good governance*. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Diharapkan melalui peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi serta berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan maupun pelayanan publik di Katingan.

2. Penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak lama dengan berbagai pendekatan dan

9 y f 4





strategi. Dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterpaduan dan dilakukan secara terus-menerus.

**3. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja.**

Di dalam upaya mengurangi angka pengangguran diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain dengan mendirikan pusat latihan kerja, pelatihan keterampilan, *workshop* hingga memberikan bantuan peralatan produktif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja dan tenaga kerja terampil, inisiatif dan kreatif.

**4. Pengembangan desa.**

Pengembangan desa melalui pembangunan pedesaan dilakukan melalui pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana desa dan pengawasannya. Pengembangan melalui pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mengubah pola pikir serta sikap mental masyarakat. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing.

**5. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.**

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan Pendidikan di Kabupaten

9 214





Katingan tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain; pemerataan dan perluasan akses layanan Pendidikan; peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus; peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang memenuhi standar dan perbaikan tata kelola Pendidikan.

**6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.**

Pembangunan dimensi Kesehatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan tujuan pembangunan kesehatan. Saat ini, Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat PTM seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain (Hasil Riskesdas Tahun 2018). Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini, PTM menjadikan resiko tinggi terinfeksi jika dihubungkan dengan COVID-19 ini. Selain itu, Pemerintah harus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita dan pelaksanaan GERMAS.

**7. Pengarusutamaan gender.**

Konsep pengarusutamaan gender merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Pengarusutamaan gender, merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

**8. Pengembangan potensi pertanian untuk penguatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan.**

Potensi pertanian di Kabupaten Katingan masih tinggi, hal ini terlihat dari besaran dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Katingan masih tinggi, selain itu produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan,

9/19/23





peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap sumber alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang.

**9. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur.**

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar wilayah yang baik ditunjukkan dari jalan maupun akses transportasi yang dimiliki, sehingga makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dorong yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

**10. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.**

Pembangunan daerah tidak terlepas dari aktivitas untuk mengisi atau memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan seringkali menemui masalah kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan lingkungan hidup ataupun sosial budaya. Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam

9/2/19





pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam perlu terus dipelihara dan dimanfaatkan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan penyempurnaan atas pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Katingan. Selain itu, pemanfaatan dan pendayagunaan SDA diharapkan dapat dilakukan dengan mengacu kepada hasil pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan. Bila ditemui adanya kesalahan pengelolaan oleh pemegang izin, maka pemerintah daerah harus segera mengambil Tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal lain yang penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah penerapan pembangunan rendah emisi.

Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Katingan adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan yang rawan terjadi di sejumlah wilayah penting disebarluaskan. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diharapkan dapat dilakukan secara bersamaan dan bersinergi untuk pembangunan jangka menengah kedepan.

#### **11. Pengembangan potensi pariwisata berbasis alam.**

Struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun sektor industri pengolahan masih sangat lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Katingan, namun belum optimal dikembangkan adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah, baik secara pendanaan, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam harus lebih

9 x 79 k



ditingkatkan melalui dukungan dalam pengembangan ekonomi kreatif kepariwisataan yang fokus bertemakan alam atau berbasis alam.

Peningkatan daya saing pariwisata perlu dilakukan dengan strategi yang tepat baik dari aspek pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menghidupkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya pengembangan kepariwisataan dalam sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi Kabupaten Katingan harus bertransformasi dari ketergantungan kepada sektor eksploitasi SDA menjadi pengembangan jasa sektor Pariwisata yang berbasis alam.

**12. Pelestarian dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya serta nilai kebangsaan.**

Sosial dan budaya adalah suatu unsur terkecil dalam tatanan hidup bersama. Dalam tatanan hidup bersama sosial dan budaya berkaitan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Menyimpangnya nilai-nilai agama dan Pancasila dalam sosial budaya masa kini mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang mengusik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemahaman dan kesadaran akan sosial dan budaya yang berpancasila diharapkan dapat dikembangkan kembali. Dengan memperbaiki sosial dan budaya berarti memperbaiki juga kualitas SDM dari akar-akarnya. Dengan begitu sosial dan budaya mampu mendorong kesejahteraan dan kedamaian dalam tatanan hidup bersama yang penuh dengan rasa aman yang mendorong perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah diperlukan stabilitas dan wilayah yang kondusif sehingga tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

9/1/24





## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

#### 5.1. VISI

Pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahap ketiga. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJPD dan sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023, maka disusun visi pembangunan Kabupaten Katingan 2018-2023. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan 2018-2023, adalah:

#### **KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA**

Pernyataan Katingan BERMARTABAT memiliki makna:

- BERBUDAYA: masyarakat Katingan memiliki akal budi yang luhur sehingga mampu menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.
- MAJU: Katingan mampu meningkatkan dan mewujudkan capaian pembangunan dengan menyeimbangkan pembangunan fisik maupun non fisik, menyambut tantangan dan peluang untuk bersaing bersama daerah lainnya.
- RELIGIUS: masyarakat Katingan taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta penuh toleransi dan hidup rukun, berdampingan dengan pemeluk agama lain.
- TERINTEGRASI: pembangunan dilakukan dengan melihat seluruh aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama membangun Katingan kedepan.
- BEKESINAMBUNGAN: pembangunan dilaksanakan dengan berpijak pada capaian pembangunan saat ini dan bergerak maju dengan mengerahkan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- AMAN: Kabupaten Katingan selalu dalam kondisi yang kondusif dan aman.
- TERBUKA: Katingan memiliki akses transportasi, komunikasi dan informasi yang baik dan lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "Sejahtera" adalah pembangunan dilaksanakan secara inklusif yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing didukung oleh kondisi wilayah yang aman dan tenteram.

Handwritten signature and date: 2/4





## 5.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, yaitu:

### **Misi 1: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum**

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan dilaksanakan dengan prinsip bersih, berwibawa dan inovatif. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk berkinerja, profesional, menerapkan *good governance* serta meningkatkan pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya sebatas rutin, namun didorong untuk selalu melakukan terobosan baru atau inovasi yang mengarah ke peningkatan kreatifitas dan semangat kerja, yang pada gilirannya akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Dalam melaksanakan semua itu sinergitas kinerja dan akuntabilitas menjadi hal yang utama, serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, baik dalam pengelolaan pendapatan daerah maupun belanja yang didukung dengan upaya nyata penegakan dan kepatuhan terhadap hukum, baik itu oleh aparat maupun masyarakat Katingan umumnya.

### **Misi 2: Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan**

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memberdayakan potensi unggulan lokal. Sektor pertanian, sebagai penggerak perekonomian utama di Katingan masih menjadi primadona pada periode pembangunan jangka menengah ini. Namun pada periode ini, hasil-hasil atau produk pertanian diarahkan untuk lebih bernilai ekonomi tinggi dan menjadi input bagi sektor industri. Lebih lanjut, pengembangan pertanian diharapkan menunjang ketahanan pangan daerah. Posisi strategis Katingan diharapkan dapat menjadi penopang pangan bagi daerah-daerah sekitarnya.

Upaya peningkatan perekonomian daerah juga ditempuh dengan membuka peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan pihak investor, namun juga melibatkan masyarakat setempat. Berbagai peluang investasi di Katingan ditawarkan ke investor dengan dukungan kebijakan dan pelayanan perijinan yang profesional.

### **Misi 3: Memantapkan pembangunan perdesaan.**

Pembangunan desa dan daerah perdesaan menjadi salah satu agenda dalam pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023. Desa yang memiliki berbagai potensi namun seringkali belum terbangun dengan baik, membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan. Pembinaan dan pemberdayaan tidak hanya terhadap aparat desa, namun juga terhadap masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan ekonomi. Selain itu, desa perlu diberikan pelayanan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Kedepan, diharapkan masyarakat desa dapat lebih berdaya dan memiliki kemampuan untuk berdikari.

9 x 4





**Misi 4: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender.**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan unggul adalah keharusan dalam meraih kemajuan. Untuk menghadapi tantangan global dan dalam mengupayakan pembangunan daerah yang berdaya saing, maka dibutuhkan penyiapan SDM. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang akan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah keharusan. Hal ini dimaksudkan agar secara bertahap, SDM Kabupaten Katingan dapat memiliki kualitas yang unggul dan mampu bersaing dengan daerah sekitarnya serta diharapkan mampu keluar dari garis kemiskinan. Lebih lanjut, SDM yang ada dapat memberikan kontribusi aktif dan positif bagi pembangunan Katingan.

**Misi 5: Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi.**

Pembangunan Kabupaten Katingan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar, antara lain jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi. Dengan pelayanan yang semakin baik dan menjangkau seluruh wilayah, diharapkan membuka keterisolasian, mendorong aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

**Misi 6: Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.**

Kekayaan sumber daya alam dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan posisi strategis Kabupaten Katingan dalam konstelasi Kalimantan Tengah dan dengan mempertimbangkan kondisi lahan gambut yang tersebar di wilayah ini, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Katingan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian dalam arti luas, industri, konstruksi, pariwisata dan sebagainya, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

**Misi 7: Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.**

Kabupaten Katingan merupakan wilayah yang menjunjung nilai budaya falsafah Huma Betang dan Penyang Hinje Simpei. Masyarakat hidup dengan semangat persatuan dan kesatuan, serta saling menghormati keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Katingan, akan terus berupaya melestarikan adat istiadat maupun budaya masyarakat Dayak yang merupakan ciri khas Kabupaten Katingan dengan memupuk semangat gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat di Wilayah Kabupaten Katingan.





### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Guna menjabarkan misi pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan dirinci kedalam sasaran agar memperjelas apa yang akan dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran masing-masing misi pembangunan Kabupaten Katingan pada Perubahan RPJMD ini tidak mengalami perubahan dari RPJMD, hanya terdapat perubahan pada 1 sasaran, semula “Menurunnya pencemaran lingkungan” menjadi “Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”. Adapun keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran beserta indikatornya dijelaskan sebagai berikut:

#### **MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM**

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 1, yaitu: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- c. Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan
- d. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
- e. Meningkatnya penegakan hukum.

#### **MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.**

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 2, yaitu: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan
- b. Meningkatnya ketahanan pangan
- c. Meningkatnya daya saing investasi daerah.
- d. Meningkatnya sektor UMK
- e. Meningkatnya daya saing Koperasi

#### **MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.**

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 3, yaitu: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sasaran dari tujuan tersebut meliputi:

- a. Meningkatnya pembangunan perdesaan
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

#### **MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.**

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 4, yaitu:

1. Meningkatnya daya saing masyarakat

h  
9 2 fy





Sasaran dari tujuan tersebut, meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
  - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.
  - c. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.
- Sasaran dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya pengarusutamaan gender.

**MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI**

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 5 adalah Meningkatnya konektivitas antar wilayah. Sasaran dari tujuan tersebut yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga
- b. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak
- c. Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi

**MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN**

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 6, yaitu: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Menurunnya pencemaran lingkungan. Sasaran ini diubah menjadi Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan pertimbangan lebih mendukung pencapaian tujuan.
- b. Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam.

**MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA.**

Tujuan yang ingin dicapai dari misi 7 adalah Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- a. Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat.
- b. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Penentuan target indikator tujuan maupun sasaran pada perubahan RPJMD merupakan hasil analisis dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sampai saat ini dan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia. Target yang akan dicapai sampai dengan 2023 mempertimbangkan kemampuan daerah dan kondisi eksternal dengan asumsi dampak pandemi masih akan dirasakan sampai dengan tahun 2022, yang dibarengi dengan upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Handwritten signature and date: 19/1/24

Tabel 5.1  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023

RPJMD Tahun 2018-2023										Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023					
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Target			Kondisi Akhir			
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023				
Misi I: Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif Serta Mewujudkan Supremasi Hukum															
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks RB	n/a	C	C			BB		CC	B	BB	BB	
		1.1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Indeks RB	n/a	C	C	B	BB	BB		CC	B	BB	BB
		1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP (predikat)	CC	CC	CC	BB	BB	A		B	BB	A	A
		1.3	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD (predikat)	WDP (2017)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP
		1.4	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	74,52 (Baik) (2016)	77,09/(B)	78,33/(B)	79,32 /(B)	80,57 /(B)	81,83 /(A)		B	B	A	A
		1.5	Meningkatnya penegakan hukum	Persentase penegakan Perda (%)	100	92,42	48	100	100	100		100	100	100	100
Misi II: Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Kemandirian Pangan															
2	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan		Laju pertumbuhan ekonomi (%)	6,59	5,81	-3,25			6,96		4,29	5,01	6,03	6,03	
		2.1	Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan	1	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.)	1.947,70	2.126,50	2.232,40	2128,8	2360,7	2492,6	2288,21	2345,415	2404,051	2404,051

Handwritten signature and initials: "W" and "29 x 14"



RPJMD Tahun 2018-2023										Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			
Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Target			Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
			2 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.)	1.340,50	1.437,10	1.405,60	1402,4	1465,9	1509,5	1433,712	1462,386	1491,634	1491,634
	2.2	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	84,4	78,9	81,6	86	86,5	87	82	84	85	85
	2.3	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Laju Investasi (PMA dan PMDN) (%)	10	10,7	12	11,5	12	12,5	11,5	12	12,5	12,5
	2.4	Meningkatnya Sektor UMK	1 Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (%)	-	2,16		1,21	1,22	1,23	2,16	2,17	2,18	2,18
			2 Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba (unit)	1.502	1.559	1.605	1.592	1.622	1.652	1605	1613	1667	1667
	2.5	Meningkatnya daya saing Koperasi	Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh laba) (%)	40	42,78	44	46	48	50	43	45	47	47
Misi III: Memantapkan Pembangunan Perdesaan													
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan		Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65	95	91			35	90	88	86	86
		3.1	1 Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65	95	91	47	41	35	90	88	86	86
			2 Jumlah Desa Berkembang (desa)	12	37	51	18	20	22	54	56	58	58

h  
a x / y





RPJMD Tahun 2018-2023											Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023				
Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Target			Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
		3.2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa		Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif. (unit)	140	143	150	149	152	154	150	152	154	154
Misi IV: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Kesenjangan Gender															
4	Meningkatnya daya saing masyarakat				Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	67,91	68,55	68,68			70,75	68,72	68,90	69,00	69,00
		4.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,65	8,66	8,67	9,06	9,17	9,28	8,95	8,96	8,97	8,97
				2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,21	12,51	12,67	13,12	13,36	13,61	12,89	13,13	13,38	13,38
		4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas		Angka Harapan Hidup (tahun)	66	66,5	66,5	66,85	67,18	67,52	66,5	66,58	66,66	66,66
		4.3	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1	Persentase penduduk miskin (%)	5,22	5,02	4,79	5,58	5,53	5,48	5,30	5,19	4,95	4,95
				2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat penanganan (%)	43,84	45,32	52	54,68	60,1	66,01	74,00	76,96	80,81	80,81
				3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,78	5,45	5,69	3,66	3,6	3,54	5,50	5,40	5,30	5,30

Handwritten signature and date: 19/1/4



RPJMD Tahun 2018-2023										Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023						
Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Target			Kondisi Akhir		
						2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
5	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan				1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	85,7	85,57	85,56			86,03	85,72	85,81	86,03	86,03
					2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,32	66,57	66,41			65,19	67,09	67,16	67,22	67,22
	5.1	Meningkatnya pengarusutamaan gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	85,7	85,57	85,56	85,72	85,88	86,03	85,72	85,81	86,03	86,03		
			2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,32	66,57	66,41	64,09	64,64	65,19	67,09	67,16	67,22	67,22		
Misi V: Peningkatan Infrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih, dan Komunikasi																
6	Meningkatnya konektivitas antar wilayah		6.1	Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga		Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%)	69	69	77			92,3	85	85	85	85
					1	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	33,42	30,47	30,57	38,72	39,83	40,34	38,72	40,07	41,47	41,47
					2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	54,55	56,96	55,70	64,56	68,75	72,84	64,56	68,75	72,84	72,84
					3	Persentase dermaga dalam kondisi baik (%)	69,77	91,43	69,77	84,78	89,36	93,75	70,78	79,36	80,75	80,75
	6.2	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak	1	Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak (%)	36	32,82	37,8	46,5	52,5	58,4	46,5	52,5	58,4	58,4		

h  
9 x 4




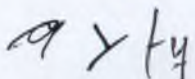


RPJMD Tahun 2018-2023										Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			
Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Target			Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
			2 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	31	16,77	25,47	38,62	41,46	44,33	38,62	39,77	40,96	40,96
	6.3	Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi	Persentase desa yang blankspot (%)	50,31	47,71	41,61	45,34	43,48	42,24	41	40	39	39
Misi VI: Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkesinambungan													
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75	76,17	74,97			76,85	75,55	76,73	76,85	76,85
		7.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Indeks kualitas air	50	50,56	53,33	52	55	55	54	55	55
			2 Indeks kualitas udara	92	89,2	88,26	92	92	92	88,7	89,14	89,59	89,59
			3 Indek tutupan lahan dan hutan	75,1	85,6	86,18	76,8	76,9	77	86,61	87,04	87,48	87,48
		7.2	Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam	1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (kunjungan)	211	26	5	301	331	361	6	8	12
			2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (kunjungan)	32.405	36310	11821	35.769	36.663	37.580	113.050	15.355	19.790	19.790

h  
a x ty



RPJMD Tahun 2018-2023											Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Target			Kondisi Akhir		
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023			
Misi VII: Membangun Semangat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Gotong Royong Serta Harmonisasi Antar Lapisan Masyarakat Dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat, Dan Sosial Budaya														
8	Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)		Jumlah kasus konflik SARA (kasus)	0	0	0			0		0	0	0	0
		8.1	Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	Angka kriminal (kasus)	90	60	82	60	50	40	60	50	40	40
		8.2	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



5.4. PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan terpilih untuk periode 2018-2023 memiliki beberapa program unggulan yang disampaikan pada saat kampanye. Program unggulan akan diwujudkan dalam masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Program-program tersebut secara teknokratik, partisipatif dan *bottom up* dan *top down* akan distrukturkan dalam bab-bab RPJMD sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Tabel 5.2  
Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Katingan  
Tahun 2018-2023

MISI/PROGRAM UNGGULAN
<b>MISI I: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM</b>
1. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Peningkatan disiplin dan kinerja ASN.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ASN.
4. Penataan manajemen dan peningkatan dukungan sistem informasi.
5. Peningkatan kapasitas hukum.
6. Peningkatan kualitas produk hukum.
7. Penataan peraturan perundang-undangan.
<b>MISI II: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>
1. Peningkatan produksi pertanian, mutu, dan pemasaran produksi/komoditas serta pengembangan agribisnis
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
3. Peningkatan investasi dan kemudahan pelayanan perizinan
4. Pengembangan industri, kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
<b>MISI III: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN</b>
1. Peningkatan kapasitas aparaturn Pemerintah Desa.
2. Peningkatan peran perempuan di pedesaan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
<b>MISI IV: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER</b>
1. Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pendidikan Sembilan Tahun.

Handwritten marks: a checkmark and the number 9.





MISI/PROGRAM UNGGULAN	
3.	Peningkatan manajemen pendidikan.
4.	Peningkatan dan peran serta masyarakat.
5.	Pendidikan Non Formal.
6.	Pendidikan Luar Biasa.
7.	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
8.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
9.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
10.	Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
11.	Upaya kesehatan masyarakat.
12.	Perbaikan gizi masyarakat.
13.	Pengembangan lingkungan sehat.
14.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya.
15.	Peningkatan pelayanan Anak Balita.
16.	Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak.
17.	Obat dan perbekalan kesehatan.
18.	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
19.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
20.	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
21.	Pencegahan, penemuan dan penanganan HIV AIDS.
22.	Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
23.	Keluarga Berencana (KB).
24.	Kesehatan reproduksi.
25.	Penguatan kelembagaan pengarusutaaan gender dan anak.
26.	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
27.	Penanggulangan kemiskinan daerah
28.	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
<b>MISI V: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI</b>	
1.	Pembangunan jalan dan jembatan.
2.	Pemberdayaan jasa konstruksi.
3.	Perencanaan tata ruang.
4.	Pengendalian banjir.
5.	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
6.	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
7.	Pembangunan infrastruktur Perdesaan.
8.	Peningkatan dan pemerataan sumber daya energi.
9.	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
10.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
11.	Peningkatan pelayan teknologi informasi.
12.	Peningkatan manajemen sumber daya yang terintegrasi.
13.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi.

*Handwritten notes:*  
h  
a x fy





MISI/PROGRAM UNGGULAN
<b>MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN</b>
1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan.
6. Pengendalian kebakaran hutan.
7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
8. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
9. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan limbah B3.
10. Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
<b>MISI VII: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA</b>
1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
2. Pengembangan promosi dan informasi kebudayaan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.
4. Peningkatan pelaku dan kelembagaan kebudayaan.
5. Peningkatan peran serta kepemudaan
6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
7. Pengembangan wawasan kebangsaan.
8. Penguatan hubungan kelembagaan masyarakat.
9. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ibadah.
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

## 5.5. KESELARASAAN RPJMD DENGAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN, RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN RPJMN

### 5.5.1. Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025

Visi dan misi jangka menengah merupakan penjabaran lima tahunan dalam rangka mencapai target yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang. Misi yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran misi dan arah pembangunan jangka panjang. Visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Katingan adalah:

**“Kabupaten Katingan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera”**

h  
a y ty





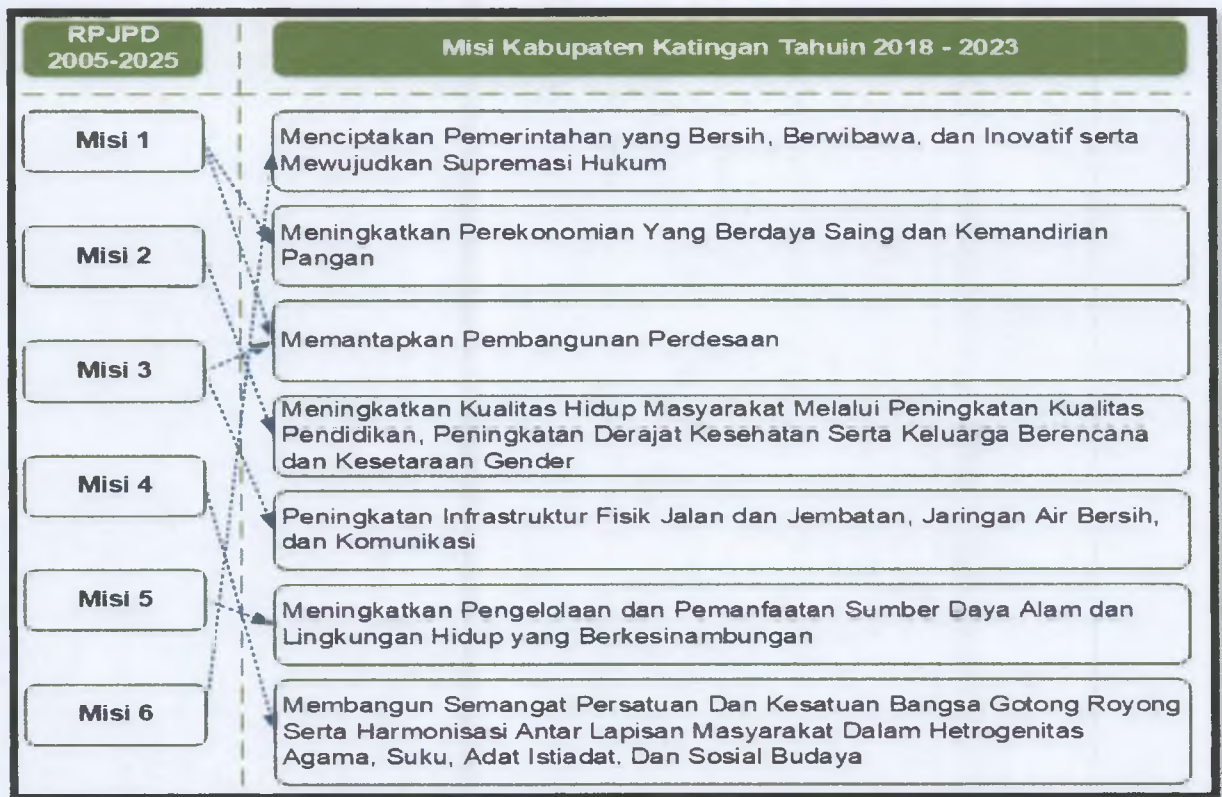
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat. Pembangunan Sumber Daya Manusia disamping meningkatkan kompetensi (*knowledge, skill, attitude*) juga meningkatkan derajat kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan kualitas SDM sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan permukiman, listrik dan air bersih, penerbangan perintis (baik untuk pertahanan/keamanan dan umum/bisnis), akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Katingan.
4. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasuk kemitraan sosial dan kesetiakawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui Penegakkan Hukum, Keamanan dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan.
6. Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih.



Hubungan antara visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 5.1 Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025**



Sumber: hasil analisis, 2021

#### 5.5.2. Keselarasaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Mengingat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan maka yang digunakan sebagai acuan adalah Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang disampaikan pada saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD. Adapun analisis keterkaitan misi antara kedua dokumen tersebut disajikan pada gambar di bawah.





**Gambar 5.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026**



Sumber: hasil analisis, 2021

**5.5.3. Keselarasaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJMN 2020-2024**

Visi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi pembangunan nasional terdiri atas 9 (sembilan), yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Berikut grafis korelasi antara RPJMN dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan.



Gambar 5.3 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024



Sumber: hasil analisis, 2021

h  
a y





## BAB VI

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### 6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, strategi dijabarkan lagi menjadi arah kebijakan yang memberikan gambaran upaya lebih rinci bagi pencapaian sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Katingan selama periode 2018-2023 ditempuh dengan upaya sebagai berikut:

#### **MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM.**

##### **Strategi 1: Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi**

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi*
2. *Meningkatnya akuntabilitas kinerja*
3. *Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan*
4. *Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat*

Memperhatikan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, sasaran perubahan yang ingin dicapai sampai akhir tahun 2023 melalui strategi ini adalah:

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pememerintah Kabupaten Katingan
- Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemkab Katingan yang diukur dari semakin meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja, mempertahankan opini WTP dari BPK, meningkatnya pencapaian dan penerapan SPM, dan optimalisasi penerapan E-Gov/PTSP.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik
- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, maka arah kebijakan daerah yang digunakan pada Strategi 1 ini, yaitu:

1. Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
4. Peningkatan inovasi pelayanan publik.





**Strategi 2: Meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah.**

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: *Meningkatnya penegakan hukum*. Salah satu isu strategis dalam mendukung terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah penegakan hukum dan keharmonisan dalam masyarakat. Adapun kondisi yang diharapkan dapat dicapai melalui penerapan strategi ini adalah semakin mantapnya peran serta masyarakat Katingan dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pengembangan wawasan kebangsaan dan semakin patuhnya masyarakat dan pelaku usaha terhadap penegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Diharapkan pula, strategi ini dapat mendukung pencapaian Misi ke-7, yakni membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya melalui penerapan falsafah Huma Betang dan Penyang Hinje Simpei, khususnya di Kabupaten Katingan

Adapun arah kebijakan yang akan digunakan untuk mewujudkan Strategi 2 ini adalah: Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum.

**MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.**

**Strategi 3: Memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian.**

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan*
2. *Meningkatnya ketahanan pangan.*

Sektor pertanian adalah sektor yang paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan banyak memiliki usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam periode 2018-2023 akan lebih fokus mengembangkan sektor ini sebagai sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Untuk itu dalam lima tahun kedepan selain penguatan ketahanan pangan daerah, pengembangan komoditi unggulan sektor pertanian akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Adapun komoditi pertanian yang akan dikembangkan adalah padi, durian, pisang dan tanaman cabai. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Katingan, sekaligus untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak.

Adapun tujuan lain dari penguatan ekonomi lokal berbasis petanian dimaksudkan mendukung program pembangunan ekonomi hijau di Katingan, termasuk menjaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian (padi, buah-buahan dan holtikultura) ke perkebunan sawit. Untuk itu, kebijakan daerah terhadap pengembangan sektor pertanian akan diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan dalam pengembangan zona ekonomi, dimana Kabupaten Katingan masuk dalam zona 2 sebagai wilayah yang dikembangkan untuk potensi pertanian tanaman pangan dan holtikultura.





Agar strategi pengembangan empat komoditi tersebut berhasil, perlu diperkuat pula dengan kebijakan penguatan rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan hilirisasi atau penambahan rantai nilai produk dari sektor pertanian dan perikanan yang menjadi komoditi unggulan masyarakat. Untuk itu, kebijakan ini akan diarahkan pula pada pembentukan pasar dan penyerapan produk langsung maupun olahannya. Praktek dari penerapan kebijakan yang langsung dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kedepan adalah kewajiban pembelian beras petani lokal oleh ASN Kabupaten Katingan, Selain itu perlu pula kebijakan penguatan untuk pengembangan sektor perdagangan dan industri pengolahan, yakni pengolahan sederhana, packaging, dan branding terhadap komoditi dan produk olahan khas Kabupaten Katingan.

Memperhatikan strategi tersebut, maka rumusan arah kebijakan yang akan diterapkan pada Strategi 3 ini, yaitu:

1. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.
2. Penguatan rantai nilai komoditi pertanian.
3. Peningkatan kualitas irigasi
4. Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau.

**Strategi 4: Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.**

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya daya saing investasi daerah*
2. *Meningkatnya sektor UMK*
3. *Meningkatnya daya saing Koperasi*

Untuk mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan Strategi 4 di atas, perlu adanya ini upaya dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat secara berkelanjutan dinikmati oleh masyarakat dan generasi muda yang akan datang. Selain itu, perlu pula penguatan regulasi untuk mempermudah proses pelayanan perizinan sebagai salah daya tarik investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesempatan kerja melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkan upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan penyiapan kompetensi dan produktivitas bagi kelembagaan keuangan mikro, UMKM, dan koperasi. Pemerintah daerah Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan berkomitmen untuk penguatan industri daerah, mengembangkan sentra pertumbuhan baru, dan pengembangan produk lokal berdasarkan wilayah atau yang dikenal dengan istilah *one village one product* (OVOP) dalam upaya memperkuat terbentuknya rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk pula pengembangan potensi pada sektor pariwisata.

Adapun rumusan arah kebijakan pada Strategi 4 ini, yaitu:





1. Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan bagi koperasi.

### **MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.**

#### **Strategi 5: Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.**

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya pembangunan perdesaan.*
2. *Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.*

Sampai dengan akhir tahun 2017, berdasarkan penilaian Pemerintah Pusat sebagaimana tergambar dari Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kabupaten Katingan adalah salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak ada satupun desanya mencapai status desa mandiri dan hanya 1 desa yang mampu mencapai status desa maju, yakni Desa Hampalit di Kecamatan Katingan Hilir. Selebihnya berstatus desa berkembang (12 desa) dan sisanya kebanyakan status desa adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan total 141 desa, terbanyak ada di Kecamatan Katingan Hulu dan Marikit. Merujuk pada hasil penilaian tersebut, dapat dipastikan target pengurangan desa tertinggal sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan target TPB/SDGs 2017 di Kabupaten Katingan tidak tercapai.

Pemerintah Kabupaten Katingan dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan bertekad akan mengurangi jumlah desa tertinggal, melalui upaya-upaya untuk meningkat kemampuan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi di desa.

Selain itu perlu mendapat perhatian memberikan lompatan terhadap desa sangat tertinggal untuk menuju desa berkembang, sehingga tidak menjadi beban baru untuk penurunan target desa tertinggal.

Untuk prioritas dan penguatan dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa adalah desa-desa yang terkait prioritas pengembangan kawasan dan wilayah ekonomi, seperti sekitar kawasan perdesaan pertanian, kawasan pariwisata, dan desa sekitar kawasan konservasi hutan. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaannya akan diarahkan pada pengembangan inovasi desa baik yang baru maupun yang sudah berjalan, pengembangan komoditi lokal desa yang potensial, desa wisata sekitar Kawasan TN Sebangau dan desa budaya (di Dusun Betung dan Tumbang Manggu). Untuk mendukung upaya tersebut, setiap instansi terkait akan dimaksimalkan perencanaan kegiatannya, seperti:

- Pelatihan bahasa Inggris dan pelaku pariwisata
- Pelatihan membina pemukiman kawasan perdesaan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian, pengembangan desa wisata dan desa budaya.

k





- Menambah cakupan pelayanan komunikasi dan informasi pada desa-desa yang *blank spot* guna mendukung pengembangan ekonomi desa, teknologi, informasi dan pariwisata (seperti Desa Tumbang Kalemei) melalui jaringan internet dan penggunaan medsos aktif sampai ke desa-desa di pelosok Katingan.
- Pengembangan komoditi lokal yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan pengembangan BUMDes secara bersamaan,
- Penguatan teknologi tepat guna dan inovasi desa untuk mendukung pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) dan rantai nilai tambah dari produk pangan yang potensial dikembangkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pencapaian Strategi 5 dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes.

#### **MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.**

**Strategi 6: Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.** Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan.*
2. *Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.*
3. *Menurunnya kemiskinan dan pengangguran*

Strategi ini sangat mendukung upaya peningkatan angka IPM Kabupaten Katingan dari kategori sedang meningkat menjadi kategori di akhir periode RPJMD 2018-2023, dan upaya penurunan angka kemiskinan dari 5,78% di tahun 2017 menuju 4,95% pada tahun 2023. Selain itu strategi ini mendorong untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka dari 3,81% di tahun 2017 menuju 5,30% pada tahun 2023.

Prioritas pembangunan di bidang pendidikan dengan upaya mengurangi angka putus sekolah, sehingga tercapai Angka Harapan Lama Sekolah menuju 13,38 tahun pada akhir periode RPJMD. Selain itu upaya mendorong peningkatan partisipasi pendidikan dan melanjutkan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan Rata-rata lama Sekolah menuju 8,97 tahun pada tahun 2023.

Untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, maka akan dilakukan penempatan tenaga kesehatan di desa sangat terpencil dan terpencil, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kehamilan, memberikan penyuluhan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, mendorong asupan gizi selama kehamilan, meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh bayi, meningkatkan cakupan

kr  
Ay ty





imunisasi balita, meningkatkan kesadaran pemberian asi eksklusif pada bayi 0-6 bulan serta pemenuhan gizi bayi optimal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, meningkatkan pengawasan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas, mengupayakan akreditasi puskesmas untuk mendukung kualitas layanan kesehatan.

Hal ini akan dilakukan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat baik formal maupun non formal, meningkatkan ketrampilan masyarakat agar mampu untuk memanfaatkan peluang dan sumber daya alam yang ada disekitarnya, memberikan bantuan sosial berupa layanan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, pemberian bantuan jaminan hidup berupa Program Keluarga Harapan, pemberian bantuan lainnya sesuai kebutuhan.

Arah kebijakan pada strategi 6, yaitu:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar.
2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan penanganan pandemi Covid-19.
4. Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang kesehatan.
5. Peningkatan preventif dan promosi kesehatan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis.
7. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu.
8. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
9. Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan tenaga kerja.

**Strategi 7: Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.** Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: *Meningkatnya pengarusutamaan gender.*

Peranan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Katingan masih perlu menjadi perhatian utama dan ini dilakukan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Target yang ingin dicapai melalui strategi ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Gender dari kondisi awal 84,78 di tahun 2015 menuju 86,03 pada tahun 2023 dan angka Indeks Pemberdayaan Gender dari kondisi awal 60,79 pada tahun 2015 menuju 67,22 pada tahun 2023.

Arah kebijakan pada strategi 7, yaitu:

1. Peningkatan kesejahteraan keluarga.
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

## **MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI.**

**Strategi 8: Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah.** Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga
2. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak
3. Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi





Guna mendukung pencapaian Misi 2, Misi 3, Misi 4 dan Misi 7, perlu ada arahan umum terhadap pengembangan infrastruktur daerah yang menjadi prioritas kepala daerah. Selain memperkuat dan memperjelas arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, secara kewilayahan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus transportasi pada daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dan perlu menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung.

Prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya adalah membangun dan melanjutkan rencana pengembangan jalan darat di wilayah utara dan wilayah selatan sampai pada rencana pembangunan dermaga pelabuhan laut Bajungkal dan dermaga Kereng Pakahi. Prioritas ini diharapkan mendukung pengembangan sektor pertanian pada sentra produksi padi dan palawija di Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai. Selain itu, dampaknya juga akan mendorong kemajuan sektor pariwisata yang melewati kawasan sekitar TN Sebangau, seperti kawasan Punggu Alas yang saat ini terkenal dengan perlindungan orang utan liar, selain wisata budaya dan wisata alam. Untuk penjelasan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan secara khusus akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Selain fokus pada pengembangan infrastruktur kewilayahan, pengembangan sanitasi Kabupaten Katingan juga menjadi perhatian khusus, mencakup pengolahan air limbah pemukiman, sistem pengelolaan persampahan, cakupan layanan air bersih dan layanan drainase, layanan komunikasi dan informasi, serta penataan kawasan permukiman. Untuk percepatan pembangunan sanitasi permukiman, secara khusus kebijakan dan perencanaannya kedepan hingga tahun 2023 disusun melalui Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai acuan pencapaian Universal Acces di tahun 2019 dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tahun 2030 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Demikian pula untuk rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk didalamnya rencana penanganan permukiman pada kawasan kumuh di Kabupaten Katingan akan diperkuat dengan konsep yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Katingan. Kesemua rencana tersebut, tentunya akan disesuaikan dan diintegrasikan lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039.

Memperhatikan prioritas pembangunan dan arah pengembangan wilayah tersebut, maka rumusan Arah Kebijakan pada Strategi 8 yaitu:

1. Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten.
2. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
3. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum.
5. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.
6. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
7. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika.





**MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN.**

**Strategi 9: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim.**

Strategi ini mengalami penyempurnaan pada Perubahan RPJMD, yang semula “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan” disempurnakan menjadi Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim”. Strategi tersebut dipilih untuk mendukung pencapaian sasaran:

1. *Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.*
2. *Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam.*

Isu pengelolaan lingkungan yang berdampak secara global yakni emisi gas rumah kaca dan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan saat ini. Terkait isu ini, Pemerintah Kabupaten Katingan sangat mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan menetapkan visi lingkungan “Konservasi Katingan untuk Borneo” dan “Kasongan Kota Hijau”. Keseriusan pemerintah daerah terhadap perlindungan alam juga diwujudkan dengan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka di wilayah utara Katingan dan Kawasan Taman Nasional Sebagai di wilayah selatan yang berbatas juga dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Selain itu, di Kabupaten Katingan juga dibentuk Kebun Raya Katingan sebagai pusat konservasi, pelestarian dan pengembangan tanaman buah-buahan tropis khususnya buah-buahan lokal yang ada di Kalimantan.

Selain menjadi kawasan konservasi yang dilindungi, agar kebijakan ini dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya dan pembangunan di Kabupaten Katingan, maka strategi ini diarahkan pula pengembangan wisata berbasis alam. Lokasi yang paling potensial dikembangkan dalam lima tahun kedepan adalah Kawasan Bukit Batu dan Danau Punggualas yang ada di Desa Keruing.

Selain itu perlu pula dilakukan penguatan pada desa-desa lainnya, terutama desa konservasi yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya dan TN Sebangau. Untuk itu kedepannya, konsep pengembangan jasa lingkungan akan lebih diperkuat pada wilayah ini agar memberi manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Katingan secara umum dan khususnya masyarakat sekitar kawasan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, NGO bidang lingkungan (WWF), BRG, dan instansi teknis lainnya (KPH) sangatlah diperlukan guna mendukung strategi ini.

Potensi lain yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan sudah memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pusat adalah rencana penyiapan lokasi untuk dijadikan kawasan strategis pengembangan Pusat Perfilman Asia Tenggara yang berada di





Kecamatan Pulau Malan. Rencana strategi pengembangan kawasan ini tentunya masih mengacu pada konsep pembangunan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini, wewenangannya terbatas pada penyediaan lahan. Meski demikian efek domino dari terlaksananya proyek ini adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Katingan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait pengembangan sektor pariwisata, Kawasan Punggualas menjadi salah satu objek wisata minat khusus berbasis alam yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Wilayah ini secara khusus banyak diminati oleh wisatawan mancanegara dan lokal, sehingga berpotensi menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, dukungan pembangunan infrastruktur menuju dan pada wilayah ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan, termasuk pula kawasan wisata alam lainnya yang berpotensi dikembangkan dan menarik minat wisata datang berkunjung, sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 430/194.1/KPTS/2016 tentang Penetapan Zona Kreatif dan Destinasi Pariwisata, Kesenian, Cagar Budaya dan Suku Bangsa di Wilayah Kabupaten Katingan. Penetapan ini sebagai upaya daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kepariwisataan dan cagar budaya daerah yang ada di Kabupaten Katingan sekaligus merupakan amanat dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Guna mewujudkan Strategi 9 ini, maka arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan, yaitu:

1. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3.
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5. Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana.
6. Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam.

#### **MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA**

##### **Strategi 10: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman.**

Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: *Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat.*

Masyarakat Dayak di Kalimantan secara umum dan di Katingan secara khusus, sejak dulu sudah memiliki kearifan lokal yang dapat mempererat konsep persatuan dan kesatuan bangsa serta gotong royong, dan harmonisasi

Handwritten signature and date: 9/1/2023





antar lapisan masyarakat yang berbeda-beda adat, budaya, agama, istiadat dan sosial budaya. Falsafah Huma Betang (rumah besar) yang dimiliki masyarakat suku Dayak, lahir untuk menyatukan konsep bebas terpimpin dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna menciptakan keharmonisan dan mencegah perselisihan yang berarti. Menurut Prof. Dr. H. Norsanie Darlan, Guru Besar Universitas Palangkaraya (Kompas.com, 6 Agustus 2012), ada ruang bebas yang merupakan sarana dalam mewujudkan pembangunan masyarakat merujuk pada budaya suku Dayak. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, justru ruang publik yang bebas tersebut diharapkan menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Kearifan lokal seperti ini perlu mendapat perhatian bagi kelestariannya di masa mendatang. Dengan menafsirkan ruang publik yang bebas dalam tatanan pembangunan masyarakat tersebut akan terjadi kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum. Bahkan, tingginya kekerabatan karena adanya rasa persaudaraan yang tinggi, tidak saling menyalahkan satu sama yang lain. Masyarakat Dayak sungguh memberikan kearifan yang sangat tinggi harganya. Tidak pernah ada perselisihan, yang berarti dalam kehidupan Huma Betang. Saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong tercipta sejak beberapa abad silam dan masih bisa dilihat hingga sekarang. Falsafah huma betang dalam kehidupan masyarakat Kalteng betul-betul hidup bersama dalam suatu suasana harmonis manakala pendatang berpegang menganut budaya "di mana bumi di injak, di situ langit dijunjung". Mencermati kehidupan yang konsisten pada kearifan lokal huma betang itu, tidak keliru manakala budaya yang berkembang dalam masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk di Katingan dipertahankan bagi kelanjutan pembangunan di masa mendatang. Adapun kata "Penyang Hinje Simpei" yang menjadi moto Kabupaten Katingan berasal dari bahasa Sangiang. Berdasarkan penjelasan dari Tengang D. Halip, artinya adalah semangat persatuan dan kesatuan.

Memperhatikan semakin berkurangnya pemahaman dan pengetahuan generasi muda terhadap kearifan lokal dan pelestarian budaya lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan akan menerapkan konsep ini menjadi kebijakan daerah guna membangun dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

Untuk itu fokus pembangunan yang dirumuskan dalam arah kebijakan daerah pada Strategi 10, yaitu:

1. Pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama.

**Strategi 11: Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.** Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: *Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.*

Selain penerapan falsafah dan budaya Dayak dalam pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah juga tetap memprioritaskan terwujudnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal, serta pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala pembangunan. Penyiapan generasi muda perlu menjadi perhatian

h  
A y / 4





bersama, disamping bisa tetap melestarikan kearifan budaya Dayak, dengan peningkatan ketrampilan dan kompetensi para pemuda, diharapkan kedepannya dapat bersaing dan berkompetisi dalam segala bidang pembangunan, apalagi menghadapi Pasar Bebas Asia dan global. Pelestarian dan perlindungan terhadap situs budaya, bangunan, benda, dan kawasan cagar budaya juga menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Katingan kedepannya.

Arah kebijakan pada strategi 11, yaitu:

1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
2. Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan.

h  
9 x/4



**Tabel 6.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
<b>MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM</b>				
1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	1.1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	1.1.1 Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a. Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	2019-2023
	1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja		b. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	2019-2023
	1.3 Meningkatkan kepatuhan terhadap standar laporan keuangan		c. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	2019-2023
	1.4 Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat		d. Peningkatan inovasi pelayanan publik	2019-2023
	1.5 Meningkatkan penegakan hukum	1.5.1 Meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah.	a. Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum.	2019-2023
<b>MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.</b>				
2 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan	2.1 Meningkatkan sektor pertanian dan perikanan	2.1.1 Memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian	a. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.	2019-2023
			b. Penguatan rantai nilai komoditi pertanian	2019-2023
			c. Peningkatan kualitas irigasi	2019-2023

br  
9/4





TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN	
	2.2	Meningkatnya ketahanan pangan	2.3.1	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat	d. Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau	2019-2023	
	2.3	Meningkatnya daya saing investasi daerah			a. Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara.	2019-2023	
	2.4	Meningkatnya sektor UMK			b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM	2019-2023	
	2.5	Meningkatnya daya saing Koperasi			c. Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembiayaan bagi koperasi	2019-2023	
	MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.						
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan	3.1	Meningkatnya pembangunan perdesaan	3.1.1	Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya	a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	2019-2022
		3.2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa			b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes	2019-2023
MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.							
4	Meningkatnya daya saing masyarakat	4.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	4.1.1	Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar.	2019-2023
						b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	2019-2023

12/4





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
	4.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas		c. Peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan penanganan pandemi Covid-19 serta cakupan layanan sarana dan prasarana kesehatan d. Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan e. Peningkatan preventif dan promosi kesehatan f. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis	2019-2023 2019-2023 2019-2023 2019-2023
	4.3 Menurunnya kemiskinan dan pengangguran		g. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu h. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial i. Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan tenaga kerja	2019-2023 2019-2023 2019-2023
5 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	5.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender	5.1.1 Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	a. Peningkatan kesejahteraan keluarga b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. c. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.	2019-2022 2019-2022 2019-2022
<b>MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI.</b>				
6 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	6.1 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga	6.1.1 Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah	a. Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten b. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan c. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	2019-2023 2019-2023 2019-2023

9/2/4



TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
	6.2	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak		d. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum e. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan f. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	2019-2023 2019-2023 2019-2022
	6.3	Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi		g. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	2019-2023
MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN.					
7 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	7.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	7.1.1 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim	a. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3 b. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) d. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan e. Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana f. Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam	2019-2022 2019-2022 2020-2022 2019-2023 2021-2023 2019-2022
	7.2	Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam			

h  
9/4/4





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN PELAKSANAAN
<b>MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA</b>				
8 Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)	8.1 Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	8.1.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman	a. Pengembangan wawasan kebangsaan.	2019-2022
			b. Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama	2019-2022
	8.2 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	8.2.1 Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal	a. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.	2019-2022
			b. Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan	2019-2022

h  
9/2/4





Gambar 6.1. Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan



## 6.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan yang paling berdaya ungkit untuk mencapai *outcome* program.

Program pembangunan daerah selain dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, juga dalam rangka mencapai program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Katingan periode 2018-2023. Penjabaran program-program unggulan tersebut diterjemahkan ke dalam program perangkat daerah yang selanjutnya menjadi prioritas dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah. Program unggulan kepala daerah diterjemahkan kedalam program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Mengingat terdapat perbedaan nomenklatur program sebelum dan sesudah perubahan RPJMD, maka penyajian program dipilah menjadi program 2019 dan 2020 (sebelum) dan program 2021-2023 (sesudah).

9/1/4



Tabel 6.2  
Penjabaran Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kedalam Program  
Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MISI I: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM			
1. Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN).	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
	Program Pendidikan Kedinasan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
2. Peningkatan disiplin dan kinerja ASN.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
3. Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ASN.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
4. Penataan manajemen dan peningkatan dukungan sistem informasi.	Program Pengembangan Data/Informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Peningkatan kapasitas hukum.	Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

Handwritten signature and initials.





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6. Peningkatan kualitas produk hukum.	Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
7. Penataan peraturan perundang-undangan.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
<b>MISI II: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>			
1. Peningkatan Produksi Pertanian, Mutu, dan Pemasaran Produksi/ Komoditas serta Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengembangan Peternakan	a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengembangan Perkebunan	a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (2021-2022) 2. Dinas Perhubungan dan Perikanan (2023)
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (2021-2022)

W  
9 yk4





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2. Dinas Perhubungan dan Perikanan (2023)
	Program Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	(Berdasarkan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 kewenangan Bidang Pertanian hanya terkait izin usaha yaitu Program Perizinan Usaha Pertanian. Namun program ini tidak digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebab perijinan sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (2021-2022) 2. Dinas Perhubungan dan Perikanan (2023)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2. Peningkatan Investasi dan kemudahan pelayanan perizinan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

k  
A y t y



PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Pengembangan industri, kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (2021-2022) 2. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2023)
4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.	Program Pembinaan Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.	Peningkatan Produktivitas dan Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja/Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
<b>MISI III: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN</b>			
1. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Peningkatan peran perempuan di pedesaan.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Peningkatan keberdayaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Handwritten signature and date: 9/1/24





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
masyarakat perdesaan.		Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>MISI IV: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER</b>			
1. Pendidikan Anak Usia Dini.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2. Pendidikan Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3. Peningkatan manajemen pendidikan.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4. Peningkatan dan peran serta masyarakat.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Pendidikan Non Formal.	Program Pendidikan Non Formal	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
6. Pendidikan Luar Biasa.	Bukan kewenangan kabupaten, namun kewenangan provinsi	Bukan kewenangan kabupaten, namun kewenangan provinsi	-
7. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
8. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
9. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Sekretariat Daerah
10. Pelayanan kesehatan penduduk miskin.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan

*Handwritten signature/initials*





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penduduk Lanjut Usia (lansia)	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11. Upaya kesehatan masyarakat.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
12. Perbaikan gizi masyarakat.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
13. Pengembangan lingkungan sehat.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
14. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya.	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
15. Peningkatan pelayanan Anak Balita.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
16. Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
17. Obat dan perbekalan kesehatan.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
18. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

*Handwritten signature/initials*



PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
19. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
20. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
21. Pencegahan, penemuan dan penanganan HIV AIDS	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
22. Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
23. Keluarga Berencana (KB).	Program Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24. Kesehatan reproduksi.	Program Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

W  
ayky





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
25. Penguatan kelembagaan pengarusuteraan gender dan anak.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27. Penanggulangan kemiskinan daerah.	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
28. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Program Penanganan Bencana b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
MISI V: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI			
1. Pembangunan jalan dan jembatan.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Pemberdayaan jasa konstruksi.	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Perencanaan tata ruang.	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas

W  
9/1/4





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Pengendalian banjir.	Program Pengendalian Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan /Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
6. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (2021-2022) 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2023)
7. Pembangunan infrastruktur perdesaan.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan /Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
8. Peningkatan dan pemerataan sumber daya energi.	Bukan kewenangan Kabupaten Katingan sebab tidak memiliki panas bumi	Bukan kewenangan Kabupaten Katingan sebab tidak memiliki panas bumi	-
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Dinas PUPR dan Perhubungan (2021-2022) 2. Dinas Perhubungan dan Perikanan (2023)
10. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Dinas PUPR dan Perhubungan (2021-2022) 2. Dinas Perhubungan dan Perikanan (2023)
11. Peningkatan pelayanan teknologi informasi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi,

W  
9/1/24



PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Informatika, Statistik dan Persandian
12. Peningkatan manajemen sumber daya yang terintegrasi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
<b>MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN</b>			
1. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
4. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi.	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
6. Pengendalian kebakaran hutan.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian dan Pencegahan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Handwritten signature and initials.





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
8. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup.	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
9. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan limbah B3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
10. Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
<b>MISI VII: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA</b>			
1. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2. Pengembangan promosi dan informasi kebudayaan.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
4. Peningkatan pelaku dan kelembagaan kebudayaan.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan

h  
9/5/24





PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020)	PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Olahraga serta Pariwisata
5. Peningkatan peran serta kepemudaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
6. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
7. Pengembangan wawasan kebangsaan.	Program Ketahanan Ideologi Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Penguatan hubungan kelembagaan masyarakat.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ibadah.	Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.	Program Kewaspadaan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP

Selain itu, penerapan dari standar pelayanan minimal (SPM) juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimuat dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, di perencanaan tahunan akan dimuat dalam RKPD dan dianggarkan di APBD. Adapun program perangkat daerah yang mendukung penerapan jenis pelayanan dasar pada 6 (enam) bidang urusan untuk tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam Tabel 6.3 di bawah. Pencapaian indikator SPM tahun 2019 dan 2020 telah disajikan pada Bab II dokumen ini.

Handwritten signature and initials.



Tabel 6.3  
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
I. BIDANG PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	34,76%	96,22%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	112,3%	3,24%	Program Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	115,8%	70,11%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
II. BIDANG KESEHATAN						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	85%	79,18%	1. Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
					2. Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	85%	52,11%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	96%	83,26%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	89%	83,31%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan

h  
9/4





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	93%	44,89%	Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	69%	52,18%	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	81%	90,57%	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	70%	53,13%	Program P2PTM	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	71%	47,27%	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	49%	84,88%	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	97%	49,94%	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	58%	67,52%	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	95,40	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

h  
y/4





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	95,40	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
IV. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	-	
V. BIDANG TRANTIBUMLINMAS						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara		647 Orang	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		88.100 Orang (55,6%)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		120.464 Orang (76%)	Program Pengurangan Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0 Orang (100%)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Penanganan Bencana (Tanggap Darurat)	

k  
9/1/4



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi Kinerja		Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
			2019	2020		
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran		100%	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>VI. BIDANG SOSIAL</b>						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10%	100%	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		100%	2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20%	100%	3. Program Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	-	100%	4. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	30%	-	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
				100%	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020, diolah

Program perangkat daerah yang mendukung penerapan SPM untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel di bawah. Lebih lanjut, penerapan SPM pada masing-masing program tersebut dirinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang dimuat dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah pengampu SPM.

k  
9 y k y





**Tabel 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja			Perangkat Daerah	
					2021	2022	2023		
I.	BIDANG PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.70 %	95.20%	95.70 %	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	72.70 %	73.20 %	73.70 %	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3,25 %	3.50 %	3.75%	
				4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93.40 %	93.90 %	94.40 %	
II.	BIDANG KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	92%	95%	97%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan							
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan							

Handwritten signature and initials.





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja			Perangkat Daerah
					2021	2022	2023	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan						
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan						
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan						
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan						
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan						
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan						
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan						
11	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan						

Handwritten signature and date: 29/1/24

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah		Indikator Kinerja Program	Target Kinerja			Perangkat Daerah
						2021	2022	2023	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan							
III. BIDANG PEKERJAAN UMUM									
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	46,5%	52,5%	58,40%	1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (2021-2022) 2. Dinas PUPR (2023)
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	38,62%	41,46%	44,33%	1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (2021-2022) 2. Dinas PUPR (2023)

Handwritten signature and date: 14/4





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja			Perangkat Daerah	
					2021	2022	2023		
IV.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan		(program tidak dipakai oleh Perangkat Daerah terkait)				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan		(program tidak dipakai oleh Perangkat Daerah terkait)				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan
V.	BIDANG TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	70%	75%	80%	Satuan Polisi Pamong Praja/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	162.200 org	162.200 org	162.200 org	Badan Penanggulangan Bencana

h  
9/1/4





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah	Indikator Kinerja Program		Target Kinerja			Perangkat Daerah
						2021	2022	2023	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	162.200 org	162.200 org	162.200 org	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	30 mnt	30 mnt	20 mnt	
VI.	BIDANG SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80%	85%	90%	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti							
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti							

h  
9/1/14



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program Perangkat Daerah Daerah			Target Kinerja			Perangkat Daerah
						2021	2022	2023	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti							Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Penanganan Bencana	1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	90%	95%	100%	

Sumber: hasil analisis, 2021

h  
9/14





Program Pembangunan Daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Program pembangunan untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada **Lampiran Bab VI Tabel 6.5**, dikelompokkan berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran yang mendukung pencapaian target sasaran. Berikut rumusan program pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi RPJMD dan Renstra PD dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Realisasi Program tahun 2019 dan 2020 masih menerapkan nomenklatur program (dan kegiatan di Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sedangkan program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah menerapkan nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Handwritten signature and date: 14





**TABEL 6.5**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN**  
**KATINGAN TAHUN 2019-2023**

kyt



**TABEL 6.5**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN**  
**KATINGAN TAHUN 2019-2023**

[Lampiran A Tabel 6.5] PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2020

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	16	17
	Misi I : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif Serta Mewujudkan Supremasi Hukum								
	Tujuan :								
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel								
	Sasaran								
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi								
	Program								
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	90%	9,592,884,318.00	91.69%	7,557,852,942.00	17,150,737,260	Dinas Pendidikan
1.02.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60%	100%	15,762,403,087.00	100%	11,990,039,446.00	27,752,442,533	Dinas Kesehatan
1.03.1.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	4,381,888,690.00	90%	2,287,708,673.00	6,669,597,363	DisPUPRHub
1.04.1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,093,869,029.00	100%	2,018,659,469.00	5,112,528,498	Disperkimtan
1.05.1.05.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	7,820,013,888.00	100%	7,323,343,640.00	15,143,357,528	Satpol PP
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Presentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,220,961,475.00	94%	1,360,671,437.00	2,581,632,912	BPBD
1.06.1.06.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,719,932,009.00	100%	1,228,340,314.00	2,948,272,323	Dinas Sosial



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
2.02.2.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,795,373,374.00	98%	1,030,644,523.00	2,826,017,897	DP3APKB
2.05.2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%	100%	2,940,063,883.00	100%	2,723,724,946.00	5,663,788,829	DLH
2.06.2.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,398,579,666.00	100%	975,945,419.00	2,374,525,085	Disdukcapil
2.07.2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	1,622,184,375.00	95%	1,212,316,227.00	2,834,500,602	DisPMDes
2.10.2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60%	100%	2,668,048,508.00	100%	1,277,099,994.00	3,945,148,502	DiskominfoPersantik
2.11.2.11.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	2,490,595,515.00	100%	1,797,314,618.00	4,287,910,133	DisKopUKMPP
4.01.4.01.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	89%	100%	1,299,052,283.00	100%	825,035,285.00	2,124,087,568	DPM-PTSP
2.13.2.13.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,886,983,152.00	100%	2,165,461,397.00	5,052,444,549	Disbudporpora
3.03.3.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,130,560,474.00	100%	1,949,894,901.00	4,080,455,375	Distanpaper
2.01.2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,100,970,759.00	100%	1,123,738,223.00	2,224,708,982	Distransnaker
4.01.4.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	10,886,470,340.00	100%	14,611,173,680.00	25,497,644,020	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	6,677,771,326.50	100%	6,836,977,644.00	13,514,748,971	Sekretariat DPRD
4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	4,066,791,518.00	90%	2,404,909,652.00	6,471,701,170	Bappelitbang
4.04.4.04.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	5,283,008,263.00	100%	4,583,277,538.00	9,866,285,801	BPKAD
4.05.4.05.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	90%	2,094,758,316.00	90%	2,319,138,000.00	4,413,896,316	BKPP
4.02.4.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	1,684,009,738.00	100%	1,353,332,352.00	3,037,342,090	Inspektorat
4.01.4.01.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	786,590,800.00	100%	684,192,000.00	1,470,782,800	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	981,814,300.00	99%	850,206,000.00	1,832,020,300	Kec. Kamipang
4.01.4.01.12.01.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	721,897,405.00	90%	513,230,084.00	1,235,127,489	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	97%	812,950,248.00	90%	574,593,205.00	1,387,543,453	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.14.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	85%	669,818,544.00	100%	560,278,182.00	1,230,096,726	Kec. Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	493,751,376.00	100%	376,459,436.00	870,210,812	Kec. Pulau Malan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	884,791,180.00	100%	803,008,436.00	1,687,799,616	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	60%	549,024,009.00	100%	404,357,037.00	953,381,046	Kec. Marikit
4.01.4.01.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	785,299,223.00	100%	501,034,995.00	1,286,334,218	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.20.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	775,646,302.00	100%	505,357,754.00	1,281,004,056	Kec. Mendawai
4.01.4.01.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	571,521,000.00	100%	461,438,000.00	1,032,959,000	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	449,138,490.00	100%	372,680,750.00	821,819,240	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.17.01.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	586,406,384.00	100%	483,301,309.00	1,069,707,693	Kec. Sanaman Mantikei
1.05.1.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	50%	100%	1,160,054,092.00	100%	992,471,560.00	2,152,525,652	Bakesbangpol
1.06.1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	142,984,500.00	100%	95,216,000.00	238,200,500	BPBD
4.05.4.05.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%		0.00	100%	275,000.00	275,000	BKPP
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%			80%	89,987,300.00	89,987,300	Dinas Pendidikan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
1.02.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	100%	2,254,416,623.00	100%	912,042,668.00	3,166,459,291	Dinas Kesehatan
1.03.1.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	1,815,903,300.00	90.00%	864,622,300.00	2,680,525,600	DisPUPRHub
1.04.1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapat layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	875,569,431.00	100%	356,775,800.00	1,232,345,231	Disperkimtan
1.05.1.05.02.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	100%	276,696,900.00	100%	386,281,511.97	662,978,412	Satpol PP
1.06.1.06.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	60%	100%	10,000,000.00	65%	120,708,990.00	130,708,990	Dinas Sosial
2.02.2.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	293,563,619.00	99%	1,377,999,268.00	1,671,562,887	DP3APPKB
2.05.2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	85%	100%	70,000,000.00	100%	284,455,200.00	354,455,200	DLH
2.06.2.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	100%	100%	429,048,800.00	100%		429,048,800	Disdukcapil
2.07.2.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	80%	100%	247,242,500.00	98%	256,239,000.00	503,481,500	DisPMDes
2.10.2.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	40%	60%	1,367,381,000.00	100%	53,040,447.00	1,420,421,447	DiskominfoPersantik
2.11.2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	15,350,000.00	100%	215,429,485.00	230,779,485	DisKopUKMPP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
2.11.2.11.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	48%	61,400,000.00	15%	15,000,000.00	76,400,000	DisKopUKMPP
2.11.2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	15,350,000.00	100%	215,429,485.00	230,779,485	DisKopUKMPP
4.01.4.01.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	89%	100%	366,544,700.00	100%	370,595,400.00	737,140,100	DPM-PTSP
2.13.2.13.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	202,241,000.00	100%	123,965,000.00	326,206,000	Disbudporpora
3.03.3.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	138,040,000.00	100%	256,184,400.00	394,224,400	DisDistanpaper
2.01.2.01.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	40%	100%	991,606,500.00	100%	103,919,800.00	1,095,526,300	Distransnaker
4.01.4.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	10,412,197,854.00	100%	5,026,650,000.00	15,438,847,854	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%			100%	2,273,182,900.00	2,273,182,900	Sekretariat DPRD
4.03.4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	1,209,893,211.00	90%	592,944,926.00	1,802,838,137	Bappelitbang
4.04.4.04.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	100%	8,078,214,615.31	100%	9,741,112,271.69	17,819,326,887	BPKAD
4.02.4.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	100%	453,033,940.00	-	0.00	453,033,940	Inspektorat



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.4.01.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	500,775,000.00	100%	39,288,000.00	540,063,000	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	200,763,600.00	94%	49,824,000.00	250,587,600	Kec. Kamipang
4.01.4.01.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	100%	52,949,000.00	95%	42,565,500.00	95,514,500	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	99%	917,467,450.00	100%	99,895,600.00	1,017,363,050	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.14.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	90%	289,540,800.00	100%	50,232,000.00	339,772,800	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	57%	22,126,500.00	100%	34,460,500.00	56,587,000	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	282,962,000.00	100%	214,976,611.00	497,938,611	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	89,274,500.00	100%	223,336,000.00	312,610,500	Kec. Marikit
4.01.4.01.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	117,195,600.00	100%	96,088,000.00	213,283,600	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.20.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	114,832,600.00	100%	48,347,500.00	163,180,100	Kec. Mendawai
4.01.4.01.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	48,262,000.00	100%	38,476,000.00	86,738,000	Kec. Bukit Raya



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01.22.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	388,007,510.00	100%	363,284,550.00	751,292,060	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	97,015,000.00	100%	100,719,800.00	197,734,800	Kec. Sanaman Mantikei
1.05.1.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	68%	14,042,000.00	100%	10,000,000.00	24,042,000	Bakesbangpol
2.05.2.05.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Stel Pakaian Dinas	100 Steel	95 Steel	82,854,750.00			82,854,750	DLH
1.06.1.06.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	33,650,000.00			33,650,000	Dinas Sosial
2.11.2.11.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%		181,841,000.00			181,841,000	DisKopUKMPP
4.01.4.01.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	57,377,000.00			57,377,000	DPM-PTSP
3.03.3.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	93,844,300.00	-		93,844,300	Distanpaper
2.01.2.01.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	25,200,000.00			25,200,000	Distransnaker
4.01.4.01.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	191,180,000.00			191,180,000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.04.01.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	408,201,500.00			408,201,500	Sekretariat DPRD
4.03.4.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	181,910,700.00			181,910,700	
1.02.1.02.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	257,760,800.00			257,760,800	Dinas Kesehatan
1.03.1.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	111,119,800.00			111,119,800	
2.07.2.07.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	76,530,000.00			76,530,000	DisPMDes

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
2.10.2.10.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	224,680,500.00			224,680,500	Diskominfoopersantik
4.01.4.01.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	17,000,000.00			17,000,000	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	10,000,000.00			10,000,000	Kec. Kamipang
4.01.4.01.12.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	17,100,000.00			17,100,000	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.13.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	31,000,000.00			31,000,000	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.16.01.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	18,690,000.00			18,690,000	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.18.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	15,000,000.00			15,000,000	Kec. Marikit
4.01.4.01.20.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	14,365,000.00			14,365,000	Kec. Mendawai
4.01.4.01.22.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	14,000,000.00			14,000,000	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.17.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	17,000,000.00			17,000,000	Kec. Sanaman Mantikei
1.06.1.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	32.43%	37.14%	52,800,000.00	100%	28,000,000.00	80,800,000	BPBD
4.05.4.05.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	38,025,000.00			38,025,000	BKPP
4.05.4.05.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	1,894,904,150.00	90%	43,600,000.00	1,938,504,150	BKPP
1.01.1.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	73.44 %	93,450,000.00	100%	5,000,000.00	98,450,000	Dinas Pendidikan
1.02.1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	100%	590,898,000.00		101,238,000.00	692,136,000	Dinas Kesehatan

May 14



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1.04.1.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	79,500,000.00	100%	19,000,000.00	98,500,000	Disperkimtan
1.05.1.05.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	100%	118,150,000.00			118,150,000	Satpol PP
1.06.1.06.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	15%	21%	42,900,000.00	55%	14,600,000.00	57,500,000	Dinas Sosial
2.02.2.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	122,650,000.00	99%	38,800,000.00	161,450,000	DP3APPKB
2.05.2.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	100%	62,500,000.00	100%	10,000,000.00	72,500,000	DLH
2.06.2.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	20,000,000.00			20,000,000	Disdukcapil
2.07.2.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	100%	76,000,000.00	100%	14,500,000.00	90,500,000	DisPMDes
2.10.2.10.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	36%	66%	152,000,000.00	100%	43,600,000.00	195,600,000	Diskominfoopersantik
2.11.2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	15,350,000.00	100%	215,429,485.00	230,779,485	DisKopUKMPP
2.11.2.11.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	48%	61,400,000.00	15%	15,000,000.00	76,400,000	DisKopUKMPP
4.01.4.01.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	100%	38,000,000.00	100%	23,500,000.00	61,500,000	DPM-PTSP
2.13.2.13.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	90,000,000.00	80%	16,200,000.00	106,200,000	Disbudporpora
3.03.3.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	40%	100%	47,500,000.00	100%	5,000,000.00	52,500,000	Distanpaper
2.01.2.01.01.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	100%	25,000,000.00	100%	21,200,000.00	46,200,000	
4.01.4.01.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	99%	339,657,000.00	100%	1,231,047,000.00	1,570,704,000	Sekretariat Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.4.01.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	90%	699,552,960.00	100%	59,416,400.00	758,969,360	Sekretariat DPRD
4.03.4.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50%	54%	153,250,000.00	68%	30,000,000.00	183,250,000	Bappelitbang
4.04.4.04.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	84%	62,950,000.00	84%	15,000,000.00	77,950,000	BPKAD
4.01.4.01.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-		100%	5,000,000.00	5,000,000	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	46,000,000.00	100%	15,000,000.00	61,000,000	Kec. Kamipang
4.01.4.01.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	94%	71%	9,500,000.00	94%	5,000,000.00	14,500,000	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	63%	25,000,000.00	100%	20,000,000.00	45,000,000	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.14.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	90%	19,000,000.00	100%	5,000,000.00	24,000,000	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	31,000,000.00	100%	15,000,000.00	46,000,000	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.16.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	24,000,000.00	100%	23,900,000.00	47,900,000	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.18.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	33%	19,000,000.00	100%	15,000,000.00	34,000,000	Kec. Marikit

*Handwritten signature/initials*

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.4.01.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	84%	53,900,000.00	100%	20,000,000.00	73,900,000	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.20.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	28,500,000.00	100%	15,000,000.00	43,500,000	Kec. Mendawai
4.01.4.01.21.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	27,000,000.00	100%	15,000,000.00	42,000,000	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.22.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40,650,000.00	100%	5,000,000.00	45,650,000	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	13,500,000.00	100%	15,000,000.00	28,500,000	Kec. Sanaman Mantikei
1.05.1.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	68%	14,042,000.00	100%	10,000,000.00	24,042,000	Bakesbangpol
4.01.4.01.03.01.52	Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	90%	100%	37,550,000.00			37,550,000	Sekretariat Daerah
4.05.4.05.08.01.63	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang memperoleh pendidikan kedinasan	80%	80%	604,911,000.00			604,911,000	BKPP
4.05.4.05.08.01.64	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan	80%	80%	43,049,500.00	80%	10,500,000.00	53,549,500	BKPP
4.05.4.05.08.01.65	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan	80%	80%	43,049,500.00	80%	1,213,532,900.00	1,256,582,400	BKPP
1.02.1.02.01.01.43	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	0%				-	Dinas Kesehatan
	Sasaran								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja								
	Program								
4.03.4.03.01.01.71	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah	Tinggi (84,65)	tinggi	634,621,869.00	90%	170,729,000.00	805,350,869	Bappelitbang



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.03.4.03.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Daerah	100%	100%	954,077,348.00	100%	497,957,600.00	1,452,034,948	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi (%)	84%	84%	1,272,540,732.00	87%	98,878,000.00	1,371,418,732	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.27	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (%)	79%	79%	224,010,000.00	83%	129,986,500.00	353,996,500	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.73	Program Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyusun dokumen penganggaran	100%	100%	581,819,900.00	100%	127,221,000.00	709,040,900	Bappelitbang
4.02.4.02.01.01.35	Program Pengembangan Sistem Pemerintahan dalam Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Cakupan obrik pengawasan	80%	80%	2,502,119,260.00	80%	1,152,645,000.00	3,654,764,260	Inspektorat
4.02.4.02.01.01.81	Program Peningkatan Kapabilitas	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	3	133,646,000.00	3	145,475,000.00	279,121,000	Inspektorat
	Sasaran								
	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar Laporan Keuangan								
	Program								
1.02.1.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60%	99%	76,455,500.00		814,686,570.00	891,142,070	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	60%	100%	139,998,210.00			139,998,210	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.08	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	60%	100%	448,385,000.00			448,385,000	Dinas Kesehatan
1.05.1.05.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	16,300,000.00			16,300,000	Satpol PP
1.06.1.06.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	100%	14,940,000.00	100%	4,516,250.00	19,456,250	Dinas Sosial

W 9/14



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
2.05.2.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%			80%	13,420,000.00	13,420,000	DLH
4.01.4.01.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%			100%	10,218,000.00	10,218,000	DPM-PTSP
2.13.2.13.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	100%		100%	11,150,000.00	11,150,000	Disbudporpora
3.03.3.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	17,000,000.00	100%		17,000,000	Distanpaper
4.01.4.01.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan yang tepat waktu	100%	100%	406,761,000.00	100%	443,365,576.00	850,126,576	Sekretariat Daerah
		Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	100%			100%		-	
		Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu	100%					-	
		Persentase laporan pengadaan barang dan jasa pemda yang tepat waktu	100%					-	
4.01.4.01.03.01.100	Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana	Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana	90%	100%	29,000,000.00			29,000,000	Sekretariat Daerah

May 19

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		90,86%	166,650,900.00	166,650,900	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	129,310,200.00			129,310,200	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.09	Program Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	100%	54,719,700.00			54,719,700	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.29	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	83,221,500.00			83,221,500	Sekretariat DPRD
4.03.4.03.01.01.07	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%			95%	72,890,000.00	72,890,000	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	95%	71,815,000.00			71,815,000	Bappelitbang
4.04.4.04.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%			100%	227,689,800.00	227,689,800	BPKAD
4.04.4.04.06.01.49	Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran	Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat waktu	100%	100%	565,441,150.00	100%	381,965,700.00	947,406,850	BPKAD
4.04.4.04.06.01.80	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu	100%	100%	566,842,890.00	100%	472,605,500.00	1,039,448,390	BPKAD
4.04.4.04.06.01.81	Program Penatausahaan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	432,991,500.00	100%	480,190,000.00	913,181,500	BPKAD
4.04.4.04.06.01.82	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Jumlah Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7.5 % Pertahun	5000 OP	375,449,000.00	5000 OP		375,449,000	BPKAD
4.04.4.04.06.01.85	Program Peningkatan Penerimaan Pajak	Pertumbuhan PAD	7.5 % Pertahun				317,155,000.00	317,155,000	BPKAD



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.04.4.04.06.01.83	Program Pembukuan dan Pelaporan	Persentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tepat waktu	100%	100%	204,487,000.00		49,443,000.00	253,930,000	BPKAD
4.04.4.04.06.01.84	Program Penagihan dan Keberatan	Persentase Objek Pajak yang ditagih	6% dari Pendapatan Daerah	69%	615,058,500.00		60,350,400.00	675,408,900	BPKAD
4.04.4.04.06.01.86	Program Perencanaan Penganggaran Daerah						421,264,400.00	421,264,400	
1.05.1.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-			100%	11,544,000.00	11,544,000	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15,744,000.00	-		15,744,000	Bakesbangpol
4.01.4.01.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	99%	26,384,000.00			26,384,000	Kec. Katingan Hilir
	Sasaran								
	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat								
	Program								
4.03.4.03.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan	6%	6%	57,575,000.00	100%	77,920,000.00	135,495,000	Bappelitbang
2.06.2.06.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	92%	96%	1,031,632,578.00	99%	722,423,200.00	1,754,055,778	Disdukcapil
2.06.2.06.01.01.16	Program Administrasi Pencatatan Sipil	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil	55%	41%	149,751,000.00	47%	17,000,000.00	166,751,000	Disdukcapil
2.06.2.06.01.01.17	Program Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi kependudukan	100%	100%	343,144,000.00	100%	333,679,000.00	676,823,000	Disdukcapil
4.01.4.01.03.01.54	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan publik	100%	100%	99,628,000.00			99,628,000	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.4.01.03.01.09	Program Pelayanan Administrasi Umum	Persentase RKA dan DPA dan Renstram Renja	100%	100%	27,513,250.00			27,513,250	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.47	Program Administrasi Kerjasama Pembangunan	Administrasi Kerjasama Pembangunan	100%	100%	7,002,500.00			7,002,500	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.71	Program Penunjang Kehumasan	Persentase Pelayanan Penunjang Kehumasan	100%	100%	541,261,034.00			541,261,034	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.53	Program Kerjasama dengan Media Massa	Persentase jumlah kerjasama dengan media massa	100%	100%	2,159,422,000.00		2,410,000,000.00	4,569,422,000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	80%	100%	247,020,900.00	100%	375,698,000.00	622,718,900	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51	Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance	55%	100%	71,349,537.00		172,900,000.00	244,249,537	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang prima	100%	100%	7,218,810,427.00	100%	6,091,800,000.00	13,310,610,427	Sekretariat Daerah
35	Program Administrasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%			100%	1,365,000,000.00	1,365,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.68	Program Peningkatan Administrasi Pertanahan	Peningkatan Administrasi Pertanahan	100%	100%	150,895,000.00			150,895,000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70	Program Peningkatan Otonomi Daerah	Peningkatan Otonomi Daerah	100%	100%	1,222,319,397.00	-	-	1,222,319,397	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kerjasama dengan Media Massa	100%	100%		100%	100,000,000.00	100,000,000	
	Program Kehumasan, Informasi dan Keprotokolan	Persentase Kehumasan	100%	100%			226,800,000.00	226,800,000	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
	Program Administrasi dan Koordinasi Perekonomian	Persentase administrasi dan koordinasi perekonomian yang dilaksanakan dengan baik	70%	100%		100%	707,000,000.00	707,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.57	Program Administrasi Pengembangan Perekonomian	Administrasi Pengembangan Perekonomian	100%	100%	194,490,909.00			194,490,909	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.93	Program Pembinaan dan Pengawasan Inflasi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Inflasi Daerah	100%	100%	86,143,000.00			86,143,000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.04.01.23	Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Perda	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD	90%	100%		81,91%	914,577,400.00	914,577,400	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.24	Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPRD	Persentase fasilitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD	90%	100%		75,07%	1,610,042,800.00	1,610,042,800	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.84	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%	100%	3,728,242,401.00			3,728,242,401	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.85	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	100%	3,156,622,748.35			3,156,622,748	Sekretariat DPRD
4.03.4.03.01.01.72	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi daaerah yang ditindak lanjuti	82%	85%	1,693,732,289.00	82%	211,415,400.00	1,905,147,689	Bappelitbang
4.01.4.01.10.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	2,400,000.00	100%	45,912,000.00	48,312,000	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.11.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90%	100%	102,100,000.00	100%	73,659,000.00	175,759,000	Kec. Kamipang
4.01.4.01.12.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85%	85%	10,665,000.00	86%	62,084,000.00	72,749,000	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.13.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	80%	100%	20,000,000.00	98%	38,420,000.00	58,420,000	Kec. Katingan Hilir

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.4.01.14.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	85%	23,500,000.00	100%	30,645,500.00	54,145,500	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.15.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)				100%	28,725,000.00	28,725,000	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.16.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	42,285,000.00	100%	137,919,000.00	180,204,000	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.18.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	62,715,000.00	100%	125,408,500.00	188,123,500	Kec. Marikit
4.01.4.01.19.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	38,740,000.00	98%	68,725,000.00	107,465,000	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.20.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	12,550,000.00	100%	32,140,000.00	44,690,000	Kec. Mendawai
4.01.4.01.21.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	20,000,000.00	100%	38,800,000.00	58,800,000	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.22.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	67,000,000.00	100%	92,315,000.00	159,315,000	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.17.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	21,100,000.00	100%	42,361,000.00	63,461,000	Kec. Sanaman Mantikei
	Sasaran								
	Meningkatnya penegakan hukum								
4.01.4.01.03.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	100%	100%	183,330,653.00	100%		183,330,653	Sekretariat Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
4.01.4.01.03.01.56	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase kasus yang memperoleh bantuan hukum	80%	100%	152,331,500.00	100%	100,000,000.00	252,331,500	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.55	Program Peningkatan Kepastian Hukum	Peningkatan Kepastian Hukum	80%	100%	393,742,000.00			393,742,000	Sekretariat Daerah
Misi II : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Kemandirian Pangan									
	Tujuan :								
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan									
	Sasaran								
Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan									
	Program								
3.03.3.03.01.01.44	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai	18.34	66.53%	6,590,955,500.00	0.74%	588,626,100.00	7,179,581,600	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.46	Program Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Persentase usaha dan kelembagaan kelompok tani yang berkembang	37.89	27.97%	423,417,600.00	63.49%	279,232,000.00	702,649,600	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.49	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	64,556	69,224	344,205,650.00	73,535.29	326,512,250.00	670,717,900	Distanpaper
		- Padi (ton)	64,125	68,783.16		72,271.13		-	
		- Jagung (ton)	359	368.56		378.53		-	
		- Bawang Merah (ton)	18	18.00		30.00		-	
		- Cabe (ton)	18	18.00		110.00		-	
		- Pisang (pohon)	18	18.00		619.19		-	
		- Durian (Kg)	18	18.00		126.44		-	
3.03.3.03.01.01.47	Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Persentase Hasil Produksi beras yang dipasarkan dalam kemasan	15%	75%	20,745,000.00			20,745,000	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.42	Program Pengembangan Perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan	14,167	93,20	237,650,000.00	432.7	292,520,000.00	530,170,000	Distanpaper
		- Karet (ton)	2,650	136		116		-	
		- Sawit (ton)	167	112,94		210.4		-	
		- Kelapa (ton)	11,350	204,95		106.3		-	
3.03.3.03.01.01.43	Program Pengembangan Peternakan	Jumlah populasi ternak	382,017	98,86	5,539,975,000.00		332,867,050.00	5,872,842,050	Distanpaper
		- Ternak Besar (ekor)	9,680	97,10		94,3%		-	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		- Ternak Kecil (ekor)	18,375	101,42		99.3%		-	
		- Ternak Unggas (ekor)	353,962	100,28		99,0%		-	
3.03.3.03.01.01.45	Program Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah ternak yang terobati (%)	100	100	59,950,000.00	76,15%	129,439,000.00	189,389,000	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.48	Program Pengembangan Data dan Informasi Pertanian dan Perikanan	Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%)	100	100	10,000,000.00		49,500,000.00	59,500,000	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.29	Program Grand Desain dan Base Potensi Pertanian			100%	21,250,000.00	-		21,250,000	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah luasan PLTB tertanami dan terolah			29,909,000.00	-		29,909,000	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.20	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	429.87	3535.89	1,720,851,800.00	3550.49	663,716,100.00	2,384,567,900	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.23	Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	1	3	232,060,000.00	6	0	232,060,000	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	5427	3108.61	1,360,690,350.00	314,973.00	907,192,500.00	2,267,882,850	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.23	Program Pengembangan Perikanan Budidaya						45,000,000.00	45,000,000	
3.03.3.03.01.01.39	Program Pengembangan Perikanan Tangkap						3,990,000.00	3,990,000	
	Sasaran								
	Meningkatnya ketahanan pangan								
	Program								
2.03.3.03.01.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase penurunan kecamatan rawan pangan	7.7			13.75%	121,890,000.00	121,890,000	Distanpaper
		Jumlah data ketersediaan dan kerawanan pangan	24					-	
		Jumlah ragam pangan dan pangan olahan	48					-	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
3.03.3.03.01.01.16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)		15.40%	85.95%	741,022,785.00			741,022,785	Distanpaper
	Sasaran								
	Meningkatnya daya saing dan investasi daerah								
	Program								
4.01.4.01.09.01.18	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilakukan	3	4	101,297,000.00			101,297,000	DPM-PTSP
4.01.4.01.09.01.21	Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	35%	100%	51,239,500.00			51,239,500	DPM-PTSP
4.01.4.01.09.01.25	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP	-		47,366,000.00			47,366,000	DPM-PTSP
4.01.4.01.09.01.26	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	85%	100%	42,585,000.00			42,585,000	DPM-PTSP
2.01.2.01.01.01.19	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	persentase wilayah transmigrasi yang dikembangkan	-	100%	116,000,000.00			116,000,000	Distransnaker
	Sasaran								
	Meningkatnya Sektor UMK								
	Program								
2.11.2.11.01.01.28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM Aktif	1502 UKM aktif	90.00%	313,546,151.00	91%		313,546,151	DisKopUKMPP
3.07.2.11.01.01.23	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP		1 Produk	454,149,340.00			454,149,340	DisKopUKMPP
3.06.2.11.01.01.20	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	9,21%	9.49%	4,207,720,528.00	7%	326,387,500.00	4,534,108,028	DisKopUKMPP
3.06.2.11.01.01.21	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga		80%	65,533,500.00	-		65,533,500	DisKopUKMPP
3.06.2.11.01.01.22	Program Peningkatan Layanan Kemetrologian	Persentase Alat UTTP yang sesuai standar		23.25%	39,616,200.00	58.33%	1,148,203,400.00	1,187,819,600	DisKopUKMPP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
3.07.2.11.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM berbasis teknologi	0	10%	226,299,600.00	10%		226,299,600	DisKopUKMPP
	Sasaran								
	Meningkatnya daya saing Koperasi								
	Program								
2.11.2.11.01.01.27	Program Pembinaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	40%	42.00%	253,480,727.00	44.00%	38,038,859.00	291,519,586	DisKopUKMPP
2.01.2.01.01.01.24	Program Peningkatan Produktivitas dan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	22.00%	0.00	100.00%	3,750,000.00	3,750,000	Distransnaker
		- Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1	-	1.00%				-	
2.01.2.01.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			98.00%	259,839,500.00			259,839,500	Distransnaker
2.01.2.01.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			22.00%	355,560,000.00			355,560,000	Distransnaker
2.01.2.01.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan	52%	20.00%	71,416,000.00		18,450,000.00	89,866,000	Distransnaker
4.01.4.01.03.01.58	Program Administrasi Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM, BUMD Dan Perbankan	Administrasi Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM, BUMD Dan Perbankan	100%	100.00%	98,990,850.00			98,990,850	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.92	Program Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Menengah	100%	100.00%	36,500,000.00			36,500,000	Sekretariat Daerah
	Misi III : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN								
	Tujuan :								
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan								
	Sasaran								
	Meningkatnya pembangunan perdesaan								
	Program								



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
2.07.2.07.01.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	80%	100.00%	3,112,897,000.00	99.30%	7,055,000.00	3,119,952,000	DisPMDes
2.02.2.02.01.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga daerah	46%	100.00%		98.00%		-	DP3APPKB
	Sasaran								
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa								
	Program								
2.07.2.07.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK)	80%	100.00%	1,029,502,825.00	95.01%	259,492,520.00	1,288,995,345	DisPMDes
2.07.2.07.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	80%	100.00%	390,565,000.00	100%	37,500,000.00	428,065,000	DisPMDes
4.01.4.01.10.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	-	170,355,000.00			170,355,000	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.11.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	-	100.00%	158,565,000.00			158,565,000	Kec. Kamipang
4.01.4.01.12.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	85%	100.00%	156,640,000.00			156,640,000	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.13.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	98.01%	452,668,400.00			452,668,400	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa		-	100.00%	11,200,000.00			11,200,000	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.11.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa	-	100.00%	30,650,000.00			30,650,000	Kec. Kamipang
1.03.4.01.14.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan	-	18.00%	152,835,000.00			152,835,000	Kecamatan Tewang Sangalang Garing

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
4.01.4.01.15.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat		12.00%	125,768,000.00			125,768,000	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.16.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat				296,580,000.00			296,580,000	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.18.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat		-		205,758,000.00			205,758,000	Kec. Marikit
4.01.4.01.19.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		80.00%	180,753,000.00			180,753,000	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.20.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat			100.00%	107,620,000.00			107,620,000	Kec. Mendawai
4.01.4.01.21.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat			100.00%	146,970,000.00			146,970,000	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.21.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa			100.00%	6,000,000.00			6,000,000	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.22.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat		-		241,075,000.00			241,075,000	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.22.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa				5,000,000.00			5,000,000	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.17.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi Masyarakat				194,553,000.00			194,553,000	Kec. Sanaman Mantikei
	Misi IV: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender								
	Tujuan :								
	Meningkatnya daya saing masyarakat								
	Sasaran								
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan								
	Program								
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	87%	86.94%	1,121,143,200.00	87.16 %	967,631,274.00	2,088,774,474	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI/Paket A	101%	101.94 %	40,744,100,256.45	102.19 %	65,559,938,732.60	106,304,038,989	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.24	Program Pengembangan Lembaga Pendidikan Formal dan Informal	APK SMP/MT/Paket B	91%	91.11 %	68,894,200.00	91.34 %		68,894,200	
		APM SD/MI/Paket A	87%					-	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
		APM SMP/MT/Paket B	65%					-	
1.01.1.01.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99%	99.43 %	1,196,750,000.00	99.46 %	1,085,400,000.00	2,282,150,000	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melakukan pemuktahiran data pokok pendidikan (dapodik)	83%	83.75 %	2,804,873,010.00	83.96 %	128,684,611.00	2,933,557,621	Dinas Pendidikan
								-	
4.01.4.01.03.01.91	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung ke perpustakaan	7200 org	100.00%	324,651,500.00	100.00%	759,188,000.00	1,083,839,500	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.90	Program Penataan dan Pendataan dan Dokumentasi Arsip Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	80%	100.00%	122,493,930.00	80.00%	400,431,000.00	522,924,930	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.99	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah		90%	100.00%	66,209,000.00	90.00%		66,209,000	Sekretariat Daerah
	Sasaran								
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas								
	Program								
1.02.1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan keluarga siaga	60%	100.00%	3,218,988,910.99			3,218,988,911	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber PHBS	60%	99.00%	716,998,256.00			716,998,256	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.60	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksananya cakupan program kesehatan kerja dan olahraga	12 bulan	12 bulan	28,285,000.00			28,285,000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.56	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Cakupan Rumah Tangga sehat	0%	99.00%	192,250,000.00			192,250,000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting menurun	27%	25,78%	1,461,276,240.00		532,351,150.00	1,993,627,390	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.36	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	AKABA	10,6	16,3	92,380,000.00			92,380,000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	85%	100.00%	619,501,000.00		8,185,823,844.00	8,805,324,844	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1.02.1.02.01.01.61	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	menurunnya kasus penyakit DBD	50%	100.00%	133,730,660.00			133,730,660	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	0%	100.00%	6,309,053,998.00		19,072,489,532.00	25,381,543,530	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	60%	99.00%	2,764,916,371.15			2,764,916,371	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.37	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75%	100.00%	437,559,755.00			437,559,755	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48	Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya	100%	89.00%	21,880,646,873.22		21,515,912,260.70	43,396,559,134	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (lansia)	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	60%	57.00%	96,311,450.00			96,311,450	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.52	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	85%	100.00%	323,632,570.00			323,632,570	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49	Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat	60%	100.00%	101,556,000.00			101,556,000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.53	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	51%	20%	551,903,050.00		41,680,000.00	593,583,050	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.58	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi	75%	61.00%	485,661,450.00		65,000,000.00	550,661,450	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.55	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan	- Cakupan penemuan dan penanganan kesehatan diabetes miletus	60%	79.00%	247,769,225.00			247,769,225	
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita gangguan jiwa berat	60%	0.00%					



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1.02.1.02.01.01.39	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	80%	100.00%	157,318,200.00			157,318,200	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50	Program Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Cakupan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	80%	100.00%	29,834,300.00			29,834,300	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin	80%	100.00%	3,257,850,680.00		1,573,017,426.00	4,830,868,106	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat	80%	100.00%	71,824,500.00		74,810,000.00	146,634,500	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.43	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	100.00%	2,549,866,600.00		3,717,581,683.00	6,267,448,283	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.45	Program Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	100.00%	134,400,000.00			134,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.47	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu	9%	79.90%	13,441,096,479.00		11,515,294,145.00	24,956,390,624	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.03.55	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kemandirian BLUD	BLUD	BLUD	14,710,833,897.08	BLUD	16,546,638,281.16	31,257,472,178	BLUD RSUD
1.02.1.02.01.01.64	Program Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Pelayanan RS	-	-	0.00	Pratama	531,576,000.00	531,576,000	RSUD
1.02.1.02.01.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS	80%	100.00%	2,236,123,151.00		10,216,838,221.00	12,452,961,372	RSUD
1.02.1.02.01.01.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	70%	100.00%	1,114,444,100.00		878,171,600.00	1,992,615,700	RSUD
2.07.2.07.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	80%	100.00%		100%			DisPMDes

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1.04.1.04.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase taman yang dibangun	-	26.14%	1,586,459,750.00		1,532,061,500.00	3,118,521,250	Disperkimtan
		Persentase taman yang dipelihara	-					-	
	Sasaran								
	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran								
	Program								
1.06.1.06.02.01.15	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial	57.14%	57.60%	350,774,150.00	57.66%	170,949,000.00	521,723,150	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.22	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	55%	60.00%	25,434,000.00	70.00%		25,434,000	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS tertangani	43,84%	73.21%	435,923,100.00	75.80%	25,404,400.00	461,327,500	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.32	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial	85%	90.00%	255,335,000.00	95.00%	155,871,000.00	411,206,000	Dinas Sosial
1.06.4.01.13.01. 32	Program Penangan Bencana, Perlindungan dan Jainan Sosial			100.00%	80,000,000.00			80,000,000	Dinas Sosial
	Tujuan :								
	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan								
	Sasaran								
	Meningkatnya pengarusutamaan gender								
	Program								
2.08.2.02.01.01.15	Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78.69%	79%	4,781,068,160.00	86%	3,260,225,700.00	8,041,293,860	DP3APPKB
2.08.2.02.01.01.19	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Persentase Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	12.42%	100%		100%	27,987,900.00	27,987,900	DP3APPKB
2.08.2.02.01.01.26	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Kualitas Pemberdayaan Keluarga	36.65%	90%	419,440,000.00	97%	177,118,900.00	596,558,900	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga daerah	46.37%	100%	228,049,000.00	98%	509,926,420.00	737,975,420	DP3APPKB



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
2.02.2.02.01.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kelembagaan PUG Meningkat	100.00%	99%	67,412,600.00	98%		67,412,600	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		100.00%	100%	380,928,988.00	100%		380,928,988	
2.02.2.02.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Terhadap Perlindungan Perempuan	100.00%	99%	47,520,000.00	98%	0.00	47,520,000	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.20	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu	100.00%	86%	31,040,000.00	98%		31,040,000	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase pemenuhan kabupaten layak anak	100.00%	100%	53,803,700.00	98%	64,030,000.00	117,833,700	DP3APPKB
4.01.4.01.10.01.83	Program Kabupaten Layak Anak ( KLA )		-	-	11,000,000.00			11,000,000	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.17.01.83	Program Kabupaten Layak Anak ( KLA )	Terlaksananya kegiatan implementasi dan monev KLA		100%	20,000,000.00			20,000,000	Kec. Sanaman Mantikei
4.01.4.01.16.01.83	Program Kabupaten Layak Anak ( KLA )				20,000,000.00			20,000,000	Kec. Katingan Tengah
1.06.4.01.10.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		-		38,400,000.00			38,400,000	
Misi V : Peningkatan Infrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih, dan Komunikasi									
Tujuan :									
Meningkatnya konektivitas antar wilayah									
Sasaran									
Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga									
Program									

*Wag 1/4*

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
1.03.1.03.01.01.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjir yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan	9.26%	16.43%	1,586,345,000.00	19.28%	1,196,024,350.00	2,782,369,350	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang dibangun	797,2 Km	2,51 (20,5 Km)	58,866,524,812.00	1,52 (12,61 Km)	19,954,672,800.00	78,821,197,612	DisPUPRHub
		Persentase jalan yang ditingkatkan	104,73 Km	13,76 (16,71 Km)		11,04 (15,08 Km)		-	
1.03.1.03.01.01.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	161,86 Km	1,91 (3,15 Km)	9,965,204,726.00	2,42 (4,1 Km)	8,589,909,080.00	18,555,113,806	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.34	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	17 Dokumen ( 2 Dokumen RRTR, 5 Dokumen RTBL, dan 10 Dokumen RDTR)	1	294,449,750.00	3	1,630,560,000.00	1,925,009,750	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.25	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Pola Ruang	70%	80%		80%	52,799,750.00	52,799,750	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.31	Program Pemberdayaan Jasa konstruksi	Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	516,883,351.00	100%	450,611,600.00	967,494,951	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.42	Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan ( DBH - DR )	Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					585,913,282.00	585,913,282	
1.04.1.04.01.01.21	Program Peningkatan dan Pemerataan Sumber Daya Energi	Persentase jaringan LPJU yang berfungsi baik	36%	36%	1,719,220,386.00		4,309,026,306.00	6,028,246,692	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.24	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kawasan perkotaan dan perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai	10%	20%	7,015,641,300.00		6,158,129,200.00	13,173,770,500	Disperkimtan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
1.04.1.04.01.01.26	Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesan	Persentase jalan desa yang dibangun	-	30%	8,113,578,300.00		4,476,437,150.00	12,590,015,450	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.29	Program Pembangunan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan SPM Perumahan Rakyat	25%	26.14%	753,697,400.00		230,833,000.00	984,530,400	Disperkimtan
2.09.1.03.01.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Rambu-Rambu Terpasang	28%	30%	1,362,304,839.00	32%	149,430,000.00	1,511,734,839	DisPUPRHub
2.09.1.03.01.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	100%	100%	819,170,000.00	100%	427,350,900.00	1,246,520,900	DisPUPRHub
2.09.1.03.01.01.23	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang direhab dan dipelihara	100%	100%	169,500,000.00	100%	14,850,000.00	184,350,000	DisPUPRHub
1	Program Pengaturan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Persentase Rumah Tangga yang terlanyi sistem pengelolaan air limbah setempat	-	32.82%	533,581,106.00	37.08%	828,491,960.00	1,362,073,066	Disperkimtan
4.01.4.01.10.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-		50%	1,250,100,740.00	1,250,100,740	Kec. Katingan Kuala
1.03.4.01.10.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan		-		258,000,000.00			258,000,000	
1.03.4.01.10.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		-		80,085,000.00			80,085,000	
4.01.4.01.13.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-			92%	1,251,681,240.00	1,251,681,240	Kec. Katingan Hilir
1.03.4.01.13.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan			100%	5,500,000.00			5,500,000	
4.01.4.01.14.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-			50%	642,602,290.00	642,602,290	Kec. Tewang Sangalang Garing
1.03.4.01.14.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan		-		245,000,000.00			245,000,000	
4.01.4.01.16.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-			50%	612,993,940.96	612,993,941	Kec. Katingan Tengah

W 9/14

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
1.03.4.01.16.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan				213,987,000.00			213,987,000	
4.01.4.01.19.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-			100%	642,455,000.00	642,455,000	Kec. Katingan Hulu
1.03.4.01.19.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				354,000,000.00			354,000,000	
1.03.4.01.16.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				39,928,000.00			39,928,000	
1.04.1.04.01.01.30	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	Persentase bahu jalan dan drainase yang dibersihkan di wilayah perkotaan	100%	100%	3,416,203,210.00		2,969,545,950.00	6,385,749,160	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.32	Program Pembangunan Perumahan						2,380,980,000.00	2,380,980,000	
	Sasaran								
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak								
	Program								
1.03.1.03.01.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	59.23%	61.39%	5,544,180,600.00	62.47%	4,650,998,400.00	10,195,179,000	DisPUPRHub
1.04.1.04.01.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan	36.52%	49.52%	10,346,229,500.00		5,379,960,300.00	15,726,189,800	Disperkimtan
	Sasaran								
	Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi								
	Program								
2.10.2.10.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat daerah yang memiliki insfrastruktur TIK sesuai ketentuan	47%	45%	3,134,074,750.00	81%	2,970,658,000.00	6,104,732,750	Diskominfoopersantik
2.14.2.10.01.01.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Persentase data statistik yang terpublikasi		5%	14,000,000.00			14,000,000	Diskominfoopersantik
4.01.4.01.03.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	100%	263,603,676.00			263,603,676	Sekretariat Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
	Misi VI : Meningkatkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkesinambungan								
	Tujuan :								
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
	Sasaran								
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan								
	Program								
2.05.2.05.01.01.35	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun	3%			1%	88,975,000.00	88,975,000	DLH
2.05.2.05.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun	-	94%	329,911,511.00			329,911,511	DLH
2.05.2.05.01.01.24	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indek Kualitas Tutupan Lahan	77,75 Point	78,3 Point	60,000,000.00	78,65 Point	418,986,975.00	478,986,975	DLH
2.05.2.05.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indek Kualitas Tutupan Lahan	77,75 Point	78,3 Point	99,500,000.00			99,500,000	DLH
2.05.2.05.01.01.34	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	26%			28%	228,039,400.00	228,039,400	DLH
2.05.2.05.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	26%	28%	1,789,480,916.00			1,789,480,916	DLH
2.05.2.05.01.01.36	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air	-			53%	34,552,000.00	34,552,000	DLH
2.05.2.05.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Udara	-	50,56 Point	83,101,400.00	53,53 Point		83,101,400	DLH
2.05.2.05.01.01.26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penerimaan Asli Daerah	-			127%	1,098,272,800.00	1,098,272,800	DLH
2.05.2.05.01.01.26	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan Lingkungan	Jumlah Parameter yang terakreditasi	10 Parameter	1 Parameter	1,116,052,510.00			1,116,052,510	DLH

129x64

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp	Rp	
2.05.2.05.01.01.28	Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan (DBH - DR)	Jumlah Bibit Pohon	-	169500	1,251,291,700.00	169500	1,755,138,300.00	3,006,430,000	DLH
2.05.2.05.01.01.27	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH - DR)	Jumlah titik Api	100	80	4,679,153,918.84	70	451,606,211.88	5,130,760,131	DLH
2.05.2.05.01.01.29	Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah. (DBH-DR)	Jumlah Bibit Pohon	-	31455	964,789,440.00	15727.5	285,683,030.00	1,250,472,470	DLH
1.05.1.05.02.01.29	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.	Jumlah korban jiwa akibat kebakaran	0.00%	100%	82,065,000.00			82,065,000	Satpol PP
		Jumlah harta benda akibat kebakaran	0.00%					-	
1.06.1.06.01.01.25	Program Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase cakupan kecamatan siapsiaga menghadapi bencana	84.62%	100%	44,000,000.00	100%	43,039,000.00	87,039,000	BPBD
1.06.1.06.01.01.28	Program Logistik dan Peralatan	Jumlah posko yang mendapat ketersediaan logistik	5 posko	25%	25,520,000.00	0%	-	25,520,000	BPBD
1.06.1.06.01.01.30	Program Pasca Bencana	Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0.00%	33%	28,400,000.00	100%	6,671,108,000.00	6,699,508,000	BPBD
1.06.1.06.01.01.31	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH - DR)	Cakupan luasan resiko bencana akibat kebakaran hutan dan lahan	0.00%	88%	13,027,995,258.00	88%	5,709,462,520.00	18,737,457,778	BPBD
1.06.1.06.01.01.37	Program Penanganan Bencana (Tanggap Darurat)	Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat	0.00%	0%	0.00	67%	360,558,700.00	360,558,700	BPBD
	Sasaran								
	Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam								
	Program								
3.02.2.13.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar	5%	10%	1,786,558,950.00	15%	2,654,183,000.00	4,440,741,950	Disbudparpora
		Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan	32.616 kunjungan	11%		-67.45%		-	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
	Misi VII : Membangun Semangat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Gotong Royong Serta Harmonisasi Antar Lapisan Masyarakat Dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat, Dan Sosial Budaya								
	Tujuan :								
	Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)								
	Sasaran								
	Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat								
	Program								
1.05.1.05.02.01.07	Program Pemeliharaan Kentrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang diselesaikan	80.00%	100%	511,452,846.00	95%	40,710,000.00	552,162,846	Satpol PP
1.05.1.05.01.01.21	Program Pendidikan Politik dan Masyarakat	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	70.00%	100%	81,200,000.00	100%	39,790,000.00	120,990,000	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.27	Program Kewaspadaan	Persentase kecamatan yang diawasi keamanannya	70.00%	100%	1,027,553,000.00	100%	1,433,985,000.00	2,461,538,000	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.26	Program Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa	80.00%	100%	205,785,000.00	-	-	205,785,000	Bakesbangpol
2.13.2.13.01.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	95	126	837,115,800.00	126	33,850,000.00	870,965,800	Disbudparpora
		Persentase Pemuda Yang Berwirausaha	0.23%	0.28%		0.42%		-	
		Jumlah Pemuda Yang lulus seleksi mengikuti pemuda pelopor tingkat nasional	0	0		0		-	
		Jumlah peserta yang lulus seleksi mengikuti paskibra tingkat nasional	0	0		0		-	
2.13.2.13.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even Olahraga	0	50	837,718,000.00	70	1,103,833,500.00	1,941,551,500	Disbudparpora
		Jumlah pelajar yang lulus seleksi mengikuti event olahraga	0	0		0		-	

*Handwritten signature*

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
				2019		2020			
				K	Rp	K	Rp		
		Jumlah pelajar yang memenangkan medali pada even olah raga kabupaten	0	0		0		-	
4.01.4.01.03.01.34	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	80.00%	100%	77,289,000.00			77,289,000	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.31	Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	100.00%		1,035,600,000.00	100%	1,069,430,000.00	2,105,030,000	Sekretariat Daerah
		Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	23.00%					-	
		Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	5.00%					-	
4.01.4.01.03.01.78	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah	Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	100.00%	100%	20,677,056,217.25			20,677,056,217	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33	Program Koordinasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase koordinasi pemberantasan penyakit masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	100%	154,225,000.00		50,150,000.00	204,375,000	Sekretariat Daerah
	Sasaran								
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal								
	Program								
2.16.2.13.01.01.21	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Peningkatan Sanggar Seni Budaya Yang Aktif	8 sanggar	12.50%	1,289,301,950.00	25.00%	183,775,500.00	1,473,077,450	Disbudporpora







[Lampiran B Tabel 6.5] PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021-2023 (Nomenklatur PMDN No. 90/2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050 - 3708 Tahun 2020)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Misi I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM														
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel														
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi														
Arah Kebijakan a : Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan														
X	XX													
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	227,353,851,510	B	231,988,920,178	B	244,380,723,152	B	703,723,494,840	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	A	92,964,847,529	A	94,860,923,813	A	100,923,089,624	A	288,748,860,966	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB	10,422,060,426	BB	11,366,297,377	BB	11,603,538,055	BB	33,391,895,858	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	100	8,025,999,822	100	8,340,194,445	100%	8,449,995,580	100%	24,816,189,847	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	13,604,305,445	B	14,069,282,762	B	14,602,509,044	BB	42,276,097,251	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	100%	5,147,226,885	100%	5,123,849,115	100%	5,191,306,109	100%	15,462,382,109	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	C	4,016,405,813	CC	4,537,329,308	B	4,597,064,595	B	13,150,799,716	Dinas Sosial	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	100%	3,859,316,365	100%	4,482,925,315	100%	4,541,944,357	100%	12,884,186,037	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	99%	5,176,676,865	100%	5,648,345,667	100%	5,722,707,814	100%	16,547,730,346	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	11,752,653,286	B	13,452,026,213	B	13,629,126,130	63	38,833,805,629	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	6,444,174,938	BB	6,217,170,727	BB	6,348,821,624	BB	19,010,167,289	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB	4,712,700,269	BB	5,391,690,887	A	5,462,674,097	A	15,567,065,253	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	4,775,012,630	B	4,786,502,734	B	4,849,518,463	B	14,411,033,827	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	4,662,020,366	B	5,281,993,239	BB	5,351,532,247	BB	15,295,545,852	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB	5,530,503,893	BB	5,477,044,147	A	5,549,151,058	A	16,556,699,098	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	5,207,649,961	BB	8,118,454,253	BB	8,270,936,112	BB	21,597,040,326	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	5,693,521,560	BB	6,725,215,998	A	6,813,755,462	A	19,232,493,020	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	31,541,964,811	BB	31,949,738,459	A	32,987,166,246	A	96,478,869,516	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	23,917,717,907	BB	29,455,628,632	A	29,843,420,724	A	83,216,767,263	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	6,725,936,493	BB	7,059,463,338	BB	7,152,403,268	BB	20,937,803,099	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	CC	15,726,642,498	B	22,419,226,545	B	22,714,382,315	B	60,860,251,358	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	4,824,374,384	B	4,832,751,879	B	4,896,376,492	B	14,553,502,755	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	BB	6,689,236,527	BB	6,984,584,521	A	7,076,538,649	A	20,750,359,697	Inspektorat Daerah	Inspektorat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	2,445,913,271	BB	2,954,439,572	BB	2,993,335,646	BB	8,393,688,489	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	2,478,252,964	B	2,576,578,311	B	2,610,499,729	B	7,665,331,004	Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	2,923,825,925	BB	3,207,758,992	A	3,249,990,091	A	9,381,575,008	Kecamatan Kamipang	Kecamatan Kamipang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	2,828,388,514	BB	2,799,014,104	BB	2,835,863,955	BB	8,463,266,573	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	4,349,911,790	BB	4,637,207,857	BB	4,698,258,074	BB	13,685,377,721	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	3,924,147,298	BB	4,144,799,988	BB	4,199,367,510	BB	12,268,314,796	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	3,155,662,793	B	3,079,401,912	B	3,119,943,152	B	9,355,007,857	Kecamatan Pulau Malan	Kecamatan Pulau Malan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	3,875,642,710	BB	4,122,402,276	BB	4,176,674,925	BB	12,174,719,911	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	2,359,379,888	BB	2,504,609,806	BB	2,537,583,737	BB	7,401,573,431	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	2,280,314,989	BB	2,418,171,855	BB	2,450,007,805	BB	7,148,494,649	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	2,911,156,891	BB	3,046,627,666	A	3,136,537,423	A	9,094,321,980	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	1,891,415,116	BB	2,432,708,684	BB	2,491,747,952	BB	6,815,871,752	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	1,860,303,113	B	1,976,131,736	B	2,002,148,097	B	5,838,582,946	Kecamatan Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	3,909,968,081	BB	4,022,923,205	BB	4,075,886,183	BB	12,008,777,469	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP					B	1,800,000,000	B	1,800,000,000		Dinas Perhubungan dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP					B	1,800,000,000	B	1,800,000,000		Badan Pendapatan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN											
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kepegawaian daerah yang dikeluarkan tepat waktu	80%	2,886,424,134	80%	1,880,764,721	80%	1,905,525,547	80%	6,672,714,402	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	80%	1,083,584,594	80%	770,662,000	80%	780,807,994	80%	2,635,054,588	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
Misi I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM														
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel														
Sasaran 1.2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja														
Arah Kebijakan b : Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel														
X	XX													
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	B	31,541,964,811	BB	31,949,738,459	A	32,987,166,246	A	96,478,869,516	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
6	01		INSPEKTORAT DAERAH											
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	2,122,412,096	Level 4	2,897,316,353	Level 4	2,935,460,383	Level 4	7,955,188,832	Inspektorat Daerah	Inspektorat
				Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang tidak mendapat temuan hasil pengawasan	85%		85%		85%		85%		Inspektorat Daerah	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat kapabilitas APIP	3 level	543,362,700	4 level	434,919,973	Level 4	440,645,824	Level 4	1,418,928,497	Inspektorat Daerah	Inspektorat
Misi I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM														
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel														
Sasaran 1.3 : Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan														
Arah Kebijakan c : Peningkatan kualitas pelaporan keuangan														
5	02		KEUANGAN											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengelolaan keuangan daerah	100%	258,353,895,038	100%	256,661,945,483	100%	260,040,976,156	100%	775,056,816,677	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	100%	777,284,601	100%	734,222,523	100%	743,888,780	100%	2,255,395,904	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan realisasi PAD (%)	7%	2,204,941,939	8%	2,425,140,795	9%	2,457,068,493	9%	7,087,151,227	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
Misi I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM															
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel															
Sasaran 1.4 : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat															
Arah Kebijakan d : Peningkatan inovasi pelayanan publik															
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	99.50%	433,054,454	99.75%	108,396,161	100.00%	109,823,229	100.00%	651,273,844	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil	55.00%	144,115,150	65.00%	199,596,153	75.00%	202,223,896	75.00%	545,935,199	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki	43.07%		53.07%		73.07%		73.07%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	95.28%		97.28%		99.28%		99.28%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi	100.00%	428,190,415	100.00%	528,756,161	100.00%	535,717,393	100.00%	1,492,663,969	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Perekaman KTP Elektronik	99.74%	0	99.84%		99.94%		99.94%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan pendataan basis data	12.17%		20.17%		28.17%		28.17%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi pemerintah daerah yang diimplementasikan sesuai dengan standar/standar	84%	3,535,744,610	90%	5,544,406,160	95%	5,617,399,912.33	95%	14,697,550,682	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
7	01		KECAMATAN												
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	71,069,100	100%	78,019,725	100%	79,046,878	100%	228,135,703	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90%	21,200,000	90%	26,200,000	90%	26,544,931	90%	73,944,931	Kecamatan Kamipang	Kecamatan Kamipang	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	31,507,776	100%	42,976,690	100%	43,542,491	100%	118,026,957	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90%	29,275,693	90%	35,115,693	90%	35,578,002	90%	99,969,388	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	45,959,660	100%	61,606,592	100%	62,417,661	100%	169,983,913	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	14,900,000	100%	22,900,000	100%	23,201,485	100%	61,001,485	Kecamatan Pulau Malan	Kecamatan Pulau Malan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	47,494,256	100%	47,494,256	100%	48,119,532	100%	143,108,044	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	59,589,690	100%	55,688,090	100%	56,421,240	100%	171,699,020	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	43,311,809	100%	64,142,990	100%	64,987,451	100%	172,442,250	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	16,816,000	100%	28,900,746	100%	29,281,233	100%	74,997,979	Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	12,999,782	100%	34,939,260	100%	35,399,246	100%	83,338,288	Kecamatan Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	285,934,000	100%	126,420,000	100%	128,084,357	100%	540,438,357	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	136,320,506	100%	206,521,850	100%	209,240,771	100%	552,083,127	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah
Misi 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM														
Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel														
Sasaran 1.5 : Meningkatnya penegakan hukum														
Arah Kebijakan a : Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum.														
4	01		SEKRETARIAT DAERAH											
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dengan	100%	18,254,292,303	100%	22,352,835,829	100%	22,647,117,546	100%	63,254,245,678	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.														
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan														
Sasaran 2.1 : Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan														
kan a : Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketaha														
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah total produksi perikanan (Tanakan Kabupaten	6511.7 ton	4,732,969,260	6781 ton	3,180,066,000	6602.48 ton	3,221,932,513	6602.48 ton	11,134,967,773	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN RUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan (budidaya ) Kabupaten	5.988,64 ton	2,511,419,945	6.288,07 ton	1,748,148,973	6.602,48 ton	1,771,163,873	6.602,48 ton	6,030,732,791	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	3 jenis	82,850,000	3 jenis	33,280,000	3 jenis	33,718,141	3 jenis	149,848,141	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Capaian produktivitas pertanian perhektar pertahun	80%	2,473,081,183	85%	914,549,443	90%	926,589,758	90%	4,314,220,384	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	80%	2,247,227,636	85%	5,260,694,014	90%	5,329,952,612	90%	12,837,874,262	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.														
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan														
Sasaran 2.1 : Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan														
Arah Kebijakan b : Penguatan rantai nilai komoditi pertanian														
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	100%	273,014,466	100%	300,850,262	100%	304,811,045	100%	878,675,773	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang ditindaklanjuti	40%	733,708,070	40%	1,143,585,483	40%	1,158,641,125	40%	3,035,934,678	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Usaha dan Kelembagaan Kelompok Tani yang	60%	591,661,787	60.65%	313,459,683	62%	317,586,473	62%	1,222,707,943	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.														
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan														
Sasaran 2.1 : Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan														
Arah Kebijakan c : Peningkatan kualitas irigasi														
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase lahan yang terlayani jaringan irigasi (%)	63.55%	7,448,582,092	64.44%	4,318,450,000	65.72%	4,375,303,676	65.72%	16,142,335,768	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Berhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.														
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan														
Sasaran 2.2 : Meningkatnya ketahanan pangan														
Arah Kebijakan d : Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau														
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan	40%	859,516,714	44%	879,025,421	48%	890,598,052	48%	2,629,140,187	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan ( Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	50%	68,896,143	55%	103,823,776	65%	105,190,647	65%	277,910,566	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pemenuhan data ketersediaan dan kerawanan pangan	100%	62,611,875	100%	77,997,050	100%	79,023,904	100%	219,632,829	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.														
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan														
Sasaran 2.3 : Meningkatnya daya saing investasi daerah														
Arah Kebijakan a : Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara.														
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	10 (PMA) / 54 (PMDN)	43,464,988	10 (PMA) / 54 (PMDN)	100,000,000	10 (PMA) / 54 (PMDN)	101,316,530	10 (PMA) / 54 (PMDN)	244,781,518	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten (PMA + PMDN)	2%	37,410,000	2%	50,000,000	2%	50,658,265	2%	138,068,265	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Predikat IKM DPMPSTP	70/B	243,108,166	75/B	1,351,866,030	80/BB	1,369,663,747	80/BB	2,964,637,943	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Persentase penanganan Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	0	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	65%	335,173,000	70%	335,173,000	75%	339,585,652	75%	1,009,931,652	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi Penanaman Modal yang lengkap, akurat dan update	100%	19,998,840	100%	100,000,000	100%	101,316,530	100%	221,315,370	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	6.4%	517,488,667	6.6%	1,791,692,439	6.8%	1,815,280,602	6.8%	4,124,461,708	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	2%	44,214,000	3%	79,039,901	4%	80,080,485	4%	203,334,386	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia	80%	55,470,000	90%	258,284,699	100%	261,685,094	100%	575,439,793	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.															
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan															
Sasaran 2.4 : Meningkatnya sektor UMK															
Arah Kebijakan b : Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM															
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	92%	48,600,000	93%	116,999,050	94%	118,539,377	94%	284,138,427	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	(Persentase) meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi wirausaha	98.5%	21,480,000	98.7%	350,303,230	98.9%	354,915,076	98.9%	726,698,306	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku			10%	91,054,830	12.5%	92,253,594	12.5%	183,308,424	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku			5%		10%		10%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	7%	1,399,131,870	0.00%	-	8%	164,786,883	8%	1,563,918,753	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	

*Handwritten signature*



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	6%	191,259,998	6%	328,375,244	6%	332,698,402	6%	852,333,644	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
				Persentase kinerja realisasi pupuk			9.2%		9.3%		9.5%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Jenis komoditas lokal yang dikembangkan untuk tujuan ekspor	0	0	2 jenis	34,674,933	2 jenis	35,131,439	4 jenis	69,806,372	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang	70%	250,530,000	80%	524,127,700	80%	531,027,997	80%	1,305,685,697	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Jenis komoditas lokal yang dapat menembus pasar regional maupun nasional			2	84,959,798	3	86,078,319	5	171,038,117	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.															
Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan															
Sasaran 2.5 : Meningkatnya daya saing Koperasi															
Arah Kebijakan c : Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembiayaan bagi koperasi															
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	45%	171,485,000	46%	220,440,000	47%	223,342,158	47%	615,267,158	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya			11%	24,985,454	11%	25,314,395	11%	50,299,849	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	(Persentase) meningkatnya koperasi yang berkualitas	8%	434,561,349	9%	295,913,505	10%	299,809,294	10%	1,030,284,148	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	1 Koperasi	0	1 Koperasi		1 Koperasi		3 Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Misi III : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.														
Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan														
Sasaran 3.1 : Meningkatnya pembangunan perdesaan														
Arah Kebijakan a : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa														
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	90%	2,535,430,712	95%	928,180,000	100%	940,399,765	100%	4,404,010,477	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	01		KECAMATAN											
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100%	8,000,000	100%	8,787,500	100%	8,903,190	100%	25,690,690	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100%	11,158,000	100%	28,999,000	100%	29,380,780	100%	69,537,780	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar		-	100%	5,405,000	100%	5,476,158	100%	10,881,158	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	100%	36,515,000	100%	35,440,000	100%	35,906,578	100%	107,861,578	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit
Misi III : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.														
Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan														
Sasaran 3.2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa														
Arah Kebijakan b : Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes														
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	90%	59,040,000	95%	500,000,000	100%	506,582,648	100%	1,065,622,648	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa	90%	36,472,130	95%	231,000,000	100%	234,041,184	100%	501,513,314	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif	90%	1,287,271,289	95%	1,397,446,520	100%	1,415,844,318	100%	4,100,562,127	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	95%	282,627,800	95%	229,252,261	95%	232,270,435	95%	744,150,496	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100%	30,240,000	100%	42,510,040	100%	43,069,697	100%	115,819,737	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	0%	0	90%	3,297,000	90%	3,340,406	90%	6,637,406	Kecamatan Kamipang	Kecamatan Kamipang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	90%	887,082,136	90%	1,293,759,482	90%	1,310,792,209	90%	3,491,633,827	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100%	428,957,613	100%	742,597,300	100%	752,373,814	100%	1,923,928,727	Kecamatan Tewang Sangalang Garinn	Kecamatan Tewang Sangalang Garinn
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100%	392,043,368	100%	742,604,741	100%	752,381,353	100%	1,887,029,462	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100%	687,074,400	100%	1,286,359,022	100%	1,303,294,320	100%	3,276,727,742	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan	100%	342,603,766	100%	642,700,000	100%	651,161,336	100%	1,636,465,102	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah

Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.

Tujuan 4 : Meningkatnya daya saing masyarakat

Sasaran 4.1 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan

Arah Kebijakan a : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar.

Arah Kebijakan b : Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.70 %	54,765,219,327	95.20%	58,407,703,467	95.70 %	58,462,438,215	95.70 %	171,635,361,009	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	72.70 %		73.20 %		73.70 %		73.70 %		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.25%		3.50 %		3.75%		3.75%		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93.40 %		93.90 %		94.40 %		94.40 %		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pengembangan kurikulum yang dilakukan di Satuan					83.80%	381,400,000	83.80%	381,400,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan					75%	302,820,000	75%	302,820,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kualitas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra					33.33%	30,000,000	33.33%	30,000,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	rata-rata jumlah pengunjung ke perpustakaan per bulan	100	846,515,604	100	664,423,264	100	673,170,593	100	2,184,109,461	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.														
Tujuan 4 : Meningkatnya daya saing masyarakat														
Sasaran 4.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas														
Arah Kebijakan c : Peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan penanganan pandemi Covid-19 serta cakupan layanan sarana dan prasarana kesehatan														
Arah Kebijakan d : Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan														
Arah Kebijakan e : Peningkatan preventif dan promosi kesehatan														
Arah Kebijakan f : Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis														
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	92%	171,548,552,360	95%	121,303,447,580	97%	125,900,443,463	97%	418,752,443,403	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	95%	8,250,390,815	95%	8,724,809,500	97%	8,839,674,206	97%	25,814,874,521	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian Yang memenuhi Standar	90%	800,422,107	95%	349,991,786	98%	354,599,532	98%	1,505,013,425	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proposi Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	93%	2,229,433,149	97%	1,147,491,473	97%	1,162,598,539	97%	4,539,523,161	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence /mCPR)	97%	4,405,608,630	98%	4,114,560,000	100%	4,168,729,403	100%	12,688,898,033	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	98%		98%		98%		98%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.														
Tujuan 4 : Meningkatnya daya saing masyarakat														
Sasaran 4.3 : Menurunnya kemiskinan dan pengangguran														
Arah Kebijakan g : Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu														
Arah Kebijakan h : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial														
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil yang diberdayakan	80.00%	334,844,812	90.00%	204,758,190	95.00%	207,453,892	95%	747,056,894	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	80.00%	393,820,591	85.00%	512,451,867	90.00%	519,198,448	90%	1,425,470,906	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang aktif melakukan update data	45.00%	403,805,075	60.00%	466,212,656	70%	472,350,484	70%	1,342,368,215	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah bencana	90.00%	649,303,237	95.00%	632,116,972	100.00%	640,438,980	100%	1,921,859,189	Dinas Sosial	Dinas Sosial
Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.														
Tujuan 4 : Meningkatkan daya saing masyarakat														
Sasaran 4.3 : Menurunnya kemiskinan dan pengangguran														
Arah Kebijakan i : Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan tenaga kerja														
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			100%	68,347,924	100%	69,247,745	100%	137,595,669	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	15%	837,086,414	15%	776,466,562	30.77%	786,688,975	30.77%	2,400,241,951	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan di luar negeri) melalui mekanisme layanan	55%	176,562,563	55%	173,924,472	55%	176,214,239	55%	526,701,274	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta	60%	238,932,032	64%	184,458,203	67%	186,886,650	67%	610,276,885	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.														
Tujuan 5 : Meningkatkan daya saing masyarakat														
Sasaran 5.1 : Meningkatkan pengarusutamaan gender														
Arah Kebijakan a : Peningkatan kesejahteraan keluarga														
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas terhadap keluarga	99%	365,064,280	100%	535,064,280	100%	542,108,560	100%	1,442,237,120	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Keluarga Sejahtera yang difasilitasi	98%	839,549,753	98%	1,019,514,609	100%	1,032,936,821	100%	2,892,001,183	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.														
Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing masyarakat														
Sasaran 5.1 : Meningkatnya pengarusutamaan gender														
Arah Kebijakan b : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak														
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender)	98%	287,678,813	98%	491,833,516	97%	498,308,650	98%	1,277,820,979	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	99%	9,239,403	100%	30,037,466	100%	30,432,918	100%	69,709,787	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan Kabupaten Layak Anak	99%	95,192,775	100%	189,996,726	100%	192,498,089	100%	477,687,590	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.														
Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing masyarakat														
Sasaran 5.1 : Meningkatnya pengarusutamaan gender														
Arah Kebijakan c : Peningkatan perlindungan perempuan dan anak														
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)			
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan	99%	137,747,457	100%	163,017,990	100%	165,164,170	100%	465,929,617	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	99%	48,697,519					99%	48,697,519	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk	
Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI															
Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah															
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga															
Arah Kebijakan a : Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten															
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALAJ)	Persentase rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan yang terpasang	64%	6,741,044,249	66%	1,860,494,500	67%	1,884,988,462	67%	10,486,527,211	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	
				Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun dan dipelihara	100%		100%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang dibangun dan dipelihara	100%	1,125,877,000	100%	3,139,499,088	100%	3,180,831,525	100%	7,446,207,613	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	
Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI															
Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah															
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga															
Arah Kebijakan b : Peningkatan kualitas jalan dan jembatan															
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun	0,30% (2,5 Km)	106,486,170,342	0,30% (2,55 Km)	103,644,153,943	0,33% (2,75 Km)	106,001,610,206	838,11 Km	316,131,934,491	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				persentase jalan yang ditingkatkan	13.18%		5.50%		6.80%		6.80%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	2.60%		5.47%		3.29%		3.29%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Nilai Layanan Dasar IUJK di Kabupaten Katingan	100%	590,723,930	100%	602,319,680	100%	610,249,397	100%	1,803,293,007	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS LUMAH (PSUL)	(Persentase) Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU( Prasarana, Sarana, dan Utilitas	40%	27,128,585,829	50%	25,185,000,000	60%	27,516,567,998	60%	79,830,153,827	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI														
Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah														
Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga														
Arah Kebijakan c : Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan														
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	3 Dokumen	2,426,105,259	3 Dokumen	3,041,559,382	2 Dokumen	3,081,602,414	8 Dokumen	8,549,267,055	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI														
Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah														
Sasaran 6.2 : Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak														
Arah Kebijakan d : Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum														
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	46.5%	7,142,671,633	52.5%	7,628,084,400	58.40%	7,728,510,395	58.40%	22,499,266,428	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	38.62%	3,652,376,372	41.46%	3,271,118,200	44.33%	3,314,183,442	44.33%	10,237,678,014	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI														
Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah														
Sasaran 6.2 : Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak														
Arah Kebijakan e : Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan														
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten (kota yang ditangani)	34.67%	684,635,739	38.93%	569,993,251	43.19%	577,497,381	43.19%	1,832,126,371	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI														



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah														
Sasaran 6.2 : Terpenuhiya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak														
Arah Kebijakan f : Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan														
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pencapaian Jakstrada	25 Poin	4,298,868,555	26 Poin	4,647,279,656	27 Poin	4,708,462,472	27 Poin	13,654,610,683	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI														
Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah														
Sasaran 6.3 : Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi														
Arah Kebijakan g : Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika														
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	70%	737,062,370	75%	553,213,217	80%	560,496,433.16	80%	1,850,772,020	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan	74%		78%		85%		85%		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Misi VI : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN														
Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup														
Sasaran 7.1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan														
Arah Kebijakan a : Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3														
Arah Kebijakan b : Perlindungan dan konservasi sumber daya alam														
Arah Kebijakan c : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	85%	6,808,963	85%	299,999,928	85%	303,949,516	85%	610,758,407	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	75,55 Point	1,094,380,433	76,73 Point	15,632,393,605	76,85 Point	2,000,000,000	76,85 Point	18,726,774,038	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	78.9%	5,603,229,990	78.9%	1,804,674,257	78.9%	1,828,433,329	78.9%	9,236,337,570	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 yang di awasi	85%	29,999,760	85%	19,999,746	90%	20,263,049	90%	70,262,555	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan'	80%	0	85%	239,605,525	85%	242,760,003	85%	482,365,528	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG	Persentase kelompok masyarakat adat yang dibina	1%	149,920,000	1%	149,920,000	1%	151,893,741	3%	451,733,741	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lembaga kemasyarakat/kelompok lingkungan hidup yang dibina			90%	99,998,172	95%	101,314,678	95%	201,312,850	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup			100%	349,998,939	100%	354,606,779	100%	704,605,718	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjut	100%	10,720,000	100%	179,997,818	100%	182,367,543	100%	373,085,361	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Misi VI : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN														
Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup														
Sasaran 7.1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan														
Arah Kebijakan d : Pengendalian kebakaran hutan dan lahan														
Arah Kebijakan e : Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana														
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi	162,200	1,394,930,769	162,200	2,239,594,955	162,200	3,269,079,887	162,200	6,903,605,611	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	162,200		162,200		162,200	-	162,200	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan mitigasi korban bencana	100		100		100	-	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	30 Menit	5,372,783,655	30 Menit	14,631,944,974	30 Menit	1,500,000,000	30 Menit	21,504,728,629	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

W-9 Yfg



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)			
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	11,314,000					100	11,314,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Misi VI : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN															
Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup															
Sasaran 7.2 : Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam															
Arah Kebijakan f : Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam															
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	20.00%	791,030,766	33.33%	2,071,195,679	50.00%	2,098,463,585	50.00%	4,960,690,030	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	10%		18.00%		29.00%		29.00%		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Target PAD	0%	0	57%	50,000,000	74%	50,658,265	74%	100,658,265	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi	0%	0	100%	62,406,130	100%	63,227,725	100%	125,633,855	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta	
Misi VII : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA															
Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)															
Sasaran 8.1 : Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat															
Arah Kebijakan a : Pengembangan wawasan kebangsaan.															
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	70%	1,130,142,976	75%	1,815,459,266	85%	1,839,360,326	85%	4,784,962,568	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
7	01		KECAMATAN												
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	46,320,000	100%	143,220,000	100%	145,105,534	100%	334,645,534	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	90%	89,141,786	90%	200,625,000	90%	203,266,288	90%	493,033,074	Kecamatan Kamipang	Kecamatan Kamipang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
			Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	57,025,360	100%	192,597,334	100%	195,132,935	100%	444,755,629	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	85%	120,769,050	85%	494,276,505	85%	500,783,802	85%	1,115,829,357	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	63,176,981	100%	253,609,193	100%	256,948,033	100%	573,734,207	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	79,730,000	100%	218,590,000	100%	221,467,802	100%	519,787,802	Kecamatan Pulau Malan	Kecamatan Pulau Malan
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	99,954,000	100%	255,998,520	100%	259,868,816	100%	615,321,336	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	80,350,000	100%	256,279,090	100%	259,653,080	100%	596,282,170	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	19,040,000	100%	316,480,978	100%	320,647,544	100%	656,168,522	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	75,225,000	100%	221,289,772	100%	224,203,118	100%	520,717,890	Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	29,863,636	100%	218,679,545	100%	221,558,526	100%	470,101,707	Kecamatan Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	52,652,980	100%	220,760,806	100%	223,667,188	100%	497,080,974	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN/ PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	100%	181,097,000	100%	208,177,272	100%	210,917,988	100%	600,192,260	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8	01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi pancasila dan	85.00%	179,436,198	88.00%	446,359,395	90.00%	452,235,849	90%	1,078,031,442	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	88.00%	998,385,369	90.00%	1,053,316,867	95.00%	1,067,184,096	95%	3,118,886,332	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
				Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang dibina	85.00%	125,000,000	88.00%	288,346,708	90.00%	292,142,878	90%	705,489,586	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Misi VII : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA															
Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)															
Sasaran 8.1 : Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat															
Arah Kebijakan b : Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama															
7	01		KECAMATAN												
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	1,000,000,000					-	100%	1,000,000,000	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	90%	1,000,000,000					-	90%	1,000,000,000	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	500,000,000					-	100%	500,000,000	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	500,000,000					-	100%	500,000,000	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	500,000,000					-	100%	500,000,000	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	85.00%	150,000,000	88.00%	253,953,169	90.00%	257,296,538	90%	661,249,707	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti	85.00%	556,389,108	88.00%	628,114,822	90.00%	636,384,140	90%	1,820,888,070	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Misi VII : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA															
Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan)															
Sasaran 8.2 : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal															
Arah Kebijakan a : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.															
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang dilindungi	100%	341,980,000	100%	901,876,625	100%	913,750,098	100%	2,157,606,723	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
					Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan terlestarikannya Cagar Budaya	100%	277,555,000	100%	84,000,000	100%	85,105,885	100	446,660,885	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
Misi VII : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA														
Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan)														
Sasaran 8.2 : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal														
Arah Kebijakan b : Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan														
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.42%	692,582,080	0.44%	1,569,663,909	0.45%	1,607,757,993	0.45%	3,870,003,982	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat parsipasi pemuda dalam organisais kepemudaaan dan organisasi social kemasyarakatan	6.85%		7.04%		7.17%		7.17%		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi Olahraga	13 medali	5,611,924,575	15 medali	1,923,849,203	17 medali	2,970,538,989	17 medali	10,506,312,767	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	256,067,236	100%	756,067,236	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta

Handwritten signature







### 6.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya pada Bab VI ini perlu dilengkapi dengan aspek spasial. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan mempertimbangkan dimensi keruangan, sebagaimana telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan dan arahan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan 2019-2039, arahan kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

#### 1. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang potensial untuk dikembangkan, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi
- b. kawasan peruntukan pertanian
- c. kawasan peruntukan perkebunan
- d. kawasan peruntukan pertambangan
- e. kawasan peruntukan industri
- f. kawasan peruntukan pariwisata
- g. kawasan peruntukan permukiman
- h. kawasan peruntukan budidaya lain
- i. kawasan peruntukan Bandar Udara
- j. kawasan peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara

Berikut ini akan diuraikan potensi pengembangan masing-masing kawasan yang disebutkan diatas.

#### a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:

##### 1) Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala.

##### 2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai.

##### 3) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.

#### b. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:

Handwritten signature and date: 9/1/24





- 1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan  
Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan tersebar di seluruh kecamatan.
- 2) Kawasan Pertanian Hortikultura  
Kawasan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan.
- 3) Kawasan Peternakan  
Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan.
- c. Kawasan Peruntukan Perkebunan, meliputi:  
Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan  
Kawasan peruntukan pertambangan berupa wilayah pertambangan mineral dan batubara, meliputi:
  - 1) Wilayah Usaha Pertambangan Logam  
Wilayah Usaha Pertambangan Logam, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Matikei, dan Kecamatan Katingan Tengah.
  - 2) Wilayah Usaha Pertambangan Bukan Logam  
Wilayah usaha pertambangan bukan logam, meliputi: Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Meridawai, dan Kecamatan Katirigan Kuala.
  - 3) Wilayah Usaha Pertambangan Batubara  
Wilayah usaha pertambangan batubara, meliputi: Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, dan Kecamatan Mendawai.
  - 4) Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif  
Wilayah usaha pertambangan radioaktif, meliputi:  
Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai Katingan Tengah, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan.
  - 5) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)  
Wilayah pertambangan rakyat, meliputi: Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
- e. Kawasan Peruntukan Industri  
Kawasan peruntukan industri terdiri dari:
  - 1) Kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di setiap kecamatan.
  - 2) Kawasan peruntukan industri sedang dan besar terkonsentrasi di Kecamatan Katingan Hilir.
  - 3) Kawasan peruntukan industri minapolitan terkonsentrasi di kecamatan Katingan Kuala.

h  
9/1/14



- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata  
Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah.
- g. Kawasan Peruntukan Permukiman  
Kawasan peruntukan permukiman, meliputi a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
  - 1) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi kawasan perkotaan ibu kota kecamatan.
  - 2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di setiap kecamatan.
- h. Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya  
Kawasan peruntukan budidaya lainnya meliputi:
  - 1) Kawasan perikanan tangkap laut disesuaikan dengan kewenangan kabupaten dan perikanan tangkap perairan umum tersebar di wilayah kecamatan yang memiliki potensi
  - 2) Kawasan pertahanan, keamanan dan perlindungan masyarakat
  - 3) Hutan pendidikan
  - 4) Kebun raya
  - 5) Kawasan budidaya perikanan tersebar pada seluruh kecamatan di kabupaten katingan; dan
  - 6) Kawasan konservasi perairan laut
- i. Kawasan Peruntukan Bandar Udara  
Kawasan peruntukan bandar udara, meliputi: Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Katingan Hilir dan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hulu, dan Kecamatan Katingan Kuala.
- j. Kawasan Peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara  
Kawasan peruntukan pusat perfilman asia tenggara berada di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

## **2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi**

Jaringan jalan, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri meliputi: Kasongan-Tangkling; dan Pelantaran-Kasongan.
- b. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan strategis nasional yaitu: batas Kalimantan Barat- Tumbang Kaburai; Tumbang Kaburai-Tumbang Sanarnang; Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran; dan Tumbang Hiran-Tumbang Samba.
- c. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 yaitu jaringan jalan Tumbang Samba-Rabambang.
- d. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 3 yaitu jaringan jalan Pundu-Tumbang Samba;
- e. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- f. jaringan jalan strategis kabupaten yaitu jaringan jalan Hampangen-Mendawai-Selat Jeruju;
- g. jaringan jalan lingkaran dalam; dan
- h. jaringan jalan lingkaran luar;

h  
9/1/24





Jaringan angkutan sungai, meliputi:

- a. Katingan Kuala - Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir- Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Marikit -Katingan Hulu - Bukit Raya (jalur Sungai Katingan); dan
- b. Katingan Kuala - Meridawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir-Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Sanaman Mantikei - Petak Malai (jalur Sungai Katingan - Sungai Samba).

Sedangkan Jaringan prasarana angkutan sungai, meliputi dermaga pengumpan di Jahanjang.

### 3. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan yang merupakan kawasan strategis di kabupaten meliputi:

- a. kawasan strategis nasional;
- b. kawasan strategis provinsi; dan
- c. kawasan strategis kabupaten.

Kawasan strategis nasional, terdiri atas: kawasan strategis dan sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau; dan kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*).

Kawasan strategis provinsi, meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
  - 1) kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet);
  - 2) kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Katingan Kuala;
  - 3) kawasan minapolitan; dan
  - 4) kawasan Pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan Kalaru.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: Kawasan Strategis DAS Terpadu; Taman Nasiorial Bukit Baka Bukit Raya; dan Taman Nasiorial Sebangau.
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi, meliputi: Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi kabupaten; dan Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut kabupaten.

Kawasan strategis kabupaten, meliputi:

- a. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi;
- b. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya;
- c. Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan; dan
- d. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.

Selain arah kebijakan pengembangan kewilayahan yang telah diuraikan diatas, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan 2018-2023 juga perpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan

h  
9/1/4





daerah. Untuk itu skenario rencana pembangunan Kabupaten Katingan pada tahun 2018-2023 berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada rencana pembangunan wilayah pengembangan diuraikan sebagai berikut:

### **6.3.1. Pembangunan Wilayah Pengembangan Sektor Pertanian dan Pengembangan Komoditi Unggulan**

Berdasarkan kajian terhadap potensi lahan pertanian dengan mempertimbangkan indikator luas pertanaman, penyerapan tenaga kerja, trend produksi dan sumbangsih ekonomi keluarga petani di Kabupaten Katingan diperoleh tiga komoditas utama yang akan dikembangkan, yaitu padi, durian dan pisang, sedangkan tanaman cabai menjadi salah satu komoditi utama dikarenakan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Pengembangan keempat komoditi ini tersebar pada 3 zona/wilayah di Kabupaten Katingan, yaitu Zona Utara, Zona tengah dan Zona Selatan Kabupaten Katingan. Adapun Zona Utara meliputi Kecamatan Sanaman Mantikei, Marikit, Katingan Hulu, Petak Malai dan Bukit Raya; Zona Tengah meliputi Kecamatan Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dan Katingan Tengah; sedangkan Zona Selatan meliputi Kecamatan Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang dikonsentrasikan pada wilayah/zona tengah dan selatan yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan 2 komoditi ini sekaligus untuk menekan inflasi pada kedua wilayah tersebut.

Pertanian tanaman pangan bagi petani di Zona Utara dan Tengah lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi pangan dan masih dilakukan setahun sekali. Kondisi ini sangat berbeda dengan Zona Selatan yang sebagian sudah melakukan sistem pertanian padi sawah yang intensif dengan tujuan untuk dijual. Potensi pertanian hortikultura sangat besar di Kabupaten Katingan meskipun sampai saat ini baru komoditas durian dan pisang yang menjadi unggulan daerah. Petani yang membudidayakan jenis komoditas hortikultura yang lain terutama sayur mayur masih sangat terbatas. Tanaman hortikultura sejauh ini merupakan tanaman komersial yang banyak diusahakan oleh petani transmigran atau pendatang. Karena itu ke depan potensi pengembangan komoditas ini masih sangat terbuka.

Berikut rencana pengembangan komoditi unggulan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Katingan berbasis kewilayahan.

#### **A. Padi**

Kabupaten Katingan memiliki potensi padi sawah/rawa dan padi ladang yang masih dapat terus dikembangkan. Komoditi padi di Kabupaten Katingan diusahakan pada beberapa tipe lahan meliputi sawah/rawa dan ladang (lahan kering). Pengembangan padi sawah dipusatkan pada zona yang memiliki ketersediaan lahan sawah/rawa yang potensial diolah untuk meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Katingan.

h  
9/14



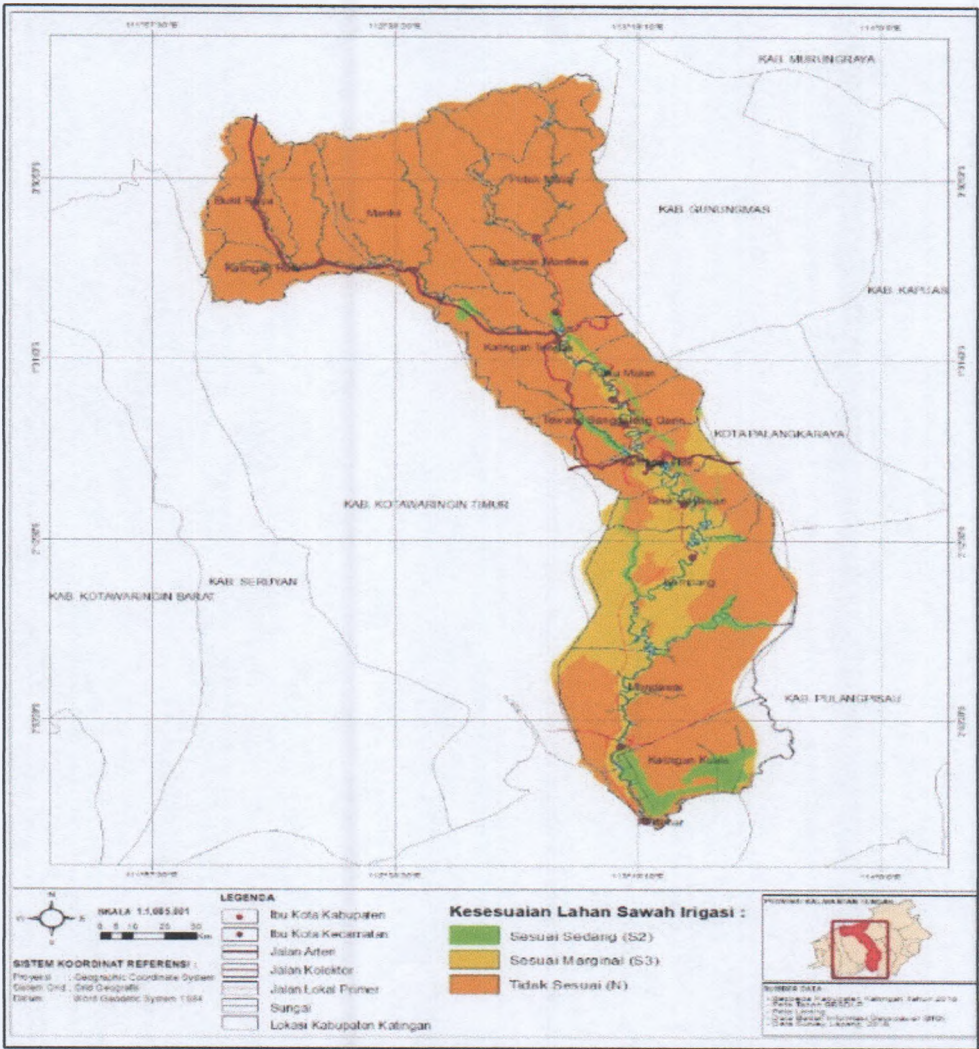






pada tahun 2019 dibangun Bendung Sungai Manten yang diharapkan dapat mengalir areal sawah seluas ± 3.000 ha, meliputi Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

**Gambar 6.3 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan**



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

**B. Durian**

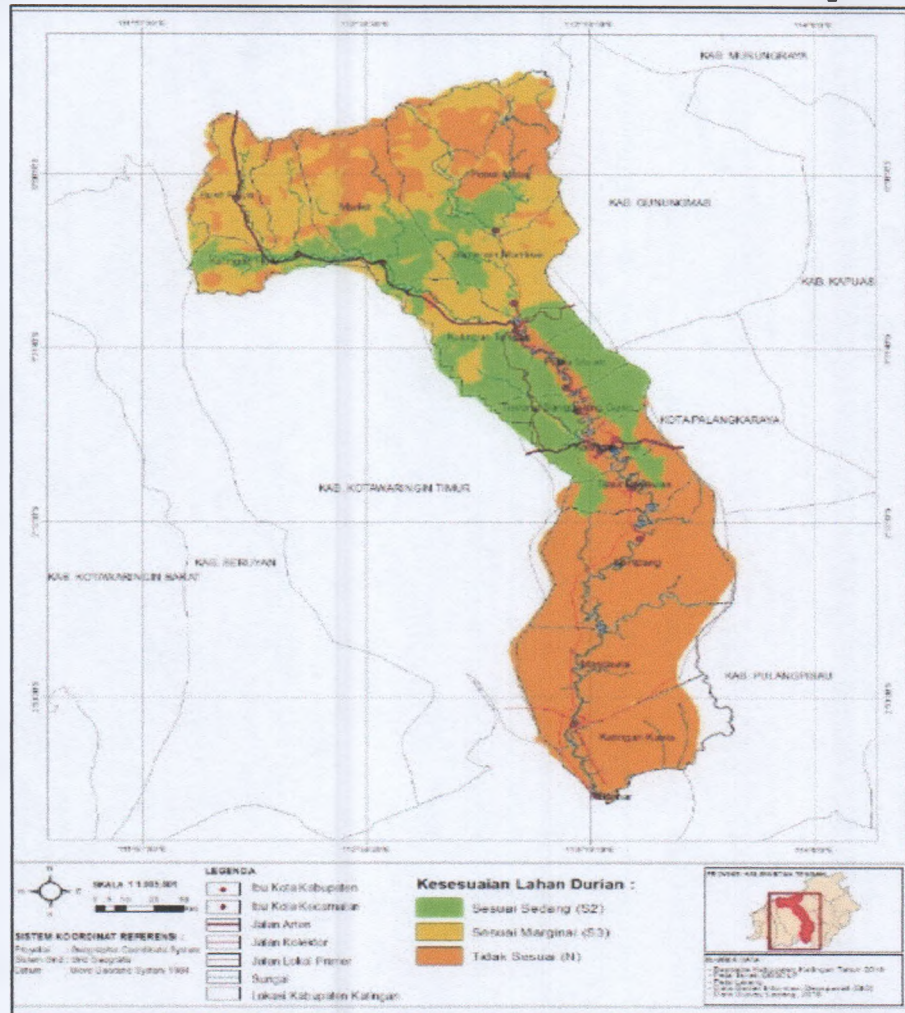
Durian Katingan adalah jenis buah musiman yang memiliki banyak varian dan memiliki citra khas yang membedakan dengan varian jenis durian lain yang tumbuh di wilayah Kalimantan. Durian dari Katingan saat ini menjadi salah satu komoditi unggulan buah-buahan yang sudah dikenal bahkan sampai keluar pulau Kalimantan.

Memperhatikan peluang ini, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam lima tahun ke depan berencana akan meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan jenis durian unggul dari bibit lokal sebagai upaya regenerasi tanaman agar produksi durian dari Katingan tetap ada dan berkelanjutan. Jenis bibit yang akan dikembangkan adalah Undang, Lunek, Lagas, Undang Buyu, Koko, Kalasi, dan Gelapir, dengan wilayah pengembangan berada pada zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona tengah yaitu Kecamatan Tewang Sangalang Garing.

h  
9/14



**Gambar 6.4 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan**



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

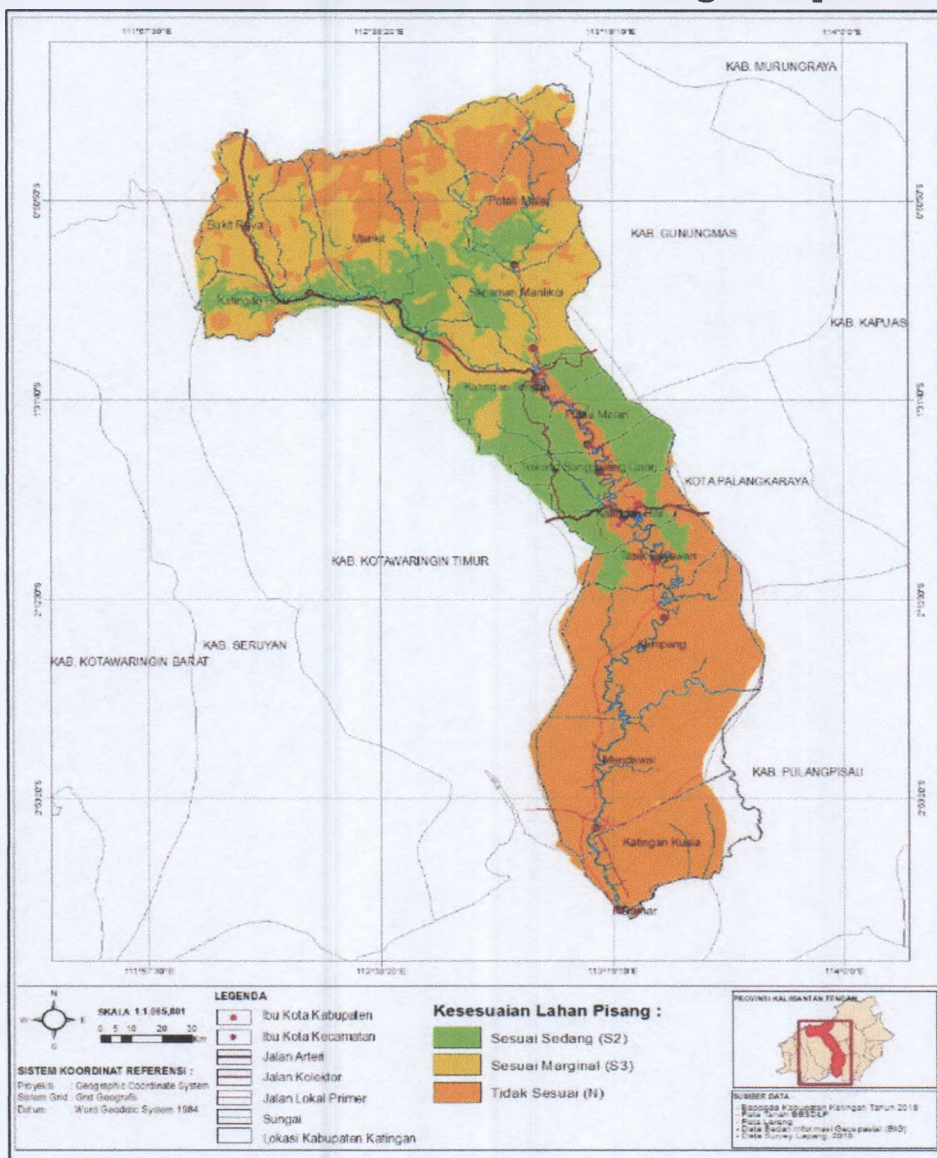
### C. Pisang

Komoditi pisang saat ini juga menjadi salah satu produk unggulan masyarakat Katingan. Hanya saja yang dimanfaatkan masih pada buah segar, dan belum berkembang sampai pada produk olahan dan industri skala kecil dan menengah. Komoditi ini juga akan menjadi salah satu produk daerah yang akan dikembangkan kedepan, terutama nilai tambah dan produk olahannya. Daerah yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan komoditi pisang berada di zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan.





**Gambar 6.5 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan**



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

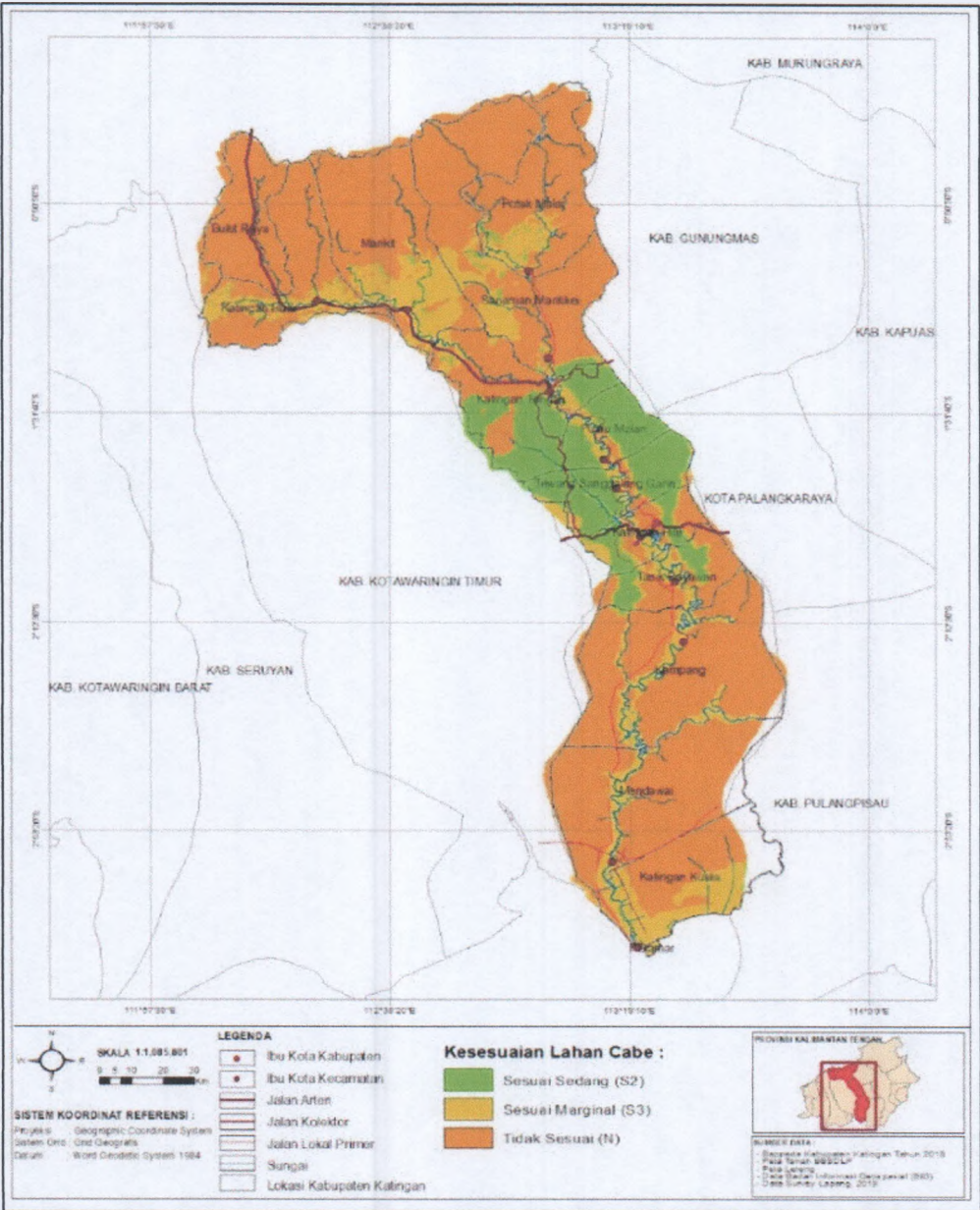
#### D. Cabai

Daerah yang akan dikembangkan dan memiliki potensi terbesar untuk lahan cabai berada pada zona tengah dan selatan Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada zona tengah yaitu pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Katingan Hilir.





Gambar 6.6 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018

E. Jagung

Pemerintah Kabupaten Katingan berencana mengembangkan pertanian jagung sebagai salah satu komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan, hal ini dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sedang berupaya mewujudkan swasembada jagung melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan. Produksi jagung di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan produksi dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 luas tanam jagung 1.732 hektar yang terdiri dari 1.597 hektar merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan 135 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen jagung pipilan 48 hektar dengan produksi 133 ton. Sedangkan pada tahun 2018 luas tanam 1.129 hektar yang terdiri dari bantuan Pemerintah Pusat seluas 987 hektar dan 142 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen (jagung pipilan) 146 hektar dengan produksi 973 ton, selebihnya dipanen

Handwritten signature and date: 9/14





muda (untuk sayuran). Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan.

#### **F. Bawang Merah**

Selain jagung, komoditi bawang merah juga menjadi komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan. Pemilihan komoditi ini untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak. Tahun 2018, telah dilakukan penanaman (Luas Tambah Tanam) seluas 3 hektar di Kecamatan Katingan Hilir dengan produktivitas sebesar 3 ton/hektar dan produksi sebesar 9 ton, sedangkan tahun 2019 akan dilakukan pengembangan pada kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan. Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman bawang merah di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan.

Untuk mendukung pengembangan beberapa komoditi ini, Pemerintah Daerah berencana mengembangkan kawasan-kawasan agrowisata di Kabupaten Katingan, dengan memadukan variasi komoditi-komoditi unggulan dan komoditi non unggulan yang merupakan buah lokal, yakni langsung/tanggu madu dan nangkadak (nangka cempedak).

### **6.3.2. Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan untuk Mendukung Kegiatan Pertanian, Industri dan Pariwisata**

#### **A. Pembangunan Jalan dan Jembatan**

Pengembangan Infrastruktur terutama jalan dan jembatan masih merupakan salah prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan. Selain untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, rencana pengembangan infrastruktur juga akan difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi pusat pengembangan pertanian, perindustrian dan pariwisata.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Katingan melanjutkan kebijakan ini guna tercapainya aksesibilitas angkutan barang, orang/tenaga kerja/jasa yang memadai, yakni hasil produksi pertanian, barang kebutuhan rumah tangga dan industri, pengangkutan material konstruksi, serta pariwisata sehingga secara umum memacu pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Kabupaten Katingan yang Bermartabat.

Pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Katingan yang diprioritaskan antara lain meliputi:

1. Pembangunan ruas jalan Mendawai sampai ke Pelabuhan Laut Bajungkal (Sei Kaki) dimana jalan ini direncanakan melewati kawasan industri dan kawasan Agropolitan.
2. Pembangunan Ruas Jalan Kereng Pangi-Baun Bango-Kampung Keramat-Pagatan, sekaligus akses untuk menuju obyek wisata Punggualas yang berada di jalan masuk Taman Nasional Sebangau di Desa Keruing.
3. Pembangunan trase jalan Tumbang Sanamang sampai batas dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.

W  
9/1/4





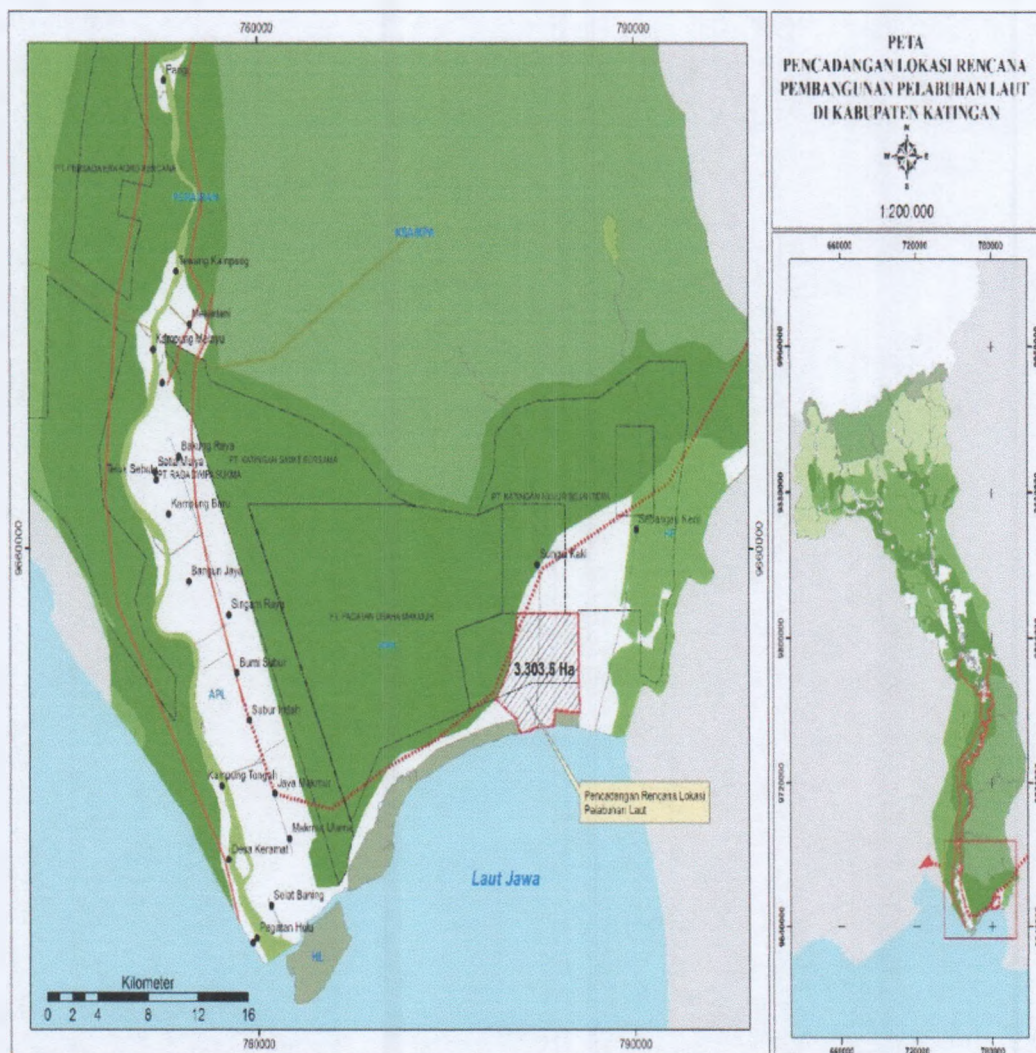
4. Peningkatan Jalan Mendawai – Katingan I – Katingan II, jalan ini merupakan jalan Poros/Penghubung Desa sekaligus Jalan yang berada pada Kawasan Agropolitan dan Pertanian serta Industri Pertanian dan Gudang Bulog.
5. Pembangunan Jalan Telangkah – Tumbang Samba, jalan ini berada pada di sebelah kiri mudik sungai Katingan yang menghubungkan desa-desa dan kawasan-kawasan pertanian.

Selain itu, sedang dibangun melalui kerjasama antar pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintahan Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur trase jalan penghubung antar kabupaten yaitu Trase Jalan Pegatan-Kampung Melayu-batas Kotawaringin Timur.

## B. Pembangunan Pelabuhan

Kabupaten Katingan dalam perkembangannya lebih diarahkan sebagai wilayah dengan fungsi utama regional dan menjadi outlet ekonomi dan produksi yang diharapkan dapat melayani Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangkaraya.

**Gambar 6.7 Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut**



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Handwritten signature and initials.





Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah pengembangan kawasan juga didukung dengan pengembangan transportasi laut berupa pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Pegatan-Mendawai serta pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Katingan Kuala. Pada saat ini baik Pemerintah Kabupaten maupun melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya mendorong Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Pelabuhan Pegatan-Mendawai di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Katingan memantapkan pencadangan kawasan pengembangan Pelabuhan Mendawai-Pegatan (Pelabuhan Bajungkal) di daerah Sei Kaki. Pencadangan rencana lokasi pelabuhan laut dicadangkan seluas 3.303,5 Ha sepenuhnya pada kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL) berdasarkan RTRW Provinsi perda Nomor 5 tahun 2015 dan Perda RTRW Kabupaten Katingan.

### **C. Pembangunan Jaringan Irigasi**

Kabupaten Katingan mempunyai potensi Bidang Pertanian tanaman pangan, sehingga untuk rencana lima tahun kedepan fokus pemeliharaan jaringan irigasi yang diarahkan pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) melalui pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Adapun jumlah Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang dikelola adalah 46 DIR dengan Luas Baku 18.482 Ha, Luas Potensial 10.946 Ha dan Luas Fungsional 3.344 Ha, tersebar hampir diseluruh kecamatan.

Di Kabupaten Katingan juga terdapat beberapa Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha dan kewenangan pusat luasan lebih dari 3.000 Ha, tersebar di 5 kecamatan yang potensial dan fungsional dikembangkan, yakni Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing.

Kabupaten Katingan juga mengupayakan Pembangunan Irigasi Permukaan dalam hal ini Irigasi Teknis dengan rencana pembangunan Bendung Manten di desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dengan harapan pola tanam dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) kali setahun, dengan adanya ketersediaan air untuk lahan sawah disekitarnya melalui Bendung Manten tersebut.

Kondisi Jaringan Irigasi masih perlu mendapat perhatian dengan perlu dilengkapi Bangunan dan Bangunan Pelengkap seperti: pintu air, tabat/drumple, gorong-gorong, jalan inspeksi dan jembatan serta infrastruktur lainnya. Selanjutnya guna menjaga kondisi Jaringan tetap dalam kondisi baik diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan.

Pengelolaan di Bidang Sumber Daya Air juga dilaksanakan Program Pengendalian Banjir, hal ini dilakukan melalui kegiatan Normalisasi Sungai dan Pengendalian genangan/banjir melalui pembangunan Kanal Pengendalian Banjir.

Kondisi sungai dan anak anak sungai yang ada masih sangat diperlukan dilakukannya Normalisasi dan Pemeliharaan guna membentuk profil sungai dengan daya tampung debit yang memadai dan juga tetap

Handwritten signature and initials.





dilakukan kegiatan yang perlu secara konsisten untuk mengatasi banjir, genangan dan limpasan air permukaan dengan sistem Kanal Pengendali Banjir khususnya mengatasi genangan di wilayah strategis seperti di Kota Kasongan.

#### **6.3.3. Pengembangan Ekowisata pada Kawasan Punggualas Taman Nasional Sebangau untuk Kegiatan Pariwisata berbasis Alam**

Sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengembangan obyek-obyek pariwisata, dimana salah satu lokasi yang secara bersama-sama akan dikembangkan dengan Pemerintah Kabupaten Katingan adalah Kawasan Ekowisata Punggualas yang merupakan kawasan pelestarian ekosistem hutan rawa gambut dan menjadi habitat orang utan liar, hewan dan tumbuhan endemik lainnya.

Lokasi ini berada di Kecamatan Kamipang dan menjadi bagian dari Taman Nasional Sebangau. Dalam lima tahun kedepan kawasan ini didorong menjadi lokasi kawasan wisata yang akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdesaan meliputi Desa Baun Bango, Jahanjang, Keruing dan Muara Bulan. Untuk mendukung pengembangan kawasan ini, pemerintah daerah akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas menuju lokasi
- Meningkatkan kegiatan promosi wisata daerah
- Pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata daerah
- Meningkatkan pemberdayaan dan pengetahuan masyarakat sekitar tentang konsep ekowisata dan konservasi cagar budaya
- Secara intens membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk dukungan pendanaan dan pengembangannya.

Untuk kawasan lain yang saat ini sudah berkembang seperti obyek wisata Bukit Batu (Kasongan), Danau Bulat (Jahanjang). Riam Mangkikit (Tumbang Kalemei) dan obyek wisata lain ditambah dengan beberapa situs/cagar budaya, bangunan dan atraksi budaya lokal akan tetap dikembangkan secara bersama-sama dalam beberapa paket wisata daerah. Kedepannya pengembangan wisata daerah dan kebijakannya secara khusus akan dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Wisata Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2024.

#### **6.3.4. Pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara,**

Katingan memiliki lahan dan kawasan hutan yang masih luas yang bila dikelola secara produktif dan berkelanjutan akan meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi. Rencana penyediaan lahan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan strategis di Kalimantan Tengah menjadi salah satu dasar yang melatarbelakangi rencana pengembangan pusat produksi perfilman di Asia Tenggara. Kebijakan ketataruangan Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam Perda RTRW Kabupaten Katingan, kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan strategis yang berada di Kecamatan Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing.

Handwritten signature and date: 9/1/24



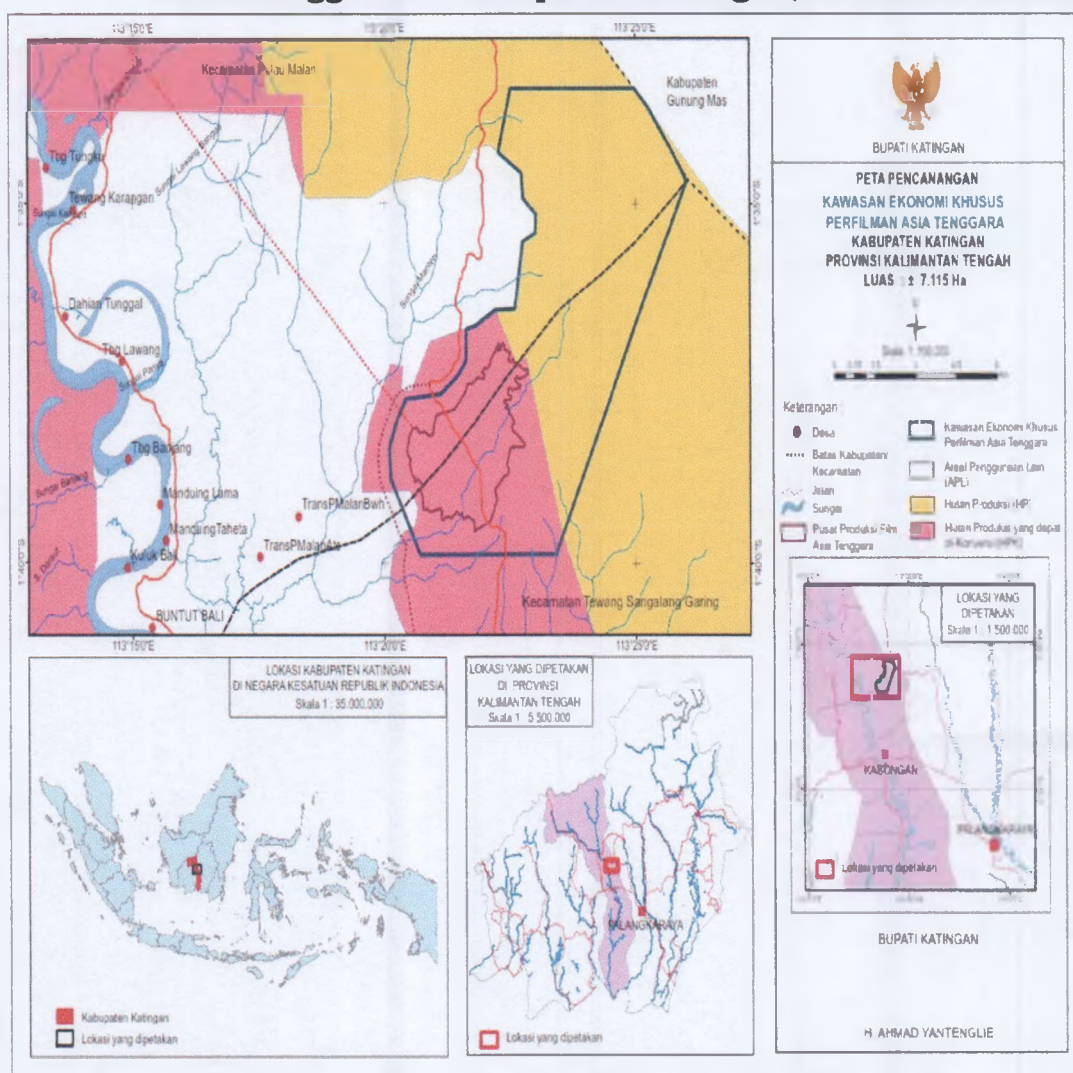


Keuntungan yang didapat oleh Kabupaten Katingan dengan adanya Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara secara sosial ekonomi adalah peningkatan status sosial ekonomi Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum di Asia Tenggara karena lokasi ini akan menjadi pusat perfilman, wisata sekaligus konservasi alam yang terbesar di Asia Tenggara.

Warga Kalimantan Tengah bisa menikmati aneka rumah tradisional Indonesia yang akan dibangun sebagai sarana shooting film. Selain itu Rumah Betang dan Rumah adat berbagai suku khas Kalteng akan menjadi terkenal seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung. Bahkan bangunan-bangunan bercirikan mancanegara serta bangunan modern sesuai kebutuhan akan dibangun menjadi fasilitas utama.

Lebih jauh bila Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura ataupun negara lain memproduksi film mereka di sini maka bangunan tradisional khas negara mereka tidak akan dibongkar, sehingga bisa menjadi obyek wisata bagi Kalteng dan wisatawan yang berkunjung. Kawasan ini diharapkan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Berikut ini disajikan peta lokasi perfiman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan:

**Gambar 6.8 Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah**



Sumber: Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2018





BAB VII  
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun mulai 2019 sampai dengan tahun 2023. Kerangka pendanaan pembangunan akan memberikan gambaran besaran alokasi Belanja Daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta unsur lainnya dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan demikian, program perangkat daerah dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan merupakan program yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan visi dan misi kepala daerah pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Kerangka pendanaan pembangunan memuat belanja daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2019 sebagai tahun pertama RPJMD sampai dengan 2023 sebagai tahun terakhir RPJMD. Sedangkan tahun 2018 tidak disajikan pada tabel di bawah sebab merupakan periode RPJMD yang lalu. Realisasi belanja daerah tahun 2019 dan 2020 yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan pada Tabel 7.1. Sedangkan proyeksi belanja daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dimuat pada Tabel 7.2 dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan  
Tahun 2019 dan 2020

Kode Akun	Uraian	2019	2020
5	BELANJA	1.389.889.317.649	1.100.845.535.475
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	703.667.698.206	706.849.781.737
5.1.1	Belanja Pegawai	408.776.717.122	396.392.722.044
5.1.3	Belanja Subsidi	1.349.993.700	1.416.385.700
5.1.4	Belanja Hibah	23.026.900.000	23.157.850.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.400.204.017	25.198.228.982
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.762.644.179	2.359.731.056

Handwritten signature and initials.



Kode Akun	Uraian	2019	2020
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	225.351.239.188	225.280.458.715
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	33.044.405.240
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>686.221.619.443</b>	<b>393.995.753.738</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	48.622.863.753	54.691.001.719
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	452.365.781.889	200.995.939.181
5.2.3	Belanja Modal	185.232.973.801	138.308.812.838
	Surplus/defisit	(126.899.771.529)	

Sumber: LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020, BPKAD, diolah

**Tabel 7.2**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan**  
**Tahun 2021-2023**

Kode Akun	Uraian	Tahun Berjalan (APBD)	Proyeksi	
		2021	2022	2023
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.341.149.670.984</b>	<b>1.340.010.298.333</b>	<b>1.357.651.931.541</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja operasi</b>	<b>828.755.199.706</b>	<b>792.627.508.289</b>	<b>815.224.078.641</b>
5.1.01	Belanja pegawai	427.751.864.117	437.173.857.351	447.688.777.785
5.1.02	Belanja barang dan jasa	291.576.901.470	298.640.875.769	339.707.105.880
5.1.03	Belanja bunga			
5.1.04	Belanja subsidi	1.601.150.000	1.601.150.000	1.601.150.000
5.1.05	Belanja hibah	64.938.089.108	32.425.656.190	17.184.724.673
5.1.06	Belanja bantuan sosial	42.887.195.011	22.785.968.980	9.042.320.304
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>273.541.042.431</b>	<b>294.732.965.327</b>	<b>294.732.965.327</b>
5.2.1	Belanja Modal	273.541.042.431	294.732.965.327	294.732.965.327
<b>5.3</b>	<b>Belanja tidak terduga</b>	<b>10.561.059.130</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>5.057.094.563</b>
5.3.1	Belanja tidak terduga	10.561.059.130	10.000.000.000	5.057.094.563
<b>5.4</b>	<b>Belanja transfer</b>	<b>228.292.369.717</b>	<b>242.649.824.717</b>	<b>242.649.824.717</b>
5.4.01	Belanja bagi Hasil	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	225.792.369.717	240.149.824.717	240.149.824.717

Sumber: hasil proyeksi, 2021

Handwritten signature and initials





Selanjutnya, pada **Lampiran Bab VII Tabel 7.3** disajikan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan. Rencana Program Perangkat Daerah dan Pagu Indikatifnya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Penyajian Program Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program perangkat daerah tahun 2019 dan 2020 merupakan program yang telah dilaksanakan sebelum penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sedangkan rencana program tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun berdasarkan peraturan tersebut.

Perkembangan keadaan yang memburuk akibat pandemi Covid-19 menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja berbagai indikator kinerja pembangunan daerah. Penyesuaian kemampuan keuangan dan target kinerja ini juga telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan hampir seluruh daerah di Indonesia sejak tahun 2020, sebagai respon terhadap kondisi global dan nasional yang memburuk akibat Covid-19. Untuk itu, pada Perubahan RPJMD dilakukan penyesuaian indikator kinerja program sesuai dengan nomenklatur program yang baru, serta penentuan target kinerja yang mempertimbangkan realisasi tahun 2020. Selain itu, penentuan target program 2021 sampai dengan 2023 juga mempertimbangkan skenario pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait pemulihan dampak Covid-19.

h

VI.11



**TABEL 7.3**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI**  
**KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN KATINGAN**

Handwritten signature and initials in blue ink.





**TABEL 7.3**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI**  
**KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN KATINGAN**

Handwritten signature and initials in blue ink.

Lampiran A Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 (Nomenklatur Lama)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
I	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				298,999,121,381.89		277,602,470,359.43	
1	Pendidikan				55,622,094,984.45		75,394,494,859.60	
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	90%	9,592,884,318.00	91.69%	7,557,852,942.00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	70%			80%	89,987,300.00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	73.44 %	93,450,000.00	100%	5,000,000.00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	86.51%	86.94%	1,121,143,200.00	87.16 %	967,631,274.00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI/Paket A	101.43%	101.94 %	40,744,100,256.45	102.19 %	65,559,938,732.60	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.24	Program Pengembangan Lembaga Pendidikan Formal dan Informal	APK SMP/MT/Paket B	90.66%	91.11 %	68,894,200.00	91.34 %		
		APM SD/MI/Paket A	87.20%					
		APM SMP/MT/Paket B	64.72%					
1.01.1.01.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99.41%	99.43 %	1,196,750,000.00	99.46 %	1,085,400,000.00	Dinas Pendidikan
1.01.1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang melakukan pemuktahiran data pokok pendidikan (dapodik)	83.33%	83.75 %	2,804,873,010.00	83.96 %	128,684,611.00	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan				96,896,329,936.44		108,285,190,826.88	
	Kesehatan				78,834,928,788		80,111,966,725	
1.02.1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60%	100%	15,762,403,087.00		11,990,039,446.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	100%	2,254,416,623.00		912,042,668.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	257,760,800.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	100%	590,898,000.00		101,238,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60%	99%	76,455,500.00		814,686,570.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.07	Program Pelayanan Administrasi Umum	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi umum	60%	100%	139,998,210.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.08	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	60%	100%	448,385,000.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan keluarga siaga	60%	100%	3,218,988,910.99			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga ber PHBS	60%	99%	716,998,256.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.60	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	terlaksananya cakupan program kesehatan kerja dan olahraga	12 bulan	12	28,285,000.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.56	Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Cakupan Rumah Tangga sehat	0%	99%	192,250,000.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting menurun	26.50%	25,78%	1,461,276,240.00		532,351,150.00	Dinas Kesehatan



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
1.02.1.02.01.01.36	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	AKABA	10,6	16,3	92,380,000.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	85%	100%	619,501,000.00		8,185,823,844.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.61	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	menurunnya kasus penyakit DBD	50%	100%	133,730,660.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	0%	100%	6,309,053,998.00		19,072,489,532.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin	60%	99%	2,764,916,371.15			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.37	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75%	100%	437,559,755.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48	Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya	Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya	100%	89%	21,880,646,873.22		21,515,912,260.70	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (lansia)	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	60%	57%	96,311,450.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.52	Program Pelayanan Kesehatan Remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	85%	100%	323,632,570.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49	Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Cakupan penjangkauan siswa SD dan setingkat	60%	100%	101,556,000.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.53	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	51	20	551,903,050.00		41,680,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.58	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)	- Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi	75%	61%	485,661,450.00		65,000,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.55	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan	- Cakupan penemuan dan penanganan kesehatan diabetes miletus	60%	79%	247,769,225.00			
		- Cakupan penemuan dan penanganan penderita gangguan iwa berat	60%	0%				
1.02.1.02.01.01.39	Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	80%	100%	157,318,200.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50	Program Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji	Cakupan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haii	80%	100%	29,834,300.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin	80%	100%	3,257,850,680.00		1,573,017,426.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat	80%	100%	71,824,500.00		74,810,000.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.43	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	100%	2,549,866,600.00		3,717,581,683.00	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.45	Program Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	85%	100%	134,400,000.00			Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.47	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu	9%	79.9%	13,441,096,479.00		11,515,294,145.00	
	RSUD				18,061,401,148.08		28,173,224,102.16	
1.02.1.02.01.03.55	Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kemandirian BLUD	BLUD	BLUD	14,710,833,897.08	BLUD	16,546,638,281.16	BLUD RSUD
1.02.1.02.01.01.64	Program Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat Pelayanan RS	-	-	-	Pratama	531,576,000.00	Dinas Kesehatan (RSUD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
1.02.1.02.01.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS	80%	100%	2,236,123,151.00		10,216,838,221.00	Dinas Kesehatan (RSUD)
1.02.1.02.01.01.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	70%	100%	1,114,444,100.00		878,171,600.00	Dinas Kesehatan (RSUD)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				83,224,500,029		40,315,320,235	
1.03.1.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	90%	4,381,888,690.00	90%	2,287,708,673.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	1,815,903,300.00	90%	864,622,300.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100	111,119,800.00			
1.03.1.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	142,000,000.00	90%	51,400,000.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	59.23%	61.39%	5,544,180,600.00	62.47%	4,650,998,400.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.28	Program Pengendalian Banjir	Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjir yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan	9.26%	16.43%	1,586,345,000.00	19.28%	1,196,024,350.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang dibangun	797,2 Km	2,51 (20,5 Km)	58,866,524,812.00	1,52 (12,61 Km)	19,954,672,800.00	DisPUPRHub
		Persentase jalan yang ditingkatkan	104,73 Km	13,76 (16,71 Km)		11,04 (15,08 Km)		
1.03.1.03.01.01.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	161,86 Km	1,91 (3,15 Km)	9,965,204,726.00	2,42 (4,1 Km)	8,589,909,080.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.34	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	17 Dokumen (2 Dokumen RRTR, 5 Dokumen RTBL, dan 10 Dokumen RZPD)	1	294,449,750.00	3	1,630,560,000.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.25	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Pola Ruang	70%	80%		80%	52,799,750.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.31	Program Pemberdayaan Jasa konstruksi	Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	516,883,351.00	100%	450,611,600.00	DisPUPRHub
1.03.1.03.01.01.42	Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan (DBH - DR)	Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya					585,913,282.00	DisPUPRHub
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				36,999,968,306		29,831,408,675	
1.04.1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3,093,869,029.00		2,018,659,469.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapat layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	875,569,431.00		356,775,800.00	Disperkimtan



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
1.04.1.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	79,500,000.00		19,000,000.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.21	Program Peningkatan dan Pemerataan Sumber Daya Energi	Persentase jaringan LPJU yang berfungsi baik	36%	36%	1,719,220,386.00		4,309,026,306.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.24	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kawasan perkotaan dan perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai	10%	20%	7,015,641,300.00		6,158,129,200.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan	36.52%	49.52%	10,346,229,500.00		5,379,960,300.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.26	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase jalan desa yang dibangun	-	30%	8,113,578,300.00		4,476,437,150.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.29	Program Pembangunan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan SPM Perumahan Rakyat	25%	26.14%	753,697,400.00		230,833,000.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase taman yang dibangun	-	26.14%	1,586,459,750.00		1,532,061,500.00	Disperkimtan
		Persentase taman yang dipelihara	-					
1.04.1.04.01.01.30	Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	Persentase bahu jalan dan drainase yang dibersihkan di wilayah perkotaan	100%	100%	3,416,203,210.00		2,969,545,950.00	Disperkimtan
1.04.1.04.01.01.32	Program Pembangunan Perumahan						2,380,980,000.00	Disperkimtan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				23,367,339,867.00		22,018,390,808.97	
1.05.1.05.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	7,820,013,888.00	100%	7,323,343,640.00	Satpol PP
1.05.1.05.02.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	100%	276,696,900.00	100%	386,281,511.97	Satpol PP
1.05.1.05.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	100%	118,150,000.00			Satpol PP
1.05.1.05.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	16,300,000.00			Satpol PP
1.05.1.05.02.01.07	Program Pemeliharaan Kentrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang diselesaikan	80%	100%	511,452,846.00	95%	40,710,000.00	Satpol PP
1.05.1.05.02.01.29	Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.	Jumlah korban jiwa akibat kebakaran	0	100%	82,065,000.00			Satpol PP
		Jumlah harta benda akibat kebakaran	0					
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,220,961,475.00	94%	1,360,671,437.00	BPBD
1.06.1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	142,984,500.00	100%	95,216,000.00	BPBD
1.06.1.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	32.43%	37%	52,800,000.00	100%	28,000,000.00	BPBD
1.06.1.06.01.01.25	Program Pengurangan Resiko Bencana	Prosentase cakupan kecamatan siapsiaga menghadapi bencana	84.62%	100%	44,000,000.00	100%	43,039,000.00	BPBD
1.06.1.06.01.01.28	Program Logistik dan Peralatan	Jumlah posko yang mendapat ketersediaan logistik	5 posko	25%	25,520,000.00	0.00	0.00	BPBD
1.06.1.06.01.01.30	Program Pasca Bencana	Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0.00%	33%	28,400,000.00	100%	6,671,108,000.00	BPBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
1.06.1.06.01.01.31	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH - DR)	Cakupan luasan resiko bencana akibat kebakaran hutan dan lahan	0.00%	88%	13,027,995,258.00	88%	5,709,462,520.00	BPBD
1.06.1.06.01.01.37	Program Penanganan Bencana (Tanggap Darurat)	Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat	0.00%	0.00	0.00	67%	360,558,700.00	BPBD
6	Sosial				2,888,888,259		1,757,764,954	
1.06.1.06.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,719,932,009.00	100%	1,228,340,314.00	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	60%	100%	10,000,000.00	65%	120,708,990.00	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	33,650,000.00			Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	15%	21%	42,900,000.00	55%	14,600,000.00	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	100%	14,940,000.00	100%	4,516,250.00	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.15	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial	57.14%	57.60%	350,774,150.00	57.66%	170,949,000.00	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.22	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan	55%	60%	25,434,000.00	70%		Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS tertangani	43,84%	73.21%	435,923,100.00	75.80%	25,404,400.00	Dinas Sosial
1.06.1.06.02.01.32	Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial	85%	90%	255,335,000.00	95.00%	155,871,000.00	Dinas Sosial
II	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar	-			55,525,595,410		31,717,334,285	
1	Tenaga Kerja				686,815,500		22,200,000	
2.01.2.01.01.01.24	Program Peningkatan Produktivitas dan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	-	22%	0.00	100%	3,750,000.00	Distransnaker
		- Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1	-	1%				
2.01.2.01.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			98%	259,839,500.00			Distransnaker
2.01.2.01.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			22%	355,560,000.00			Distransnaker
2.01.2.01.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakeriaan	Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan	52%	20%	71,416,000.00		18,450,000.00	Distransnaker
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3,020,341,281		3,021,400,211	
2.02.2.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,795,373,374.00	98%	1,030,644,523.00	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	293,563,619.00	99%	1,377,999,268.00	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	122,650,000.00	99%	38,800,000.00	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga daerah	46.37%	100%	228,049,000.00	98%	509,926,420.00	DP3APPKB



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
2.02.2.02.01.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kelembagaan PUG Meningkat	100.00%	99%	67,412,600.00	98%		DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		100%	100%	380,928,988.00	100%		
2.02.2.02.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Terhadap Perlindungan Perempuan	100.00%	99.00%	47,520,000.00	98%	0	DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.20	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu	100%	86%	31,040,000.00	98%		DP3APPKB
2.02.2.02.01.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase pemenuhan kabupaten layak anak	100%	100%	53,803,700.00	98%	64,030,000.00	DP3APPKB
3	Pangan				741,022,785		121,890,000	
2.03.3.03.01.01.18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase penurunan kecamatan rawan pangan	7.7			14%	121,890,000.00	Distanpaper
		Jumlah data ketersediaan dan kerawanan pangan	24					
		Jumlah ragam pangan dan pangan olahan	48					
3.03.3.03.01.01.16	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)		15.40%	85.95%	741,022,785.00			Distanpaper
4	Pertanahan				533,581,106		828,491,960	
1	Program Pengaturan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat	-	32.82%	533,581,106.00	37.08%	828,491,960.00	Disperkimtan
5	Lingkungan Hidup				13,528,700,029		7,392,853,863	
2.05.2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	70%	100%	2,940,063,883.00	100%	2,723,724,946.00	DLH
2.05.2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	85%	100%	70,000,000.00	100%	284,455,200.00	DLH
2.05.2.05.01.01.03	Proqram Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Stel Pakaian Dinas	100 Steel	95Steel	82,854,750.00			DLH
2.05.2.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	100%	62,500,000.00	100%	10,000,000.00	DLH
2.05.2.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%			80.3%	13,420,000.00	DLH
2.05.2.05.01.01.35	Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun	3%			1%	88,975,000.00	DLH
2.05.2.05.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun	-	94%	329,911,511.00			DLH
2.05.2.05.01.01.24	Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indek Kualitas Tutupan Lahan	77,75 Point	78,3 Point	60,000,000.00	78,65 Point	418,986,975.00	DLH
2.05.2.05.01.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indek Kualitas Tutupan Lahan	77,75 Point	78,3 Point	99,500,000.00			DLH
2.05.2.05.01.01.34	Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	26%			28%	228,039,400.00	DLH
2.05.2.05.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	26%	28%	1,789,480,916.00			DLH



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
2.05.2.05.01.01.36	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air	-			53.33%	34,552,000.00	DLH
2.05.2.05.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Udara	-	50,56 Point	83,101,400.00	53,53 Point		DLH
2.05.2.05.01.01.26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penerimaan Asli Daerah	-			127%	1,098,272,800.00	DLH
2.05.2.05.01.01.26	Program Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang Kelembagaan Lingkungan	Jumlah Parameter yang terakreditasi	10 Parameter	1 Parameter	1,116,052,510.00			DLH
2.05.2.05.01.01.28	Program Penanaman Pohon pada Lahan di Luar Kawasan (DBH - DR)	Jumlah Bibit Pohon	-	169500	1,251,291,700.00	169500	1,755,138,300.00	DLH
2.05.2.05.01.01.27	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH - DR)	Jumlah titik Api	100	80	4,679,153,918.84	70	451,606,211.88	DLH
2.05.2.05.01.01.29	Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah. (DBH-DR)	Jumlah Bibit Pohon	-	31455	964,789,440.00	15728	285,683,030.00	DLH
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				3,372,156,044		2,049,047,619	
2.06.2.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,398,579,666.00	100%	975,945,419.00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	100%	100%	429,048,800.00	100%		Disdukcapil
2.06.2.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	20,000,000.00	100%		Disdukcapil
2.06.2.06.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	92%	96%	1,031,632,578.00	99.25%	722,423,200.00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.01.16	Program Administrasi Pencatatan Sipil	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil	55%	41%	149,751,000.00	47.29%	17,000,000.00	Disdukcapil
2.06.2.06.01.01.17	Program Penataan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi kependudukan	100%	100%	343,144,000.00	100%	333,679,000.00	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				6,554,921,700		1,787,102,747	
2.07.2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	1,622,184,375.00	95.04%	1,212,316,227.00	DisPMDes
2.07.2.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang pelayanan	80%	100%	247,242,500.00	97.99%	256,239,000.00	DisPMDes
2.07.2.07.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	76,530,000.00			DisPMDes
2.07.2.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	100%	76,000,000.00	100%	14,500,000.00	DisPMDes
2.07.2.07.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK)	80%	100%	1,029,502,825.00	95.01%	259,492,520.00	DisPMDes
2.07.2.07.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	80%	100%	390,565,000.00	100%	37,500,000.00	DisPMDes



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
2.07.2.07.01.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	80%	100%	3,112,897,000.00	99.30%	7,055,000.00	DisPMDes
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5,200,508,160		3,465,332,500	
2.08.2.02.01.01.15	Program Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	78.69%	79%	4,781,068,160.00	86.00%	3,260,225,700.00	DP3APPKB
2.08.2.02.01.01.19	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Persentase Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	12.42%	100%		100%	27,987,900.00	DP3APPKB
2.08.2.02.01.01.26	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Kualitas Pemberdayaan Keluarga	36.65%	90%	419,440,000.00	97%	177,118,900.00	DP3APPKB
9	Perhubungan				2,350,974,838		591,630,900	
2.09.1.03.01.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Rambu-Rambu Terpasang	28%	30%	1,362,304,839.00	32%	149,430,000.00	DisPUPRHub
2.09.1.03.01.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun	100%	100%	819,170,000.00	100%	427,350,900.00	DisPUPRHub
2.09.1.03.01.01.23	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	- Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang direhab dan dipelihara	100%	100%	169,500,000.00	100%	14,850,000.00	DisPUPRHub
10	Komunikasi dan Informatika				7,546,184,758		4,344,398,441	
2.10.2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	60%	100%	2,668,048,508.00	100%	1,277,099,994.00	DiskominfoPersantik
2.10.2.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	40%	60%	1,367,381,000.00	100%	53,040,447.00	DiskominfoPersantik
2.10.2.10.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%		224,680,500.00	0%		DiskominfoPersantik
2.10.2.10.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	36%	66%	152,000,000.00	100%	43,600,000.00	DiskominfoPersantik
2.10.2.10.01.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Perangkat daerah yang memiliki insfrastruktur TIK sesuai ketentuan	47%	45%	3,134,074,750.00	81%	2,970,658,000.00	DiskominfoPersantik
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				3,316,213,393		2,065,782,962	
2.11.2.11.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	2,490,595,515.00	100%	1,797,314,618.00	DisKopUKMPP
2.11.2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	15,350,000.00	100%	215,429,485.00	DisKopUKMPP
2.11.2.11.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%		181,841,000.00			DisKopUKMPP
2.11.2.11.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	48%	61,400,000.00	15%	15,000,000.00	DisKopUKMPP
2.11.2.11.01.01.27	Program Pembinaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	40%	42.00%	253,480,727.00	44.00%	38,038,859.00	DisKopUKMPP
2.11.2.11.01.01.28	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UKM Aktif	1502 UKM aktif	90.00%	313,546,151.00	91%		DisKopUKMPP
12	Penanaman Modal				2,003,461,483		1,229,348,685	
4.01.4.01.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	89%	100%	1,299,052,283.00	100%	825,035,285.00	DPM-PTSP
4.01.4.01.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	89%	100%	366,544,700.00	100%	370,595,400.00	DPM-PTSP



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.09:01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	57,377,000.00			DPM-PTSP
4.01.4.01.09:01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	100%	38,000,000.00	100%	23,500,000.00	DPM-PTSP
4.01.4.01.09:01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	80%			100%	10,218,000.00	DPM-PTSP
4.01.4.01.09:01.18	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilakukan	3	4	101,297,000.00			DPM-PTSP
4.01.4.01.09:01.21	Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Persentase tKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	35%	100%	51,239,500.00			DPM-PTSP
4.01.4.01.09:01.25	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP	-		47,366,000.00			DPM-PTSP
4.01.4.01.09:01.26	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	85%	100%	42,585,000.00			DPM-PTSP
13	Kepemudaan dan Olah Raga				1,674,833,800		1,137,683,500	
2.13.2.13.01:01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	95	126	837,115,800.00	126	33,850,000.00	Disbudparpora
		Persentase Pemuda Yang Berwirausaha	0.23%	0.28%		0.42%		
		Jumlah Pemuda Yang lulus seleksi mengikuti pemuda pelopor tingkat nasional	0	0		0		
		Jumlah peserta yang lulus seleksi mengikuti paskibra tingkat nasional	0	0		0		
2.13.2.13.01:01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even Olahraga	0	50	837,718,000.00	70	1,103,833,500.00	Disbudparpora
		Jumlah pelajar yang lulus seleksi mengikuti event olahraga	0	0		0		
		Jumlah pelajar yang memenangkan medali pada even olah raga kabupaten	0	0		0		
14	Statistik				14,000,000		-	
2.14.2.10.01:01.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Persentase data statistik yang terpublikasi		5%	14,000,000.00			Diskominfoopersantik
15	Persandian				-		-	
16	Kebudayaan				4,468,526,102		2,500,551,897	
2.13.2.13.01:01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,886,983,152.00	100%	2,165,461,397.00	Disbudparpora
2.13.2.13.01:01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	202,241,000.00	100%	123,965,000.00	Disbudparpora
2.13.2.13.01:01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	80%	90,000,000.00	80%	16,200,000.00	Disbudparpora
2.13.2.13.01:01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85%	100%		100%	11,150,000.00	Disbudparpora
2.16.2.13.01:01.21	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase Peningkatan Sanggar Seni Budaya Yang Aktif	8 sanggar	12.50%	1,289,301,950.00	25.00%	183,775,500.00	Disbudparpora
17	Perpustakaan				324,651,500.00		759,188,000.00	



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.03.01.91	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung ke perpustakaan	7200 org	100%	324,651,500.00	100%	759,188,000.00	Sekretariat Daerah
18	Kearsipan				188,702,930.00		400,431,000.00	
4.01.4.01.03.01.90	Program Penataan dan Pendataan dan Dokumentasi Arsip Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	80%	100%	122,493,930.00	80%	400,431,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.99	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah		90%	100%	66,209,000.00			Sekretariat Daerah
III	Urusan Pilihan	-			28,236,366,451		11,274,706,224	
1	Kelautan dan Perikanan				3,313,602,150		1,619,898,600	
3.03.3.03.01.01.20	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	429.87	3,535.89	1,720,851,800.00	3,550.5	663,716,100.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.23	Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	1	3	232,060,000.00	6		Distanpaper
3.03.3.03.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	5427.00	3,108.61	1,360,690,350.00	314.973	907,192,500.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.23	Program Pengembangan Perikanan Budidaya						45,000,000.00	
3.03.3.03.01.01.39	Program Pengembangan Perikanan Tangkap						3,990,000.00	
2	Pariwisata				1,786,558,950		2,654,183,000	
3.02.2.13.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar	5%	10%	1,786,558,950.00	15%	2,654,183,000.00	Disbudparpora
		Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan	32.616 kunjungan	11.41%		-67.45%		
3	Pertanian				15,705,002,524		4,209,775,701	
3.03.3.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2,130,560,474.00	100%	1,949,894,901.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	138,040,000.00	100%	256,184,400.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	93,844,300.00	-		Distanpaper
3.03.3.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	40%	100%	47,500,000.00	100%	5,000,000.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	17,000,000.00	100%		Distanpaper
3.03.3.03.01.01.44	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai	18.34	66.53%	6,590,955,500.00	0.74%	588,626,100.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.46	Program Pengembangan Penyuluhan Pertanian	Persentase usaha dan kelembagaan kelompok tani yang berkembang	37.89	27.97%	423,417,600.00	63.49%	279,232,000.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.49	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	64,556	69,224	344,205,650.00	73,535.29	326,512,250.00	Distanpaper
		- Padi (ton)	64,125	68,783.16		72,271.13		
		- Jagung (ton)	359	368.56		378.53		
		- Bawang Merah (ton)	18	18.00		30.00		
		- Cabe (ton)	18	18.00		110.00		
		- Pisang (pohon)	18	18.00		619.19		
		- Durian (Kg)	18	18.00		126.44		
3.03.3.03.01.01.47	Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Persentase Hasil Produksi beras yang dipasarkan dalam kemasan	15%	75%	20,745,000.00			Distanpaper
3.03.3.03.01.01.42	Program Pengembangan Perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan	14,167	93.20	237,650,000.00	432.7	292,520,000.00	Distanpaper



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
		- Karet (ton)	2,650	136		116		Distanpaper
		- Sawit (ton)	167	112,94		210.4		
		- Kelapa (ton)	11,350	204,95		106.3		
3.03.3.03.01.01.43	Program Pengembangan Peternakan	Jumlah populasi ternak	382,017	98,86	5,539,975,000.00		332,867,050.00	
		- Ternak Besar (ekor)	9,680	97,10		94,3%		
		- Ternak Kecil (ekor)	18,375	101,42		99,3%		Distanpaper
		- Ternak Unggas (ekor)	353,962	100,28		99,0%		
3.03.3.03.01.01.45	Program Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah ternak yang terobati (%)	100	100	59,950,000.00	76,15%	129,439,000.00	
3.03.3.03.01.01.48	Program Pengembangan Data dan Informasi Pertanian dan Perikanan	Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%)	100	100	10,000,000.00		49,500,000.00	Distanpaper
3.03.3.03.01.01.29	Program Grand Desain dan Base Potensi Pertanian			100.00%	21,250,000.00	-		Distanpaper
3.03.3.03.01.01.41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	Jumlah luasan PLTB tertanami dan terolah			29,909,000.00	-		Distanpaper
4	Perdagangan				4,312,870,228		1,474,590,900	
3.06.2.11.01.01.20	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	9,21%	9.49%	4,207,720,528.00	7%	326,387,500.00	DisKopUKMPP
3.06.2.11.01.01.21	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Persentase Tertib Niaga		80%	65,533,500.00	-		DisKopUKMPP
3.06.2.11.01.01.22	Program Peningkatan Layanan Kemetrolgian	Persentase Alat UTTP yang sesuai standar		23.25%	39,616,200.00	58.33%	1,148,203,400.00	DisKopUKMPP
5	Perindustrian				859,555,340		40,450,000	
3.07.2.11.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM berbasis teknologi	0%	10%	226,299,600.00	10%		DisKopUKMPP
3.07.2.11.01.01.18	Program Penataan Struktur Industri	Persentase IKM potensial yang mendapatkan bantuan	0%	15%	179,106,400.00	10%	40,450,000.00	DisKopUKMPP
3.07.2.11.01.01.23	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP		1 Produk	454,149,340.00			DisKopUKMPP
6	Transmigrasi				2,258,777,259.00		1,375,808,023.00	
2.01.2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1,100,970,759.00	100%	1,123,738,223.00	Distransnaker
2.01.2.01.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	40%	100%	991,606,500.00	100%	103,919,800.00	Distransnaker
2.01.2.01.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	25,200,000.00			Distransnaker
2.01.2.01.01.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	100%	25,000,000.00	100%	21,200,000.00	Distransnaker
3.08.2.01.01.01.26	Program Pengembangan dan Peningkatan Transmigrasi	Persentase sarana dan prasarana transmigrasi	-			100%	26,950,000.00	Distransnaker
2.01.2.01.01.01.19	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	persentase wilayah transmigrasi yang dikembangkan	-	100%	116,000,000.00			Distransnaker
4	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah				73,280,370,180.10		47,802,277,300.00	
4.1	Sekretariat Daerah				58,342,727,844		35,941,429,256	
4.01.4.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	10,886,470,340.00	100%	14,611,173,680.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	10,412,197,854.00	100%	5,026,650,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	191,180,000.00			Sekretariat Daerah



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.03.01.54	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan pelayanan publik	100%	100%	99,628,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70%	99%	339,657,000.00	100%	1,231,047,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.34	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	80%	100%	77,289,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.52	Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	90%	100%	37,550,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan perencanaan dan pelaporan kinerja pembangunan yang tepat waktu	100%	100%	406,761,000.00	100%	443,365,576.00	Sekretariat Daerah
		Persentase laporan keuangan yang tepat waktu	100%			100.00%		
		Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu	100%					
		Persentase laporan pengadaan barang dan jasa pemda yang tepat waktu	100%					
4.01.4.01.03.01.09	Program Pelayanan Administrasi Umum	Persentase RKA dan DPA dan Renstram Renja	100%	100%	27,513,250.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.47	Program Administrasi Kerjasama Pembangunan	Administrasi Kerjasama Pembangunan	100%	100%	7,002,500.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.71	Program Penunjang Kehumasan	Persentase Pelayanan Penunjang Kehumasan	100%	100%	541,261,034.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.53	Program Kerjasama dengan Media Massa	Persentase jumlah kerjasama dengan media massa	100%	100%	2,159,422,000.00		2,410,000,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi	100%	100%	183,330,653.00	100%		Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.56	Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum	Persentase kasus yang memperoleh bantuan hukum	80%	100%	152,331,500.00	100%	100,000,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.55	Program Peningkatan Kepastian Hukum	Peningkatan Kepastian Hukum	80%	100%	393,742,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.100	Program Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana	Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana	90%	100%	29,000,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.31	Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	100%		1,035,600,000.00	100%	1,069,430,000.00	Sekretariat Daerah
		Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	23%					
		Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	5%					
4.01.4.01.03.01.78	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah	Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda	100%	100.00%	20,677,056,217.25			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33	Program Koordinasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase koordinasi pemberantasan penyakit masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	154,225,000.00		50,150,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.101	Program Administrasi dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase administrasi dan koordinasi Sumber Daya Alam yang dilaksanakan dengan baik	55%	100%	941,386,800.00	100%	1,362,890,000.00	Sekretariat Daerah
	Program Administrasi dan Koordinasi Perekonomian	Persentase administrasi dan koordinasi perekonomian yang dilaksanakan dengan baik	70%	100%		100%	707,000,000.00	Sekretariat Daerah



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.03.01.57	Program Administrasi Pengembangan Perekonomian	Administrasi Pengembangan Perekonomian	100%	100%	194,490,909.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58	Program Administrasi Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM, BUMD Dan Perbankan	Administrasi Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM, BUMD Dan Perbankan	100%	100%	98,990,850.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.92	Program Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Menengah	Persentase Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Menengah	100%	100%	36,500,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.93	Program Pembinaan dan Pengawasan Inflasi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Inflasi Daerah	100%	100%	86,143,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.30	Program Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE	84%	87%		100%	597,525,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	100%	263,603,676.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	80%	100%	247,020,900.00	100%	375,698,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51	Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan	Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	55%	100%	71,349,537.00		172,900,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang prima	100%	100%	7,218,810,427.00	100%	6,091,800,000.00	Sekretariat Daerah
35	Program Administrasi dan Koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi dan koordinasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%			100%	1,365,000,000.00	Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.68	Program Peningkatan Administrasi Pertanahan	Peningkatan Administrasi Pertanahan	100%	100%	150,895,000.00			Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70	Program Peningkatan Otonomi Daerah	Peningkatan Otonomi Daerah	100%	100%	1,222,319,397.00	-	-	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kerjasama dengan Media Massa	100%	100%		100%	100,000,000.00	
	Program Kehumasan, Informasi dan Keprotokolan	Persentase Kehumasan	100%	100%		100%	226,800,000.00	
4.2	Sekretariat Dewan				14,937,642,335.85		11,860,848,044.00	
4.01.4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	6,677,771,326.50		6,836,977,644.00	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%				2,273,182,900.00	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	408,201,500.00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	90%	699,552,960.00	100%	59,416,400.00	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		90,86%	166,650,900.00	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	129,310,200.00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.09	Program Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi umum	100%	100%	54,719,700.00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.29	Program Pelayanan Administrasi Keuangan	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	83,221,500.00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.23	Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pembentukan Perda	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD	90%	100%		81,91%	914,577,400.00	Sekretariat DPRD



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.04.01.24	Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPRD	Persentase fasilitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD	89.50%	100%		75,07%	1,610,042,800.00	Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.84	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%	100%	3,728,242,401.00			Sekretariat DPRD
4.01.4.01.04.01.85	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	100%	3,156,622,748.35			Sekretariat DPRD
5	Fungsi Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			32,983,488,181.31		24,751,951,587.69	
5.1	Perencanaan				9,408,305,278		4,203,436,678	
4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	4,066,791,518.00	90%	2,404,909,652.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	1,209,893,211.00	90%	592,944,926.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	181,910,700.00			
4.03.4.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	50%	54.05%	153,250,000.00	68%	30,000,000.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.07	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%			95%	72,890,000.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	95%	71,815,000.00			Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.71	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah	Tinggi (84,65)	tinggi	634,621,869.00	90%	170,729,000.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan	6.00	6	57,575,000.00	100%	77,920,000.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Daerah	100%	100%	954,077,348.00	100%	497,957,600.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi (%)	84%	84%	1,272,540,732.00	87%	98,878,000.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.27	Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (%)	79%	79%	224,010,000.00	83%	129,986,500.00	Bappelitbang
4.03.4.03.01.01.73	Program Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyusun dokumen penganggaran	100%	100%	581,819,900.00	100%	127,221,000.00	Bappelitbang
5.2	Keuangan				16,184,442,918		16,750,053,610	
4.04.4.04.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	5,283,008,263.00		4,583,277,538.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	100%	8,078,214,615.31		9,741,112,271.69	BPKAD
4.04.4.04.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	84	62,950,000.00		15,000,000.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				227,689,800.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.49	Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran	Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat waktu	100%	100%	565,441,150.00		381,965,700.00	BPKAD



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.04.4.04.06.01.80	Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu	100%	100%	566,842,890.00		472,605,500.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.81	Program Penatausahaan Aset Daerah	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah	100%	100%	432,991,500.00		480,190,000.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.82	Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Jumlah Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	7.5 % Tahunan	5000 OP	375,449,000.00			BPKAD
4.04.4.04.06.01.85	Program Peningkatan Penerimaan Pajak	Pertumbuhan PAD	7.5 % Tahunan				317,155,000.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.83	Program Pembukuan dan Pelaporan	Persentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tepat waktu	100%	100%	204,487,000.00		49,443,000.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.84	Program Penagihan dan Keberatan	Persentase Objek Pajak yang ditagih	6% dari Pendapatan Daerah	69%	615,058,500.00		60,350,400.00	BPKAD
4.04.4.04.06.01.86	Program Perencanaan Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran				100%	421,264,400.00	BPKAD
5.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				5,697,007,696.00		3,587,045,900.00	
4.05.4.05.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	90%	2,094,758,316.00	90%	2,319,138,000.00	BKPP
4.05.4.05.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%		0	100%	275,000.00	BKPP
4.05.4.05.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	38,025,000.00			BKPP
4.05.4.05.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	1,894,904,150.00	90%	43,600,000.00	BKPP
4.05.4.05.08.01.63	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase aparatur yang memperoleh pendidikan kedinasan	80%	80%	604,911,000.00			BKPP
4.05.4.05.08.01.64	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan	80%	80%	43,049,500.00	80%	10,500,000.00	BKPP
4.05.4.05.08.01.65	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan	80%	80%	1,021,359,730.00	80%	1,213,532,900.00	BKPP
5.4	Penelitian dan Pengembangan				1,693,732,289		211,415,400	
4.03.4.03.01.01.72	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi daaerah yang ditindak lanjuti	81.82%	85%	1,693,732,289.00	82%	211,415,400.00	Bappelitbang
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				4,772,808,938.00		2,651,452,352.00	
6.1	Inspektorat Daerah				4,772,808,938.00		2,651,452,352.00	
4.02.4.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	1,684,009,738.00	100%	1,353,332,352.00	Inspektorat
4.02.4.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	100%	453,033,940.00	0%	0.00	Inspektorat
4.02.4.02.01.01.35	Program Pengembangan Sistem Pemerintahan dalam Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Cakupan obrik pengawasan	80%	80%	2,502,119,260.00	80%	1,152,645,000.00	Inspektorat
4.02.4.02.01.01.81	Program Peningkatan Kapabilitas	Tingkat kapabilitas APIP	Level 2	3	133,646,000.00	3	145,475,000.00	Inspektorat
7	Kewilayahan				17,139,355,221.00		13,882,478,459.96	
7.1	Kecamatan				17,139,355,221		13,882,478,460	
	Kecamatan Katingan Kuala				1,864,605,800		2,024,492,740	



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	786,590,800.00	100%	684,192,000.00	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	500,775,000.00	100%	39,288,000.00	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	17,000,000.00			Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-		100%	5,000,000.00	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.10.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	2,400,000.00	100%	45,912,000.00	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.10.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-		50%	1,250,100,740.00	Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.10.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	-	170,355,000.00			Kec. Katingan Kuala
4.01.4.01.10.01.83	Program Kabupaten Layak Anak ( KLA )		-	-	11,000,000.00			Kec. Katingan Kuala
1.03.4.01.10.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan		-		258,000,000.00			
1.03.4.01.10.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		-		80,085,000.00			
1.06.4.01.10.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		-		38,400,000.00			
	Kecamatan Kamipang	-			1,529,892,900		988,689,000	
4.01.4.01.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	981,814,300.00	99%	850,206,000.00	Kec. Kamipang
4.01.4.01.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	200,763,600.00	94%	49,824,000.00	Kec. Kamipang
4.01.4.01.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%		10,000,000.00	0%		Kec. Kamipang
4.01.4.01.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	90%	90%	46,000,000.00	100%	15,000,000.00	Kec. Kamipang
4.01.4.01.11.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	90%	100%	102,100,000.00	100%	73,659,000.00	Kec. Kamipang
4.01.4.01.11.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	-	100%	158,565,000.00			Kec. Kamipang
4.01.4.01.11.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Perencanaan Pembangunan Desa	-	100%	30,650,000.00			Kec. Kamipang
	Kecamatan Tasik Payawan	-			968,751,405		622,879,584	
4.01.4.01.12.01.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	721,897,405.00	90%	513,230,084.00	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	95%	100%	52,949,000.00	95%	42,565,500.00	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.12.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	17,100,000.00			Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	94%	71%	9,500,000.00	94%	5,000,000.00	Kec. Tasik Payawan



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.12.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	85%	85%	10,665,000.00	86%	62,084,000.00	Kec. Tasik Payawan
4.01.4.01.12.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	85%	100%	156,640,000.00			Kec. Tasik Payawan
	Kecamatan Katingan Hilir	-			2,382,170,098		1,984,590,045	
4.01.4.01.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	97%	812,950,248.00	90%	574,593,205.00	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	99%	917,467,450.00	100%	99,895,600.00	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	31,000,000.00			Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85%	63%	25,000,000.00	100%	20,000,000.00	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	99%	26,384,000.00			Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	80%	100%	20,000,000.00	98%	38,420,000.00	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-			92%	1,251,681,240.00	Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-	98%	452,668,400.00			Kec. Katingan Hilir
4.01.4.01.13.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa		-	100%	11,200,000.00			Kec. Katingan Hilir
	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan							
1.03.4.01.13.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan			100%	5,500,000.00			
1.06.4.01.13.01.32	Program Penangan Bencana, Perlindungan dan Jalinan Sosial			100%	80,000,000.00			
	Kecamatan Tewang Sangalang Garing				1,399,694,344		1,288,757,972	
4.01.4.01.14.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	85.00%	669,818,544.00	100%	560,278,182.00	Kec. Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.14.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	90.00%	289,540,800.00	100%	50,232,000.00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.14.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	90.00%	19,000,000.00	100%	5,000,000.00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.14.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	85.00%	23,500,000.00	100%	30,645,500.00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
4.01.4.01.14.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-			50%	642,602,290.00	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
1.03.4.01.14.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	terlaksananya peran serta masyarakat dalam pembangunan	-	18%	152,835,000.00			Kecamatan Tewang Sangalang Garing
1.03.4.01.14.01.15	Program pembanqunan jalan dan jembatan		-		245,000,000.00			
	Kecamatan Pulau Malan	-			672,645,876		454,644,936	



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	493,751,376.00	100%	376,459,436.00	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	57%	22,126,500.00	100%	34,460,500.00	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	31,000,000.00	100%	15,000,000.00	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.15.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	-	-	-	100%	28,725,000.00	Kec. Pulau Malan
4.01.4.01.15.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	-	12%	125,768,000.00	-	-	Kec. Pulau Malan
	Kecamatan Katingan Tengah	-	-	-	1,823,223,180	-	1,792,797,988	-
4.01.4.01.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	884,791,180.00	100%	803,008,436.00	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	282,962,000.00	100%	214,976,611.00	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.16.01.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	18,690,000.00	-	-	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.16.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	24,000,000.00	100%	23,900,000.00	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.16.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	42,285,000.00	100%	137,919,000.00	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.16.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-	-	-	50%	612,993,940.96	Kec. Katingan Tengah
4.01.4.01.16.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	-	-	-	296,580,000.00	-	-	Kec. Katingan Tengah
1.03.4.01.16.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	-	-	-	213,987,000.00	-	-	-
1.03.4.01.16.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	-	-	-	39,928,000.00	-	-	-
4.01.4.01.16.01.83	Program Kabupaten Layak Anak ( KLA )	-	-	-	20,000,000.00	-	-	Kec. Katingan Tengah
	Kecamatan Marikit	-	-	-	940,771,589	-	768,101,537	-
4.01.4.01.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	60%	549,024,009.00	100%	404,357,037.00	Kec. Marikit
4.01.4.01.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	89,274,500.00	100%	223,336,000.00	Kec. Marikit
4.01.4.01.18.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	15,000,000.00	-	-	Kec. Marikit
4.01.4.01.18.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	33%	19,000,000.00	100%	15,000,000.00	Kec. Marikit
4.01.4.01.18.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	62,715,000.00	100%	125,408,500.00	Kec. Marikit
4.01.4.01.18.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	-	-	-	205,758,000.00	-	-	Kec. Marikit

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
	Kecamatan Katingan Hulu	-			1,529,887,823		1,328,302,995	
4.01.4.01.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	785,299,223.00	99.83%	501,034,995.00	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	117,195,600.00	100%	96,088,000.00	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	83.83%	53,900,000.00	100%	20,000,000.00	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.19.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	38,740,000.00	97.86%	68,725,000.00	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.19.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik	-			99.98%	642,455,000.00	Kec. Katingan Hulu
4.01.4.01.19.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		80%	180,753,000.00			Kec. Katingan Hulu
1.03.4.01.19.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				354,000,000.00			
	Kecamatan Mendawai	-			1,053,513,902		600,845,254	
4.01.4.01.20.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	775,646,302.00	100%	505,357,754.00	Kec. Mendawai
4.01.4.01.20.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	114,832,600.00	100%	48,347,500.00	Kec. Mendawai
4.01.4.01.20.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	14,365,000.00			Kec. Mendawai
4.01.4.01.20.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	28,500,000.00	100%	15,000,000.00	Kec. Mendawai
4.01.4.01.20.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	12,550,000.00	100%	32,140,000.00	Kec. Mendawai
4.01.4.01.20.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat			100%	107,620,000.00			Kec. Mendawai
	Kecamatan Bukit Raya	-			819,753,000		553,714,000	
4.01.4.01.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	571,521,000.00	100%	461,438,000.00	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	48,262,000.00	100%	38,476,000.00	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.21.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	27,000,000.00	100%	15,000,000.00	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.21.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	20,000,000.00	100%	38,800,000.00	Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.21.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat			100%	146,970,000.00			Kec. Bukit Raya
4.01.4.01.21.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa			100%	6,000,000.00			Kec. Bukit Raya
	Kecamatan Petak Malai	-			1,204,871,000		833,280,300	



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
4.01.4.01.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	449,138,490.00	100%	372,680,750.00	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.22.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	388,007,510.00	100%	363,284,550.00	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.22.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	14,000,000.00			Kec. Petak Malai
4.01.4.01.22.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	40,650,000.00	100%	5,000,000.00	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.22.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	67,000,000.00	100%	92,315,000.00	Kec. Petak Malai
4.01.4.01.22.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat		-		241,075,000.00			Kec. Petak Malai
4.01.4.01.22.01.48	Program Perencanaan Pembangunan Desa		-		5,000,000.00			Kec. Petak Malai
	Kecamatan Sanaman Mantikei	-			949,574,384		641,382,109	
4.01.4.01.17.01.01	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	586,406,384.00	100%	483,301,309.00	Kec. Sanaman Mantikei
4.01.4.01.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	97,015,000.00	100%	100,719,800.00	Kec. Sanaman Mantikei
4.01.4.01.17.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan pegawai	100%	100%	17,000,000.00			Kec. Sanaman Mantikei
4.01.4.01.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	13,500,000.00	100%	15,000,000.00	Kec. Sanaman Mantikei
4.01.4.01.17.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	21,100,000.00	100%	42,361,000.00	Kec. Sanaman Mantikei
4.01.4.01.17.01.28	Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat				194,553,000.00			Kec. Sanaman Mantikei
4.01.4.01.17.01.83	Program Kabupaten Layak Anak ( KLA )	Terlaksananya kegiatan implementasi dan monev KLA		100%	20,000,000.00			Kec. Sanaman Mantikei
8	Unsur Pemerintahan Umum				2,599,659,692.00		2,521,192,060.00	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				2,599,659,692		2,521,192,060	
1.05.1.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	50%	100%	1,160,054,092.00	100%	992,471,560.00	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	60%	100%	95,281,600.00	100%	33,401,500.00	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	60%	68%	14,042,000.00	100%	10,000,000.00	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-			100%	11,544,000.00	Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15,744,000.00	-		Bakesbangpol
1.05.1.05.01.01.21	Program Pendidikan Politik dan Masyarakat	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan	70%	100%	81,200,000.00	100%	39,790,000.00	Bakesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi		Realisasi		Perangkat Daerah
				2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	
1.05.11.05.01.01.27	Program Kewaspadaan	Persentase kecamatan yang diawasi keamanannya	70%	100%	1,027,553,000.00	100%	1,433,985,000.00	Bakesbangpol
1.05.11.05.01.01.26	Program Ketahanan Ideologi Bangsa	Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa	80%	100%	205,785,000.00	-	0	Bakesbangpol
	JUMLAH	-			513,538,765,455		412,203,862,628	





Lampiran B Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 (Nomenklatur PMDN No. 90/2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050 - 3708 Tahun 2020)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					94.70 %	54,765,219,327	95.20%	58,407,703,467	95.70 %	58,462,438,215	95.70 %	171,635,361,009	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah					72.70 %		73.20 %		73.70 %		73.70 %		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan menengah					3.25%		3.50 %		3.75%		3.75%		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan					93.40 %		93.90 %		94.40 %		94.40 %		Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN	Persentase pengembangan kemampuan									83.80%	381,400,000	83.80%	381,400,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang memenuhi standar profesional pendidik									75%	302,820,000	75%	302,820,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kualitas pengembangan, pelindungan, dan pembinaan kebudayaan									33.33%	30,000,000	33.33%	30,000,000	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)					92%	171,548,552,360	95%	121,303,447,580	97%	125,900,443,463	97%	418,752,443,403	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten					95%	8,250,390,815	95%	8,724,809,500	97%	8,839,674,206	97%	25,814,874,521	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Persentase Sarana Kefarmasian Yang memenuhi Standar					90%	800,422,107	95%	349,991,786	98%	354,599,532	98%	1,505,013,425	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif					93%	2,229,433,149	97%	1,147,491,473	97%	1,162,598,539	97%	4,539,523,161	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase lahan yang terlayani jaringan irigasi (%)					63.55%	7,448,582,092	64.44%	4,318,450,000	65.72%	4,375,303,676	65.72%	16,142,335,768	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap					46.5%	7,142,671,633	52.5%	7,628,084,400	58.40%	7,728,510,395	58.40%	22,499,266,428	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan					38.62%	3,652,376,372	41.46%	3,271,118,200	44.33%	3,314,183,442	44.33%	10,237,678,014	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan yang dibangun					0,30% (2,5 Km)	106,486,170,342	0,30% (2,5 Km)	103,644,153,943	0,33% (2,75 Km)	106,001,610,206	838,11 Km	316,131,934,491	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				persentase jalan yang ditingkatkan					13.18%		5.50%		6.80%		6.80%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara					2.60%		5.47%		3.29%		3.29%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Nilai Layanan Dasar IUK di Kabupaten Katlengan					100%	590,723,930	100%	602,319,680	100%	610,249,397	100%	1,803,293,007	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun					3 Dokumen	2,426,105,259	3 Dokumen	3,041,559,382	2 Dokumen	3,081,602,414	8 Dokumen	8,549,267,055	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten					34.67%	684,635,739	38.93%	569,993,251	43.19%	577,497,381	43.19%	1,832,126,371	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	(Persentase) berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					34.67%	1,820,000,000	38.93%	7,299,999,883	38.93%	7,396,106,548	38.93%	16,516,106,431	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN	(Persentase) Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU(					40%	27,128,585,829	50%	25,185,000,000	60%	27,516,567,998	60%	79,830,153,827	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan					70%	1,130,142,876	75%	1,815,459,266	85%	1,839,360,326	85%	4,784,962,568	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi					162,200	1,394,930,769	162,200	2,239,594,955	162,200	3,269,079,887	162,200	6,903,605,611	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan					162,200		162,200		162,200		162,200		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan					100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)					30 Menit	5,372,783,655	30 Menit	14,631,944,874	30 Menit	1,500,000,000	30 Menit	21,504,728,629	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					100	11,314,000					100	11,314,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil					80.00%	334,844,812	90.00%	204,758,190	93.00%	207,453,892	95%	747,056,894	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi					80.00%	393,820,591	85.00%	512,451,867	90.00%	519,198,448	90%	1,425,470,906	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa yang aktif					45.00%	403,805,075	60.00%	466,212,656	70%	472,350,484	70%	1,342,368,215	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan					90.00%	649,303,237	95.00%	632,116,872	100.00%	640,438,980	100%	1,921,859,189	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang					75.00%	228,794,500	80.00%	272,959,307	85.00%	276,552,897	85%	778,306,704	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke							100%	68,347,924	100%	69,247,745	100%	137,595,669	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					15%	837,086,414	15%	776,466,562	30.77%	786,688,975	30.77%	2,400,241,951	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan di luar negeri) melalui mekanisme layanan					55%	176,562,563	55%	173,924,472	55%	176,214,239	55%	526,701,274	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta					60%	238,932,032	64%	184,458,203	67%	186,886,650	67%	610,276,885	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender)					98%	287,678,813	98%	491,833,516	97%	498,308,650	98%	1,277,820,979	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan					99%	137,747,457	100%	163,017,890	100%	165,164,170	100%	465,929,617	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas terhadap keluarga					99%	365,064,280	100%	535,064,280	100%	542,108,560	100%	1,442,237,120	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak					99%	9,239,403	100%	30,037,466	100%	30,432,918	100%	69,709,787	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan Kabupaten Layak Anak					99%	95,192,775	100%	189,996,726	100%	182,498,089	100%	477,687,590	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten					99%	48,697,519					99%	48,697,519	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan					40%	859,516,714	44%	879,025,421	48%	890,598,052	48%	2,629,140,187	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan ( Tersedianya cadangan beras/jagung )					50%	68,896,143	55%	103,823,776	65%	105,190,647	65%	277,910,566	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN PANGAN	Persentase pemenuhan data pangan					100%	62,611,875	100%	77,997,050	100%	79,023,904	100%	219,632,829	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase mediasi yang dilakukan dalam penanganan sengketa tanah					100%	271,192,000	100%	299,639,896	100%	303,584,744	100%	874,416,640	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah					100%	1,900,848,368	100%	1,499,999,744	100%	1,519,747,686	100%	4,920,595,798	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN	Persentase tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan					100%	207,549,682	100%	472,035,219	100%	478,249,703	100%	1,157,834,604	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan/Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan	
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas Izin lokasi					60%	475,000,000	80%	749,712,498	100%	759,582,686	100%	1,984,295,184	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan/Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan					85%	6,808,963	85%	299,999,928	85%	303,949,516	85%	610,758,407	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	IKLM					75.55 Point	1,094,380,433	76.73 Point	15,632,393,605	76.85 Point	2,000,000,000	76.85 Point	18,726,774,038	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN	Indeks Kualitas Tutupan Lahan					78.9%	5,603,229,990	78.9%	11,804,674,257	78.9%	1,828,433,329	78.9%	9,236,337,576	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 yang di awasi					85%	29,999,760	85%	19,999,746	90%	20,263,049	90%	70,262,555	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha/Kegiatan/terhadap izin lingkungan					80%	0	85%	239,605,525	85%	242,760,003	85%	482,365,528	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG	Persentase kelompok masyarakat adat yang dibina					1%	149,920,000	1%	149,920,000	1%	151,893,741	3%	451,733,741	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lembaga kemasyarakat/kelompok lingkungan hidup yang dibina							90%	99,998,172	95%	1101,314,678	95%	201,312,850	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Persentase kecamatan yang mendapatkan penghargaan							100%	349,998,939	100%	354,606,779	100%	704,605,718	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN	Persentase pengaduan lingkungan					100%	10,720,000	100%	179,997,818	100%	182,367,548	100%	373,085,361	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN	Pencapaian Jakstrada					25 Poin	4,298,868,555	26 Poin	4,647,279,656	27 Poin	4,708,462,472	27 Poin	13,654,610,683	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN	Rata-rata tingkat kepemilikan					99.50%	433,054,454	99.75%	108,396,161	100.00%	1109,823,229	100.00%	651,273,844	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata tingkat kepemilikan					55.00%	144,115,150	65.00%	199,596,153	75.00%	202,223,896	75.00%	545,935,199	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase anak usia 0-17 tahun					43.07%		53.07%		73.07%		73.07%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase kepemilikan akta					95.28%		97.28%		99.28%		99.28%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase kecamatan yang					100.00%	428,190,415	100.00%	528,756,161	100.00%	535,717,393	100.00%	1,492,663,969	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Perekaman KTP Elektronik					99.74%	0	99.84%		99.94%		99.94%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan					12.17%		20.17%		28.17%		28.17%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal					90%	59,040,000	95%	500,000,000	100%	506,582,648	100%	1,065,622,648	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN PERIACAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan					90%	36,472,130	95%	231,000,000	100%	234,041,184	100%	501,513,314	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan					90%	2,535,430,712	95%	928,180,000	100%	940,399,765	100%	4,404,010,477	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif					90%	1,287,271,289	95%	1,397,446,520	100%	1,415,844,318	100%	4,100,562,127	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	02	PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)					98%	52,070,000				98%	52,070,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN/KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence /mCPR)					97%	4,405,608,630	98%	4,114,560,000	100%	4,168,729,403	100%	12,688,898,033	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					98%		98%		98%		98%		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Keluarga Sejahtera yang difasilitasi					98%	839,549,753	98%	1,019,514,609	100%	1,032,936,821	100%	2,892,001,183	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS	Persentase rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan yang					64%	6,741,044,249	66%	1,860,494,600	67%	1,884,988,462	67%	10,486,527,211	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Perhubungan dan Perikanan
				Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang					100%		100%		100%		100%		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Perhubungan dan Perikanan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang					100%	1,125,877,000	100%	3,139,499,088	100%	3,180,831,525	100%	7,446,207,613	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Perhubungan dan Perikanan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang					70%	737,062,370	75%	553,213,217	80%	560,496,433.16	80%	1,850,772,020	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan					74%		78%		85%		85%		Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi pemerintah daerah yang diimplementasikan					84%	3,535,744,610	90%	5,544,406,160	95%	5,617,399,912.33	95%	14,697,550,682	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif					45%	171,485,000	46%	220,440,000	47%	223,342,158	47%	615,267,158	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya							11%	24,985,454	11%	25,314,395	11%	50,299,849	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	(Persentase) meningkatnya koperasi yang berkualitas					8%	434,561,349	9%	295,913,505	10%	299,809,294	10%	1,030,284,148	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi					1 Koperasi	0	1 Koperasi		1 Koperasi		3 Koperasi		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif					92%	48,600,000	93%	116,999,050	94%	118,539,377	94%	284,138,427	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	(Persentase) meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi wirausaha					98.5%	21,480,000	98.7%	350,303,230	98.9%	354,915,076	98.9%	726,698,306	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)					10 (PMA) / 54 (PMDN)	43,464,988	10 (PMA) / 54 (PMDN)	100,000,000	10 (PMA) / 54 (PMDN)	101,316,530	10 (PMA) / 54 (PMDN)	244,781,518	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten (PMA + PMDN)					2%	37,410,000	2%	50,000,000	2%	50,658,265	2%	138,068,265	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Predikat IKM DPMPTSP					70/8	243,108,166	75/8	11,351,866,030	80/BB	1,389,663,747	80/BB	2,964,637,943	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Persentase penanganan Pengaduan yang ditindak lanjuti					100%	0	100%		100%		100%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)					65%	335,173,000	70%	335,173,000	75%	339,585,652	75%	1,009,931,652	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Persentase data dan informasi Penanaman Modal yang lengkap, akurat dan mudah diakses					100%	19,998,840	100%	100,000,000	100%	101,316,530	100%	221,315,370	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					0.42%	692,582,080	0.44%	11,569,663,909	0.45%	1,607,757,993	0.45%	3,870,003,982	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan olahraga					6.85%		7.04%		7.17%		7.17%		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Peningkatan prestasi Olahraga					13 medali	5,611,924,575	15 medali	11,923,849,203	17 medali	2,970,538,989	17 medali	10,506,312,767	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif					100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	256,067,236	100%	756,067,236	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					80%	132,620,000	80%	97,283,872	80%	98,564,648	80%	328,468,515	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam penyelenggaraan pemerintahan					70%		70%	99,999,694	70%	101,316,220	70%	201,315,914	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang dilindungi					100%	341,980,000	100%	901,876,625	100%	913,750,098	100%	2,157,606,723	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)		
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan terlestarikannya Cagar Budaya					100%	277,555,000	100%	84,000,000	100%	85,105,865	100	446,660,885	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	rata-rata jumlah pengunjung ke perpustakaan					100	846,515,604	100	664,423,264	100	673,170,593	100	2,184,109,461	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki arsip					32%	74,346,000	32%	69,411,363	32%	70,325,184	32%	214,082,547	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENJELAJAHAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang terlestarikan					100%	30,444,161	100%	166,161,752	100%	1168,349,321	100%	364,955,234	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANPAKAD	Jumlah total produksi perikanan (Tonnage Keluaran)					6511.7 ton	4,732,969,260	6781 ton	3,180,066,000	6602.48 ton	3,221,932,513	6602.48 ton	11,134,967,773	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDAYA	Jumlah total produksi perikanan (tonnage Keluaran)					5.988,64 ton	2,511,419,945	6.288,07 ton	11,748,148,973	6.602,48 ton	1,771,163,873	6.602,48 ton	6,030,732,791	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PELAKSANAAN PERIKANAN	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan					3 jenis	82,850,000	3 jenis	33,280,000	3 jenis	33,718,141	3 jenis	149,848,141	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Perhubungan dan Perikanan	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara					20.00%	791,030,766	33.33%	2,071,195,679	50.00%	2,098,463,585	50.00%	4,960,690,030	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang					10%		18.00%		29.00%		29.00%		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Target PAD					0%	0	57%	50,000,000	74%	50,658,265	74%	100,658,265	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN PELAKSANAAN PARIWISATA	Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi					0%	0	100%	62,406,130	100%	63,227,725	100%	125,633,855	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Capaian produktivitas pertanian perhektar pertahun					80%	2,473,081,183	85%	914,549,443	90%	926,589,758	90%	4,314,220,384	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan					80%	2,247,227,636	85%	5,260,694,014	90%	5,329,952,612	90%	12,897,874,262	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan					100%	273,014,466	100%	300,850,262	100%	304,811,045	100%	878,675,773	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang ditindaklanjuti					40%	733,708,070	40%	1,143,585,483	40%	1,158,641,125	40%	3,035,934,678	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Usaha dan Kelembagaan Kelompok Tani yang terlayani					60%	591,661,787	60.65%	313,459,683	62%	317,586,473	62%	1,222,707,943	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku							10%	91,054,830	12.5%	92,253,594	12.5%	183,308,424	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
				Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku							5%		10%		10%		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar					7%	1,399,131,870	0.00%		8%	1154,786,863	8%	1,563,918,753	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok					6%	191,259,998	6%	328,375,244	6%	332,698,402	6%	852,333,644	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
				Persentase kinerja realisasi pupuk						9.2%		9.3%		9.5%			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Jenis komoditas lokal yang dikembangkan untuk tujuan ekspor					0	0	2 jenis	34,674,933	2 jenis	35,131,439	4 jenis	69,806,372	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UUTP) bertanda tera sah yang					70%	250,530,000	80%	524,127,700	80%	531,027,997	80%	1,305,685,697	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Jenis komoditas lokal yang dapat menembus pasar regional maupun nasional							2	84,959,798	3	86,078,319	5	171,038,117	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten					6.4%	517,488,667	6.6%	11,791,692,439	6.8%	1,815,280,602	6.8%	4,124,461,708	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah					2%	44,214,000	3%	79,039,801	4%	80,080,485	4%	203,334,386	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia					80%	55,470,000	90%	258,284,699	100%	261,685,094	100%	575,439,793	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi					95%	282,627,800	95%	229,252,261	95%	232,270,435	95%	744,150,496	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat					100%	18,254,292,303	100%	22,352,835,829	100%	22,647,117,546	100%	63,254,245,678	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi perekonomian dan pembangunan					100%	2,711,920,713	100%	2,817,241,951	100%	2,854,331,777	100%	8,383,494,441	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD					100%	10,201,410,362	100%	6,256,377,250	100%	6,338,744,313	100%	22,796,531,925	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai					100%	1,363,723,699	100%	11,800,225,295	100%	1,823,925,795	100%	4,987,874,789	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Renstra dan Renja yang berkualitas baik (%)					100%	1,154,554,280	100%	11,575,334,888	100%	1,596,074,639	100%	4,325,963,807	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5 02	KEUANGAN																
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengelolaan keuangan daerah						100%	258,353,895,038	100%	256,661,945,483	100%	260,040,976,156	100%	775,056,816,677	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah						100%	777,284,601	100%	734,222,523	100%	743,888,780	100%	2,255,395,904	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pertumbuhan realisasi PAD (%)						7%	2,204,941,939	8%	2,425,140,795	9%	2,457,068,493	9%	7,087,151,227	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah
5 03	KEPEGAWAIAN																
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan administrasi kepegawaian daerah yang						80%	2,886,424,134	80%	1,880,764,721	80%	1,905,525,547	80%	6,672,714,402	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi						80%	1,083,584,594	80%	770,662,000	80%	780,807,994	80%	2,635,054,588	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah yang ditindaklanjuti/diterapkan						85%	1,434,823,250	85%	1,590,936,690	85%	1,611,881,844	85%	4,637,641,784	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6 01	INSPEKTORAT DAERAH																
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						Level 3	2,122,412,096	Level 4	2,897,316,353	Level 4	2,935,460,363	Level 4	7,955,188,832	Inspektorat Daerah	Inspektorat
		Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang tidak mendapat temuan hasil						85%		85%		85%		85%		Inspektorat Daerah	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEUANGAN, PENGADAAN DAN PEMERINTAHAN	Tingkat kapabilitas APIP						3 level	543,362,700	4 level	434,919,973	Level 4	440,645,824	Level 4	1,418,928,497	Inspektorat Daerah	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	KECAMATAN																
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						100%	71,069,100	100%	78,019,725	100%	79,046,878	100%	228,135,703	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						90%	21,200,000	90%	26,200,000	90%	26,544,931	90%	73,944,931	Kecamatan Kampang	Kecamatan Kampang
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						100%	31,507,776	100%	42,976,690	100%	43,542,491	100%	118,026,957	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						90%	29,275,693	90%	35,115,693	90%	35,578,002	90%	99,969,388	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						100%	45,959,660	100%	61,606,592	100%	62,417,661	100%	169,983,913	Kecamatan Teweng Sangalang Gering	Kecamatan Teweng Sangalang Gering
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						100%	14,900,000	100%	22,900,000	100%	23,201,485	100%	61,001,485	Kecamatan Pulau Malen	Kecamatan Pulau Malen
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						100%	47,494,256	100%	47,494,256	100%	48,119,532	100%	148,108,044	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar						100%	59,589,690	100%	55,688,090	100%	56,421,240	100%	171,699,020	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar					100%	43,311,809	100%	64,142,990	100%	64,987,451	100%	172,442,250	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar					100%	16,816,000	100%	28,900,746	100%	29,281,233	100%	74,997,979	Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar					100%	12,999,782	100%	34,939,260	100%	35,399,246	100%	83,338,288	Kecamatan Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar					100%	285,934,000	100%	126,420,000	100%	128,084,357	100%	540,438,357	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar					100%	136,320,506	100%	206,521,850	100%	209,240,771	100%	552,083,127	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan desa/kelurahan yang					100%	30,240,000	100%	42,510,040	100%	43,069,697	100%	115,819,737	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan desa/kelurahan yang					0%	0	90%	3,297,000	90%	3,340,406	90%	6,637,406	Kecamatan Kampang	Kecamatan Kampang	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan desa/kelurahan yang					90%	887,082,136	90%	1,293,759,482	90%	1,310,792,209	90%	3,491,633,827	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan desa/kelurahan yang					100%	428,957,613	100%	742,597,300	100%	752,373,814	100%	1,923,928,727	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan desa/kelurahan yang					100%	392,043,368	100%	742,604,741	100%	752,381,353	100%	1,887,029,462	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan desa/kelurahan yang					100%	687,074,400	100%	1,286,359,022	100%	1,303,294,320	100%	3,276,727,742	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan desa/kelurahan yang					100%	342,603,766	100%	642,700,000	100%	651,161,336	100%	1,636,465,102	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					100%	1,000,000,000					100%	1,000,000,000	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					90%	1,000,000,000					90%	1,000,000,000	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					100%	500,000,000					100%	500,000,000	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					100%	500,000,000					100%	500,000,000	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					100%	500,000,000					100%	500,000,000	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	46,320,000	100%	143,220,000	100%	145,105,534	100%	334,645,534	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					90%	89,141,786	90%	200,625,000	90%	203,266,268	90%	493,033,074	Kecamatan Kampang	Kecamatan Kampang	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	57,025,360	100%	192,597,334	100%	195,132,935	100%	464,755,629	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					85%	120,769,050	85%	494,276,505	85%	500,783,802	85%	1,115,829,357	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	63,176,981	100%	253,609,193	100%	256,948,033	100%	573,734,207	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	79,730,000	100%	218,590,000	100%	221,467,802	100%	519,787,802	Kecamatan Pulau Malan	Kecamatan Pulau Malan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	99,954,000	100%	255,998,520	100%	259,368,816	100%	615,321,336	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	80,350,000	100%	256,279,090	100%	259,653,080	100%	596,282,170	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	19,040,000	100%	316,480,978	100%	320,647,544	100%	656,168,522	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	75,225,000	100%	221,289,772	100%	224,203,118	100%	520,717,890	Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	29,863,636	100%	218,679,545	100%	221,558,526	100%	470,101,707	Kecamatan Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	52,652,980	100%	220,760,806	100%	223,667,188	100%	497,080,974	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan					100%	181,097,000	100%	208,177,272	100%	210,917,988	100%	600,192,260	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan					100%	8,000,000	100%	8,787,500	100%	8,903,190	100%	25,690,690	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan					100%	11,158,000	100%	28,999,000	100%	29,380,780	100%	69,537,780	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan							100%	5,405,000	100%	5,476,158	100%	10,881,158	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan					100%	36,515,000	100%	35,440,000	100%	35,906,578	100%	107,861,578	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemangku kepentingan yang dilkoordinasikan melalui penguatan ideologi pancasila dan					85.00%	179,436,198	88.00%	446,359,395	90.00%	452,235,849	90%	1,078,031,442	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang-undangan					88.00%	998,385,369	90.00%	1,053,316,867	95.00%	1,067,184,096	95%	3,118,886,332	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase organisasi masyarakat yang elbina					85.00%	125,000,000	88.00%	288,346,708	90.00%	292,142,878	90%	705,489,586	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan					85.00%	150,000,000	88.00%	253,953,169	90.00%	257,296,538	90%	661,249,707	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti					85.00%	556,389,108	88.00%	628,114,822	90.00%	636,384,140	90%	1,820,888,070	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X																		
X	XX																	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					8	227,353,851,510	8	231,988,920,178	8	244,380,723,152	8	703,723,494,840	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)	
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					A	92,964,847,529	A	94,860,923,813	A	100,923,089,624	A	288,748,860,966	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					BB	10,422,060,426	BB	11,366,297,377	BB	11,603,538,055	BB	33,391,895,858	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					100	8,025,999,822	100	8,340,194,445	100%	8,449,995,580	100%	24,816,189,847	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	13,604,305,445	B	14,069,282,762	B	14,802,509,044	BB	42,276,097,251	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					100%	5,147,226,885	100%	5,123,849,115	100%	5,191,306,109	100%	15,462,382,109	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					C	4,016,405,813	CC	4,537,329,308	B	4,597,064,595	B	13,150,799,716	Dinas Sosial	Dinas Sosial
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					100%	3,859,316,365	100%	4,482,925,315	100%	4,541,944,357	100%	12,884,186,037	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP					99%	5,176,676,865	100%	5,648,345,667	100%	5,722,707,814	100%	16,547,730,346	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seri Pengendalian Penduduk
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	11,752,653,286	B	13,452,026,213	B	13,629,126,130	63	38,833,805,628	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	6,444,174,938	BB	6,217,170,727	BB	6,348,821,624	BB	19,010,167,288	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					BB	4,712,700,269	BB	5,391,690,887	A	5,462,674,097	A	15,567,065,253	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	4,775,012,630	B	4,786,502,734	B	4,849,518,463	B	14,411,033,827	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	4,662,020,366	B	5,281,993,239	BB	5,351,532,247	BB	15,295,545,852	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP					BB	5,530,503,893	BB	5,477,044,147	A	5,549,151,058	A	16,556,699,098	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	5,207,649,961	BB	8,118,454,253	BB	8,270,936,112	BB	21,597,040,326	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	5,693,521,560	BB	6,725,215,998	A	6,813,755,462	A	19,232,493,020	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	31,541,964,811	BB	31,949,738,459	A	32,987,166,246	A	96,478,869,516	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP					B	23,917,717,907	BB	28,455,628,632	A	29,843,420,724	A	83,216,767,263	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP					B	6,725,936,493	BB	7,059,463,338	BB	7,152,403,268	BB	20,937,803,099	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP					CC	15,726,642,498	B	22,419,226,545	B	22,714,382,315	B	60,860,251,358	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Unsur Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022)	Perangkat Daerah Penanggungjawab (2023)
				Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	4,824,374,384	B	4,832,751,879	B	4,896,376,492	B	14,553,502,755	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				BB	6,689,236,527	BB	6,984,584,521	A	7,076,538,649	A	20,750,359,697	Inspektorat Daerah	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	2,445,913,271	BB	2,954,439,572	BB	2,993,335,646	BB	8,393,688,489	Kecamatan Katingan Kuala	Kecamatan Katingan Kuala
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	2,478,252,964	B	2,576,578,311	B	2,610,499,729	B	7,665,331,004	Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	2,923,825,925	BB	3,207,758,992	A	3,249,990,091	A	9,381,575,008	Kecamatan Kamipang	Kecamatan Kamipang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	2,828,388,514	BB	2,799,014,104	BB	2,835,863,955	BB	8,463,266,573	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	4,349,911,790	BB	4,637,207,857	BB	4,698,258,074	BB	13,685,377,721	Kecamatan Katingan Hilir	Kecamatan Katingan Hilir
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	3,924,147,298	BB	4,144,799,988	BB	4,199,367,510	BB	12,268,314,796	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	3,155,662,793	B	3,079,401,912	B	3,119,943,152	B	9,355,007,857	Kecamatan Pulau Malen	Kecamatan Pulau Malen
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	3,875,642,710	BB	4,122,402,276	BB	4,176,674,925	BB	12,174,719,911	Kecamatan Katingan Tengah	Kecamatan Katingan Tengah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	2,359,379,888	BB	2,504,609,806	BB	2,537,583,737	BB	7,401,573,431	Kecamatan Sanaman Mantikei	Kecamatan Sanaman Mantikei
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	2,280,314,989	BB	2,418,171,855	BB	2,450,007,805	BB	7,148,494,649	Kecamatan Marikit	Kecamatan Marikit
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	2,911,156,891	BB	3,046,627,666	A	3,136,537,423	A	9,094,321,980	Kecamatan Katingan Hulu	Kecamatan Katingan Hulu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	1,891,415,116	BB	2,432,708,684	BB	2,491,747,952	BB	6,815,871,752	Kecamatan Petak Malai	Kecamatan Petak Malai
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	1,860,303,113	B	1,976,131,736	B	2,002,148,097	B	5,838,582,946	Kecamatan Bukit Raya	Kecamatan Bukit Raya
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP				B	3,909,968,081	BB	4,022,923,205	BB	4,075,886,183	BB	12,008,777,469	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP								B	1,800,000,000	B	1,800,000,000		Dinas Perhubungan dan Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP								B	1,800,000,000	B	1,800,000,000		Badan Pendapatan Daerah
									1,334,486,139,539		1,340,010,298,333		1,357,663,963,249		4,032,160,401,121		







## BAB VIII

### KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Kabupaten Katingan yang menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan adalah indikator kinerja sasaran sebagaimana dimuat dalam Bab V dokumen ini dan disajikan dalam Tabel 8.1. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara itu, IKK yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.3 berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Penentuan target kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan tahun - tahun sebelumnya, dan secara khusus tahun 2020 setelah adanya pandemi Covid-19. Dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kondisi dalam negeri menyebabkan pemerintah pusat dan hampir seluruh pemerintah daerah melakukan penyesuaian target-target pembangunan sejak tahun 2020 lalu. Hal ini dilakukan menyusul adanya penerapan kebijakan untuk refocusing dan realokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 yang diarahkan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan diikuti dengan pemulihan dampak pandemi.

Handwritten signature and initials in blue ink.





**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023**

RPJMD Tahun 2018-2023									Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			
No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Kondisi Akhir	Target			Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
INDIKATOR TUJUAN												
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (predikat)	NA	C	C			BB	BB	CC	B	BB	BB
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,59	5,81	-3,25			6,96	6,96	4,29	5,01	6,03	6,03
3.	Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65	95	91			35	35	90	88	86	86
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	67,91	68,55	68,68			70,75	70,75	68,72	68,90	69,00	69,00
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	85,70	85,57	85,56			86,03	86,03	85,72	85,81	86,03	86,03
6.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,32	66,57	66,41			65,19	65,19	67,09	67,16	67,22	67,22
7.	Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%)	69	69	77			92,3	92,3	85	85	85	85
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75	76,17	74,67			76,85	76,85	75,55	76,73	76,85	76,85
9.	Jumlah kasus konflik SARA (kasus)	0	0	0			0	0	0	0	0	0
INDIKATOR SASARAN												
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (predikat)	NA	C	C	B	BB	BB	BB	CC	B	BB	BB
2.	Nilai SAKIP (predikat)	CC	CC	CC	BB	BB	A	A	B	BB	A	A

h  
9/1/4



RPJMD Tahun 2018-2023									Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			
No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Kondisi Akhir	Target			Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
3.	Opini BPK terhadap LKPD (predikat)	WDP (2017)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	74,52 (Baik) (2016)	77,09/(B)	78,33/(B)	79,32 /(B)	80,57 /(B)	81,83 /(A)	81,83 /(A)	B	B	A	A
5.	Persentase penegakan Perda (%)	100	92,42	48	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.)	1.947,7	2.126,50	2.232,40	2128,8	2360,7	2492,6	2492,6	2288,21	2345,415	2404,051	2404,051
7.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.)	1.340,5	1.437,1	1.405,6	1402,4	1465,9	1509,5	1509,5	1433,712	1462,386	1491,634	1491,634
8.	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	84,4	78,9	81,6	86	86,5	87	87	82	84	85	85
9.	Laju Investasi (PMA dan PMDN) (%)	10	10,7	12,42	11,5	12	12,5	12,5	11,5	12	12,5	12,5
10.	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (%)	-	2,16	2,88	1,21	1,22	1,23	1,23	2,16	2,17	2,18	2,18
11.	Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba (unit)	1.502	1.559	1.605	1.592	1.622	1.652	1.652	1.605	1.613	1.667	1.667
12.	Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh laba) (%)	40	42,78	44,1	46	48	50	50	43	45	47	47
13.	Jumlah Desa Tertinggal (desa)	65	95	91	47	41	35	35	90	88	86	86

9/14





RPJMD Tahun 2018-2023									Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			
No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Kondisi Akhir	Target			Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
14.	Jumlah Desa Berkembang (desa)	12	37	51	18	20	22	22	54	56	58	58
15.	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif. (unit)	140	143	150	149	152	154	154	150	152	154	154
16.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,65	8,66	8,67	9,06	9,17	9,28	9,28	8,95	8,96	8,97	8,97
17.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,21	12,51	12,67	13,12	13,36	13,61	13,61	12,89	13,13	13,38	13,38
18.	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,00	66,50	66,50	66,85	67,18	67,52	67,52	66,5	66,58	66,66	66,66
19.	Persentase penduduk miskin (%)	5,22	5,02	4,79	5,58	5,53	5,48	5,48	5,30	5,19	4,95	4,95
20.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat penanganan (%)	43,84	45,32	52	54,68	60,1	66,01	66,01	74,00	76,96	80,81	80,81
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,78	5,45	5,69	3,66	3,6	3,54	3,54	5,50	5,40	5,30	5,30
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	85,70	85,57	85,56	85,72	85,88	86,03	86,03	85,72	85,81	86,03	86,03
23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	73,32	66,57	66,41	64,09	64,64	65,19	65,19	67,09	67,16	67,22	67,22
24.	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	33,42	30,47	30,57	38,72	39,83	40,34	40,34	38,72	40,07	41,47	41,47
25.	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	54,55	56,96	55,70	64,56	68,75	72,84	72,84	64,56	68,75	72,84	72,84
26.	Persentase dermaga dalam kondisi	69,77	91,43	69,77	84,78	89,36	93,75	93,75	70,78	79,36	80,75	80,75

Handwritten signature and date: 14



RPJMD Tahun 2018-2023									Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023			
No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2018)	Realisasi		Target			Kondisi Akhir	Target			Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
	baik (%)											
27.	Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak (%)	36	32,82	37,8	46,5	52,5	58,4	58,4	46,5	52,5	58,4	58,4
28.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	31	16,77	25,47	38,62	41,46	44,33	44,33	38,62	39,77	40,96	40,96
29.	Persentase desa yang blankspot (%)	50,31	47,71	41,61	45,34	43,48	42,24	42,24	41,00	40,00	39,00	39,00
30.	Indeks kualitas air	50	50,56	53,33	52	55	55	55	54	55	55	55
31.	Indeks kualitas udara	92	89,2	88,26	92	92	92	92	88,70	89,14	89,59	89,59
32.	Indek tutupan lahan dan hutan	75,1	85,6	86,18	76,8	76,9	77	77	86,61	87,04	87,48	87,48
33.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	211	26	5	301	331	361	361	6	8	12	12
34.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	32.405	36310	11821	35.769	36.663	37.580	37.580	13.050	15.355	19.790	19.790
35.	Angka kriminal (kasus)	90	60	82	60	50	40	40	60	50	40	40
36.	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: hasil evaluasi terhadap RKPD dan RPJMD; dan hasil proyeksi, 2021

h  
9/1/24





Penetapan indikator kinerja makro dilakukan untuk memberikan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Realisasi dan proyeksi inidkator kinerja makro Kabupaten Katingan untuk periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 8.2**  
**Realisasi dan Target Indikator Kinerja Makro**  
**Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	68,55	68,68	68,72	68,90	69,00
2	Angka kemiskinan (%)	5,02	4,79	5,30	5,19	4,95
3	Angka Pengangguran (%)	5,45	5,69	5,64	5,51	5,33
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	-3,25	4,29	5,01	6,03
5	Pendapatan per kapita/PDRB per kapita (juta Rp):					
	– ADHB	48,45	48,2	48,25	50,95	51,95
	– ADHK	30,1	28,7	29,7	29,85	31,44
6	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio (poin)	0,247	0,252	0,251	0,250	0,249

Sumber: hasil evaluasi terhadap RKPD dan RPJMD; dan hasil proyeksi, 2021

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. IKK didistribusikan berdasarkan 3 (tiga) aspek. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah memuat indikator kinerja *impact*, sedangkan Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja *outcome*. Hal ini dimaksudkan agar terwujud arsitektur kinerja secara *cascade* dari kinerja yang paling tinggi ke yang rendah pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra PD.

Handwritten signature/initials in blue ink.

**Tabel 8.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	6,59	5,81	-3,25	6,82	6,89	6,96	4,29	5,01	6,03	6,03
2.	PDRB per kapita (ADHB) (Juta Rp.)	44,9	48,45	48,2	52,42	56,95	61,87	48,25	50,95	51,95	51,95
3.	PDRB per kapita (ADHK) (Juta Rp.)	28,8	30,1	28,7	30,30	31,44	32,63	29,7	29,85	31,44	31,44
4.	Indeks Gini	0,30	0.274	0.252	0,235	0,228	0,222	0,251	0,250	0,249	0,249
5.	Persentase penduduk miskin (%)	5,22	5,02	4,79	5,58	5,53	5,48	5,30	5,19	4,95	4,95
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,91	68,55	68,68	69,67	70,21	70,75	68,72	68,90	69,00	69,00
7.	Angka Melek Huruf	99,29	99,68	99,20	99,73	99,80	99,86	99,30	99,40	99,50	99,50
8.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,65	8,66	8,67	9,06	9,17	9,28	8,95	8,96	8,97	8,97
9.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,21	12,51	12,67	13,12	13,36	13,61	12,89	13,13	13,38	13,38
10.	Angka Usia Harapan Hidup	66,00	66,50	66,50	66,85	67,18	67,52	65,90	66,85	67,18	67,18
11.	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (%)	68,94	72,05	73,29	74,53	75,78	77,02	74,53	75,78	77,02	77,02
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,49	70,79	64,55	69,63	70,58	71,54	64,95	70,25	70,58	70,58
13.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,78	5,45	5,69	3,54	3,48	3,42	5,50	5,40	5,30	5,30
14.	Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat atas Pelayanan Publik (poin)	NA	79,78	80,82	79,32/(B)	80,57/(B)	81,83/(A)	B	B	A	A
15.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	25,88	25,82	26,87	25,72	25,47	25,21	25,72	25,47	25,21	25,21

Handwritten signature and date: 9/1/19





NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB (%)	7,73	7,90	7,87	8,23	8,42	8,61	8,00	8,23	8,42	8,42
18.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	14,70	14,75	15,43	16,43	16,83	17,24	16,00	16,80	17,20	17,20
II	ASPEK PELAYANAN UMUM										
2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib										
A	Pendidikan										
1.	APK PAUD	86,51	86,94	87,16	87,38	87,60	87,82	87,38	87,60	87,82	87,82
2.	APK SD	118,86	115,44	114,12	102,45	102,70	102,96	102,45	102,70	102,96	102,96
3.	APM SD/SDLB/MI	100	99,87	99,85	88,07	88,29	88,52	88,07	88,29	88,52	88,52
4.	APK SMP/MTs	89,58	77,73	78,27	91,57	91,80	92,03	91,57	91,80	92,03	92,03
5.	APM SMP/MTs	76,28	76,05	75,98	65,37	65,53	65,70	65,37	65,53	65,70	65,70
6.	Angka melek huruf	99,29	99,68	99,20	99,48	99,51	99,53	99,48	99,51	99,53	99,53
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	77,36	84,85	77,94	78,14	78,33	78,53	78,14	78,33	78,53	78,53
8.	Persentase sekolah yang melakukan pemuktahiran data pokok pendidikan (dapodik) (%)	83,33	83,75	83,96	84,17	84,38	84,59	84,17	84,38	84,59	84,59
B	Kesehatan										
1.	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	10,61	13,32	6,17	1,41	1,30	1,28	6,00	5,50	5,00	5,00
2.	Angka Kematian Balita per 1000 KH	10,61	5,39	0,62	7,36	7,05	6,75	0,62	0,60	0,58	0,58

K  
9/1/14



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	121,30	207,16	93	68.57	62.08	56.21	93	85	80	80
4.	Persentase rumah tangga ber PHBS (%)	60	65	75	80	90	100	80	90	100	100
5.	Persentase balita stunting menurun (%)	26,50	26	16	24,4	23,6	22,8	21,5	18,4	16	16
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (%)	85	100	85	100	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya (%)	0	4	6	8	10	12	8	10	12	12
8.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	80,44	83,66	80,3	87	90	97	89	91	93	93
9.	Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya (%)	95	95	99	100	100	100	100	100	100	100
10.	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	36,90	56,99	70	80	90	100	80	90	100	100
11.	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja (%)	85	65	70	80	90	100	80	90	100	100
12.	Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF)	161	161	20	20	20	20	20	20	20	20
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita Hipertensi (%)	57,75	69,58	53,01	90	95	100	90	95	100	100
14.	Persentase ketersediaan Obat dan vaksin (%)	0,73	0,44	88	90	95	100	90	95	100	100
15.	Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat (%)	80	70	75	80	85	95	80	85	95	95

Handwritten signature and date: 9/1/19





NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Tingkat Pelayanan RS	Perdana	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya
17.	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS (%)	80	82	85	87	90	92	87	90	92	92
18.	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%)	70	72	75	77	80	82	77	80	82	82
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.	Persentase jalan yang dibangun (%)	797,2 Km (panjang jalan)	2,51 (20,5 Km)	1,52 (12,61 Km)	1,38 (11,66 Km)	1,37 (11,66 Km)	1,35 (11,66 Km)	1,38	1,37	1,35	1,35
2.	Persentase jalan yang ditingkatkan (%)	-	13,76 (16,71 Km)	11,04 (15,08 Km)	9,95 (15,08)	9,05 (15,08 Km)	8,3 (15,08 Km)	9,95	9,05	8,3	8,3
3.	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara (%)	-	1,91 (3,15 Km)	2,42 (4,1 Km)	3,06 (5,33 Km)	3,82 (6,93 Km)	4,73 (9,01 Km)	3,06	3,82	4,73	4,73
4.	Persentase Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%)	59,23	61,39	62,47	63,55	64,44	65,72	63,55	64,44	65,72	65,72
6.	Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjir yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan (%)	9,26	16,43	19,28	22,13	24,98	27,83	22,13	24,98	27,83	27,83
7.	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang (%)	n/a	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Handwritten signature and date: 9/1/19



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun (buku)	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Tingkat Capaian Pemasukan Asli Daerah Melalui Alat Berat (%)	50,33	70	70	70	70	70	70	70	70	70
D	Perumahan dan Kawasan Pemukiman										
1.	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan (%)	n/a	61,90	66,91	71,91	76,91	81,91	71,91	76,91	81,91	81,91
2.	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat (%)	n/a	3	8	12	15	18	12	15	18	18
3.	Persentase jalan desa yang dibangun (%)	n/a	20	30	40	50	60	32	34	36	36
4.	Persentase Rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan SPM Perumahan Rakyat (%)	n/a	26,14	30,40	34,67	38,93	43,19	34,67	38,93	43,19	43,19
5.	Persentase jaringan LPJU yang berfungsi baik (%)	n/a	36	41	46	51	56	46	51	56	56
6.	Persentase kawasan Perkotaan dan Perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai (%)	n/a	29,73	36,13	42,53	48,93	55,33	42,53	48,93	55,33	55,33
7.	Persentase taman yang dibangun (%)	n/a	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8.	Persentase taman yang dipelihara (%)	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9/1/24





NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1.	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang diselesaikan (%)	88,81	81,70	95,71	67.89	70.15	72.50	67.89	70.15	72.50	72.50
2.	Persentase korban jiwa yang selamat akibat kebakaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase penduduk yang mendapatkan layanan trantibum (%)	75	76	80	80	80	80	80	80	80	80
4.	Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap Perda/Perkada	100	100	95,71	80.94	81.75	82.57	80	80	80	80
5.	Prosentase cakupan kecamatan siapsiaga menghadapi bencana (%)	84,62	84,62	84,62	100	100	100	100	100	100	100
6.	Presentase penurunan titik HOTSPOT kebakaran hutan dan lahan (%)	n/a	19,22	10	10	10	10	10	10	10	10
7.	Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat (%)	55,16	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89	88,89
8.	Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%)	0	20	40	40	42,86	42,86	40	42,86	42,86	42,86
F	Sosial										
1.	Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial (%)	57,25	57,91	58,96	60,45	62,28	64,27	60,45	62,28	64,27	64,27
2.	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	n/a	-	80	85	90	95	82	85	85	85
3.	Persentase PMKS tertangani (%)	43,84	45,32	52	54,68	60,10	66,01	54,68	60,10	66,01	54,68

Handwritten signature and initials



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial (%)	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100
G	Tenaga Kerja										
1.	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%)	0	40	0	60	60	60	60	60	60	60
2.	Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1 (%)	79,2	37	16,8	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan (%)	53,8	53,63	72,71	60	64	67	60	64	67	67
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	49,08	51,68	51,68	51,32	52,97	54,52	52,97	54,62	54,92	54,92
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Poin pemenuhan Kabupaten Layak Anak	659	659	675	725	875	900	725	875	900	900
I	Pangan										
1.	Persentase penurunan kecamatan rawan pangan (%)	7,7	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70

Handwritten signature and date: 9/1/24





NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2019)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Jumlah data ketersediaan dan kerawanan pangan	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3.	Jumlah ragam pangan dan pangan olahan	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
J	Pertanahan										
1.	Persentase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan (%)	n/a	20	40	60	80	100	60	80	100	100
K	Lingkungan Hidup										
1.	Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun (%)	n/a	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.	Indek Kualitas Tutupan Lahan	n/a	77,75	78,25	78,65	78,90	79,00	78,65	78,90	79,00	79,00
3.	Persentase jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (%)	n/a	70	75	80	85	90	80	85	90	90
4.	Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air	n/a	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
L	Kependudukan dan Catatan Sipil										
1.	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan (%)	92	96,09	99,25	97	98	100	99,50	99,75	100	100
2.	Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil (%)	40	41,31	47,29	87	92	100	55	65	75	75
3.	Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

h  
9/4/4



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1.	Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK) (%)	n/a	80	85	90	95	100	90	95	100	100
2.	Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	n/a	80	85	90	95	100	90	95	100	100
3.	Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik (%)	n/a	80	85	90	95	100	90	95	100	100
N	Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana										
1.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 (%)	78,69	78,87	79,05	79,23	79,41	79,61	79,23	79,41	79,61	79,61
2.	Persentase Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	12,42	27,87	43,32	58,77	74,22	89,67	43,32	74,22	89,67	89,67
3.	Persentase Kualitas Pemberdayaan Keluarga (%)	11,8	25,61	39,42	53,23	67,04	80,85	53,23	67,04	80,85	80,85
O	Perhubungan										
1.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	60	60	62	64	66	67	64	66	67	67
2.	Persentase Rambu-Rambu Terpasang (%)	28	30	32	34	36	38	34	36	38	38
3.	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dibangun (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Handwritten signature and date: 9/1/24





NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpelihara (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
P	Komunikasi dan Informatika										
1.	Persentase Perangkat daerah yang memiliki infrastruktur TIK sesuai ketentuan (%)	47	53	66	74	84	92	74	84	92	92
Q	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah										
1.	Persentase Koperasi aktif (%)	42,23	44,10	44,12	46	48	50	46	48	50	50
2.	Persentase UKM aktif (%)	100	99,87	99,87	92	93	94	92	93	94	94
R	Penanaman Modal										
1.	Jumlah promosi investasi yang dilakukan (promosi)	3	4	4	4	5	5	4	5	5	5
2.	Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	35	35	45	50	55	60	50	55	60	60
3.	Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP (%)	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP (%)	85	90	91	92	93	94	92	93	94	94
S	Kepemudaan dan Olahraga										
1.	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	120	126	126	110	115	120	110	115	120	120
2.	Persentase Pemuda Yang Berwirausaha (%)	0,23	0,28	0,33	0,37	0,42	0,47	0,37	0,42	0,47	0,47

92/18



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Jumlah Pemuda Yang lulus seleksi mengikuti pemuda pelopor tingkat nasional (orang)	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
4.	Jumlah peserta yang lulus seleksi mengikuti paskibra tingkat nasional (orang)	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
5.	Jumlah Masyarakat / Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even Olahraga (orang)	0	50	67	85	100	120	85	100	120	120
6.	Jumlah pelajar yang lulus seleksi mengikuti event olahrag (orang)	0	0	67	70	75	80	70	75	80	80
7.	Jumlah pelajar yang memenangkan medali pada even olah raga kabupaten (orang)	0	0	2	3	4	5	3	4	5	5
T	Statistik										
1.	Persentase data statistik yang terpublikasi (%)	8	14	28	56	69	83	56	69	83	83
U	Kebudayaan										
1.	Persentase Peningkatan Sanggar Seni Budaya Yang Aktif (%)	8 sanggar	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	37,50	50,00	62,50	62,50
2.	Persentase Peningkatan Pelaku Seni dan Budaya Yang Aktif (%)	70 orang	14,29	29	43	57	71	43	57	71	71
3.	Persentase Peningkatan Situs dan Cagar Budaya Yang Memenuhi Ketentuan (%)	2 situs	0	100	200	300	400	200	300	400	400

Handwritten signature and initials in blue ink.



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	Perpustakaan										
1.	Jumlah pengunjung ke Perpustakaan (orang)	n/a	4.500	6.000	7.500	9.000	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
W	Kearsipan										
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang mengelola Arsip secara baku (%)	20	24	28	32	32	36	32	32	32	32
X	Persandian										
1.	Persentase penggunaan sandi dalam berkomunikasi (%)	5	15	25	35	45	60	35	45	60	60
2.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan										
A	Kelautan dan Perikanan										
1.	Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis)	1	3	6	9	12	15	9	12	15	15
2.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	5427,00	5.800,10	6.120,30	6.511,70	6.781,90	7.581,71	6.511,70	6.781,90	7.581,71	7.581,71
3.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	429,87	5.431,87	5.703,47	5.988,64	6.288,07	6.602,48	5.988,64	6.288,07	6.602,48	6.602,48
B	Pariwisata										
1.	Persentase Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar (%)	5	10	15	20	25,	30	20	25,	30	30
2.	Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan (%)	29.113 kunjungan	17,49	20,45	23,52	26,65	29,87	23,52	26,65	29,87	29,87

Handwritten signature and date: 9/1/24

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Pertanian										
1.	Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai (%)	18,34	21,69	35,06	35,32	35,59	35,86	35,32	35,59	35,86	35,86
2.	Persentase usaha dan kelembagaan kelompok tani yang berkembang (%)	37,89	47,36	56,83	66,30	75,77	85,24	66,30	75,77	85,24	85,24
3.	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	64.556	69.223,72	122.982,13	128.188,09	132.603,05	138.187,01	128.188,09	132.603,05	138.187,01	138.187,01
4.	Persentase hasil produksi beras yang dipasarkan dalam kemasan (%)	15	20	25	30	35	40	30	35	40	40
5.	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)	14.167	50.961,84	53.154,21	55.448,23	57.846,97	60.362,53	55.448,23	57.846,97	60.362,53	60.362,53
6.	Jumlah populasi ternak (ekor)	n/a	29.055	30.507	32.031	33.628	35.309	32.031	33.628	35.309	35.309
7.	Persentase jumlah ternak yang terobati (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F	Perdagangan										
1.	Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran (%)	9,21	9,23	9,25	9,27	9,29	9,31	9,27	9,29	9,31	9,31
2.	Persentase Tertib Niaga (%)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
3.	Persentase Alat UTTP yang sesuai standar (%)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Handwritten signature and initials.





NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	Perindustrian										
1.	Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP (produk)	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah IKM, Pengusaha, Investor yang menggunakan fasilitas kawasan industri hampangan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Persentase IKM berbasis teknologi (%)	0	10	12	14	16	18	14	16	18	18
4.	Persentase IKM potensial yang mendapatkan bantuan (%)	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15
H	Transmigrasi										
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Transmigrasi (%)	1	3	0	2	2	2	2	2	2	2
2.3	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah										
A	Sekretariat Daerah										
1.	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Handwritten signature and date: 9/1/24



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Persentase kasus yang memperoleh bantuan hukum (%)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4.	Persentase penerima dana hibah dan dana bantuan sosial yang tepat sasaran (%)	90	90	90	91	91	92	91	91	92	92
5.	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda (%)	23	10	5	5	5	5	5	5	5	5
7.	Persentase koordinasi perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dengan baik (%)	70	75	80	85	90	95	85	90	95	95
8.	Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE (%)	23,09	37,76	26,82	100	100	100	59,52	64,02	69,02	69,02
9.	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	80	82	83	84	85	85	84	85	85	85
10.	Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (%)	55	60	61	62	63	64	62	63	64	64
11.	Cakupan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang prima (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9/1/4





NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	Sekretariat Dewan										
1.	Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD (%)	90	92	92	95	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase fasilitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD (%)	89,50	93	95	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
A	Perencanaan										
1.	Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2.	Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan SDA (%)	84	85	87	90	91	92	90	91	92	92
5.	Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (%)	79	80	83	86	89	92	86	89	92	92
B	Penelitian dan Pengembangan										
1.	Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang ditindaklanjuti (%)	81,82	82	82	85	85	85	85	85	85	85

9/1/19



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	Keuangan										
1.	Persentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pertumbuhan PAD (%)	n/a	n/a	1,70	1,8	1,9	2	1,8	1,9	2	2
3.	Persentase Objek Pajak yang ditagih (%)	66	69	72	75	78	80	75	78	80	80
4.	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Pengelolaan Aset Daerah (%)	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat waktu (%)	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Tingkat Ketepatan waktu penyusun dokumen penganggaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan										
1.	Persentase aparatur yang memperoleh pendidikan kedinasan (%)	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2.	Persentase aparatur yang memperoleh pembinaan (%)	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90
3.	Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan (%)	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2.5	Fungsi Pengawasan										
	Inspektorat Daerah										
1.	Cakupan obrik Pengawasan (%)	80	80	80	85	85	90	85	85	90	90

k  
9/4



4  
9 7 1 4



NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2018)	RPJMD TAHUN 2018-2023					PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023			KONDISI AKHIR
			REALISASI		TARGET			TARGET			
			2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan) (%)	38,63	42,77	40,13	40,11	40,61	41,13	40,15	40,61	41,13	41,13
2.	Indeks Kemahalan Konstruksi	95,89	96,00	93,16	-	-	-	93,00	92,50	92,00	92,00
3.	Angka Kriminalitas (Kasus)	90	60	82	60	50	40	60	50	40	40
4.	Rasio Ketergantungan	48,04	44,50	42,82	-	-	-	43	44	45	45

Sumber: hasil proyeksi berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah, 2021

kr  
9/1/21





## BAB IX

### PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan secara terpadu dan konsisten, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

#### 9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Katingan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana yang telah disusun akan dilaksanakan setiap tahun untuk mencapai target-target pembangunan Kabupaten Katingan sampai tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Perubahan Renstra PD. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun.
2. Penjabaran lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Katingan setiap tahun.
3. Bupati berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 serta mengkoordinasikan dan mengevaluasi evaluasi hasil terhadap Perubahan Renstra seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
5. Dalam mengawal pelaksanaan Perubahan RPJMD ke perencanaan dan penganggaran tahunan, maka Inspektorat melakukan reviu terhadap RKPD.
6. Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023.

9y14



## 9.2 PEDOMAN TRANSISI

Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ini, akan menjadi pedoman pembangunan sampai dengan tahun 2023. Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan bersamaan dan selaras dengan penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024. Pemerintah daerah Kabupaten Katingan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 sesuai periode/tahapan berkenaan. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dan Rancangan RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional bila ada yang berlokasi di Kabupaten Katingan. Sebagaimana pelaksanaan penyusunan RKPD setiap tahun, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 akan menjadi tahun pertama dan bagian dari RPJMD periode berikutnya. Selanjutnya, RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Katingan Tahun 2024.

Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi **“Katingan Bermartabat Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”**.